



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
15. Kepala Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dapat menjalankan Tugas Pembantuan.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

RKPD Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN.
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2021.
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021.
 - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
 - BAB VII PENUTUP.

- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Juli 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 21 Juli 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 17 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan potensi atau berbagai sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan, untuk jangka panjang, menengah dan pendek, dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek tersebut adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembangunan, yaitu menjembatani perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu proses penyusunan RKPD harus dilakukan secara terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan yang penyusunannya dilaksanakan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta mewujudkan efisiensi dan alokasi sumberdaya dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan Pembangunan Daerah. Pencapaian target-target pembangunan pada tahun 2021 dilakukan melalui pendekatan *Common Goals* serta kewilayahan dengan mengevaluasi pencapaian target kinerja tahun sebelumnya serta penetapan anggaran untuk mencapai target pembangunan yang ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan juga mengacu pada RKPD Provinsi, RKP yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang 2021 merupakan: a) referensi penyusunan program/kegiatan Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah Tahun 2021; b) perwujudan program dan pemenuhan pencapaian sasaran pada tahun 2021 sesuai periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021; dan c) landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 serta menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan tahunan akan tetap mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan lima tahunan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah.

Selain mempedomani dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 juga tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial (HTIS). Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

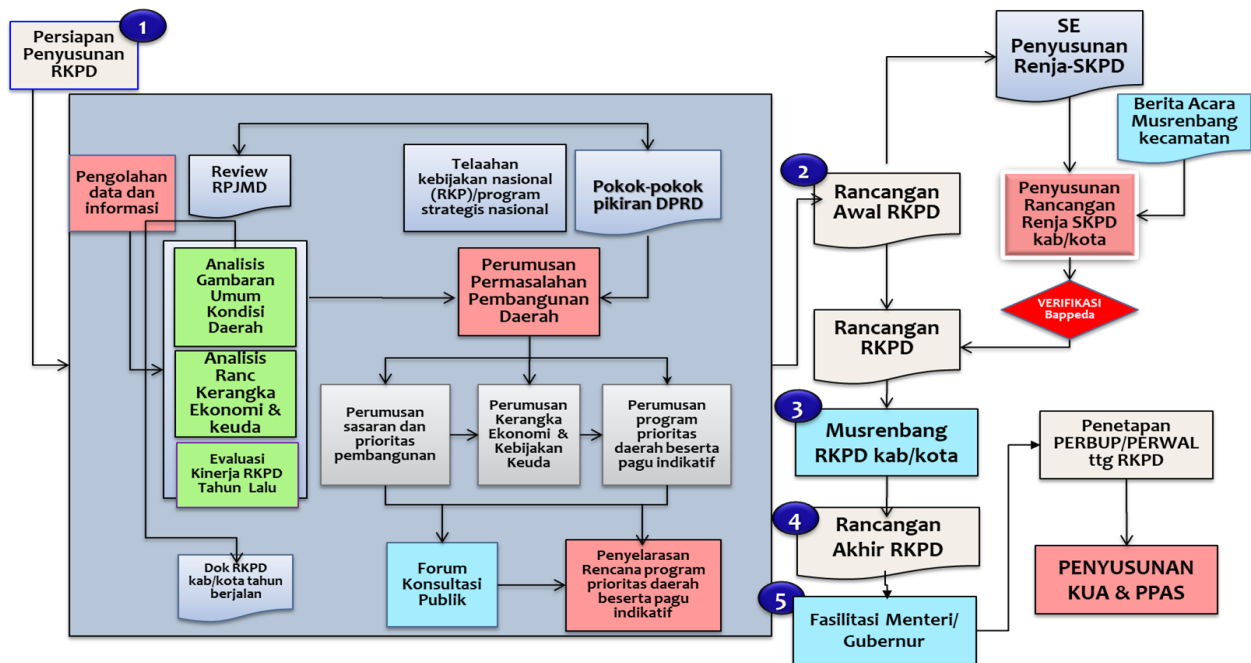
Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan 4 (empat) pendekatan perencanaan pembangunan, terdiri dari: (1) Pendekatan politik, pendekatan politik digunakan untuk mengakomodasi program pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah; (2) Pendekatan teknokratik, pendekatan teknokratik menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga/unit organisasi; (3) Pendekatan partisipatif, pendekatan partisipatif mengakomodir masukkan stakeholders melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya diformulasikan melalui Forum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk penghimpunan usulan masyarakat dan pemerintahan paling dasar (Desa/Kelurahan) berdasarkan kebutuhan mendasar atau prioritas di tengah masyarakat. Berdasar dari usulan-usulan tersebut, Musrenbang diharapkan akan mampu menjaring aspirasi masyarakat di level dasar dan akan diselaraskan dengan program kegiatan di Perangkat Daerah sehingga menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan mengenai RKPD yang menitikberatkan pada pembahasan untuk penyelarasan antara rencana kerja Perangkat Daerah dan kebutuhan masyarakat; (4) Pendekatan *bottom up dan top down*, pendekatan *bottom up* merupakan proses yang dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional, sedangkan pendekatan *top down* dapat diimplementasikan dalam bentuk *dedicated* program.

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini merupakan dokumen publik, sehingga pelibatan semua *stakeholders* dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan menjadi pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam proses penyusunan dokumen ini. Dengan prinsip tersebut, diharapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini harus dapat diakses oleh semua *stakeholders* baik dalam tahap pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Malang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2021 dapat dilihat dan dijelaskan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD



Sumber : Permendagri No. 86/20217

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019–2024;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Bupati Malang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Perangkat Daerah;
35. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
36. Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada *gambar 1.2*. Dokumen RKPD disusun dengan memperhatikan hubungan

antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan. Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan nasional dijadikan dokumen acuan terutama yang berhubungan dengan isu-isu strategis nasional jangka panjang dan menengah, serta prioritas pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait.

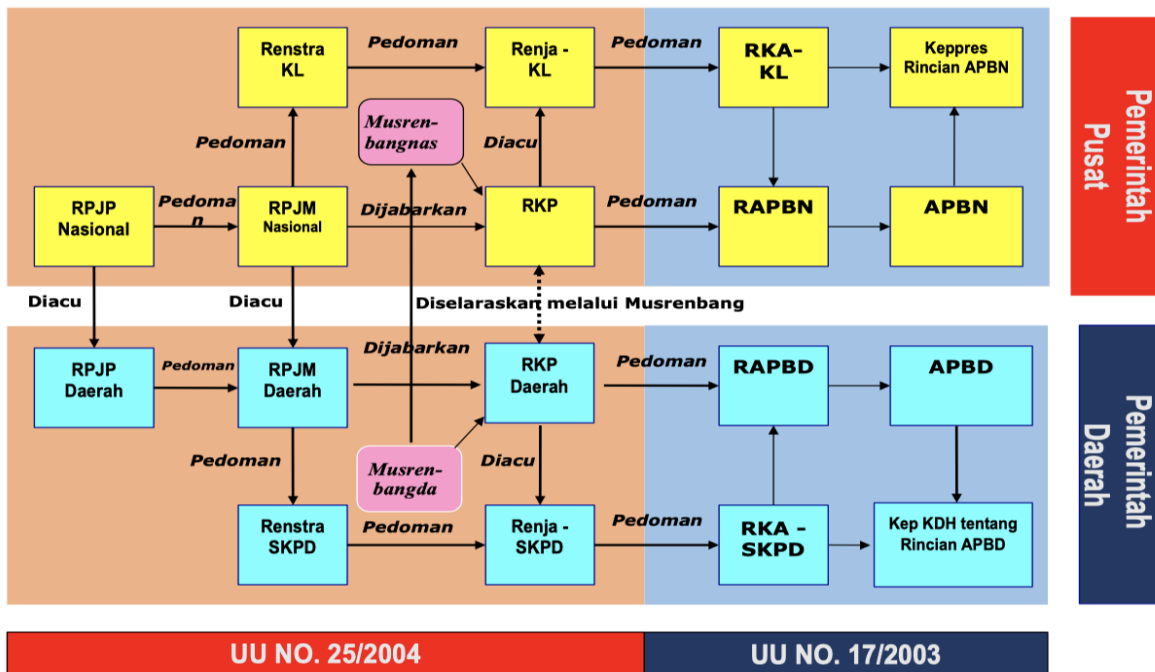
Selanjutnya, RKPD menjadi landasan bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malang.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Hubungan antar dokumen terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Malang harus memperhatikan sinkronisasi dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut ditunjukkan digambarkan pada *gambar 1.2*

Gambar 1.2

Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Daerah dan Nasional



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, dimaksudkan untuk:

- Menjabarkan arahan umum RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2021;
- Sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan baik di lingkungan pemerintahan, masyarakat, dunia usaha/swasta dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Malang pada tahun 2021 sesuai periode RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
- Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi misi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malang pada tahun 2021 sesuai periode RPJMD Kabupaten Malang tahun 2016-2021;

- d. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan;
- e. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2021.

Adapun tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah untuk:

- a. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021;
- b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- c. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

4.3. Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang
Tahun 2021

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan dan menjelaskan secara logis analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Informasi mengenai kondisi umum Kabupaten Malang akan memberikan gambaran kondisi saat ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk analisis berikutnya. Namun disisi lain tidak semua informasi disajikan dalam gambaran umum kondisi daerah, hanya informasi yang penting dan relevan saja yang ditampilkan. Informasi yang dianggap penting dan relevan jika menjelaskan tentang gambaran umum yang selaras dengan permasalahan pembangunan, visi misi kepala daerah dan isu-isu strategis Kabupaten Malang.

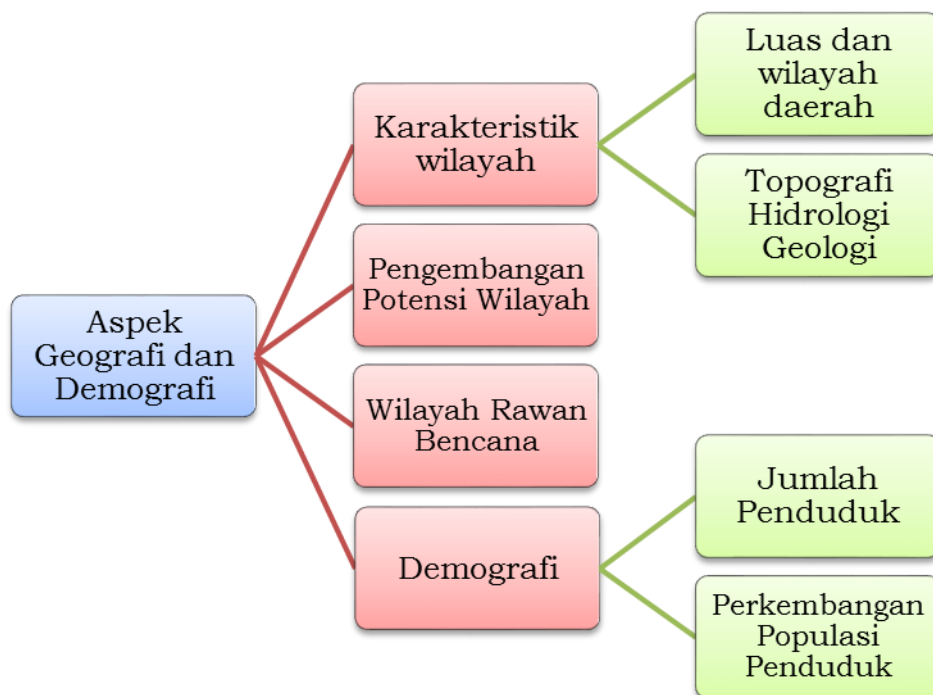
Dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, perlu adanya gambaran umum kondisi daerah di Kabupaten Malang yang akan memberikan pengetahuan dan potret pada aspek fisik (aspek geografi dan demografi), aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah masyarakat Kabupaten Malang. Gambaran umum kondisi daerah ini akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah melalui pemetaan secara objektif dan analisis data yang valid.

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Pada aspek geografi Kabupaten Malang perlu dianalisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Sedangkan pada aspek gambaran demografi, antara lain meliputi jumlah penduduk, perkembangan populasi penduduk serta proyeksi kependudukan Kabupaten Malang. Berikut ini merupakan gambaran tentang aspek geografi dan demografi.

Gambar 2.1
Kerangka Aspek Geografi dan Demografi



1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki luas 3.534,86 km² atau 353.486 ha dan terletak pada koordinat 112°17'10,90"– 122°57'00,00" Bujur Timur, 7°44'55,11" – 8°26'35,45" Lintang Selatan. Kabupaten Malang merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Dari luas Kabupaten Malang tersebut terbagi atas kawasan daratan dan lautan, masing-masing seluas 2.977,05 km² dan 557,81 km². Adapun batas wilayah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo
Sebelah Timur	: Kabupaten Lumajang
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia
Sebelah Barat	: Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri
Bagian Tengah (Lingkar Dalam)	: Kota Malang dan Kota Batu

Secara administratif kewilayahan, Kabupaten Malang terbagi atas 33 Kecamatan, 12 Kelurahan, 378 Desa, 3.155 Rukun Warga (RW) dan 14.696 Rukun Tetangga (RT). Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Kepanjen sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Berikut rincian jumlah desa/kelurahan, jumlah RW dan jumlah RT per Kecamatan di Kabupaten Malang:

Tabel 2.1
Jumlah Desa Dan Kelurahan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Dusun	RW	RT
		Desa	Kelurahan			
1.	Donomulyo	10	-	31	55	383
2.	Kalipare	9	-	38	60	459
3.	Pagak	8	-	22	77	347
4.	Bantur	10	-	32	83	484
5.	Gedangan	8	-	42	82	356
6.	Sumbermanjing Wetan	15	-	49	113	523
7.	Dampit	11	1	45	114	714
8.	Tritoyudo	13	-	43	62	295
9.	Ampelgading	13	-	39	97	317
10.	Poncokusumuo	17	-	49	170	826
11.	Wajak	13	-	43	152	487
12.	Turen	15	2	39	168	710
13.	Bululawang	14	-	51	89	351
14.	Gondanglegi	14	-	33	58	382
15.	Pagelaran	10	-	24	58	269
16.	Kepanjen	14	4	39	77	470
17.	Sumberpucung	7	-	17	53	261
18.	Kromengan	7	-	20	51	233
19.	Ngajum	9	-	35	92	329
20.	Wonosari	8	-	33	82	305
21.	Wagir	12	-	66	91	384
22.	Pakisaji	12	-	40	88	379
23.	Tajinan	12	-	40	76	360
24.	Tumpang	15	-	46	117	686
25.	Pakis	15	-	60	152	862
26.	Jabung	15	-	49	82	457
27.	Lawang	10	2	60	151	631
28.	Singosari	14	3	62	143	810
29.	Karangploso	9	-	46	105	471
30.	Dau	10	-	36	79	330
31.	Pujon	10	-	40	106	323
32.	Ngantang	13	-	60	81	355
33.	Kasembon	6	-	40	67	193
Jumlah/Total		378	12	1.369	3.131	14.742

Sumber Data : Satu Data Dinas Kominfo Kabupaten Malang, 2019

B. Letak dan Kondisi Geografis

1) Topografi

Topografi Kabupaten Malang sangat beragam, mulai dari pesisir, dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, gunung api yang aktif maupun tidak aktif, dan sungai. Kawasan pesisir pantai terletak di Wilayah Selatan Kabupaten Malang yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, membentang mulai dari Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, sampai Ampelgading. Wilayah dengan kontur datar terletak sebagian besar di Kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepanjen, Pagelaran, Pakisaji, sebagian Kecamatan Singosari, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajum, Gedangan. Wilayah dengan kontur bergelombang terletak di wilayah Sumbermanjing Wetan, Wagir dan Wonosari. Kawasan dengan kontur perbukitan yang terjal sebagian besar di Kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading dan Tirtoyudo.

Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter diatas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3.300 meter dpl.

Tabel 2.2
Nama dan Ketinggian Pegunungan di Kabupaten Malang

No.	Nama Gunung/Pegunungan	Tinggi (m)
1.	Kelud	1.731
2.	Kawi	2.651
3.	Panderman	2.040
4.	Anjasmoro	2.277
5.	Welirang	2.156
6.	Arjuno	3.339
7.	Bromo	2.329
8.	Batok	2.868
9.	Semeru	3.676
10.	Pegunungan Kendeng	650

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2019

Wilayah Kabupaten Malang diidentifikasi terdapat 9 (sembilan) gunung dan 1 (satu) pegunungan yang terdiri dari: Keberadaan gunung dan pegunungan tersebut, menjadikan Kabupaten Malang memiliki potensikehutan yang luas dan sumber-sumber mata air yang dimanfaatkan untuk kepentingan konsumsi, irigasi pertanian dan industri. Limpahan air dari sumber mata air mengalir melalui sungai-sungai besar maupun kecil. Tercatat, di Kabupaten Malang mengalir 5 (lima) sungai besar dan 68 (enam puluh delapan) sungai kecil. Sungai besar antara lain Sungai Brantas, Sungai Lesti, Sungai Amprong, Sungai Konto, dan Sungai Metro. Diantara sungai-sungai besar tersebut, Sungai Brantas adalah sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur.

Bentang alam yang sebagian besar terdiri atas pegunungan dan perbukitan, menjadikan Kabupaten Malang berhawa sejuk sehingga menarik minat masyarakat untuk menjadikannya tempat peristirahatan maupun tempat tinggal secara permanen. Hawa yang sejuk tersebut juga menjadikan Kabupaten Malang sebagai wilayah pengembangan pertanian dan perkebunan yang prospektif. Suhu udara rata-rata berkisar antara $19,1^{\circ}$ C hingga $26,6^{\circ}$ C. Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 71° C hingga 89° C dan curah hujan rata-rata berkisar antara 2 mm hingga 780 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada bulan Juni, dan tertinggi pada bulan Desember.

Berdasarkan struktur fisik dan geografis Kabupaten Malang dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) Bagian utara, barat dan tengah merupakan daerah yang relatif subur; (2) Bagian Selatan merupakan pegunungan kapur yang memiliki potensi tambang cukup besar; (3) Bagian timur merupakan pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan, tambang dan pariwisata.

Kondisi topografi Kabupaten Malang terbagi menjadi 2 aspek antara lain:

a. Ketinggian Lahan

Secara topografi wilayah daratan Kabupaten Malang dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian yaitu:

- Ketinggian 0 – 100 meter di atas permukaan laut : 0% dari seluruh wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang;
- Ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan laut : 75,76% dari seluruh wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung;
- Ketinggian 500 – 1000 meter di atas permukaan laut : 18,18% dari seluruh wilayah dengan kondisi berbukit;
- Ketinggian lebih 1000 meter di atas permukaan laut : 3,03% dari seluruh wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Tabel 2.3
Tinggi Rata-rata Ibukota Kecamatan Diatas Permukaan Laut
Tahun 2015-2019

Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
010. Donomulyo	449	449	449	423	423
020. Kalipare	310	310	310	303	303
030. Pagak	560	560	560	521	521
040. Bantur	273	273	273	317	317
050. Gedangan	546	546	546	494	494
060. Sumbermanjing	563	563	563	598	598
070. Dampit	585	585	585	427	427
080. Tirtoyudo	603	603	603	594	594
090. Ampelgading	542	542	542	516	516
100. Poncokusumo	842	842	842	685	685
110. Wajak	553	553	553	513	513
120. Turen	445	445	445	391	391
130. Bululawang	425	425	425	406	406
140. Gondanglegi	443	443	443	360	360
150. Pagelaran	437	437	437	339	339
160. Kepanjen	335	335	335	336	336
170. Sumberpucung	291	291	291	304	304
180. Kromengan	321	321	321	329	329
190. Ngajum	383	383	383	372	372
200. Wonosari	811	811	811	773	773
210. Wagir	474	474	474	544	544
220. Pakisaji	386	386	386	395	395
230. Tajinan	486	486	486	497	497
240. Tumpang	577	577	577	607	607
250. Pakis	474	474	474	490	490
260. Jabung	624	624	624	519	519
270. Lawang	527	527	527	501	501
280. Singosari	493	493	493	494	494
290. Karangploso	561	561	561	630	630
300. Dau	562	562	562	583	583
310. Pujon	1.299	1.299	1.299	1.157	1.157
320. Ngantang	870	870	870	651	651
330. Kasembon	240	240	240	239	239
Jumlah / Total	524	524	524	373	373

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

b. Kemiringan Lereng

Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang mempunyai kemiringan lereng 48,69% hampir di seluruh dataran rendah Kabupaten Malang, sedangkan untuk kemiringan lereng 28,85% berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, kemiringan lereng >22,46% berada pada daerah pegunungan.

Gambar 2.2
Kemiringan Lereng Kabupaten Malang

Luas Wilayah Kecamatan menurut Kemiringan Tanah (Hektar) <i>Area of District by Declivity Land (Ha)</i>					Lanjutan Tabel 1.13 <i>Continued Table</i>		
Kecamatan <i>District</i>	0 - 2°	2° - 8°	8° - 15°	15° - 25°	Kecamatan <i>District</i>	25° - 40°	> 40°
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(6)	(7)
010. Donomulyo	936.39	5,254.75	2,946.03	5,817.91	010. Donomulyo	715.92	-
020. Kalipare	2,544.12	6,412.16	1,939.88	2,973.84	020. Kalipare	-	-
030. Pagak	636.70	3,768.90	3,217.95	1,386.45	030. Pagak	-	-
040. Bantur	1,615.88	3,634.48	5,983.37	4,853.68	040. Bantur	18.59	-
050. Gedangan	1,152.80	2,370.14	4,421.51	7,904.81	050. Gedangan	215.74	-
060. Sumbermanjing	1,549.42	2,548.11	6,367.96	9,489.88	060. Sumbermanjing	3,874.70	119.93
070. Dampit	1,225.66	6,308.23	1,984.90	3,207.46	070. Dampit	536.75	-
080. Tirtoyudo	206.20	2,236.96	1,173.88	5,378.38	080. Tirtoyudo	4,788.24	412.34
090. Ampelgading	846.55	515.85	2,024.32	8,536.64	090. Ampelgading	10,294.58	1,732.06
100. Poncokusumo	1,148.15	3,607.63	1,077.40	758.21	100. Poncokusumo	7,815.93	5,280.68
110. Wajak	1,819.66	3,688.35	732.96	-	110. Wajak	3,060.56	154.47
120. Turen	5,056.19	1,222.83	71.16	-	120. Turen	12.82	-
130. Bululawang	3,822.60	579.40	-	-	130. Bululawang	-	-
140. Gondanglegi	9,170.87	2,335.13	-	-	140. Gondanglegi	-	-
150. Pagelaran	23,640.54	6,019.46	-	-	150. Pagelaran	-	-
160. Kepanjen	2,787.29	1,689.71	-	-	160. Kepanjen	-	-
170. Sumberpucung	2,476.23	1,147.57	147.20	-	170. Sumberpucung	-	-
180. Kromengan	2,555.03	1,184.09	151.88	-	180. Kromengan	-	-
190. Ngajum	4,135.59	1,916.57	245.84	-	190. Ngajum	-	-
200. Wonosari	144.14	2,553.06	1,315.66	650.87	200. Wonosari	1,144.94	651.33
210. Wagir	172.44	3,054.18	1,573.91	778.63	210. Wagir	1,369.66	779.18
220. Pakisaji	2,246.51	1,246.61	335.59	65.78	220. Pakisaji	45.51	-
230. Tajinan	1,630.06	2,160.29	191.46	-	230. Tajinan	88.19	-
240. Tumpang	1,553.30	2,971.14	484.71	-	240. Tumpang	1,914.27	105.58
250. Pakis	3,575.90	1,750.10	-	-	250. Pakis	-	-
260. Jabung	1,601.12	2,788.09	1,615.02	59.63	260. Jabung	6,584.82	960.32
270. Lawang	597.23	3,464.94	620.04	1,436.01	270. Lawang	653.06	8.72
280. Singosari	2,576.83	5,029.81	765.23	801.42	280. Singosari	1,138.54	263.17
290. Karangploso	683.97	2,363.85	1,343.30	125.33	290. Karangploso	560.83	8.72
300. Dau	73.47	693.27	118.46	404.42	300. Dau	1,289.61	2,505.77
310. Pujon	-	1,646.22	1,155.91	643.24	310. Pujon	7,915.33	1,693.30
320. Ngantang	622.77	1,878.75	1,725.91	872.03	320. Ngantang	7,260.92	1,228.62
330. Kasembon	365.04	905.22	1,165.22	945.92	330. Kasembon	1,832.59	348.01
Jumlah Total	83,168.65	88,945.85	44,896.66	57,090.54	Jumlah Total	63,132.10	16,252.20

Sumber: Badan Pertanahan Kabupaten Malang

Source: Land Affairs Service of Malang Regency

Catatan: Hasil perhitungan Peta Kemampunan Tanah dg Planimeter tahun 1988

Kelerengan 0° - 8°= 48.69 %

Kelerengan 8° - 25°= 28.85 %

Kelerengan 25° - 40°= 22.46 %

2) Geologi

Ditinjau dari keadaan geologinya, sebagian besar wilayah Kabupaten Malang terbentuk dari hasil gunung api kwarter muda yang meliputi areal seluas 44,25 % atau 148.152,52 Ha dari seluruh luas Kabupaten Malang, sedangkan sebagian kecil merupakan

miosen facies baru gamping dengan luas 90.884,00 Ha atau 27,15 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya.

Jenis tanah di Kabupaten Malang terdiri dari jenis tanah alluvial, regosol, brown forest, andosol, latosol, mediteran dan litosol. Jenis tanah ini tidak seluruhnya tersebar di kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Tabel 2.4
Luas Daerah Berdasarkan Struktur Geologi di Kabupaten Malang

No.	Struktur Geologi	Luas	
		Ha	%
1.	Hasil gunung api kwarter muda	145.152,52	44,25
2.	Hasil gunung api kwarter tua	41.741,61	12,47
3.	Miosen facies gamping	90.884,00	27,15
4.	Miosen facies sedimen	12.834,00	3,83
5.	Alivium	40.135,87	11,99
6.	Waduk	1.039,00	0,31
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Luas daerah yang termasuk jenis tanah latosol memiliki luas sebesar 86.260,36 Ha atau 25,77 % dari seluruh luas wilayah Kabupaten Malang. Mediteran mempunyai luas sebesar 55.811,30 Ha atau 16,67 %, litosol seluas 69.133,25 Ha atau 20,65 % dan alluvial 28.003,25 Ha atau 8,36 % dari seluruh luas Kabupaten Malang. Brown forest memiliki luas 6.142,25 Ha atau 1,83 % dari seluruh luas Kabupaten Malang.

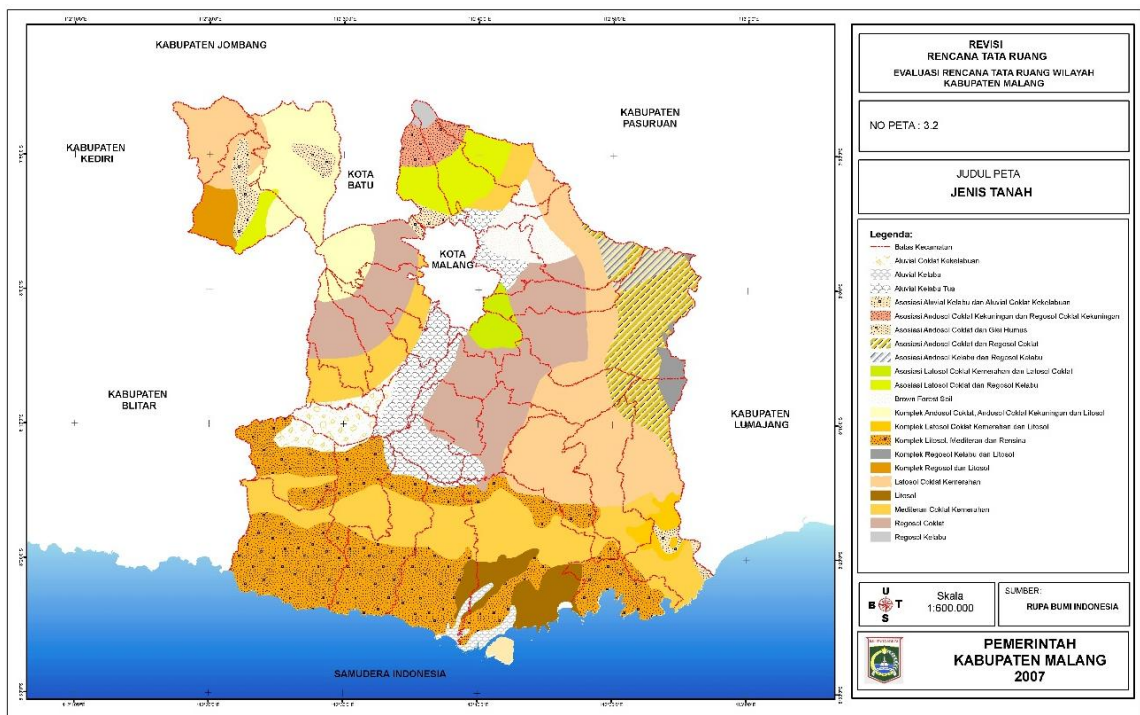
Tabel 2.5
Luas Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Tanah dan Sifat-sifatnya

No	Jenis Tanah	Luas		Sifat Tanah
		Ha	%	
1.	Andosol	43.783,42	13,08	Subur, mudah erosi
2.	Latosol	86.260,36	25,77	Tanah subur, tanah erosi potensi untuk tanaman perkebunan
3.	Mediteran	55.881,30	16,67	Mudah kena erosi, umumnya daerah hutan
4.	Litosol	69.133,25	20,65	Mudah kena erosi umumnya daerah hutan
5.	Alluvial	28.003,25	8,36	Potensi untuk pertanian umumnya daerah hutan
6.	Regosol	45.654,17	13,64	Daerah subur dan potensi untuk pertanian tinggal
7.	Brown Forest	6.142,25	1,83	Potensi pertanian rendah kurang dapat menyerap air
Jumlah		334.787,00	100,00	

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Sedangkan jenis tanah regosol memiliki luas 45.654,17 Ha atau 13,64 % dari seluruh luas Kabupaten Malang dan andosol adalah 43.782,42 Ha atau 13,08 % dari luas seluruh wilayah Kabupaten Malang. Lebih jelasnya tentang jenis tanah dan persebarannya, dapat dilihat pada Tabel 2.6 diatas dan Gambar 2.1 dibawah ini:

Gambar 2.3
Jenis Tanah Dan Persebaran Di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kemampuan tanah di Kabupaten Malang merupakan unsur-unsur yang sangat berpengaruh pada jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di atasnya. Unsur-unsur fisik yang ada di atasnya meliputi:

a. Erosi

Di Kabupaten Malang, wilayah yang tidak ada erosi yang meliputi areal seluas 276.861,10 Ha atau 82,70 % dari luas Kabupaten Malang, sedangkan yang rentan/ada erosi seluas 57.925,90 Ha atau 17,30 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya, daerah-daerah rentan erosi di Kabupaten Malang yang ada di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Ampelgading dan Bantur.

Tabel 2.6
Luas Daerah Berdasarkan Erosi di Kabupaten Malang

No.	Klasifikasi	Luas	
		Ha	%
1.	Ada erosi	75.925,90	17,30
2.	Tidak ada erosi	276.861,10	82,70
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

b. Kedalaman Efektif Tanah

Wilayah Kabupaten Malang memiliki kedalaman efektif tanah > 90 cm mencakup areal seluas 278.925,56 Ha atau 83,31 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah dengan kedalaman ini baik untuk pertumbuhan perakaran tanaman. Sedangkan yang memiliki kedalaman 60 - 90 cm di Kabupaten Malang meliputi areal seluas 35.528,89 Ha atau 10,61 % dari luas Kabupaten Malang seluruhnya. Wilayah ini baik untuk tanaman semusim dan cukup baik untuk tanaman keras atau tahunan. Wilayah yang berada pada kedalaman 30 - 60 cm di Kabupaten Malang adalah seluas 17.804,55 Ha atau 5,32 % dari seluruh luas Kabupaten Malang yang mana kondisi demikian ini cukup baik untuk tanaman keras/tahunan. Luas wilayah di Kabupaten Malang yang berada pada kedalaman efektif tanah kurang dari 30 cm adalah seluas 2.528,00 Ha atau 0,76% dari seluruh luas Kabupaten Malang. Pada wilayah ini masih memungkinkan diusahakan tanaman semusim, tetapi pada kedalaman 0 - 10 cm tidak baik untuk pertumbuhan tanaman.

Tabel 2.7
Luas Daerah Berdasarkan Kedalaman Efektif Tanah
di Kabupaten Malang

No	Klasifikasi Kedalaman Efektif Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	> 90 cm	278.925,56	83,31
2.	60 - 90 cm	35.528,89	10,61
3.	30 - 60 cm	17.804,55	5,32
4.	< 30 cm	2.528,00	0,76
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

c. Tekstur Tanah

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Malang bertekstur sedang 248.142,51 Ha atau 74,12 % dari luas wilayah. Selain itu, wilayah dengan luas 82.944,49 Ha atau 24,79 % adalah tanah

dengan tekstur halus. Sedangkan Tanah dengan tekstur kasar mempunyai luas sebesar 3.650,00 Ha atau 1,09 % dari luas wilayah Kabupaten Malang seluruhnya.

Tabel 2.8
Luas Daerah Berdasarkan Klasifikasi Tekstur Tanah
di Kabupaten Malang

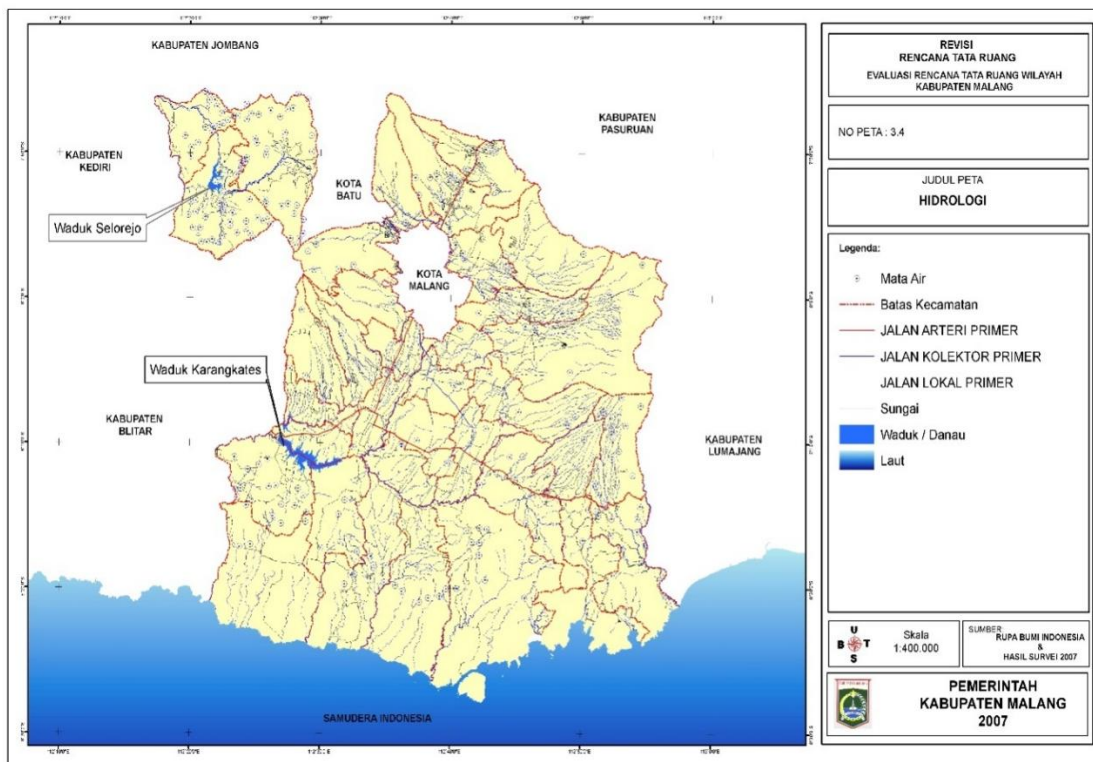
No.	Klasifikasi Tekstur Tanah	Luas	
		Ha	%
1.	Halus	82.994,49	24,79
2.	Sedang	248.142,51	74,12
3.	Kasar	3.650,00	1,09
Jumlah		334.787,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

3) Hidrologi

Kabupaten Malang yang merupakan daerah dataran tinggi memiliki drainase yang baik yakni tidak pernah tergenang air, kecuali pada dataran-dataran yang kemampuan saluran drainasenya bermasalah. Drainase tanah menunjukkan lama dan seringnya tanah jenuh terhadap kandungan air dan menunjukkan kecepatan resapan air dari permukaan tanah. Di wilayah ini terdapat genangan air berupa waduk Karangates dan Selorejo yang menjadi muara drainase dari berbagai wilayah.

Gambar 2.4
Kondisi Hidrologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

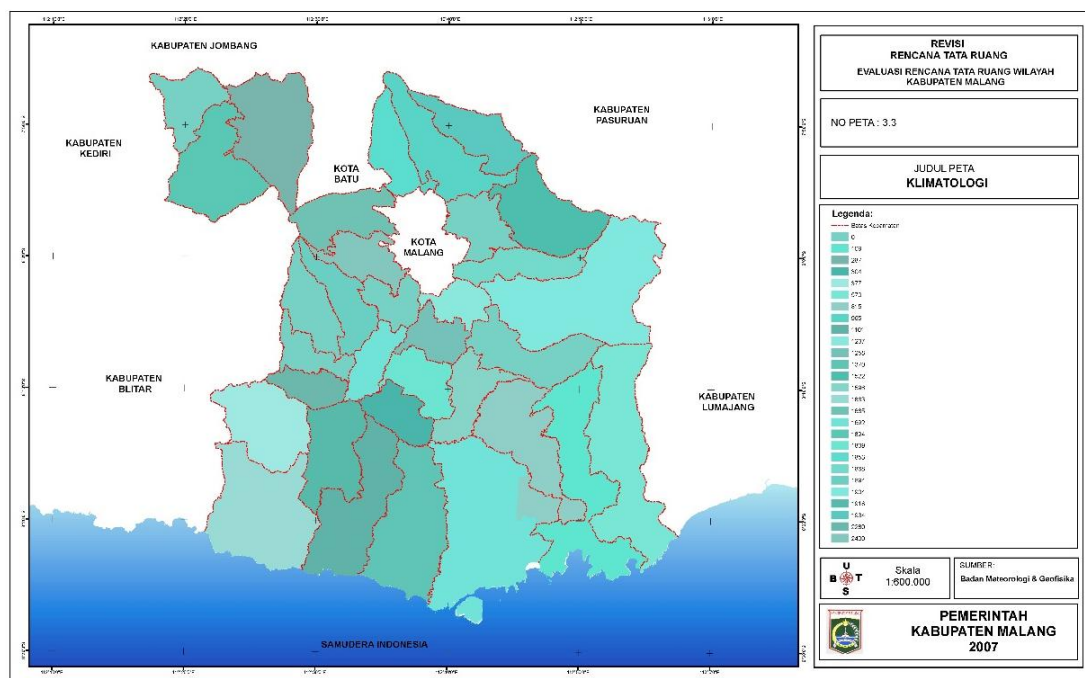
Di Kabupaten Malang dilalui oleh beberapa sungai besar dan anak sungai, anak-anak sungai yang ada sebagian dari Kali Konto dan Kali Brantas, sungai-sungai tersebut ada beberapa yang masuk di waduk-waduk Karangates dan Selorejo, ada juga yang masuk Samudra Indonesia dan Laut Jawa.

Berdasarkan data yang ada di Kabupaten Malang terdapat 588 mata air dengan debit 1 sampai di atas 200 liter/detik, debit tertinggi terdapat di Wendit Kecamatan Pakis (1.100 liter/detik). Sedangkan kecamatan yang memiliki debit air lebih dari 200 liter/detik adalah mata air yang berada di Tumpang, Pakis, Singosari, Gondanglegi, Sumberpucung, Ngajum, Wagir, Ampelgading dan Dampit. Lebih jelasnya tentang kondisi hidrologi di Kabupaten Malang, lihat Gambar 2.2.

4) Klimatologi

Kabupaten Malang memiliki iklim tropis dengan suhu antara 18,25 °C sampai dengan 31,45 °C (suhu rata-rata dari empat stasiun pengamat cuaca antara 23 °C sampai 25 °C). Tekanan udara yang paling tinggi dari empat stasiun pengamat cuaca terjadi di Singosari 1.012,70 dan yang lain masih dibawah angka tersebut.

Gambar 2.5
Kondisi Klimatologi di Kabupaten Malang



Sumber : RTRW Kabupaten Malang Tahun 2010-2030

Kelembaban udara yang diteliti lewat keempat stasiun, Stasiun Lawang 2.423 adalah menunjukkan angka tertinggi 84 % dan rata-rata kecepatan angin di empat stasiun pengamat antara 1,8

sampai dengan 4,7 Km/jam. Untuk curah hujan di Kabupaten Malang rata-rata pertahunnya 1.596 mm dengan hari hujan 84,85 per tahun, curahhujan turun antara bulan April-Oktober. Diantara kedua musim tersebut ada musim peralihan antara bulan April - Mei dan Oktober-November. Untuk lebih jelasnya tentang kondisi klimatologi di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

5) Penggunaan Lahan

Struktur penggunaan lahan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Data Rincian Penggunaan Lahan

No.	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)
	Kawasan Lindung	
1	Hutan Lindung	41.542,22
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (Kawasan Resapan Air)	
3	Kawasan Perlindungan Setempat	
4	Kawaan Suaka Alam, pelestarian alam dan cagar budaya	23.724,41
	a. Cagar Alam Pulau Sempu	999,49
	b. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru	19.013,25
	c. Taman Hutan Raya R. Soerjo	3.711,67
	Total	65.266,63
	Kawasan Budidaya	
1	Hutan Produksi	50.907,24
2	Hutan Rakyat	-
3	Pertanian	168.315,84
	Pertanian Lahan Basah	48.905,26
	Pertanian Lahan Kering dan Holtikultura	119.410,58
4	Perkebunan	14.597,08
	Perkebunan Negara	
	Perkebunan Rakyat	
5	Perikanan	75,44
	Perikanan Tangkap	
	Perikanan Budidaya (Tambak)	75,44
6	Kawasan Peruntukan Pertambangan	40,5
7	Industri	1.010,76
	Kawasan Industri	
	Kawasan Peruntukan Industri	1.010,76
8	Pariwisata	
9	Permukiman	41.493,30
	Permukiman Perkotaan	
	Permukiman perdesaan	
10	Kawasan Peruntukan Lainnya	310,28
	Bandara	310,28
	Hankam/Kawasan Militer	
11	Wilayah Perairan Darat	2.556,08
12	Lain-lain	
	Total	279.306,52
	Luas total penggunaan lahan	344.573,15

Sumber: Neraca Penggunaan Lahan Kabupaten Malang Tahun 2015 (Badan Pertanahan Nasional)

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Klasifikasi pengembangan wilayah Kabupaten Malang meliputi hutan bakau, perikanan, perkebunan, permukiman dan hutan. Seiring dinamika sosial ekonomi masyarakat, pengembangan kawasan di Kabupaten Malang senantiasa menimbulkan masalah berupa kerusakan alam dan lingkungan, seperti banjir, erosi, longsor, kerusakan hutan, kekeringan, alih fungsi lahan, sumber daya manusia yang rendah, pengangguran, dan terbatasnya ketersediaan lahan. Oleh karena itu, tata kelola pengembangan wilayah perlu dilakukan secara terfokus agar aspek keberlanjutan dan aspek keberdayaan masyarakat dapat terwujud secara bersama. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Malang diarahkan ke pengembangan kawasan (a) Agroekowisata yang berpusat di Kecamatan Poncokusumo dan daerah sekitarnya seperti Wajak, Pakis, Bromo, Jabung, dan Tumpang yang disebut sebagai Kawasan “Poncowismojatu”. Pengembangan di wilayah tersebut diarahkan pada pengembangan potensi pertanian yang diintegrasikan dengan potensi pariwisata. Wisata Gunung Bromo sebagai salah satu destinasi wisata alam andalan Kabupaten Malang, berupaya dikembangkan melalui optimalisasi potensi pada kawasan sekitar seperti pertanian hortikultura yang melimpah, bentang alam dan aktifitas religi dan budaya masyarakat Tengger; (b) Gunung Kawi di Kecamatan Wonosari dengan suguhan wisata ritualnya antara lain pesarean, mitos dan kepercayaan yang berkembang dan ekspresi-ekspresi budaya masyarakat seperti Gebyar Suroan dan Kirab Budaya Agung; (c) Wisata Selorejo di Kecamatan Ngantang menawarkan keindahan bendungan yang dikelilingi gunung, penginapan yang artistik dan aneka produk olahan perikanan; (d) Potensi alam pesisir Sendangbiru di Kecamatan Sumbermanjing Wetan yang memiliki potensi perikanan tangkap dan olahan yang sangat besar.

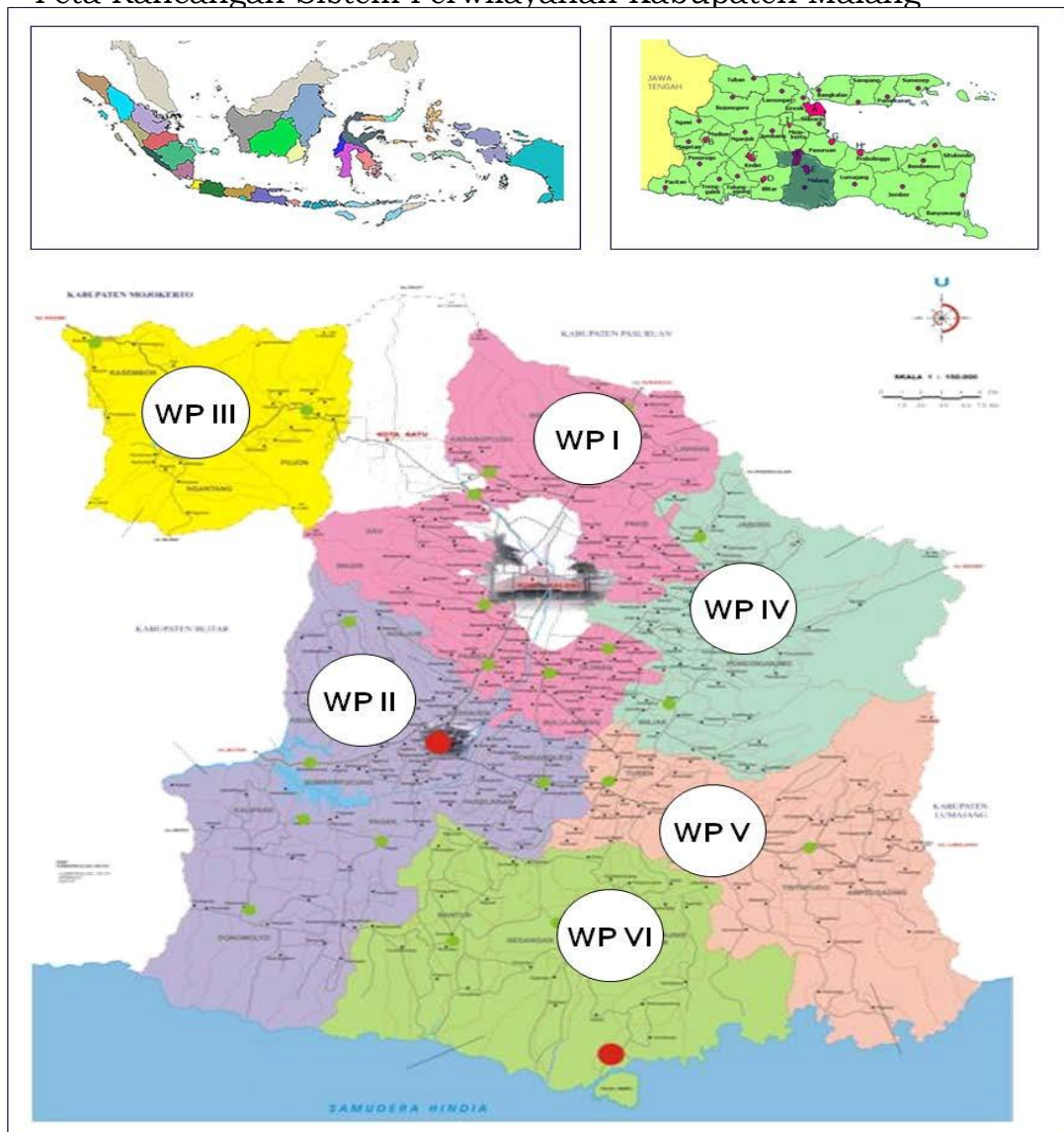
Guna efektifitas dan efisiensi percepatan dan pemerataan pembangunan Kabupaten Malang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan (WP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata ruang dan Wilayah (RTRW):

- 1) WP I lingkaran Kota Malang yang berorientasi ke Kota Malang (meliputi Kecamatan Dau, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis),

- memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), industri, pariwisata serta transportasi udara, dengan prioritas pengembangan infrastruktur; 1) Peningkatan akses jalan tembus terkait Kota Malang; 2) Pengembangan jalan Malang–Batu; 3) Peningkatan konservasi lingkungan; 4) Peningkatan kualitas koridor jalan Kota Malang-Bandara Abdul Rahman Saleh dan pengembangan permukiman.
- 2) WP II Kepanjen dengan pusat di perkotaan Kepanjen (meliputi Kecamatan Kepanjen, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kalipare, Kecamatan Donomulyo, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Pagelaran), memiliki potensi pengembangan sub sektor perdagangan dan jasa skala Kabupaten, pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, perikanan darat, industri, pariwisata, kehutanan serta pariwisata pilgrim, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan Lingkar Timur dan penyelesaian Jalan Lingkar Barat Kepanjen; 2) Peningkatan akses menuju Gunung Kawi dan Wisata Ngliyep; 3) Jalan penghubung antar sentra ekonomi di perdesaan dengan pusat kecamatan; 4) Peningkatan kapasitas jalan akses/sirip JLS; 5) Peningkatan sediaan air bersih pada kawasan rawan kekeringan dan pengembangan permukiman.
- 3) WP III Ngantang dengan pusat pelayanan di perkotaan Ngantang (meliputi Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon, Kecamatan Kasembon), memiliki potensi pengembangan di sub sektor pariwisata antara lain Bendungan Selorejo, pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan), peternakan, industri serta perikanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan menuju sentra produksi pertanian di perdesaan; 2) Jalan penghubung dengan Blitar dari Ngantang; 3) Peningkatan pengelolaan tanah pada kawasan rawan longsor sepanjang Pujon–Ngantang–Kasembon–Kandangan; 4) Peningkatan sediaan air di perdesaan dan penunjang irigasi; 5) Pengembangan dan peningkatan jalan kabupaten sebagai alternatif provinsi.

- 4) WP IV Tumpang dengan pusat pelayanan di perkotaan Tumpang (meliputi Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, Kecamatan Jabung), memiliki potensi pengembangan sub sektor pariwisata, pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan), Peternakan, Perikanan serta Industri; dengan prioritas pengembangan infrastruktur: 1) Jalan utama Pakis–Tumpang–Poncokusumo–Ngadas–Bromo; 2) Jalan pada pusat ekonomi di perdesaan; 3) Jalan tembus utama antar kecamatan; 4) Perbaikan sistem irigasi dan sediaan air; di WP ini dikembangkan Kawasan Agropolitan Poncokusumo termasuk pengembangan kawasan wisata menuju Gunung Bromo dan kawasan Minapolitan Wajak.
- 5) WP V Turen dan Dampit (meliputi Kecamatan Turen, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading) dengan pusat pelayanan sosial di Turen, dan pusat pelayanan ekonomi di Dampit, memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (tanaman pangan dan perkebunan), peternakan, perikanan dan kelautan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan menuju perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Jalan khusus penunjang ekonomi sekaligus untuk evakuasi bencana (bila terjadi letusan Gunung Semeru) dan kemungkinan tsunami, 4) Peningkatan irigasi dan sediaan air. kawasan ini dikembangkan peternakan kambing Peranakan Etawa (PE).
- 6) WP VI Sumbermanjing Wetan dengan pusat pelayanan di perkotaan Sendangbiru (meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Bantur), memiliki potensi pengembangan sub sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan), perikanan laut, pertambangan, industri, pariwisata serta kehutanan, dengan prioritas pengembangan infrastruktur 1) Jalan kearah perdesaan pusat produksi, 2) Jalan menuju pantai selatan (untuk perikanan dan pariwisata), 3) Pengembangan pelabuhan berskala nasional, 4) Jalur jalan khusus untuk evakuasi bencana (kemungkinan tsunami), 5) Peningkatan irigasi dan sediaan air; dikawasan ini dikembangkan Pelabuhan Perikanan Nusantara Sendangbiru dan direncanakan pembangunan pelabuhan umum.

Gambar 2.6
Peta Rancangan Sistem Perwilayahan Kabupaten Malang



C. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan posisi geografis, fisiografis, demografis, dan geologis wilayah Kabupaten Malang tergolong rawan bencana alam berupa tsunami. Identifikasi wilayah rawan bencana di Kabupaten Malang, yaitu:

- 1) Wilayah Potensi Bencana Banjir dan Longsor, meliputi:
 - a. Desa Lebakharjo dan Desa Simojayan Kecamatan Ampelgading;
 - b. Desa Kepatihan, Desa Sumbertangkil, Desa Pujiharjo dan Desa Purwodadi Kecamatan Tirtoyudo;
 - c. Desa Gajahrejo, Desa Segaran, Desa Tumpakrejo dan Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan;
 - d. Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tulungrejo dan Desa Sumberoto Kecamatan Donomulyo;

- e. Desa Sitiarjo dan Desa Tambakasri Kecamatan Sumbermanjing Wetan;
 - f. Desa Pait dan Desa Wonoagung Kecamatan Kasembon;
 - g. Desa Kemiri Kecamatan Jabung
 - h. Desa Selorejo, Desa Petungsewu Kecamatan Dau; dan
 - i. Desa Srimulyo Kecamatan Dampit.
- 2) Wilayah Potensi Bencana Alam Letusan Gunung Api, meliputi:
- a. Kecamatan Poncokusumo dan Kecamatan Jabung yang berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari Gunung Bromo;
 - b. Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Dampit, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Poncokusumo berpotensi bencana debu/abu vulkanik dari GunungSemeru;
 - c. Kecamatan Kasembon dan Kecamatan Ngantang berpotensi bencana Bom-bom, lapili, awan pijar, piroklastik dan gas (S/S04, S02) dari Gunung Kelud; dan
 - d. Kecamatan Pujon, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Lawang berpotensi bencana tahap gas solfatara-fumarola hingga belerang (S04) dari Gunung Arjuno-Gunung Welirang.
- 3) Wilayah Potensi Bencana Alam Gempa Bumi, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Dampit, Kecamatan Tirtoyudo dan Kecamatan Ampelgading.
- 4) Wilayah Potensi Bencana Alam Tsunami, meliputi Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo, Kecamatan Ampelgading, Kecamatan Donomulyo dan Kecamatan Bantur.
- 5) Potensi Bencana Alam Angin Puting Beliung, mencakup wilayah Kecamatan Pagak, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Jabung, Kecamatan Wagir, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Pakis dan Kecamatan Poncokusumo.

Di Kabupaten Malang terdapat rawan bencana yang meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, puting beliung, kebakaran lahan, kekeringan dan tsunami. untuk lebih jelasnya mengenai lokasi dan jenis rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.10
Data Rawan Bencana Kabupaten Malang

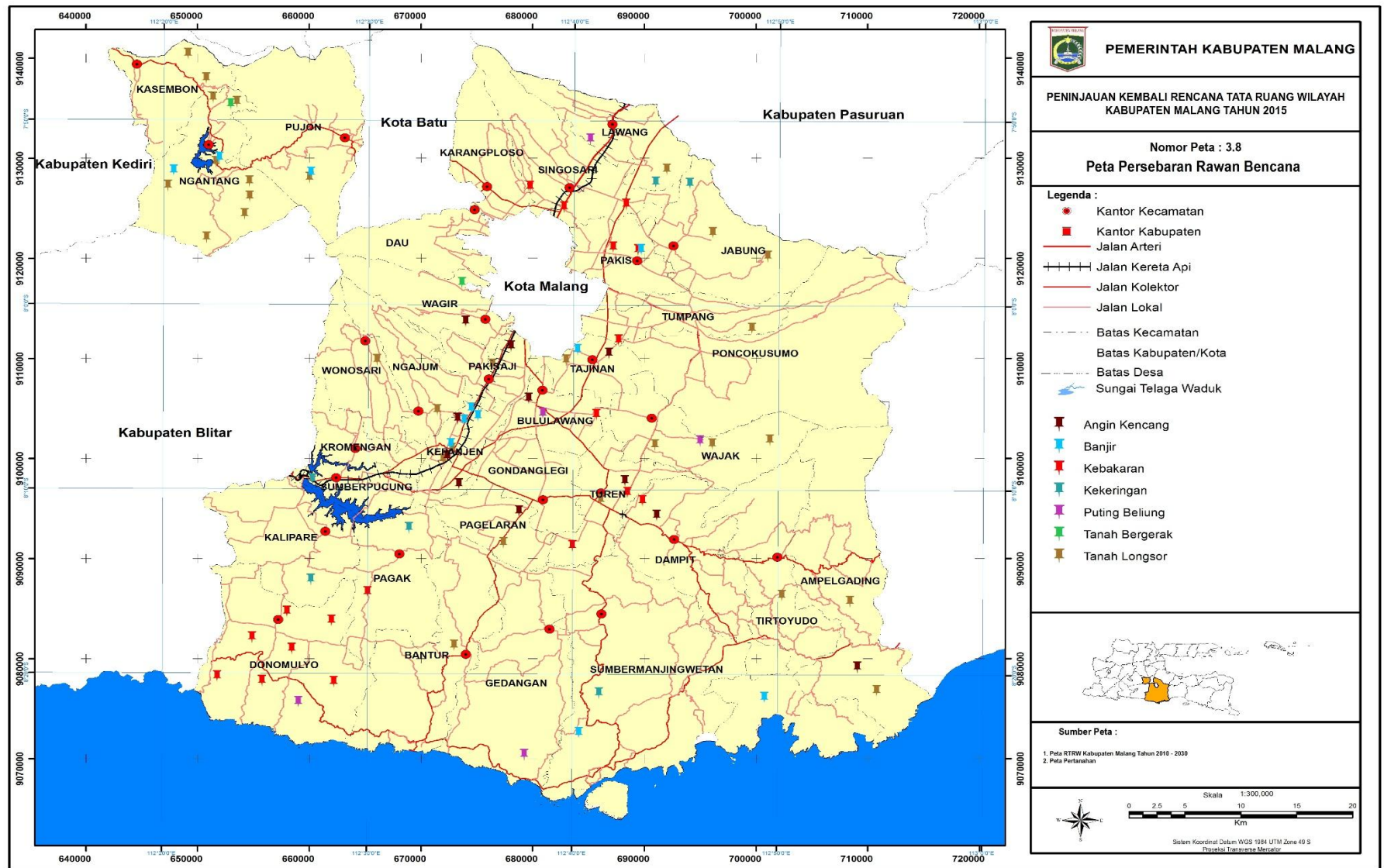
NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKARAN LAHAN	KEKERINGAN	TSUNAMI
1	Ampelgading	Sidorengo	-	-	-	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Taman Sari	-	-	-		V				
		Wirotaman	-	-	V		-				
		Lebakharjo	V	-	V		-				
2	Tirtoyudo	TamanSatriyan	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Pujiharjo	V	-	V		-				
		Purwodadi	V	-	V		-				
		Tirtoyudo	-	-	-		-				
3	Dampit	Srimulyo	V	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
		Sukodono	-	-	V		-				
		Pamotan	V	-	-		-				
		Tambaksari	V	-	V		-				
4	Sbr.Manjingwetan	Sumberagung	-	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	V	-
		Sitiarjo	V	-	V		-				
		Tambakrejo	V	-	V		V				
		Sidoasri	V	V	V		V				
		Druju	-	-	-		-				
		Snbr.Wetan	-	-	-		-				
		Klepu	-	-	-		-				
		Ringinkembar	-	-	-		-				
		KedungBanteng	-	-	-		-				
5	Turen	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
6	Bululawang	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
7	Gondanglegi	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
8	Pagelaran	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
9	Wajak	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKARAN LAHAN	KEKERINGAN	TSUNAMI
10	Tajinan	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
11	Pagak	Pagak Gampingan Sumberejo	- - -	- - -	- - -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V V	- - -
12	Bantur	Srigonco Wonorejo	- V	- -	V -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- -	V -
13	Gedangan	Gajahrejo Sindurejo Tumpakrejo Sidodadi Gedangan	V - V V -	- - - - -	V - V V -	Semua wilayah	- - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - V - -
14	Donomulyo	Tlogosari Kedungsalam Tulungrejo Sumberoto Purworejo Donomulyo Purwodadi Tempursari Mentaraman Banjarejo	- V V V - - - - - -	- - - - - - - - - -	V V - V - - - - - -	Semua wilayah	- - - - - - - - - -	Semua wilayah	Semua wilayah	V V - V V V V V V V	- V - V V - - - - -
15	Kalipare	Tumpakrejo Putukrejo	- -	V -	- -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
16	Kepanjen	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
17	Pakisaji	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
18	Wagir	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
19	Ngajum	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
20	Wonosari	Kebobang	-	-	V	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
21	Kromengan	Semua wilayah	-	-	-	Semua	-	Semua	Semua wilayah	-	-

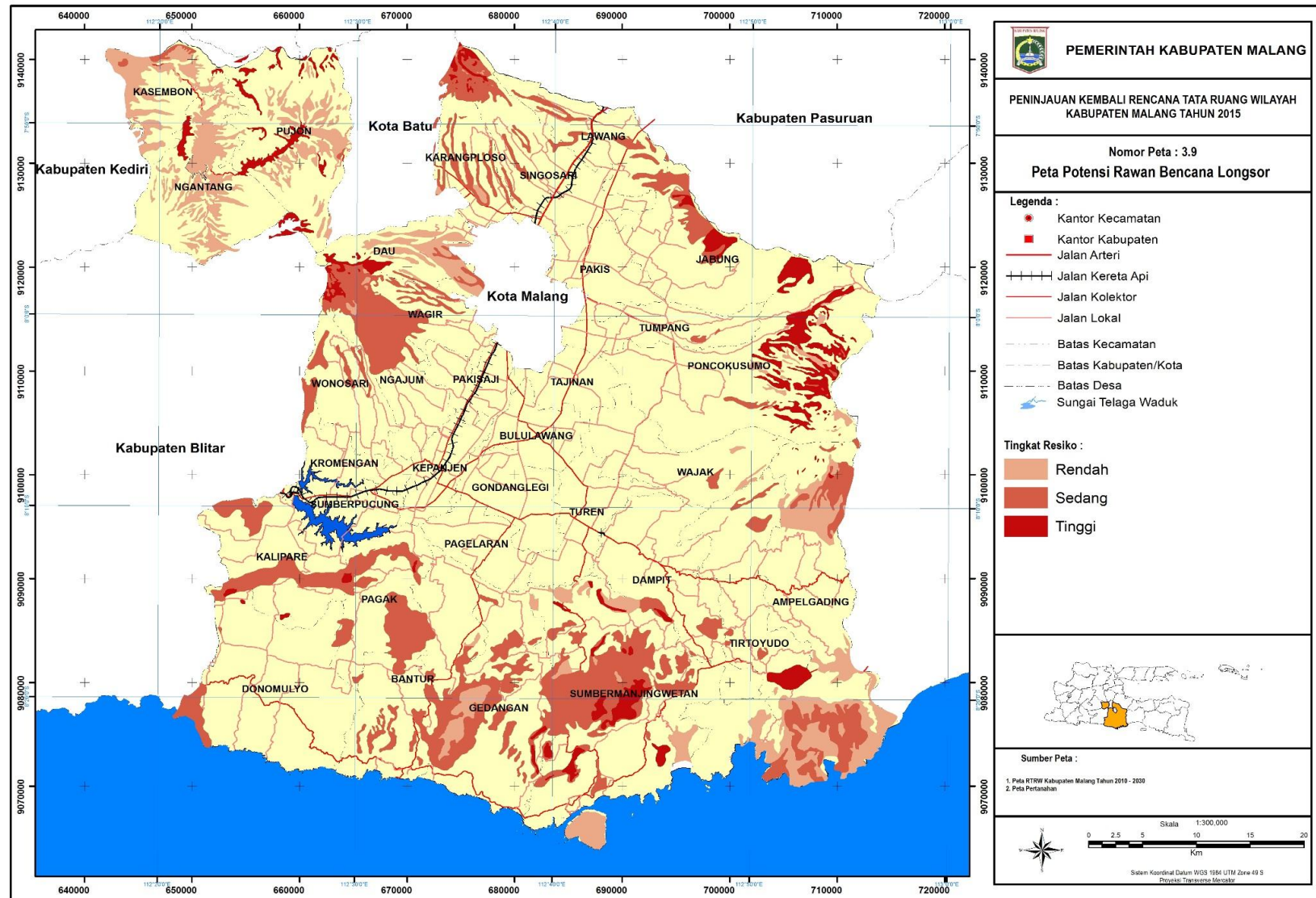
NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	JENIS BENCANA								
			BANJIR BANDANG	BANJIR GENANGAN	TANAH LONGSOR	GEMPA BUMI	GUNUNG MELETUS	PUTTING BELIUNG	KEBAKARAN LAHAN	KEKERINGAN	TSUNAMI
						wilayah		wilayah			
22	Sumberpucung	Karangkates	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	V	
23	Tumpang	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
24	Pakis	Semua wilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
25	Poncokusumo	Pandansari Gubukklakah Ngadas	- - -	- - -	V V V	Semua wilayah	V V V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - -	- - -
26	Jabung	Slamparrejo Kemiri Jabung	V V -	- - -	V V -	Semua wilayah	- - -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V V	- - -
27	Singosari	Ardimulyo Wonorejo	V -	- -	- -	Semua wilayah	- -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
28	Lawang	Turirejo Sidoluhur	- -	- -	V -	Semua wilayah	V -	Semua wilayah	Semua wilayah	- V	- -
29	Karangploso	Bocek	-	-	V	Semua wilayah	V	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
30	Dau	Karangwidoro	V	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
31	Pujon	Semuawilayah	-	-	-	Semua wilayah	-	Semua wilayah	Semua wilayah	-	-
32	Ngantang	Sumberagung Banjarrejo Sidodadi Pagersari Banturejo	- - - - -	- - - - -	V V V V -	Semua wilayah	- - - - V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - - - -	- - - - -
33	Kasembon	Pait Wonoagung Kasembon	V - -	- - -	- V -	Semua wilayah	- - V	Semua wilayah	Semua wilayah	- - -	- - -
	TOTAL		21 Desa	2 Desa	31 Desa	33 Kec	11 Desa	33 Kec	33 Kec	19 Desa	10 Desa

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

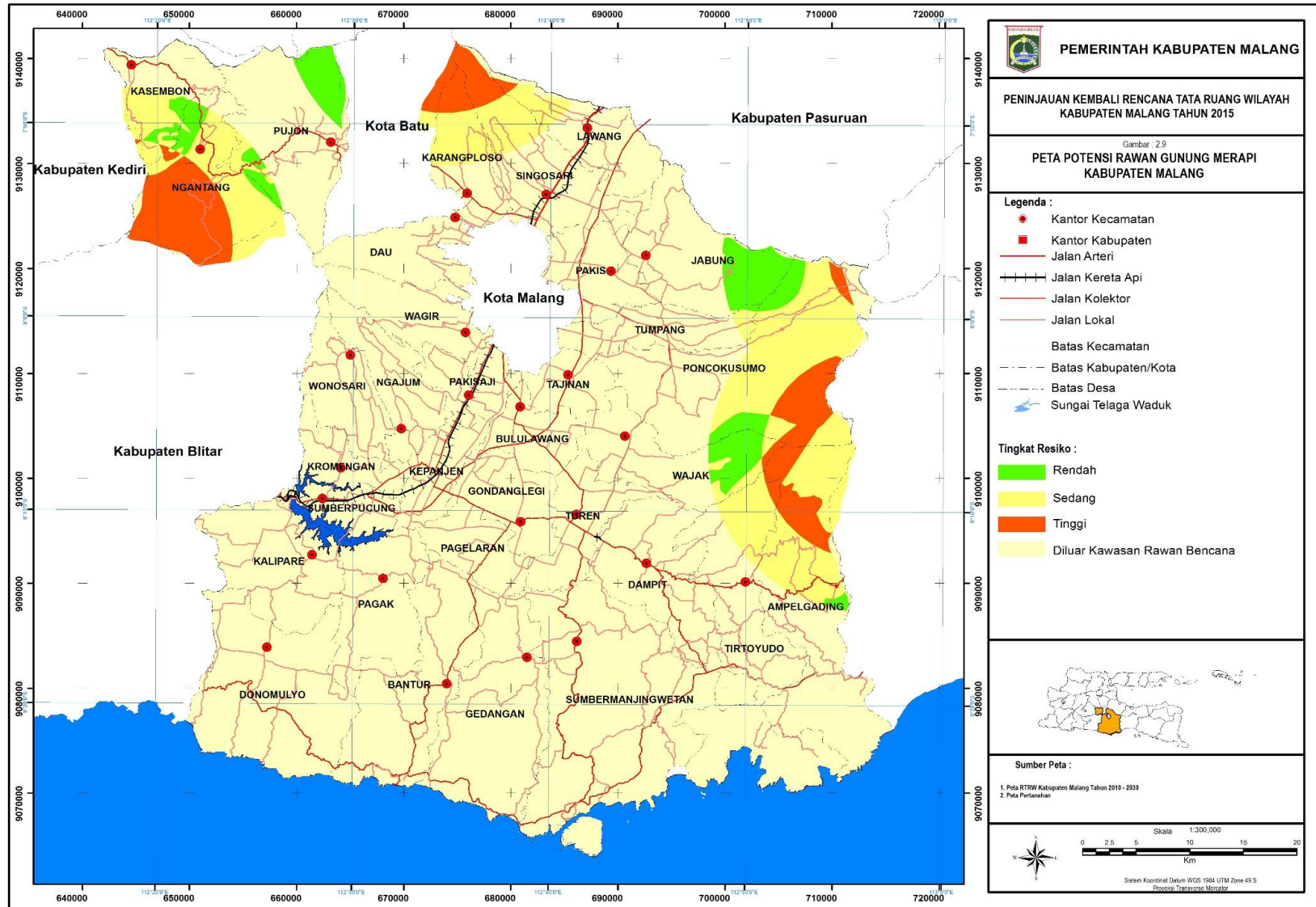
Gambar 2.7
Peta Persebaran Rawan Bencana



Gambar 2.8
Peta Potensi Rawan Bencana Longsor

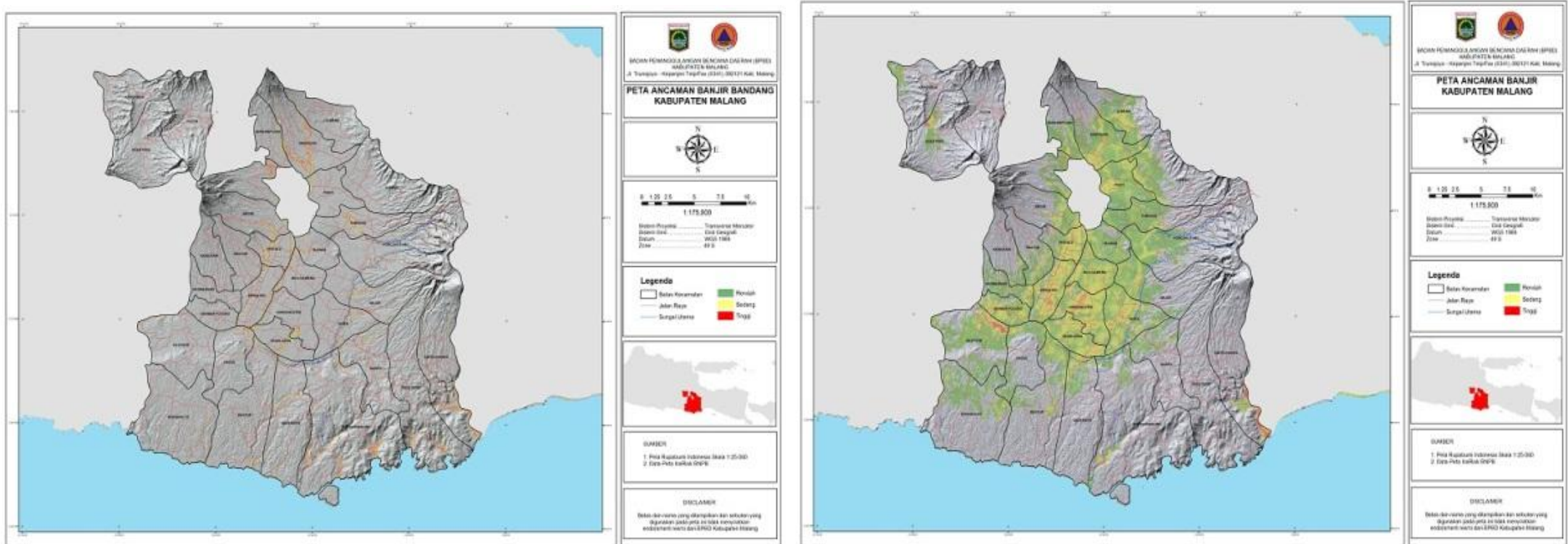


Gambar 2.9
Peta Potensi Rawan Gunung Berapi



Gambar 2.10

Peta Ancaman banjir (a) dan banjir bandang (b) di Kabupaten Malang



(a)

(b)

D. Demografi

Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk Kabupaten Malang berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) per tahun 2019 adalah 2.606.204 jiwa.

Tabel 2.11
Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk	Jiwa	2.544.315	2.560.675	2.576.596	2.591.790	2.606.204
Jumlah Laki-Laki	Jiwa	1.278.511	1.286.867	1.295.017	1.302.770	1.311.702
Jumlah Perempuan	Jiwa	1.265.804	1.273.808	1.281.579	1.289.020	1.294.502
Pertumbuhan penduduk	%	0,68	0,64	0,62	0,59	0,56
Kepadatan penduduk	jiwa/km ²	720	724	728	733	737

Sumber : BPS Kabupaten Malang (Hasil Proyeksi), 2020

Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.302.770 jiwa (50,33 persen) dan perempuan 1.289.020 jiwa (49,67 persen). Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 0,56 persen, dan tingkat kepadatan sebesar 737 jiwa/Km².

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada hasil penghitungan akhir tahun 2019 adalah sebesar 2.935.138 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.477.316 jiwa (50,33%) dan perempuan 1.457.822 jiwa (49,67%).

Tabel 2.12
Perkembangan Jumlah Kependudukan Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk						
	- Laki-laki	Jiwa	1.305.267	1.365.806	1.403.364	1.447.612	1.477.316
	- Perempuan	Jiwa	1.276.404	1.339.589	1.379.376	1.426.592	1.457.822
	Jumlah	Orang	2.581.671	2.705.395	2.782.740	2.874.204	2.935.138
2	Jumlah Penduduk Usia Sekolah						
a.	Usia 4-6 Tahun/Usia TK						
	- Laki-laki	Orang	56.179	57.596	56.62	60.645	60.566
	- Perempuan	Orang	52.951	54.107	53.593	57.342	57.595
	Jumlah	Orang	109.13	111.703	110.213	117.987	118.161
b.	Usia 7-12 Tahun/Usia SD						
	- Laki-laki	Orang	118.005	121.387	122.65	124.305	130.331
	- Perempuan	Orang	113.053	115.922	116.77	118.575	123.358
	Jumlah	Orang	231.058	237.309	239.42	242.88	253.689
c.	Usia 13-15 Tahun/Usia SMP						
	- Laki-laki	Orang	63.206	63.944	64.414	65.829	63.084
	- Perempuan	Orang	60.41	61.166	61.603	62.921	60.381
	Jumlah	Orang	123.616	125.11	126.017	128.75	123.465

d. Usia 16-18 Tahun/Usia SMU						
- Laki-laki	Orang	60.564	63.689	65.052	67.563	66.472
- Perempuan	Orang	56.794	60.351	61.922	64.178	63.391
Jumlah	Orang	117.358	124.04	126.974	131.741	129.863
e. Usia 19-24 Tahun/Usia PT						
- Laki-laki	Orang	121.941	127.837	128.77	132.695	134.249
- Perempuan	Orang	107.374	115.839	118.354	121.122	125.908
Jumlah	Orang	229.315	243.676	247.124	253.817	260.157

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Malang, 2019

Perbedaan hasil perhitungan antara BPS dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disebabkan karena perbedaan penggunaan pendekatan atau metode perhitungan. BPS menganggap penduduk adalah orang-orang yang secara riil pada saat sensus dan atau selama 6 (enam) bulan telah berdomisili pada suatu tempat. Adapun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan perhitungan jumlah penduduk berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen kependudukan yang diterbitkan, seperti akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Berdasarkan informasi dari tabel 2.11, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun rata-rata sebesar 0,70 persen. Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Malang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal, mengingat Kabupaten Malang telah menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur. Disamping itu, Kabupaten Malang merupakan daerah penyangga Kota Malang dan Kota Batu, dimana kedua daerah tersebut sedang berkembang sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata, sehingga turut mempercepat penambahan penduduk di Kabupaten Malang. Diasumsikan, untuk 2 (dua) tahun mendatang penambahan jumlah penduduk dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.13
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang
Tahun 2020-2021

URAIAN	SATUAN	2020	2021
Jumlah Penduduk			
- BPS	Jiwa	2.623.201	2.639.108
- Dispenduk	Jiwa	2.881.274	2.901.497
Kepadatan			
- BPS	jiwa/km ²	742	747
- Dispenduk	jiwa/km ²	753	764

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Malang, 2019 diolah

Walaupun jumlah penduduk di Kabupaten Malang memiliki *trend* yang naik, tetapi presentase atau laju pertumbuhan penduduk semakin menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015-2019 presentase pertumbuhan penduduk menurun sampai pada angka 0.56% pada tahun 2019. Salah satu faktor internal yang berpengaruh terhadap pelambatan laju pertumbuhan penduduk tersebut adalah keberhasilan implementasi program Keluarga Berencana di Kabupaten Malang.

2.1.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

I. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek pemerataan juga menjadi pertimbangan penting dalam keberhasilan pembangunan.

A. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Kabupaten Malang mampu meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar 73.841,93 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp103.760,08 Milyar. Sedangkan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang pada tahun 2015 sebesar Rp55.317,82 Milyar, terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp68.386,88 Milyar. Adapun PDRB per kapita pada tahun 2015 sebesar Rp29,02 Juta dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai Rp40,03 Juta. Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB, PDRB ADHK dan PDRB perkapita dapat pada Tabel 2.14 berikut:

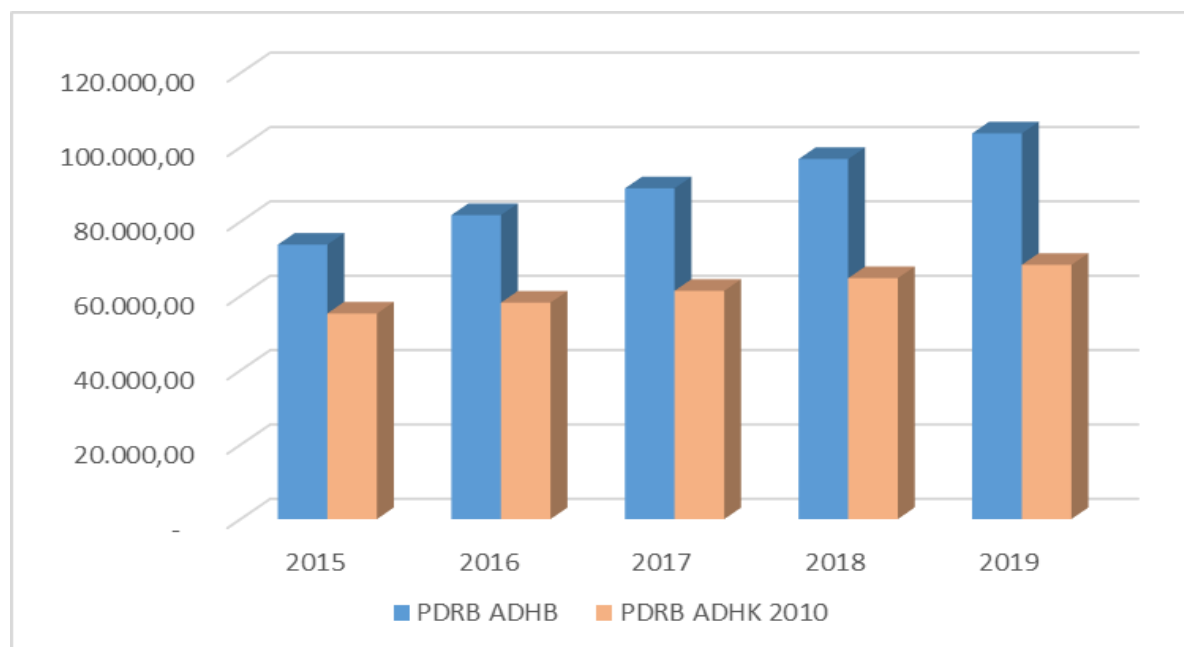
Tabel 2.14
Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010
Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
PDRB ADHB	Milyar Rp	73.841,93	81.784,43	88.979,17	96.851,52	103.760,08
PDRB ADHK 2010	Milyar Rp	55.317,82	58.247,34	61.408,93	64.823,28	68.386,88

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

Secara rinci, progresifitas kenaikan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Malang terdapat pada grafik berikut:



Gejala positif pertumbuhan PDRB dalam 5 (lima) tahun silam, menciptakan optimisme bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Malang pada masa-masa mendatang akan lebih baik. Diproyeksikan PDRB ADHB Kabupaten Malang pada akhir tahun 2021 tumbuh pada kisaran Rp115.000 milyar. PDRB ADHK pada tahun 2021 juga diperkirakan meningkat sebesar Rp75.000 Milyar.

Tabel 2.15
Perkembangan PDRB Perkapita
Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
PDRB PERKAPITA ADHB	Juta Rp	29,02	31,94	34,61	37,42	40,03

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

B. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonominya. Dengan asumsi bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyerap tenaga kerja yang tinggi pula, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010.

Realitas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. pada tahun 2015 sebesar 5,27 persen sedangkan tahun 2016 tumbuh pada posisi 5,30 persen dan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing tumbuh 5,43 dan 5,56 persen, sedangkan pada tahun 2019 mengalami perlambatan menjadi 5,50 persen.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang lebih didominasi oleh hambatan makro ekonomi. Pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah seiring dengan kenaikan harga minyak dunia dan terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS hingga menyentuh level Rp14.000 per dollar AS, menyebabkan kenaikan harga-harga barang dan jasa. Kenaikan harga-harga barang dan jasa tersebut pada gilirannya melemahkan daya beli masyarakat. Dampaknya, perekonomian cenderung mengalami kelesuan sampai saat ini meskipun harga BBM telah turun kembali dan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar AS kembali menguat.

Karakter perekonomian Kabupaten Malang yang terbuka, menjadikan dinamika ekonomi global turut berpengaruh terhadap perekonomian setempat. Dampak perekonomian global yang dimaksud, tercermin dalam konteks perdagangan luar negeri yang nilai transaksinya mengalami penurunan beberapa tahun terakhir akibat rendahnya permintaan. Kondisi melemahnya ekspor komoditas, pada gilirannya menurunkan tingkat produksi barang dan jasa sehingga berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Kabupaten Malang. Apalagi, persoalan domestik, seperti keterbatasan kapasitas industri dalam memenuhi permintaan luar negeri juga menjadi salah satu hambatan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang.

Menghadapi situasi yang demikian, pemerintah Kabupaten Malang sudah berusaha menetapkan dan menjalankan serangkaian kebijakan untuk mendorong stabilitas perekonomian daerah terutama dalam mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi lokal yang progresif. Akan tetapi, kompleksitas permasalahan yang dihadapi menyebabkan upaya-upaya stimulasi ekonomi yang ditempuh kurang berjalan optimal.

C. Inflasi

Disamping pertumbuhan ekonomi, indikator inflasi atau tingkat perkembangan harga menjadi salah satu komponen dalam menggambarkan kinerja perekonomian daerah. Perkembangan harga dari PDRB dapat tercermin dari perubahan indeks harga implisit. Peningkatan indeks implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan demikian pula sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kabupaten Malang merupakan gambaran dari peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Perubahan harga yang dimaksud adalah perubahan harga di tingkat produsen sehingga faktor margin perdagangan dan transportasi telah dihilangkan. Inflasi Kabupaten Malang pada tahun 2019 mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat mencapai 1,93 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun sebelumnya (2018) sebesar 2,98 persen.

Pada periode 3 (tiga) tahun mendatang, perekonomian Kabupaten Malang diperkirakan mengalami pertumbuhan dengan laju yang tidak signifikan. Sebaliknya, tingkat inflasi di Kabupaten Malang berpotensi mengalami tekanan yang cukup kuat. Lesunya perekonomian nasional maupun global masih menjadi faktor yang determinan dalam mempengaruhi kinerja perekonomian Kabupaten Malang.

Tabel 2.16
Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi
Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27	5,30	5,43	5,56	5,50
Inflasi	Persen	3,32	2,62	3,75	2,98	1,93

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

Walaupun dengan data tersebut, optimisme tetap perlu ditumbuhkan, mengingat perekonomian domestik masih akan terus bergerak menjadi faktor penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang diproyeksikan meningkat sebesar 5,87 persen dan laju inflasi sebesar 4,32 persen pada tahun 2021. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang secara rinci, dapat digunakan hasil perhitungan PDRB ADHK 2010 berdasarkan lapangan usaha yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok lapangan usaha, yaitu *tradables* dan *non-tradables*. Dari kelompok *tradable*, pelemahan yang tajam terjadi di

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Sementara itu, industri Pengolahan merupakan satu-satunya lapangan usaha dari kelompok *tradable* yang mencatatkan pertumbuhan positif. Di pihak lain, melemahnya permintaan domestik dan melambatnya kinerja ekspor berdampak pada melemahnya pertumbuhan pada lapangan usaha *non-tradables*, antara lain pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Salah satu dari kategori *non-tradable* yang mengalami pertumbuhan secara positif adalah jasa perusahaan.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (persen)

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
Tradable					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,44	2,98	1,70	-1,95	0,87
Pertambangan dan Penggalian	2,92	1,31	5,12	3,16	1,01
Industri Pengolahan	6,44	6,08	5,66	7,35	7,56
Non-Tradable					
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,74	4,29	5,92	3,16	1,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	4,94	6,89	7,35	7,56
Konstruksi	3,84	5,13	7,03	3,16	1,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,29	5,64	7,00	7,35	7,56
Transportasi dan Pergudangan	7,68	7,09	8,00	3,16	1,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,70	7,30	8,24	7,35	7,56
Informasi dan Komunikasi	6,78	7,00	7,24	3,16	1,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	6,10	2,90	3,16	1,01
Real Estate	5,95	6,12	5,38	7,35	7,56
Jasa Perusahaan	8,53	5,77	5,48	3,16	1,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	4,99	3,91	1,89	7,35	7,56
Jasa Pendidikan	7,21	6,05	4,37	3,16	1,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,18	4,89	5,82	7,35	7,56
Jasa lainnya	4,54	6,01	4,93	3,16	1,01
Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,30	5,43	5,56	5,50

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.17, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2015-2019 berdasarkan lapangan usaha rata-rata mengalami pertumbuhan negatif, hanya lapangan usaha Industri Pengolahan, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya yang mengalami pertumbuhan positif.

Gambaran atas pertumbuhan ekonomi berdasarkan uraian PDRB ADHK 2010 menurut lapangan usaha membuktikan bahwa pelemahan perekonomian global dan nasional cukup berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara sektoral di Kabupaten Malang. Walaupun demikian, pelambatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang masih tergolong moderat, karena ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang relatif kuat. Ketahanan konsumsi rumah tangga juga didukung keuntungan demografi. Struktur penduduk Kabupaten Malang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif akan sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung berkonsumsi lebih besar dari usia non produktif.

Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan disebut “bonus demografi” (*demographic dividend*) yang akan terjadi hanya satu kali dalam sejarah kependudukan sebuah bangsa. Bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja dan akan menguntungkan dari sisi pembangunan, sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, jika bonus jumlah penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan pendidikan ketrampilan yang memadai, tidak akan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi.

D. Indeks Gini

Salah satu ukuran dalam melihat peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi adalah manakala pendapatan penduduk suatu wilayah meningkat. Dalam mengukur tingkat pemerataan pendapatan salah satunya dapat menggunakan Indeks Gini Rasio. Koefisien gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Karena sulitnya mendapatkan informasi terkait jumlah pendapatan penduduk, maka BPS menggunakan dengan pendekatan pengeluaran, dengan asumsi pengeluaran yang besar tentunya pendapatannya besar pula.

Tabel 2.18
Indeks Gini Kabupaten Malang Tahun 2014- 2018

Indeks Gini	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
Kabupaten Malang	0,33	0,38	0,32	0,35	0,35

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, *) angka sementara

Keterangan :
 $G < 0,3$ = Ketimpangan rendah
 $0,3 \leq G \leq 0,5$ = Ketimpangan sedang, dan
 $G > 0,5$ = Ketimpangan tinggi

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa angka gini rasio di Kabupaten Malang selama beberapa tahun terakhir masih masuk dalam kategori sedang (antara 0,3-0,5). Selama tahun 2014-2018 nilai gini rasio di Kabupaten Malang menunjukkan tren ke arah peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 0,33 dan tahun 2018 bertahan pada nilai ketimpangan dalam kategori sedang yaitu 0,35.

E. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kompleksitas masalah kemiskinan tentu tidak bisa dijawab melalui program yang parsial dan karitatif, tetapi diperlukan adanya rumusan kebijakan pengentasan kemiskinan yang bersifat holistikmeskipun tidak bisa menghindari pendekatan sektoral. Rumusan kebijakan pengentasan

kemiskinan hendaknya menyatukan dua isu sentral dan mendasar yaitu penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program yang khusus ditujukan untuk mengatasi masalah kemiskinan diorientasikan pada upaya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban masyarakat miskin melalui pendekatan pemberdayaan usaha, pemberdayaan manusia dan pemberdayaan lingkungan. Implementasi pendekatan program disesuaikan dengan kondisi potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin setempat, dengan menghindari penyeragaman program.

Sebagai amanat *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang merupakan sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDG'S ini melanjutkan konsep dari MDG'S yang sudah berakhir di tahun 2015. Pada dasarnya MDG'S dan SDG's punya persamaan dan kesamaan tujuan. SDG'S melanjutkan cita-cita mulia dari MDG'S yang ingin menanggulangi kelaparan dan kemiskinan di dunia. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani deklarasi *sustainable* tersebut. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut tersusunlah 17 Tujuan Global antara lain;(1)Tanpa Kemiskinan (2) Tanpa Kelaparan (3) Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (4) Pendidikan Berkualitas (5) Kesetaraan Gender (6) Air Bersih dan Sanitasi (7) Energi Bersih dan Terjangkau (8) Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur (10) Mengurangi Kesenjangan (11) Keberlanjutan Kota dan Komunitas (12) Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab (13) Aksi Terhadap Iklim (14) Kehidupan Bawah Laut (15) Kehidupan di Darat (16) Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Begitu juga arahan RPJM Provinsi Jawa Timur maupun Nasional tentang masalah kemiskinan, pengangguran menjadi urusan bersama yang sangat prioritas. Sama halnya dengan Kabupaten Malang yang sudah dimulai RPJMD Kabupaten Malang periode 2006-2010. Pada saat itu sudah memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang dikaitkan dengan seluruh program prioritas pembangunan, dampaknya dapat mengurangi angka kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Kemiskinan
Kabupaten Malang Tahun 2014-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan	Persen	11,53	11,49	11,04	10,37	9,47

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang berada pada level 9,47 persen di Tahun 2019. Kemudian, angka pengangguran terbuka mencapai 3,24 persen di Tahun 2018. Angka kemiskinan di Kabupaten Malang menunjukkan *trend* yang menurun. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Malang semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan telah berjalan dengan baik meski belum optimal.

F. Angka Kriminalitas

Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi.

Tindak kejahatan terbanyak sebagaimana data Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Malang pada tahun 2019 adalah kasus pencurian dan penganiayaan sebanyak 931 dan 607 kasus yang dilaporkan. Serta kasus narkoba sebanyak 287 kasus. Sementara itu, berdasarkan data yang ada masih terdapat kasus demonstrasi pemogokan tenaga kerja, kasus politik dan kasus ekonomi. Secara umum angka kriminalitas di Kabupaten Malang baik secara kualitas maupun kuantitas cenderung mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Peningkatan jumlah institusi militer baik dari TNI AD, TNI AU dan TNI AL yang berperan aktif dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat dapat menjadi solusi dari rendahnya kondisi keamanan wilayah Kabupaten Malang saat ini.

Tabel 2.20
Angka Kriminalitas Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kasus narkoba	114	108	242	309	287
2	Jumlah kasus pembunuhan	6	2	1	4	2
3	Jumlah kejahatan seksual	1	4	22	16	11
4	Jumlah kasus penganiayaan	79	58	178	177	607

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
5	Jumlah kasus pencurian	35	61	614	790	931
6	Jumlah kasus penipuan	84	200	-	57	79
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	3	1	1	1	-
8	Kasus perjudian	114	82	83	38	36
9	Kasus pemerasan dan penadahan	9	6	7	5	4
10	Bunuh diri	20	21	19	17	23
	T o t a l	465	543	1,167	1,414	1,98
	Jumlah penduduk	2.544.315	2.560.675	2.576.596	2.591.790	2.606.204
11	Angka kriminalitas	0.00018	0.00021	0,045	0,054	0,076

Sumber : Badan Kesbang dan Politik, 2019

G. Transformasi Struktur Ekonomi

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam ekonomi dapat diartikan sebagai struktur ekonomi. Pada jangka pendek struktur ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.

Untuk melihat gambaran secara utuh struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat berdasarkan perhitungan PDRB ADHB tahun 2014-2018 dengan menganalisa kedalam 3 (tiga) kategori yaitu primer, sekunder dan tersier. Kategori primer mencakup kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori pertambangan dan penggalan. Kategori sekunder meliputi kategori industri pengolahan, kategori listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah serta kategori bangunan. Kategori tersier mencakup kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori jasa keuangan dan asuransi, *real estate*, jasa perusahaan, administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.

Dari sisi penawaran, transformasi struktural dapat dideteksi dengan karakteristik turunnya pangsa sektor primer. Pada saat yang bersamaan sektor sekunder meningkat dan selanjutnya diikuti oleh peningkatan sektor

tersier. Dalam proses ini, pergeseran pangsa tetap harus diikuti oleh pertumbuhan dari masing-masing sektor meskipun dengan laju yang berbeda. Lebih lanjut, laju percepatan dari suatu proses transformasi akan berbeda untuk masing-masing daerah, tergantung dari karakteristik daerah yang bersangkutan. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kabupaten Malang, proses transformasinya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan-daerah kawasan industri seperti Surabaya, Gresik dan yang sejenis. Perbedaan ini karena untuk daerah-daerah yang kaya sumber daya alam cenderung masih membutuhkan pertumbuhan yang relatif tinggi pada sektor primer untuk mendukung percepatan pertumbuhan pada sektor lainnya. Perkembangan struktur ekonomi PDRD ADHB Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Struktur Ekonomi PDRB ADHB Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019 (dalam persen)

Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018	2019*)
Primer	20,00	19,46	18,77	17,5	16,86
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,96	17,50	16,86	15,62	15,05
B Pertambangan dan Penggalian	2,04	1,96	1,91	1,88	1,81
Sekunder	43,01	43,33	43,78	44,62	45,06
C Industri Pengolahan	30,20	30,33	30,55	31,42	32,12
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F Konstruksi	12,63	12,83	13,05	13,02	12,76
Tersier	36,99	37,21	37,46	37,89	38,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,48	18,66	18,86	19,25	19,21
H Transportasi dan Pergudangan	1,17	1,18	1,22	1,23	1,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,17	3,26	3,35	3,39	3,49
J Informasi dan Komunikasi	3,97	3,96	3,97	3,94	4,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,73	1,71	1,68	1,66
L Real Estat	1,35	1,33	1,33	1,37	1,41
M,N Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,90	1,89	1,85	1,86	1,88
P Jasa Pendidikan	2,41	2,40	2,35	2,33	2,34
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,55	0,55	0,54	0,56
R,S, T,U Jasa lainnya	1,90	1,89	1,90	1,92	1,91
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

Berdasarkan tabel 2.21, perubahan pangsa struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dijelaskan bahwa pangsa kategori sekunder yang dimotori oleh kategori industri pengolahan dan kategori konstruksi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pangsa kategori sekunder masih berkisar pada angka 43,01 persen, selanjutnya naik secara konsisten

mencapai 45,06 persen pada tahun 2019. Sebaliknya, pangsa kategori tersier mengalami peningkatan, dari 36,99 persen pada tahun 2015 menjadi 38,08 persen pada tahun 2019. Kategori primer juga mengalami penurunan peranannya pada struktur ekonomi Kabupaten Malang. Pada tahun 2019, kontribusi lapangan usaha kategori primer sebesar 16,86 persen atau menurun sebesar 3,14 poin dibandingkan tahun 2015. Berkurangnya luas lahan dan pengaruh perubahan iklim yang ekstrim berperan terhadap penurunan produksi pertanian, peternakan dan perikanan. Pertambangan dan bahan galian mengalami kejenuhan eksploitasi dan berkurangnya eksplorasi. Pada kategori primer, penurunan lapangan usaha pertanian serta pertambangan dan penggalan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,94 poin dan 0,23 poin.

Berdasarkan gambaran tentang pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2015-2019 tersebut, dapat ditarik kesimpulan: Pertama, Memasuki tahun 2019, tren penurunan kategori primer dalam beberapa tahun terakhir mulai melambat. Kedua, kategori tersier yang diharapkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang, ternyata perannya tidak signifikan, Ketiga, pergeseran perekonomian Kabupaten Malang dari kategori primer ke kategori sekunder dan tersier tengah berlangsung. Pergeseran adalah sesuatu yang wajar terjadi pada suatu pembangunan ekonomi. Akan tetapi, pergeseran yang terjadi di Kabupaten Malang tampaknya mulai merubah aset penting, yaitu pertanian. Kondisi demikian, dapat ditinjau dari beralihfungsinya hamparan lahan pertanian menjadi lahan bangunan baik pemukiman, pertokoan, perkantoran, perumahan maupun lainnya. Apabila keadaan ini terus dibiarkan berlangsung tanpa pengendalian secara ketat dan konsisten, maka dikhawatirkan Kabupaten Malang tidak lagi menjadi pemasok pangan utama dibagi daerah sekitar.

Untuk 2 (dua) tahun mendatang, struktur perekonomian Kabupaten Malang diprediksi akan mengalami pola pergeseran yang sama dengan periode 5 (lima) tahun lalu. Sektor primer diperkirakan tidak lagi mendominasi struktur perekonomian Kabupaten Malang, penurunan diperkirakan mencapai 15,89 persen pada tahun 2021. Adapun sektor sekunder dan tersier akan meningkat, masing-masing mencapai angka 46,28 persen dan 39,28 persen pada hitungan tahun yang sama. Dengan Demikian, fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2

(tahun) tahun kedepan perlu tetap mengedepankan sektor pertanian untuk menopang pengembangan sektor industri dan jasa.

II. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kualitas kehidupan manusia secara individu atau masyarakat secara kelompok tidak hanya didasarkan pada tingkat ekonomi melainkan juga kesehatan dan pendidikan. Dalam subbab ini akan diuraikan analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial yang dilakukan terhadap indikator yang relevan.

A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir kondisi kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.21 berikut ini:

Tabel 2.22
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Manusia	-	66,63	67,51	68,47	69,40	70,35

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan kinerja pembangunan di Kabupaten Malang. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa IPM Kabupaten Malang senantiasa mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Posisi IPM Kabupaten Malang pada tahun 2015 66,63, tahun 2016 sebesar 67,51 dan tahun 2017 menjadi 68,47, tahun 2018 sebesar 69,40 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 70,35. Peningkatan IPM ini disebabkan mulai membaiknya pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

B. Aspek Pendidikan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek pendidikan selama lima tahun terakhir dari 2015 sampai dengan 2019.

1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2018, HLS mencapai 13,17 tahun, seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten
Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,98	12,28	12,56	12,87	13,17

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

2. Rata-rata Lama Sekolah

Selain harapan lama sekolah (HLS), indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mempengaruhi nilai IPM. Hingga tahun 2019, RLS mencapai 7,27 tahun.

Tabel 2.24
Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,73	6,98	7,17	7,18	7,27

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM). APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Indikator APM secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Untuk Tingkat SD, SMP
Dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI						
	* APM	Persen	99,34	99,35	99,40	99,40	99,41
2.	SMP Sederajat						
	* APM	Persen	80,78	80,61	80,80	80,99	81,09
3.	SMA Sederajat						
	* APM	Persen	76,61	76,83	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat baik APM Tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar 99,34 persen

meningkat sebesar 99,41 persen di tahun 2019, dan untuk tingkat SMP Sederajad pada tahun 2015 sebesar 80,78 persen meningkat menjadi sebesar 81,09 persen di tahun 2019, sedangkan untuk tingkat SMA Sederajad sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

4. Angka Partisipasi Kasar

Indikator keberhasilan pembangunan pendidikan dapat dilihat dari perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Indikator APM ini mencerminkan perbandingan jumlah siswa yang bersekolah di jenjang tertentu dengan usia tertentu dibanding dengan jumlah penduduk usia sekolah (usia tertentu untuk jenjang tertentu). Sedangkan indikator APK mencerminkan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang tertentu dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah untuk jenjang tertentu. Indikator APM dan APK secara lengkap dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK Untuk Tingkat SD, SMP dan SMA) di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI						
	* APK	Persen	113,19	113,19	113,19	113,19	113,19
2.	SMP Sederajad						
	* APK	Persen	96,39	96,55	96,60	96,66	96,72
3.	SMA Sederajad						
	* APK	Persen	81,23	81,43	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Malang, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat baik APM maupun APK Tahun 2015 sampai dengan 2019 cenderung meningkat. Adapun Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI pada tahun 2015 sebesar 113,19 persen naik menjadi 113,19 persen di tahun 2019, dan untuk tingkat SMP Sederajad pada tahun 2015 sebesar 96,39 persen meningkat menjadi 96,72 persen di tahun 2019, sedangkan untuk tingkat SMA Sederajad sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

5. Capaian Angka Kelulusan

Untuk lebih memperjelas kondisi objektif perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang, maka perlu diinformasikan pula tentang hasil kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.27
Capaian Angka Kelulusan Per Satuan Tingkat Pendidikan
Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kelulusan Tingkat SD/MI	Persen	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan Tingkat SMP/MTs	Persen	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan Tingkat SMA/MA	Persen	100	100	100	100	-
Angka Kelulusan Tingkat SMK	Persen	100	100	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 2020

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan tingkat SD/MI mampu dipertahankan sebesar 100 % dalam 5 (lima) tahun terakhir. Adapun untuk tingkat SMP/MTs pada tahun 2015 sebesar 100% dan bertahan sebesar 100% hingga tahun 2019, sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA sejak tahun 2017 sudah menjadi kewenangan Provinsi.

C. Aspek Kesehatan

Berikut ini diuraikan gambaran umum indikator kinerja dalam aspek kesehatan selama lima tahun terakhir.

1. Angka Harapan Hidup

Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, dicerminkan melalui besaran Angka Harapan Hidup (AHH). Konsep AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (www.bps.go.id).

AHH digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori, termasuk program pemberantasan kemiskinan. AHH diupayakan untuk terus menerus meningkat dan berkesinambungan karena masalah kesehatan yang terjadi sekarang dapat berpengaruh terhadap keturunan berikutnya. Derajat kesehatan ini juga harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan memberikan fasilitas kesehatan yang

memadai dan meningkatkan kesadaran pola hidup sehat bagi masyarakat secara sinergis.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Harapan Hidup
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	71,98	72,05	72,12	72,26	72,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2020

Berdasarkan data diatas tampak bahwa AHH Kabupaten Malang secara rerata lebih tinggi dari Kabupaten lain yang ada di Jawa Timur bagian Selatan dan lebih tinggi dari rerata Jawa Timur yaitu sebesar 72,26 pada tahun 2019.

2. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Malang per 1000 kelahiran hidup Tahun 2015 sebesar 5,95 turun hingga menjadi 1,55 pada tahun 2019, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat sudah mulai meningkat, khususnya tentang pemenuhan gizi pada ibu hamil di dusun-dusun terpencil, penyakit degeneratif dan penyakit menular serta adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau pelayanan.

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Kematian Bayi Dan Angka Kematian Anak Balita
Di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	5,95	4,52	1,61	2,08	1,55

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2020

3. Angka Kematian Ibu

Untuk angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada Tahun 2015 sebesar 72,22 turun hingga menjadi 39,35 pada tahun 2019. Dalam hal pengurangan angka kematian ibu Pemerintah Kabupaten Malang telah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa sebagai pusat penyuluhan dan konsultasi kesehatan termasuk penyuluhan gizi yang program terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Kematian Ibu
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	72,22	52,75	45,32	42,16	39,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, 2020

4. Angka Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan stimulasi psikososial serta paparan infeksi berulang terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia dua tahun.

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dari 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Stunting berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2013 dengan angka 27,28%. Di awal tahun 2019, Kabupaten Malang menjadi salah satu daerah yang tergabung dalam Aksi Integrasi Program Percepatan Pencegahan Stunting oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Prevalensi Stunting di Kabupaten Malang Tahun 2016-2019 adalah sebagai berikut:

Tahun	Prevalensi	Sumber Data
2016	22,9%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2017	28,3%	Pemantauan Status Gizi (PSG)
2018	20%	Bulan Timbang Februari
2018	18,5%	Bulan Timbang Agustus
2019	16,1%	Bulan Timbang Februari
2019	12,08%	Bulan Timbang Agustus

Sumber: Strategi Komunikasi dan Perubahan Perilaku dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang, 2019

Prevalensi anak yang mengalami stunting di Kabupaten Malang sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2019 mencapai 12,08% atau sekitar 18.388 dari total 152.234 balita yang ada di Kabupaten Malang seperti tabel di bawah ini:

NO	PUSKESMAS	JUMLAH YANG DIUKUR	STUNTING (SANGAT PENDEK +					PREVALENSI STUNTING	PREVALENSI STUNTING KECAMATAN	PERINGKAT
			L	%	P	%	L+P			
1	DONOMULYO	4231	158	54%	135	46,1%	293	6,9%	6,9%	32
2	KALIPARE	3334	252	63%	147	36,8%	399	12,0%	12,0%	21
3	PAGAK	1308	60	72%	23	27,7%	83	6,3%	11,5%	33
4	SUMBERMANJING KULON	857	89	54%	77	46,4%	166	19,4%		8
5	BANTUR	1874	114	62%	69	37,7%	183	9,8%	14,0%	26
6	WONOKERTO	2672	232	51%	222	48,9%	454	17,0%		13
7	GEDANGAN	2656	46	58%	34	42,5%	80	3,0%	3,0%	36
8	SITIJARJO	2763	141	60%	94	40,0%	235	8,5%	12,0%	29
9	SUMBERMANJING WETAN	3960	350	61%	224	39,0%	574	14,5%		16
10	DAMPIT	2019	297	57%	223	42,9%	520	25,8%	10,7%	3
11	PAMOTAN	3012	14	78%	4	22,2%	18	0,6%		39
12	TIRTOYUDO	2435	314	56%	249	44,2%	563	23,1%	23,1%	4
13	AMPELGADING	2761	291	56%	226	43,7%	517	18,7%	18,7%	11
14	PONCOKUSUMO	6372	178	59%	125	41,3%	303	4,8%	4,8%	35
15	WAJAK	4802	342	61%	216	38,7%	558	11,6%	11,6%	22
16	TUREN	7556	804	57%	617	43,4%	1421	18,8%	18,8%	10
17	BULULAWANG	3607	290	58%	207	41,6%	497	13,8%	13,8%	18
18	GONDANGLEGI	3041	431	51%	406	48,5%	837	27,5%	18,9%	2
19	KETAWANG	2581	140	62%	85	37,8%	225	8,7%		28
20	PAGELARAN	5070	382	49%	396	50,9%	778	15,3%	15,3%	15
21	KEPANJEN	6503	276	61%	178	39,2%	454	7,0%	7,0%	31
22	SUMBERPUCUNG	3380	366	56%	288	44,0%	654	19,3%	19,3%	9
23	KROMENGAN	2649	157	58%	115	42,3%	272	10,3%	10,3%	24
24	NGAJUM	2860	250	62%	156	38,4%	406	14,2%	14,2%	17
25	WONOSARI	1229	124	48%	133	51,8%	257	20,9%	20,9%	6
26	WAGIR	6113	174	53%	156	47,3%	330	5,4%	5,4%	34
27	PAKISAJI	6604	349	56%	271	43,7%	620	9,4%	9,4%	27
28	TAJINAN	3902	402	58%	287	41,7%	689	17,7%	17,7%	12
29	TUMPANG	4263	496	57%	375	43,1%	871	20,4%	20,4%	7
30	PAKIS	8329	151	71%	61	28,8%	212	2,5%	2,5%	37
31	JABUNG	3965	240	50%	243	50,3%	483	12,2%	12,2%	20
32	LAWANG	5901	255	58%	185	42,0%	440	7,5%	7,5%	30
33	SINGOSARI	6270	86	64%	49	36,3%	135	2,2%	5,5%	38
34	ARDIMULYO	4836	280	59%	193	40,8%	473	9,8%		25
35	KARANGPLOSO	4599	319	64%	182	36,3%	501	10,9%	10,9%	23
36	DAU	4366	327	58%	238	42,1%	565	12,9%	12,9%	19
37	PUJON	3778	643	56%	513	44,4%	1156	30,6%	30,6%	1
38	NGANTANG	3814	437	51%	412	48,5%	849	22,3%	22,3%	5
39	KASEMBON	1962	180	57%	137	43,2%	317	16,2%	16,2%	14
TOTAL		152234	10437	56,8%	7951	43%	18388	12,1%		

D. Ketenagakerjaan

Potensi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi senantiasa diikuti dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan dampaknya. Perluasan lapangan kerja juga belum memberikan peluang yang setara bagi perempuan untuk berperan pada sektor produktif. Indikator utama ketenagakerjaan yang sering digunakan sebagai indikasi keberhasilan dalam menangani masalah pengangguran adalah perhitungan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan mencari pekerjaan) sedangkan TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut:

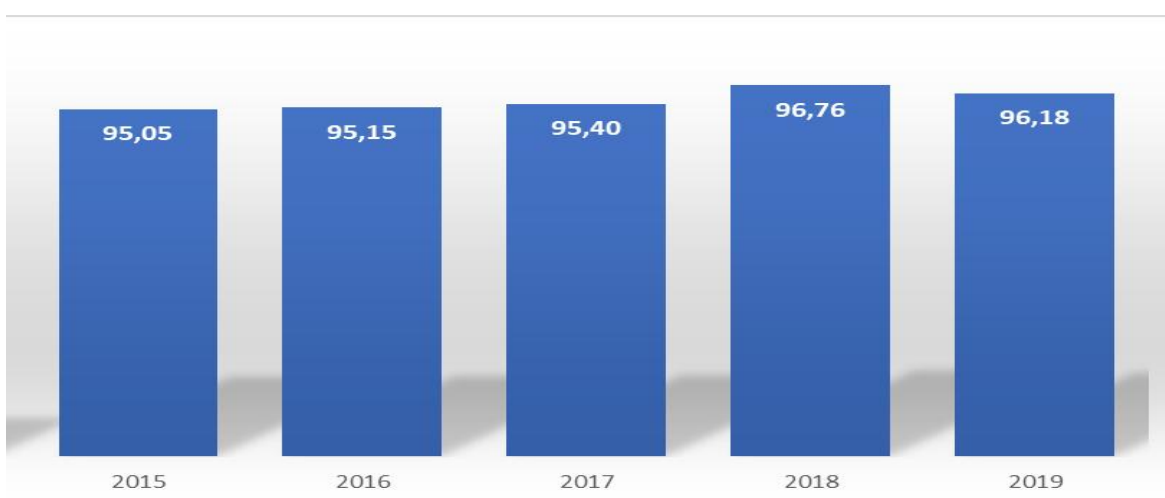
Tabel 2.31
Tabel Rasio Penduduk Yang Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Rasio Penduduk yang Bekerja	Persen	95,05	95,15	95,40	96,76	96,18

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, 2020 (diolah)

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara penduduk yang berkerja dengan angkatan kerja, selama tahun 2015-2019 rasio penduduk yang bekerja menunjukkan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2018 namun mengalami penurunan pada tahun 2019 meskipun tidak signifikan.

Gambar 2.11
Grafik Rasio Penduduk Bekerja terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Malang Tahun 2015-2019



III. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Budaya dalam suatu bangsa selalu identik dengan keragaman kesenian yang dimiliki, budaya sebuah bangsa dapat berupa sesuatu yang khas dan dapat mencerminkan identitas bangsa yang tidak terbatas pada ragam keseniannya saja. Kebudayaan bangsa Indonesia sering disebut dengan budaya nasional erat kaitannya dengan kepribadian bangsa.

Pengembangan budaya di Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan dan pembinaan budaya daerah melalui upaya pengembangan budaya yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.

Kebijakan pengarusutamaan kebudayaan dan olahraga menjadi strategi dalam rangka mewujudkan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan masyarakat sehat dan berprestasi di bidang kebudayaan dan olahraga.

Pemerintah Kabupaten Malang terus berupaya menyediakan ruang bagi tumbuh dan berkembangnya bidang seni budaya dan olahraga antara lain fasilitas seni budaya dan olahraga bagi masyarakat.

A. Kebudayaan

Pengembangan seni dan budaya bertujuan menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya leluhur, keragaman budaya dan tradisi, peningkatan kualitas berbudaya masyarakat serta ketahanan budaya. Hasil pembinaan kebudayaan dapat dilihat berkembangnya seni budaya di masyarakat dari upaya pemerintah untuk membangun ruang berekspresi bagi masyarakat pecinta budaya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang terdapat 19 tempat ruang berekspresi seni budaya seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.32
Ruang Berekspresi Seni dan Budaya di Kabupaten Malang

No	Nama Tempat
1	Panggung Terbuka di Taman Wisata Air Wendit
2	Pendopo Museum Singhasari
3	Padepokan Asmoro Bangun
4	Padepokan Mangun Darmo
5	Padepokan Mudra Ganesha
6	Padepokan Cokro Buwono
7	Sanggar Kartika (Open Stage Diknas)
8	Stadion Kanjuruhan (Open Stage)
9	Pelataran Candi Singosari
10	Pelataran Candi Sumberawan
11	Pelataran Candi Jago
12	Pelataran Candi Kidal
13	Perkebunan The Wonosari (Open Stage)
14	Karangkates (Open Stage)
15	Selorejo (Open Stage)
16	Rest Area Karangploso (Open Stage)
17	Rest Area GubugKlakah (Open Stage)
18	Taman Rekreasi Sengkaling (Open Stage)
19	Amphiteater Gunung Kawi (Open Stage)

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

B. Pemuda dan Olahraga

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah sarana gedung olahraga dapat dilihat dalam Tabel 2.33 di bawah ini:

Tabel 2.33
Data Sarana Fasilitas Olah Raga di Kabupaten Malang
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	FASILITAS OLAHRAGA										JML
		STADION	SB	BV	BB	TENIS	BL. TANGKIS	FUTSAL	GOR	AULA	KLM RENANG	
1	PUJON	0	14	11	2	0	5	2	0	16	2	52
2	NGANTANG	0	8	11	3	1	2	1	0	9	1	36
3	KASEMBON	0	7	12	3	2	2	2	0	9	2	39
4	SINGOSARI	2	15	28	16	8	20	5	0	17	5	116
5	LAWANG	1	8	9	2	1	2	2	0	12	1	38
6	KARANG PLOSO	0	9	10	1	1	5	3	0	11	9	49
7	DAU	1	7	8	1	2	4	4	0	10	2	39
8	TUMPANG	1	12	11	1	1	9	3	0	10	1	49
9	PAKIS	0	10	5	4	0	4	2	0	10	1	36
10	JABUNG	0	9	4	1	0	1	2	0	10	0	27
11	PONCOKUSUMO	0	10	5	0	0	1	1	0	8	0	25
12	BULULAWANG	1	10	11	2	1	10	1	2	11	1	50
13	WAJAK	1	9	8	1	0	1	1	0	8	0	29
14	TAJINAN	0	10	8	0	0	6	1	0	10	0	35
15	GONDANGLEGI	1	12	9	3	0	4	2	0	10	2	43
16	PAGELARAN	0	10	8	2	0	7	1	0	8	0	36
17	TUREN	2	14	18	7	1	12	3	1	15	5	78
18	DAMPIT	1	14	20	4	0	2	1	3	16	4	65
19	TIRTOYUDO	1	8	5	0	0	4	1	0	8	0	27
20	AMPELGADING	1	6	11	0	0	1	1	0	7	0	27
21	SBRMANJING WETAN	0	6	4	0	0	1	1	0	8	0	20
22	KEPANJEN	2	9	5	4	2	5	4	0	14	3	48
23	PAKISAJI	2	10	8	0	1	9	1	0	13	2	16
24	WAGIR	0	12	10	0	0	9	2	1	12	2	48
25	NGAJUM	0	9	10	1	0	1	0	0	10	0	31
26	WONOSARI	0	9	11	0	0	8	3	0	7	1	39
27	SUMBER PUCUNG	1	10	6	2	0	3	1	0	6	1	30
28	KROMENGAN	0	7	7	2	0	5	1	0	9	1	32
29	PAGAK	0	9	3	1	0	1	1	0	6	0	21
30	KALIPARE	1	10	22	0	0	5	0	0	5	1	44
31	DONOMULYO	1	14	11	9	0	12	0	0	6	2	55
32	GEDANGAN	0	12	3	1	0	2	0	0	7	0	25
33	BANTUR	0	11	11	2	2	6	0	0	12	1	45
	JUMLAH	20	330	323	75	23	169	53	7	330	50	1380

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2019

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

I. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam mempersiapkan terbentuknya generasi bangsa yang demokratis, terampil, cerdas, kreatif, berakhlak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, guna menghadapi tantangan global. Pemerintahan daerah sebagai *supporting system*, tentunya memiliki andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas. Pemerintah sebagai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan baik guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah Undang-undang Dasar. Berikut tabel perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD, SMP dan SMA.

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Murid, Jumlah Sekolah, Jumlah Guru dan Jumlah Kelas untuk Tingkat SD, SMP dan SMA di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
JUMLAH MURID							
1	TK/RA	Orang	65.942	90.691	71.800	52.190	50.094
	SD	Orang	172.991	182.638	277.215	182.449	181.255
	SDLB	Orang	496	-	-	-	-
	SMP	Orang	80.068	79.877	120.381	81.043	81.912
	SMP Unggulan (RSBI)	Orang	-	-	-	-	-
	SMP Terbuka	Orang	601	-	-	-	-
	SMPLB	Orang	88	-	-	-	-
	SMA	Orang	20.701	20.669	-	-	-
	SMA Unggulan (RSBI)	Orang	-	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Orang	221	-	-	-	-
	SMLB	Orang	32	-	-	-	-
	SMK	Orang	38.215	39.321	-	-	-
	SMK Unggulan (RSBI)	Orang	-	-	-	-	-
JUMLAH SEKOLAH							
2	TK/R	Unit	1.409	1.856	1.33	973	977
	SD	Unit	1.171	1.174	1.162	1.131	1.134
	SDLB	Unit	9	-	-	-	-
	SMP	Unit	319	323	323	326	334
	SMP Unggulan (RSBI)	Unit	-	-	-	-	-
	SMP Terbuka	Unit	6	-	-	-	-
	SMPLB	Unit	8	-	-	-	-
	SMA	Unit	64	60	-	-	-
	SMA Unggulan (RSBI)	Unit	-	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Unit	1	-	-	-	-
	SMLB	Unit	2	-	-	-	-
	SMK	Unit	114	129	-	-	-
	SMK Unggulan (RSBI)	Unit	-	-	-	-	-

JUMLAH GURU							
3	TK/RA	Orang	3.873	5.745	4.254	3.318	3.261
	SD	Orang	12.186	11.446	11.056	9.441	6.282
	SDLB	Orang	32	75	-	-	-
	SMP	Orang	6.334	4.34	4.829	4.331	3.416
	SMP Unggulan (RSBI)	Orang	-	-	-	-	-
	SMP Terbuka	Orang	103	-	-	-	-
	SMPLB	Orang	-	-	-	-	-
	SMA	Orang	1.752	1.43	1.431	-	-
	SMA Unggulan (RSBI)	Orang	-	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Orang	30	-	-	-	-
	SMLB	Orang	9	8	-	-	-
	SMK	Orang	3.177	2.378	-	-	-
	SMK Unggulan (RSBI)	Orang	-	-	-	-	-
4	TK/RA	Kelas	3.164	3.018	-	-	-
	SD	Kelas	7.886	7.819	-	-	-
	SDLB	Kelas	69	39	-	-	-
	SMP	Kelas	2.675	2.743	-	-	-
	SMP Unggulan (RSBI)	Kelas	-	-	-	-	-
	- SMP Terbuka	Kelas	30	-	-	-	-
	- SMPLB	Kelas	30	-	-	-	-
	- SMA	Kelas	974	768	-	-	-
	SMA Unggulan (RSBI)	Kelas	-	-	-	-	-
	SMA Terbuka	Kelas	3	-	-	-	-
	SMLB	Kelas	12	-	-	-	-
	SMK	Kelas	1.395	1.451	-	-	-
	SMK Unggulan (RSBI)	Kelas	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Selain Perkembangan jumlah murid, jumlah sekolah, jumlah guru dan jumlah kelas untuk tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan atau putus sekolah, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang sudah tidak mengenyam pendidikan formal lagi dan lebih dikenal dengan Angka Putus Sekolah (APs). APs Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.35
Perkembangan Angka Putus Sekolah dibandingkan dengan
Jumlah Penduduk Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
APs SD / MI	Persen	0,09	0,01	0,01	0,01	0,01
APs SMP / MTs	Persen	0,44	0,07	0,07	0,01	0,01
APs SMA/MA/SMK	Persen	0,11	0,14	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Sedangkan ditinjau dari ketersediaan infrastruktur sekolah terutama dari banyaknya sekolah terlihat bahwa rasionya masih rendah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah murid dari waktu ke waktu, sedangkan pertumbuhan gedung sekolah tidak sebanding dengan jumlah murid.

Tabel 2.36
Ketersediaan Sekolah dan Jumlah Murid
Tahun 2015 - 2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI						
1	Jumlah sekolah	1.195	1.169	1.164	1.137	1.134
2	Jumlah Murid	198.597	196.544	183.024	182.578	181.255
3	Rasio (1:...	166	168	157	160	160
SMP / MTs						
1	Jumlah sekolah	330	278	329	329	334
2	Jumlah Murid	80.082	73.619	81.450	81.043	81.912
3	Rasio (1:..	242	264	247	246	245
SMA/MA/SMK						
1	Jumlah sekolah	65	178	-	-	-
2	Jumlah Murid	21.192	55.079	-	-	-
3	Rasio (1:..	326	309	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

Sedangkan untuk perbandingan dan perkembangan jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Perkembangan Jumlah Guru dan Murid Per Jenjang
Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2015	2016	2017	2018	2019
I SD/MI						
1	Jumlah Guru	10.813	11.522	9.434	9.128	6.282
2	Jumlah Murid	198.597	196.544	183.024	182.578	181.255
3	Rasio (1:..	18	17	19	20	29
II SMP / MTs						
1	Jumlah Guru	5.829	5.984	4.361	4.331	3.416
2	Jumlah Murid	80.082	73.619	81.450	81.043	81.912
3	Rasio (1:..	13	12	18	18	24
III SMA/MA/MK						
1	Jumlah Guru	1.921	4.929	-	-	-
2	Jumlah Murid	21.192	55.079	-	-	-
3	Rasio (1:..	11	11	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan, 2020

B. Kesehatan

Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Tujuannya agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Bidang Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan dan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

Pembangunan kesehatan terutama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai lanjut usia. Selain itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis, termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan mutu akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Malang sangat tergantung dari tersedianya sarana dan prasarana kesehatan. Sebagai komitmen Kabupaten Malang terhadap sektor kesehatan masyarakat maka di wilayah Kabupaten Malang terdapat beberapa fasilitas sarana kesehatan seperti yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2.38
Perkembangan Sarana Kesehatan Di Kabupaten Malang
Tahun 2015 - 2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
1	RSU Daerah Pemerintah	Buah	2	2	2	2	2	RSUD Kanjuruhan dan RSUD Lawang
2	Rumah Sakit TNI	Buah	2	2	2	2	2	RSAU Pakis dan RS Ban Brawijaya
3	Rumah Sakit Departemen Lain	Buah	1	1	1	1	1	RSJ Lawang
4	Rumah Sakit Khusus Swasta							
	RS Bersalin	Buah	1	1	1	11	2	
	RS Bedah	Buah	1	1	1	0	0	Hasta Husada Kapanjen
	RS Geriatri	Buah	0	0	0	1	1	

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
5	Rumah Sakit Umum Swasta	Buah	16	16	16	17	17	
6	Klinik Rawat Inap	Buah	12	12	12	13	13	
7	Klinik Rawat Jalan	Buah	44	44	72	72	87	
8	PUSKESMAS	Buah	39	39	39	41	38	
9	PUSKESMAS Pembantu	Buah	93	93	95	98	88	
10	PUSKESMAS Keliling	Buah	72	72	72	54	54	
11	Puskesmas Ideal	Buah	18	18	18	18	18	
12	POSYANDU	Buah	2.828	2.828	2.872	2.842	2.842	
13	PONKESDES	Buah	390	390	390	390	390	
14	Desa Siaga Aktif	Desa	390	390	390	390	390	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Malang, 2020

Selain itu Pemerintah Kabupaten Malang juga melakukan optimalisasi fungsi 39 Puskesmas, menyiagakan 93 Puskesmas Pembantu, 54 Puskesmas Keliling, 18 Pusekesmas Ideal, serta melakukan penguatan terhadap 2.842 Posyandu dan peningkatan status Polindes menjadi Ponkesdes sebanyak 390 lembaga, serta mengukuhkan 390 desa/kelurahan siaga.

Upaya optimalisasi Puskesmas menjadi Puskesmas Ideal sebagai ikon pembangunan kesehatan akan terus dilanjutkan dan dikembangkan melalui program terobosan dibidang kesehatan berupa pengembangan Puskesmas Wisata, Puskesmas Jalan Raya, Puskesmas Siaga Bencana, Puskesmas Rawat Inap Plus, Puskesmas Gawat Darurat, Puskesmas Peduli Remaja, Puskesmas Pelayanan Narkoba, Puskesmas Pelayanan HIV/AIDS yang memiliki spesifikasi pelayanan dan Program Sutera Emas (Surveillance Epidemiologi Terpadu Berbasis Masyarakat), program unggulan Home care, Perawan Siter (Penanganan dan Pemberdayaan Masyarakat Rawan Gizi Terpadu), EMAS (Expanding maternal and Neonatal Survival), Program Keluarga Sehat.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan pula dengan pengembangan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kapanjen dan Lawang. Fasilitas yang disediakan berupa pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan tindakan medik.

Disamping itu akan dikembangkan Puskesmas menjadi Rumah Sakit Daerah, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), pengembangan UPTD pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan, juga akan dilakukan standarisasi sarana kesehatan (akreditasi dan ISO), Pengembangan tata kelola Puskesmas BLUD.

Selain itu berbagai upaya telah dilaksanakan untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat antara lain dengan menerapkan mekanisme rujukan berjenjang yaitu mulai pelayanan dasar di Puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit apabila memerlukan pelayanan kesehatan lanjutan. Pemerintah Kabupaten Malang juga terus meningkatkan jumlah tenaga medis dan paramedis yang ada.

Tabel 2.39
Perkembangan Tenaga Medis dan Paramedis di Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	298	285	59	175	272
2	Jumlah Dokter Umum	Orang	234	246	274	165	288
3	Jumlah Dokter Gigi	Orang	86	84	86	70	118
4	Jumlah Bidan/Perawat	Orang	2.906	3.151	4.830	2.283	3.108
5	Jumlah Sanitarian	Orang	42	33	33	34	51
6	Jumlah Paramedis Lain		445	381	381	120	120
	Apoteker/Ass. Apoteker	Orang	175	220	220	190	252
	Gizi (D-IV/D-III/SPAG)	Orang	91	66	66	72	167
	Analisis Kesehatan (D-III/SMAK)	Orang	129	115	115	85	92
	Kesehatan Masyarakat (S1/DIII)	Orang	17	24	24	15	157
	Perawat Gigi	Orang	33	37	37	37	37
7	Jumlah Tenaga Non Medis/Paramedis	Orang	1.127	1.030	1.030	733	2.046

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Menurunnya angka kesakitan/incident rate (IR) dan angka kematian (CFR) tahun 2015 - 2019 dari target, antara lain:

a. Kasus DBD

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Kematian	IR	CFR (%)
2014	834	4	33,03	0,48
2015	1.331	11	52,31	0,83
2016	1.268	13	51,50	1,03
2017	458	2	17,78	0,44
2018	751	3	28,98	0,40
2019	1.495	2	57,36	0,13

Jumlah penderita Demam Berdarah di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif yaitu tahun 2014 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 834 kasus (33,03 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 379 penderita laki-laki dan 455 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 4 orang (CFR : 0,48%) yang tersebar di 4 puskesmas (4 kecamatan) dan tahun 2015 kasus DBD terjadi

peningkatan sebesar 1.331 kasus (52,31 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 673 penderita laki-laki dan 658 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 11 orang (CFR : 0,83%) yang tersebar di 7 puskesmas (7 kecamatan). Pada tahun 2016 kasus DBD terjadi penurunan sebesar 1.268 kasus (51,50 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari 648 penderita laki-laki dan 621 penderita perempuan, penderita meninggal sebanyak 13 orang (CFR : 1,03%) yang tersebar di 10 puskesmas (10 kecamatan), lalu pada tahun 2017 kasus DBD mengalami penurunan sebesar 458 kasus (17,78 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 2 orang (CFR : 0,44%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan). Sedangkan kasus DBD pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 751 kasus (28,98 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 3 orang (CFR : 0,40%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan) dan pada tahun 2019 kasus DBD mengalami peningkatan lagi sebesar 1.495 kasus (57,36 per 100.000 penduduk) yang terdiri dari penderita laki-laki dan penderita perempuan, penderita yang meninggal sebanyak 2 orang (CFR: 0,13%) yang tersebar di puskesmas (kecamatan).

b. Kasus TB

Kasus Tb penemuan TB dari tahun 2014 sampai 2018 mengalami peningkatan, tetapi mengalami penurunan pada jumlah kematian.

Tabel 2.40
Keterkaitan angka kesembuhan (Cure Rate) dan angka keberhasilan pengobatan (Succes Rate) (Kasus TB)

No	Uraian	Target	Pencapaian (%)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka kesembuhan	> 5%	75,52	75,37	74,69	79,32	75,94
2	Angka keberhasilan pengobatan	> 5%	88,74	87,21	84,49	86,52	85,69

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- (1) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- (2) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.41
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
Di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan kondisi baik	Km	1.586,49	1.056,66	1.108,92	1.139,43	1.129,75
Panjang jalan seluruhnya	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	95,08	63,32	66,45	68,28	67,70

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2020

Ketersediaan infrastruktur berupa panjang trotoar dan drainase yang dibangun di wilayah Kabupaten Malang dari tahun 2016 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.42
Panjang Trotoar Dan Drainase Yang Dibangun
Di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang trotoar yang dibangun	m	-	12.000	6.000	8.000	8.030
Panjang drainase yang dibangun	m	-	3.000	2.000	2.000	500

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga Kabupaten Malang, 2020

Di wilayah Kabupaten Malang, Persentase Penanganan Sampah tahun 2015-2019 mengalami peningkatan walaupun skalanya masih kecil. Hal ini disebabkan karena pola penanganan sampah di Kabupaten Malang bertumpu pada kawasan perkotaan khususnya Ibu Kota Kecamatan, sedangkan sebagian besar lainnya dikelola secara mandiri oleh masyarakat baik melalui pengelolaan TPS 3R maupun Bank sampah. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih

tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian/juglangan.

Tabel 2.43
Persentase Penanganan Sampah
Di Kabupaten Malang Tahun 2015-2018

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Penanganan Sampah	Persen	-	88,47	97,39	97,99	97,94
Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	Persen	-	0,84	7,93	7,68	8,42

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Malang. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan potensi RTH wilayah perkotaan Kabupaten Malang dari tahun 2015 hingga tahun 2019 terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Per Satuan Wilayah
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Luas ruang terbuka hijau	Ha	4.362,67	4.393,23	4.403,33	4.417,13	4.426,55
Luas wilayah	Ha	94.422,78	94.422,78	94.422,78	94.422,78	94.422,78
Persentase terbuka hijau	%	4,62	4,65	4,66	4,68	4,69

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang (diolah)

Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Tabel 2.45
Luas Irigasi Kabupaten Malang Dalam Kondisi Baik

No	Jaringan irigasi	Luas irigasi				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Luas total baku sawah (ha)	-	46.033	46.244	46.465	46.465
2	Luas Layanan Irigasi (Ha)	-	60.545,54	55.753,37	58.205,08	53.436
3	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	-	70,02	71,86	72,14	74,13

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2020

Sesuai kewenangannya, Dinas Pengairan tidak mempunyai data luas lahan budidaya pertanian, yang ada adalah data luas baku sawah yaitu luas sawah yang dilayani oleh jaringan irigasi, dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.46
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Malang

No	Jaringan irigasi	Panjang Jaringan				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jaringan primer (m)	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80	350.218,80
2	Jaringan sekunder (m)	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50	537.532,50
3	Jaringan tersier (m)	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00	801.351,00
4	Luas baku sawah (ha)	46.033,00	46.033,00	46.244,00	46.465,00	46.465,00
5	Rasio (1+2+3) / (4)	36,69	36,69	36,53	36,35	36,35

Sumber : Dinas P.U. Sumber Daya Air Kabupaten Malang, 2020

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan dilaksanakan agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam kondisi yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan. Program pengembangan perumahan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan, sarana prasarana serta pengadaan, perbaikan perumahan dan permukiman yang layak dan sehat bagi penduduk miskin, antara lain meliputi:

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah atau penduduk miskin;
- (2) Pembangunan rumah susun sederhana sewa, dan rumah sederhana sehat untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi penduduk miskin diperkotaan;
- (3) Peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dengan mengembangkan permukiman yang layak, aman, sehat, dan renovasi rumah tidak layak huni;
- (4) Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dikawasan kumuh, desa tradisional, dan desa nelayan;
- (5) Fasilitas dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;
- (6) Fasilitas dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana akibat bencana alam;
- (7) Penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman berupa layanan Air Minum sebagai salah satu pelayanan dasar perumahan.

Tabel 2.49
Rumah Layak Huni
di Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah layak huni	Buah	678.003	678.003	707.792	716.405	726.928
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	96,22	94,89	97,96	98,06	98,10

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2020

Pada tabel 2.49 di atas, terkait dengan capaian SPM urusan perumahan, bahwa cakupan ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Malang di tahun 2019 sudah mencapai 726.928 unit dengan persentase rumah layak huni untuk masyarakat sudah 98,10%.

Tabel 2.50
Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi
di Kabupaten Malang Tahun 2014-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah rumah tangga bersanitasi	SR	357.502	386.662	387.892	388.863	411.068
Jumlah Rumah Tangga	RT	510.863	512.135	515.319	518.359	521.527
Presentase rumah tangga bersanitasi	%	69,98	75,50	75,27	75,02	78,82

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, 2020

Penduduk Kabupaten Malang yang memiliki akses sanitasi pada Tahun 2019 adalah 78,82%, mengalami peningkatan sekitar 3,4% dibandingkan tahun 2018 (sebesar 75,42%). Adapun yang memerlukan penanganan prioritas mendesak kawasan perkotaan adalah Kecamatan Pakis, Kecamatan Lawang, Kecamatan Turen, Kecamatan Tumpang, dan Kecamatan Singosari. Kawasan perdesaan adalah Kecamatan Ngantang, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Jabung, sumber Data Rencana Induk Sistem Pengolahan Air Limbah Kabupaten Malang, disamping itu masih perlu dilakukan secara berkala dan terus menerus kampanye PHBS supaya masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengola sanitasi di lingkungan tempat tinggalnya sehingga mendukung naiknya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Malang.

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, khususnya dalam pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dilakukan melalui 1 kegiatan pembinaan setiap tahunnya. Kerja sama antara pemeluk agama dalam pembangunan daerah yang saat ini telah berjalan, perlu untuk lebih ditingkatkan terutama melalui forum rutin diskusi lintas agama.

Tabel 2.51
Data Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, ORMAS Dan OKP

URAIAN	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Sosialisasi peningkatan rasa solidaritas di kalangan masyarakat	Kali	1	1	-	2	2
Sosialisasi peningkatan kerukunan antar umat beragama	Kali	3	1	1	3	4

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang, 2020

Tabel 2.52
Data Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

URAIAN	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Penyuluhan politik kepada masyarakat	Kali	16	5	2	8	5
Pembinaan administrasi bantuan parpol	Kali	4	3	2	4	5

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang, 2020

Berdasarkan data pada Tabel Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, menjelaskan mengenai perkembangan jumlah kegiatan penegakan PERDA (tipiring dan pembongkaran), jumlah kegiatan penerbitan pelanggaran PERDA, jumlah personil Satlinmas se-Kabupaten Malang dan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani.

Tabel 2.53
Perkembangan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SAT	2015	2016	2017	2018	2019
2	Penegakan PERDA (Tipiring dan Pembongkaran)	Kegiatan	584	189	77	85	54
3	Penertiban Pelanggaran PERDA	Kegiatan	7.120	4.680	4.484	6.591	8.697
4	Jumlah Personil Satlinmas se-Kabupaten Malang	Orang	12.878	12.890	12.890	12.090	12.090
5	Jumlah Kejadian Kebakaran Ditangani	Kejadian	-	-	35	84	84

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2020

F. Sosial

Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia, didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan. Pelayanan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial berarti mengentaskan mereka dari situasi tersebut sehingga diharapkan semakin lama jumlah mereka akan berkurang.

Tabel 2.54
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PMKS yang diberi bantuan	Orang	146.050	147.212	161.933	161.903	161.903
Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Orang	169.170	170.010	186.472	185.517	184.926
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	86,33	86,59	86,84	87,13	87,55

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Tabel 2.55
PMKS Yang Tertangani
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PMKS yang tertangani	Orang	146.050	147.212	161.933	161.903	161.903
Jumlah PMKS yang ada	Orang	731.418	731.418	731.418	731.418	786.246
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	19,97	20,12	22,13	22,13	20,59

Sumber : Dinas Sosial, 2020

Panti sosial di Kabupaten Malang dibedakan menjadi panti asuhan, panti werda, panti rehabilitasi sosial, berikut adalah tabel mengenai perkembangan panti sosial di Kabupaten Malang :

Tabel 2.56
Perkembangan Panti Sosial
di Kabupaten Malang Tahun 2014-2018

NO	URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Panti Asuhan	Unit	45	47	49	49	49
2	Jumlah Penghuni	Orang	2.702	2.892	2.827	2.827	2.827
3	Jumlah Panti Werda	Unit	4	4	4	4	4
4	Jumlah Penghuni	Orang	157	157	157	157	157
5	Jumlah Panti Rehabilitasi Sosial	Unit	4	3	3	3	3
6	Jumlah Penghuni	Orang	292	267	267	267	267

Sumber : Dinas Sosial, 2019

Jumlah unit panti sosial tahun 2018 terbanyak adalah panti asuhan dengan 49 unit dengan jumlah penghuni sebanyak 2.827 orang.

II. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan dicerminkan dari jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Malang pada Tahun 2015 sejumlah 1.965.371 orang, pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 1.815.726 orang, demikian juga dengan jumlah angkatan kerja sejumlah 1.573.802 pada Tahun 2015 menjadi 1.417.563 orang pada tahun 2019. Sementara itu jumlah angkatan kerja tertampung disektor formal pada Tahun 2015 sebanyak 4.514 orang, pada Tahun 2019 tertampung 2.204 orang. Jumlah pencari kerja yang terdaftar turun menjadi 2.517 orang pada tahun 2019 yang sebelumnya sebanyak 52.115 orang pada tahun 2015.

Secara lengkap kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 2.57 berikut ini:

Tabel 2.57
Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Penduduk Usia Kerja	orang	1.965.371	1.697.536	1.989.403	2.008.063	1.815.726
Angkatan Kerja	orang	1.573.802	1.643.830	1.318.611	1.399.610	1.417.563
Angkatan Kerja Tertampung	orang	4,514	4,514	2.802	4.057	2.204
Pencari Kerja	orang	52.115	52.115	20.173	4.825	2.517
Jumlah Pengiriman TKI	orang	1.969	1.969	2.973	3.287	2.471

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2020

Tabel 2.58
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka
di Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	66,28	66,28	66,28	69,70	68,60
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,95	5,50	4,60	3,24	3,82

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab Malang, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Tingkat partisipasi angkatan kerja di kabupaten Malang tertinggi pada tahun 2018 sebesar 69,70 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 66,28 persen. Sedangkan untuk tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 5,50 persen.

B. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam perkembangan kota yang semakin kompleks saat ini, diketahui bahwa sarana bermain anak agar dapat menjadi media tumbuh kembang secara layak masih dirasakan sangat minim. Ini karena lahan yang terbatas dan belum adanya perhatian serius. Di sisi lain, eksploitasi anak yang ditunjukkan dengan masih banyaknya anak jalanan juga perlu ditangani segera.

Terkait dengan capaian indikator SPM di bidang layanan terpadu perempuan dan anak diketahui bahwa kinerja selama periode 2015-2019 sudah cukup optimal. Ini diindikasikan dengan adanya usaha nyata berupa tindak lanjut penanganan dari pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang disertai dengan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.59
Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Pekerja perempuan dilembaga pemerintah	Orang	9.010	10.170	11.502	26.214	7.508
Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	Orang	9	9	9	8	9
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	-	93,54	93,54	93,54	96,71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Malang masih belum begitu tinggi.

Tabel 2.60
Rasio KDRT
di Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah KDRT	Orang	71	20	77	22	56
Jumlah Rumah Tangga	Orang	741.201	669.980	669.980	857.801	669.980
Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	%	-	88,33	88,33	88,38	88,38

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020

Jumlah KDRT Pada tahun 2018 masih rendah yaitu sejumlah 22 orang namun mengalami kenaikan menjadi 56 orang pada tahun 2019, salah satu faktornya karena adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan yang mulai tumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

C. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan upaya sistematis dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan setiap individu dalam suatu wilayah yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Kabupaten Malang merupakan Kabupaten penyangga pangan nasional, sehingga perkembangan padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas utama yang sangat berperan strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Tabel 2.61
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	87,6	88,1	88,2	88,3

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2020

Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) di Kabupaten Malang dapat dikatakan mengalami kenaikan tiap tahunnya. Ketersediaan beras ditentukan dari produksi beras, sedangkan produksi beras dipengaruhi oleh berbagai jenis faktor, diantaranya kepemilikan lahan dan penggunaan; jenis dan menegemen tanah; pemilihan, pemuliaan, dan menejemen tanam pertanian; dan pemanenan. Disamping itu juga dipengaruhi oleh perubahan temperature dan curah hujan.

Tabel 2.62
Ketersediaan Pangan Utama (beras) dalam Ton

Uraian	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Ketersediaan Pangan Utama (beras) dalam Ton/Tahun	301,684	319,247	309,810	312,540	312,810

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2020

Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup seperti data pada tabel berikut.

Tabel 2.63
Angka Keterseccian Energi dan Protein

Uraian	Tahun				
	SATUAN	2016	2017	2018	2019
Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kkal/ kapita/hari	1.962,10	1.896,30	1.900,60	1.912,71
Angka Kecukupan Protein (AKP)	gram/kapita /hari	57	57,2	61,5	62
Ketersediaan energi	Kkal/ kapita/hari	5.003,30	5.345	5.540,64	3.611,84
Ketersediaan protein	gram/kapita/ hari	101,85	120,02	123,63	103,53

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malang, 2020

D. Pertanian

Penatagunaan tanah merupakan salah satu urusan yang penting untuk ditangani. Penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan, tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan dan meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang Urusan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2015-2017

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017
1	Terselesaikannya proses tukar menukar kawasan hutan	Lokasi	-	2	1
2	Tersedianya tanah untuk kepentingan pembangunan	Bidang	-	10	9
3	Meningkatnya pengelolaan aset tanah Pemerintah Kabupaten Malang	Bidang	-	76	30

Sumber : Dinas Pertanian, 2020

Sedangkan untuk tahun 2018 hingga 2019 capaian kinerja pembangunan pada Dinas Pertanian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut.

Tabel 2.65
Capaian Kinerja Pertanian Tahun 2018-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	%	0	0	0	35,91	48,67
2	Tanah Aset yang diinventarisir	Lokasi	0	0	0	8	17
3	Lokasi Kebutuhan Pengadaan Tanah yang Diinventarisir	Lokasi	0	0	0	4	6
4	Lokasi Tukar Menukar Tanah dan Kawasan Hutan yang di Proses	Lokasi	0	0	0	2	3

5	Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	Lokasi	0	0	0	4	4
6	Bidang Tanah Aset yang Disertipikatkan	Bidang	0	0	0	45	68
7	Tanah Obyek Landreform yang Teridentifikasi	Penangan an	0	0	0	8	7
8	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah dan Badan Hukum di Kabupaten Malang	Penangan an	0	0	0	4	4
9	Penanganan Permasalahan Tanah Pemerintah Daerah dan Desa di Kabupaten Malang	Penangan an	0	0	0	6	5

Sumber : Dinas Pertanahan, 2020

E. Lingkungan Hidup

Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dimaksud untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Lingkungan Hidup
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penegakan hukum lingkungan	%	-	100	100	100	100
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Poin	-	51	50	50	80
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	Poin	-	100	100	76,53	79,96
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Poin	-	46,83	76,91	81,6	81,64
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	-	64,03	68,61	70,6	80,65
Persentase Penanganan Sampah	%	-	88,47	97,39	97,99	97,94
Pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat melalui bank sampah	%	-	0,84	7,93	7,68	8,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

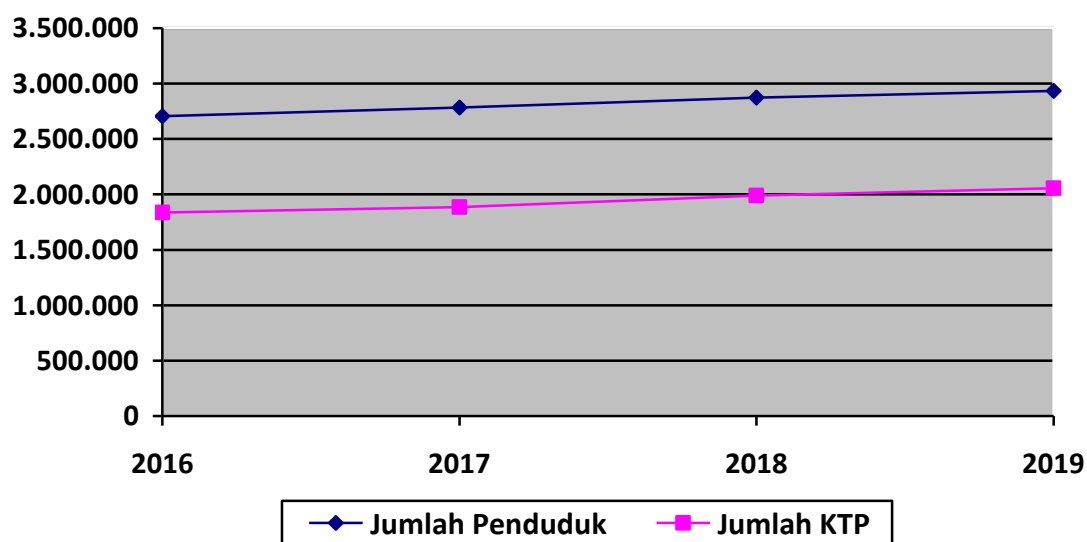
Pembahasan kondisi kependudukan akan berhubungan langsung dengan masyarakat/penduduk. Peran serta penduduk dalam pembangunan wilayah mempunyai ikatan yang cukup kuat sesuai dengan tempat tinggalnya. Karakteristik sosial yang dimaksud disini adalah karakter dari masing-masing penduduk.

Tabel 2.67
Administrasi Kependudukan
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk	Orang	-	2.705.395	2.782.740	2.874.204	2.935.138
2	Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Keping	1.746.451	1.836.048	1.886.384	1.990.729	2.056.626
3	Jumlah Kartu Keluarga (KK)	Lembar	720.922	771.672	810.913	857.801	893.535
4	Akta Kelahiran	Lembar	39.283	44.937	52.862	63.919	65.112
5	Akta Perkawinan	Lembar	472	469	435	452	508
6	Akta Kematian	Lembar	94	2.917	6.933	12.963	15.270
7	Surat Keterangan	Lembar	98	98	108	106	122
8	Kutipan II	Lembar	818	813	1.111	825	804

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Gambar 2.12
Struktur Kependudukan
Di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019



G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep besar yang memuat peran utama pemerintah dalam memberikan hasil guna bagi masyarakat. Pemberdayaan tidak diartikan dengan memberikan langsung apa yang secara instan dikehendaki oleh masyarakat. Lebih daripada itu, pemberdayaan adalah sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu “mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan” (sesuai Misi Kabupaten Malang) dan ”Mengembangkan kapasitas yang berorientasi pada penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator pembangunan serta mengembangkan secara sinergi dengan

kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Perguruan Tinggi dalam rangka fasilitasi atas pemberdayaan masyarakat miskin” (sesuai Arah Kebijakan Daerah).

(1) Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan LPM

Pembinaan LPM dilaksanakan melalui pelatihan LPMD. Jumlah LPMD/K di Kabupaten Malang sebanyak 390 LPMD/K.

2015	2016	2017	2018	2019
26 desa	26 desa	26 desa	26 desa	26 desa

(2) Rata-rata jumlah kelompok Binaan PKK

Kelompok Binaan PKK saat ini masing-masing kelompok PKK memiliki satu kelompok binaan. namun tidak menuntut kemungkinan nantinya satu kelompok PKK memiliki lebih dari satu kelompok binaan, sehingga apa bila pembagi pada rumus adalah jumlah PKK maka nilainya akan lebih dari 100%.

2015	2016	2017	2018	2019
424 klp	424 klp	424 klp	424 klp	424 klp

(3) Jumlah LSM

Untuk LSM, BPM Kab. Malang tidak pernah melakukan pendataan/ pembinaan terhadap LSM. yang dilakukan adalah kerja sama dengan LSM dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat.

(4) PKK Aktif

PKK aktif saat ini sudah 100% (sumber data TP PKK Kab. Malang).

2015	2016	2017	2018	2019
424	424	424	424	424

(5) Posyandu Aktif

Posyandu aktif saat ini sudah 100% dari 2.816 posyandu di Kabupaten Malang.

2015	2016	2017	2018	2019
2.816	2.816	2.816	2.816	2.816

(6) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk swadaya, indikator yang digunakan adalah prosentase peningkatan swadaya murni masyarakat yaitu dengan membandingkan swadaya tahun ini dikurangi swadaya tahun lalu dibagi swadaya tahun lalu dikalikan seratus persen.

2015	2016	2017	2018	2019
77.771.223.600	87.624.132.647	93.612.342.000	100.976.232.650	-

Untuk pasca program tidak dilakukan karena program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan hasilnya diserahkan ke desa lokasi pelaksanaan program.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu program pemerintah adalah menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).

Tabel 2.68
Pasangan Usia Subur di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PUS Risti yang terlayani KB	PUS	-	1.057	1.918	2.111	3.513
Jumlah PUS Risti	PUS	-	1.348	2.361	3.452	4.023
Jumlah PPKBD Mandiri	orang	-	109	151	153	211
Jumlah PPKBD	orang	-	390	390	390	390
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB yang ber KB	anggota	-	38.640	40.564	39.012	41.688
Jumlah PUS anggota Kelompok BKB	anggota	-	47.130	48.405	46.039	48.354
Jumlah Kelompok UPPKS Mandiri	kelompok	-	15	18	39	40
Jumlah Kelompok UPPKS	kelompok	-	114	99	109	145

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2020

Rasio akseptor KB dan Cakupan peserta KB Aktif terdapat kecenderungan mengalami peningkatan hingga tahun 2019 meskipun tidak signifikan menjadi sebesar 76,19% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan berkurangnya peserta KB Drop Out, peningkatan kesertaan ber KB MKJP, peningkatan kesertaan ber KB Pria, dan berkurangnya perkawinan usia muda (Usia < 20 tahun).

Tabel 2.69
Rasio akseptor KB
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah akseptor KB	Orang	380.011	413.508	393.379	384.628	385.575
Jumlah pasangan usia subur	Keluarga	502.245	542.369	519.379	508.649	506.088
Rasio akseptor KB	%	75,66	72,64	75,84	75,62	76,19

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2020

Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus berkembang, hal ini akan berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan inovasi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB), melalui Program CONTRA WAR (Contraceptive for women at Risk) merupakan program KB

yang ditujukan pada PUS beresiko tinggi, Program SKS (Surveilans Keluarga Sejahtera) merupakan kegiatan pendataan tahapan keluarga sejahtera, juga peningkatan kualitas KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) prgram KB di masyarakat, mengurangi besarnya tingkat DO dengan mendorong kesadaran ber KB MKJP, dan meningkatkan kesadaran bagi remaja tentang pendewasaan usia perkawinan.

Walaupun demikian, Badan KB terus berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan pengembangan kegiatan wirausaha melalui kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) dengan mengutamakan anggota dari keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I.

Tabel 2.70
Keluarga Para Sejahtera Dan Keluarga Sejahtera I
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah keluarga pra dan I	Org	576,706	576,706	576,706	576,749	577,285
Jumlah keluarga	Klga	723,338	723.378	723.378	723,381	726,546
Rasio keluarga pra dan I	%	79,73	79,72	79,72	79,73	79,46

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Malang, 2020

I. Perhubungan

Pemenuhan kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga Negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi dari waktu ke waktu selalu mengalami peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Seiring dengan peningkatan kebutuhan pelayanan transportasi ini, maka tidak sedikit timbul persoalan di dalam penyelenggaraannya.

Upaya mewujudkan kondisi yang aman dan tertib dibidang perhubungan dilakukan melalui program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan, peningkatan pelayanan angkutan, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor serta peningkatan dan pembangunan lalu lintas.

Tabel 2.71
Perkembangan Kendaraan Wajib Uji
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mobil Penumpang	Buah	843	246	205	491	89
2	Bus Umum	Buah	3.326	2.278	2.234	2.538	2.489
3	Bus Bukan Umum	Buah	590	464	487	576	596
4	Mobil Barang Umum	Buah	10.453	7.811	7.283	8.472	6.660
5	Mobil Barang Bukan	Buah	23.394	17.848	18.730	22.238	22.256
6	Kereta Gandengan	Buah	104	37	23	19	10
7	Kereta Gandengan Bukan Umum	Buah	92	7	4	3	2
8	Kereta Tempel Umum	Buah	47	61	67	76	73
9	Kereta Tempel Bukan	Buah	17	0	1	0	2
10	Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Tabel 2.72
Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Umum
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019	Ket
1	Jumlah Mobil Bus (AKDP Bus Sedang & Besar)	Unit	1.045	1.045	1.721	2.020	2.806	PO (Prsh. Otobus)
2	Jumlah Mobil AKDP (Bus Kecil)	Unit	1.688	1.688	3.157	2.130	1.702	Bukan PO
3	Jumlah Angkutan Pedesaan	Unit	829	827	404	394	268 s/d Okt	

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Tabel 2.73
Perkembangan Jumlah Perlengkapan Jalan
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rambu-Rambu	Buah	6.475	6.822	7.540	7.731	-
2	Warning Light	Buah	98	104	113	121	-
3	Traffic Light	Buah	10	10		11	-
5	Marka Jalan	M ²	39.983	41.537	45.457	46.830,22	47.002,18
7	Patok Pengaman Jalan	Buah	2.411	2.542	2.754	3.045	-
8	Paku Jalan (Road Stud)	Buah	955	955	1.505	2.417	2.716
9	Cermin Tikungan	Buah	6	8	10	20	-

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Tabel 2.74
Perkembangan Arus Penumpang Dan Barang Dari Bandara
Abdurachman Saleh di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penumpang						
	- Datang	Orang	381.876	425.932	577.692	661.430	401.047
	- Berangkat	Orang	387.465	432.608	595.303	671.465	412.226
2	Bagasi						
	- Datang	Kg	2.462.098	2.638.17	4.090.17	4.575.94	2.118.84
	- Berangkat	Kg	2.856.060	3.113.00	3.282.40	3.791.23	2.607.19

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

J. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang pada awalnya menggunakan alamat URL <http://www.kabmalang.go.id>. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/Kominfo/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah, pada awal tahun 2007 alamat situs web resmi Pemerintah Kabupaten Malang berubah menjadi <http://www.malangkab.go.id>.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah sesuai dengan Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/197/KEP/421.013/2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Malang Nomor 180/263/KEP/421.013/2009 Tentang Nama Domain Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Malang Dan Nama Sub Domain Situs Web Organisasi Perangkat Daerah Dan Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Tabel 2.75
Web site milik pemerintah daerah

No	Komponen	Ada/Tidak	2015	2016	2017	2018	2019
1	Website Milik Pemerintah Daerah	Ada	104	104	478	478	478

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2019

Capaian kinerja program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dapat dilihat dari perkembangan pemanfaatan website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sebagai sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti sampai dengan akhir tahun 2019 semua SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan sudah mempunyai website. Jumlah Pengunjung Website www.malangkab.go.id rata-rata 25.000 pengunjung per bulan.

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan UKM sudah terbukti bertahan terhadap gejolak eksternal. Kontribusinya bagi perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.76
Persentase Koperasi Aktif
di Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah koperasi aktif	BH	1.037	1.160	1.180	1.283	1.305
Jumlah seluruh koperasi	BH	1.130	1.253	1.273	1.293	1.316
Presentase koperasi aktif	%	91,77	92,58	92,68	99,22	99,16

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Tabel 2.77
Persentase Usaha Mikro Dan Kecil
di Kabupaten Malang Tahun 2015 - 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah usaha mikro dan kecil	Unit	415.435	417.599	419.734	421.973	424.184
Jumlah seluruh UKM	Unit	416.669	418.860	420.995	423.350	425.561
Presentase UKM	%	99,70	99,70	99,70	99,67	99,67

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2020

Kondisi perkoperasian di Kabupaten Malang dari tahun 2015 sampai 2019 secara umum menunjukkan peningkatan, baik di sisi kuantitas maupun kinerjanya. Di sisi kuantitas, menunjukkan jumlah koperasi aktif di Kabupaten Malang yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pula bahwa prosentase koperasi aktif terhadap total koperasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan pada usaha mikro dan kecil mengalami naik turun yang tidak begitu signifikan.

L. Penanaman modal

Secara umum jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Malang setiap tahunnya terus meningkat, dari tahun 2015 hingga 2019 jumlah investor PMA maupun PMDN di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.78
Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah PMA	unit	20	20	24	24	26
Jumlah PMDN	unit	20	20	7.521	8.992	9.052
Nilai Investasi PMA	Juta Rp.	-	1.433.171	2.092.086	2.092.086	2.485.096
Nilai Investasi PMDN	Juta Rp.	-	25.926.268	26.648.800	27.570.908	25.926.268

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

M. Kepemudaan dan Olah Raga

Kebutuhan sarana bagi generasi muda untuk dapat mengaktualisasikan diri secara positif merupakan salah satu kebutuhan yang perlu disediakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Malang. Perkembangan jumlah gelanggang/balai remaja (selain milik swasta) per satuan penduduk di Kabupaten Malang dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut ini:

(1) Jumlah Organisasi Pemuda

Jumlah Organisasi Pemuda Se-Kabupaten Malang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
48	47	48	50	51

(2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah Organisasi Olahraga Se-Kabupaten Malang dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
37	43	43	45	45

(3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
22	24	19	21	22

(4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

2015	2016	2017	2018	2019
3	3	4	5	5

(5) Gelanggang atau Balai Remaja

Jumlah gelanggang atau balai remaja di Kabupaten tahun 2015-2019 Malang adalah sebagai berikut:

SARANA DAN PRASARANA	2015	2016	2017	2018	2019
Gelanggang Olah Raga	104	264	284	327	337

(6) Lapangan Olahraga

Jumlah Lapangan Olahraga di Kabupaten Malang tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

SARANA DAN PRASARANA	2015	2016	2017	2018	2019
Lapangan Olah Raga	406	992	1.055	1.304	1.380

N. Statistik

Buku Kabupaten Malang Dalam Angka selama periode 2015-2019 selalu tersedia setiap tahunnya. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, serta industri. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Malang dan dapat digunakan, baik oleh pemerintah maupun swasta dan masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat dan acuan dalam perencanaan. Demikian juga ketersediaan Buku PDRB Kabupaten Malang selama periode 2015-2019 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang.

O. Persandian

Urusan Persandian di Kabupaten Malang adalah untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan peningkatan jumlah sistem informasi di Perangkat Daerah untuk meningkatkan pengelolaan manajemen dengan pemanfaatan teknologi.

P. Kebudayaan

Karakteristik budaya di Kabupaten Malang yang berkembang dipengaruhi oleh sistem kegiatan ekonomi dan budaya induk yang mempengaruhinya. Budaya induk yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Malang tersebut adalah sebagaimana perkembangan budaya-budaya suku bangsa yang dominan berkembang di wilayah Jawa Timur.

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pembangunan muncul di kalangan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Malang, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tabel 2.79
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	23	18	20	8	9

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020

Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami penurunan kuantitas penyelenggaraan maupun keikutsertaan pada event-event seni dan budaya dikarenakan kurang adanya dukungan anggaran yang cukup untuk melaksanakan maupun menghadiri kegiatan seni budaya di tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Tabel 2.80
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	18	18	18	19	19

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Malang terdiri dari open stage (panggung terbuka), pendopo, pelataran candi dan padepokan seni yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

Tabel 2.81
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	19	19	19	19	19

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2019

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Malang tercatat sejumlah 19 buah.

Q. Perpustakaan

Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun di Kabupaten Malang dibandingkan dengan jumlah orang yang harus dilayani masih relatif minim. Hingga saat ini, peran perpustakaan dirasa masih kurang dalam rangka menarik minat baca masyarakat agar mau membaca diperpustakaan. Selain itu, ketersediaan sarana prasarana yang kurang memadai dan letak perpustakaan yang masih relatif jauh dengan tempat tinggal masyarakat juga menjadi salah satu penyebab minimnya pengunjung perpustakaan. Di sisi lain, makin mudahnya akses internet juga menjadi salah satu penyebab makin minimnya pengunjung perpustakaan.

Tabel 2.82
Sarana Perpustakaan Daerah Tahun 2015–2019

URAIAN	TAHUN					
	2015	2016	2017	2018	2019	
Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama tahun	1	50.319 orang	28.247 orang	41.478 orang	44.067 orang	17.713 orang
Jumlah Koleksi Judul Buku		55.432 judul	27.449 judul	29.270 judul	31.313 judul	31.467 judul
Jumlah Jumlah perpustakaan desa / kelurahan		220	222	226	228	230

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2020

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

Tabel 2.83
Pertumbuhan Kunjungan Perpustakaan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015–2019

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
49,28%	40,00%	31,90 %	15,88 %	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2019

Pertumbuhan pengunjung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Malang mengalami mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Penurunan tersebut disebabkan karena Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Malang kurangnya pembinaan perpustakaan, promosi serta

penataan dan perbaikan sarana dan prasarana yang ada serta rendahnya upaya penyadaran minat baca masyarakat.

Tabel 2.84
Jumlah Tenaga Teknis Fungsional Pustakawan
Tahun 2015 – 2019

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
-	1 orang	1 orang	1 orang	1 orang

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2020

R. Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta menjamin keselamatan arsip itu sendiri. Perkembangan penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Malang pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

Tabel 2.85
Jumlah PD Yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku
di Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019

TAHUN				
2015	2016	2017	2018	2019
-	86	70	74	32

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang, 2020

III. Fokus Urusan Pilihan

A. Kelautan dan perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Malang terdiri dari produksi tangkap dan budidaya. Perikanan tangkap meliputi perikanan tangkap di laut dan perairan umum seperti bendungan/waduk, rawa dan sungai. Produksi perikanan budidaya meliputi produksi perairan tawar (kolam, minapadi, minamendong, jaring sekat/kolam jaring apung (KJA) dan payau (tambak).

1. Produksi Perikanan

Upaya peningkatkan produksi perikanan tangkap antara lain dilakukan dengan program stimulan untuk meningkatkan produksi yaitu pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal. Begitu pula dengan upaya peningkatan produksi

perikanan budidaya dilakukan dengan program stimulan peningkatan produksi antara lain bantuan sarana prasarana budidaya, kolam percontohan, bantuan induk dan benih, bantuan mesin pakan. Selain hal tersebut dilakukan pula bimbingan teknis di bidang perikanan tangkap dan budidaya kepada para nelayan dan pembudidaya.

Data produksi perikanan tahun 2015-2019 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.86
Tabel Produksi Perikanan Tahun 2015-2019

NO.	U R A I A N	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
A. Perikanan Tangkap							
1	Laut	Ton	11.318,93	7.009,52	13.394,62	16.071,03	14.434,36
2	Perairan Umum	Ton	408,69	395,33	438,90	455,38	395,33
B. Perikanan Budidaya							
1	Perikanan Tawar	Ton	20.476,92	18.205,26	15.083,21	15.822,07	12.305,46
2	Perikanan Payau	Ton	2.189,00	2.357,28	2.193,32	1.976,12	1.328,16

Sumber : Dinas Perikanan, 2020

2. Konsumsi Ikan

Meningkatnya konsumsi ikan merupakan salah satu sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Malang. Hasil perhitungan konsumsi ikan per kapita merupakan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi penduduk Kabupaten Malang per orang per tahun. Nilai konsumsi ikan mulai tahun 2014-2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.87
Tabel Konsumsi Ikan Tahun 2015-2019

NO.	U R A I A N	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Konsumsi Ikan	24,02	25,23	26,50	28,30	29,16

Sumber : Dinas Perikanan, 2020

Upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan terus dilakukan, antara lain melalui Program Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan antara lain melalui kegiatan sosialisasi tentang manfaat dan pentingnya mengkonsumsi ikan serta promosi mengkonsumsi ikan sebagai alternatif pangan yang sehat dan ekonomis melalui kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

(GEMARIKAN) dengan peserta murid sekolah TK, SD dan SMP di Kabupaten Malang. Selain itu dengan dibentuk pula organisasi Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Malang pada tahun 2011. Diharapkan, melalui organisasi ini, gerakan peningkatan konsumsi ikan ini mendapat dukungan dari berbagai sektor terkait, baik dari Pemerintah Daerah maupun pihak swasta yang bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Malang.

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Nelayan di wilayah Kabupaten Malang tersebar di 6 (enam) kecamatan pesisir yaitu kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Bantur, dan Donomulyo. Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk mengetahui jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan setiap tahunnya. Mulai tahun 2015 sampai 2019, jumlah kelompok yang menerima bantuan mengalami penurunan sebesar 12,5% dari 16 kelompok pada tahun 2016 menjadi 14 pada tahun 2017 dan tetap hingga tahun 2019. Penurunan dipengaruhi oleh menurunnya jumlah nelayan dan kegiatan pembinaan kelembagaan kepada para nelayan. Selain itu juga dipengaruhi ketersediaan anggaran untuk pengadaan sarana prasarana bagi kelompok nelayan tersebut. Adapun perkembangan kelompok nelayan yang menerima bantuan secara lebih jelas disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.88
Jumlah Kelompok Nelayan Yang Menerima Bantuan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Jumlah (Kelompok)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kelompok Nelayan	14	16	14	14	14

4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan merupakan produksi perikanan yang dihasilkan kelompok nelayan saja atau dari usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap di laut dilakukan oleh nelayan laut dan di perairan umum dilakukan oleh nelayan perairan umum. Data produksi perikanan kelompok nelayan tahun 2015-2019 secara rinci disajikan pada tabel dan gambar berikut ini:

Tabel 2.89
Tabel Produksi Perikanan Tahun 2015-2019

NO.	U R A I A N	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
A.	Perikanan Tangkap						
1	Laut	Ton	11.318,93	7.009,52	13.394,62	16.071,03	14.434,36
2	Perairan Umum	Ton	408,69	395,33	438,90	455,38	395,33

Sumber : Dinas Perikanan, 2019

Dari tabel dan gambar di atas diketahui bahwa produksi perikanan tangkap mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 selalu mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 14.434,36 ton untuk tangkapan laut dan 395,33 ton untuk tangkapan perairan. Produksi tangkap sangat tergantung pada musim dan cuaca yang terjadi sepanjang tahun, sehingga berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap dalam satu tahun. Salah satu dukungan pemerintah adalah adanya stimulan bagi kelompok nelayan berupa pemasangan rumpon, bantuan kapal penangkapan ikan, alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan dan sarana penanganan ikan di atas kapal.

B. Pariwisata

Sektor wisata merupakan salah satu industri yang ramah lingkungan dan berperan besar bagi pendapatan wilayah jika dapat dikelola secara baik. Kabupaten Malang memiliki obyek wisata yang beranekaragam dan tersebar di seluruh kecamatan, obyek wisata di Kabupaten Malang secara umum diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu jenis wisata alam seperti pantai, pegunungan, air terjun, wisata buatan seperti kawasan bermain dan perkebunan agropolitan buatan, selain itu ada pula jenis wisata sejarah seperti kawasan wisata candi Kidal dan Candi Jago. Terdapat obyek wisata khusus berupa wisata religius yaitu pesarean Gunung Kawi. Obyek wisata di Kabupaten Malang saat ini masih banyak yang belum tersentuh dan dikembangkan. Obyek wisata unggulan yang ada meliputi Sengkaling, Candi Badut, Puncak Dieng, Candi Singosari, Stupa Sumber Awan, kebun teh, Coban Glotak, Sumber air di Gunung Ronggo dan Wendit.

Kabupaten Malang merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata di Jawa Timur, khususnya wisatawan nusantara. Dalam setiap tahunnya jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Malang semakin bertambah, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.90
Perkembangan Wisatawan
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Wisatawan						
	- Nusantara	Orang	3.554.609	5.719.881	6.395.875	7.072.124	4.805.050
	-Mancanegara	Orang	99.873	129.663	108.485	100.234	45.909
2	Lama Tinggal						
	- Nusantara	Hari	2	1	2	2	2
	-Mancanegara	Hari	3	3	3	3	3

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020

Kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Malang mengalami peningkatan dari Tahun 2014 sampai dengan 2018 namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 dikarenakan kurang adanya pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) dan rendahnya dukungan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan berupa penyelenggaraan event-event yang dapat mendatangkan kunjungan maupun secara aktif mempromosikan Daerah Tujuan Wisata (DTW) melalui media cetak, media elektronik, website, pamflet, leaflet dan brosur serta keikutsertaan pada pameran-pameran pariwisata di tingkat propinsi, nasional dan internasional.

C. Pertanian

Potensi pertanian di wilayah Kabupaten Malang beraneka ragam dan tersebar di seluruh kecamatan. Komoditas pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan. Unggulan tanaman pangan padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Sedangkan unggulan perkebunan tebu, kopi, kakao dan kelapa. Untuk komoditi sayuran terdiri dari kentang, kubis, cabe, tomat dan bawang merah. Terdapat komoditas khas Kabupaten Malang yaitu: apel, jeruk, pisang, salak, ketela gunung kawi.

Berikut data produksi komoditas pertanian andalan Kabupaten Malang sebagai daerah agro yang merupakan andalan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

Tabel 2.91
Produksi Komoditas Andalan Pertanian
Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Padi	Ton	478.930	505.138	493.794	498.051	498.588
2	Palawija	Ton	-	556.420	568.511	574.232	533.994
3	Gabah Kering Giling (GKG)	ton	-	505.138	493.793	498.051	498.588
4	Daging	Ton	38.885,69	39.949,00	41.066,00	42.962,00	45.003,91
5	Susu	Ton	132.052,01	137.324,00	142.966,00	148.891,00	155.083,50
6	Telur	Ton	42.198,64	43.452,00	44.730,00	46.069,00	47.485,98

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2020

Kebijakan pemerintah terkait program nasional ketahanan pangan fokus terhadap peningkatan produksi dan produktivitas padi. Beberapa strategi yang telah dilaksanakan melalui beberapa aspek yaitu penyediaan sumber-sumber air, perbaikan pola tanam, serta peningkatan ketersediaan faktor-faktor produksi. Program kegiatan ini didukung oleh beberapa sumber dana anggaran APBN, APBD I dan APBD II. Selain itu pada awal tahun 2015 pemerintah bekerjasama dengan TNI berupaya meningkatkan produksi padi melalui UPSUS (Upaya Khusus) untuk komoditas PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) dengan meningkatkan luas areal tambah tanam.

Tabel 2.92
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Produktivitas padi	kw/ha	70,81	70,81	70,36	70,81	70,91

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2020

Tabel 2.93
Peningkatan Persentase Produksi Padi
di Kabupaten Malang Tahun 2014-2019

URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Presentase produktivitas	%	0,003	3,821	5,472	-2,246	0,884	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2020

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Malang menurun dikarenakan sektor pertanian masih berbasis onfarm (peningkatan produksi) belum berorientasi terhadap peningkatan nilai tambah melalui diversifikasi hasil pertanian dan perkebunan. Peningkatan nilai tambah ini mempengaruhi revenue ratio (RC ratio) petani yang

artinya biaya produksi yang petani keluarkan lebih kecil dibanding keuntungan yang didapat. Nilai revenue ratio (RC ratio) inilah yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP). Beberapa kendala yang dihadapi petani antara lain panjangnya mata rantai perdagangan sampai konsumen, sehingga pembagian margin keuntungan tidak berpihak pada petani. Pemerintah saat ini pula mulai mengembangkan program kegiatan yang bertujuan peningkatan multiplier effect di sektor pertanian yaitu agroekowisata. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi PDRB sektor pertanian dan pariwisata.

Tabel 2.94
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB ADHB
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB	%	17,96	17,50	16,86	15,62	15,05

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2019

Tabel 2.95
Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan) Terhadap PDRB
di Kabupaten Malang Tahun 2014-2019

URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sektor pertanian (tanaman pangan) terhadap PDRB	%	3,67	3,60	3,45	3,19	2,77

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2019

Tabel 2.96
Kontribusi sektor pertanian
(Tanaman Perkebunan) Terhadap PDRB
di Kabupaten Malang Tahun 2014-2019

URAIAN	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018
Kontribusi sektor pertanian (tanaman perkebunan) terhadap PDRB	%	2.09	2.01	1.92	1.76	1.71

Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2019

D. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dijabarkan sebagai perbandingan PDRB sektor Perdagangan terhadap PDRB. Sektor perdagangan cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor perdagangan merupakan penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi

mengingat sektor perdagangan sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor perdagangan, tingkat inflasi, adanya kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB ADHB
Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Milyar	13 647,00	15 265,00	16 782,67	18 643,10	19 932,80
PDRB Kabupaten	Milyar	73 841,93	81 784,43	88 979,17	96 851,52	103 760,08
Persentase Kontribusi	%	18,48	18,66	18,86	19,25	19,21

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Untuk Peningkatan peranan sektor perdagangan dalam perekonomian melalui penguatan perdagangan dalam dan luar negeri melalui peningkatkan persentase nilai ekspor bersih perdagangan sebagai salah satu indikasi peningkatan kegiatan sektor perdagangan.

Peningkatan nilai ekspor dan impor perdagangan dikarenakan adanya program dan kegiatan yang saling mendukung untuk mengembangkan dan peningkatan sektor perdagangan sehingga mampu mendorong meningkatnya nilai ekspor dan impor. Selain itu juga dikarenakan adanya berbagai aturan kepabeanan tentang ekspor impor yang seringkali disosialisasikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yang sering diikuti oleh para eksportir dan importir di wilayah Kabupaten Malang sehingga memberikan pemahaman dan memudahkan proses ekspor impor yang dilakukan. Selain itu, adanya berbagai kegiatan pameran produk-produk yang berpotensi ekspor sangat mendukung menggeliatnya sektor perdagangan.

Tabel 2.98
Realisasi Ekspor dan Import Perdagangan
Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Ekspor	US\$	358.333.867,32	377.153.816,14	388.442.850,00	402.625.370,63	481.039.000,32
Nilai Impor	US\$	87.048.205,43	93.323.638,27	94.392.903,97	97.649.065,79	49.018.951,04

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2020

Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Malang selalu menunjukkan peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.99
Retribusi Pelayanan Pasar
Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Retribusi Pelayanan Pasar	Juta Rp	-	5.832,60	6.048,06	6.858,41	4.530.284,61

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2020

E. Perindustrian

Sektor industri cukup memberikan kontribusi terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten Malang. Karena bagaimanapun sektor industri merupakan salah satu sektor penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Malang. Dimana dengan meningkatnya sektor industri secara tidak langsung akan meningkatkan sektor perdagangan serta daya beli masyarakat. Sedangkan untuk besarnya nilai kontribusi masih berfluktuasi mengingat sektor industri sangat dipengaruhi pada beberapa hal, diantaranya kebijakan pemerintah di sektor industri, tingkat inflasi, serta standar kualitas produk industri sehingga memiliki daya saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang diterapkan mulai tahun 2015. Kontribusi Sektor Industri di Kabupaten Malang terhadap PDRB ADHB seperti diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB ADHB
Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Pengolahan	Milyar	22 298,08	24 804,67	27 183,53	30 430,88	33 323,18
PDRB Kabupaten	Milyar	73 841,93	81 784,43	88 979,17	96 851,52	103 760,08
Persentase Kontribusi	%	6,44	6,08	5,66	7,35	7,56

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Pada tahun 2015, pertumbuhan industri sebesar 0,85%, jumlah industri bertambah menjadi 22.291 unit usaha pada tahun 2015. Pada tahun 2016, pertumbuhan industri sebesar 2,78%, jumlah industri bertambah menjadi 22.910 unit usaha pada tahun 2016. Pertumbuhan industri pada tahun 2017 sebesar 1,57% sehingga jumlah industri bertambah menjadi 23.270 unit usaha, sedangkan pada tahun 2018

jumlah industri bertambah menjadi 23.477 unit usaha dengan pertumbuhan industri sebesar 0,89%. Namun, jumlah industri pada tahun 2019 belum mengalami pertumbuhan sehingga jumlah industry tetap seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 23.477 unit usaha.

Tabel 2.101
Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Formal/Berijin						
	Industri Menengah	Unit	402	413	414	414	414
	Industri Kecil	Unit	1.407	1.447	1.491	1.491	1.491
	Jumlah Industri formal	Unit	1.809	1.860	1.905	1.905	1.905
2	Industri Informal / Rumah Tangga	Unit	20.452	21.050	21.365	21.572	21.572
	Jumlah Industri	Unit	22.291	22.910	23.270	23.477	23.477
3	Pertumbuhan Industri	%	0,85	2,78	1,57	0,89	0

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Peningkatan jumlah kelompok industri kecil non formal yang mendapatkan bantuan mesin/peralatan produksi yang ada merupakan bentuk konsistensi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam menumbuh kembangkan industri, baik industri non formal maupun industri formal.

Tabel 2.102
Jumlah Tenaga Kerja Formal dan Informal
Tahun 2015 – 2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Industri Formal	orang	-	108.756	109.068	109.521	109.641
2	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Informal/ Rumah Tangga	orang	-	56.795	57.910	58.987	60.292

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

F. Transmigrasi

Pelayanan bidang transmigrasi tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran. Jumlah penempatan transmigrasi menjadi indikator hasil kinerja urusan.

Tingkat kesepakatan dengan pemerintah daerah lokasi transmigrasi, selain lokasi sudah ditentukan oleh Pusat, namun tergantung juga pada kemampuan negosiasi pada saat penjajagan lokasi transmigrasi dilakukan, apabila terjadi kesepakatan antara pemerintah Kabupaten

Malang dan pemerintah daerah lokasi transmigrasi maka dilakukan penandatanganan MoU kesepakatan bersama. Penempatan transmigrasi setiap tahun terjadi peningkatan. Terkait dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan dan memperbanyak koordinasi dengan daerah penempatan transmigrasi.

IV. Fokus Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah meliputi fungsi Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan, Penelitian dan Pengembangan; serta Fungsi Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Perencanaan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan salah satu kinerja yang harus dilaksanakan. Selama tahun 2015-2019 pelaksanaan fungsi Perencanaan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.103
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dgn Perbub. tepat waktu	1	2	2	2	2
2	Kesesuaian Program RPJMD dengan Program RKPD (%)	90%	92%	95%	98%	100%

Sumber : Bappeda Kab Malang

B. Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan sistem pengelolaan dan pelaporan keuangan dan aset daerah, Masih terdapat sarana prasarana yang belum sesuai standar, Belum optimalnya pengelolaan aset, Belum optimalnyatingkat akuntabilitas pelaporan keuangan Instansi Pemerintah, Belum optimalnya pelaksanaan pendataan, pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah, Penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) masih belum optimal.

Tabel 2.104
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan

Uraian	CAPAIAN KINERJA				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat kemandirian keuangan daerah (Persentase Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah)	124,07%	118,29%	114,33%	109,38%	94,29%

Sumber : BKAD Kab Malang

C. Pengawasan

Capaian dalam Urusan Fungsi Penunjang Pengawasan cukup memuaskan. Dalam 6 (enam) tahun Kabupaten Malang mendapatkan 6 (enam) kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah. Tercapainya tingkat opini tertinggi yang diberikan oleh BPK tersebut menunjukkan efektifnya pelaksanaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 2.105
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Pengawasan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Inspektorat Kab Malang

D. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Kurang optimalnya kinerja aparatur terhadap pelayanan masyarakat, belum optimalnya penerapan sop pelayanan, belum meratanya persebaran pegawai di setiap perangkat daerah dari segi jumlah maupun kualitas, belum maksimalnya integrasi antara sistem informasi kepegawaian dengan data kompetensi pegawai, Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional, Disiplin aparatur masih perlu ditingkatkan, Kualitas mental dan pola pikir aparatur perlu ditingkatkan.

Tabel 2.106
Realisasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2014-2019

NO	DIKLAT	REALISASI (orang)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Diklat Penjurangan Struktural	558	658	237	54	376
	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	1	2	2	2	2
	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	-	-	7	11	36
	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	80	40	80	40	40
	Diklat Prajabatan Golongan I	32	-	-	-	-
	Diklat Prajabatan Golongan II	88	57	-	-	-
	Diklat Prajabatan Golongan III	357	85	-	1	-
	Diklat Prajabatan K2	-	474	148	-	11
	Pelatihan Dasar Golongan II	-	-	-	-	121
	Pelatihan Dasar Golongan III	-	-	-	-	166
2.	Diklat Teknis	413	200	83	173	70
3.	Diklat Fungsional	339	280	40	217	120

Sumber : BKPSDM Kab. Malang

E. Penelitian dan Pengembangan

Tujuan yang akan dicapai Pemerintah dalam fungsinya sebagai fungsi Penelitian dan Pengembangan yaitu untuk mencapai kualitas perencanaan berbasis penelitian dan pengembangan yang salah satu caranya melalui semakin berkembangnya jejaring /network dengan stakeholder lain yang terkait (pemerintah, swasta, akademisi). Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat beberapa kendala antara lain masih terdapatnya kesenjangan antara implementasi dan kebijakan dan belum optimalnya data/informasi dan hasil-hasil kajian penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah. Selama tahun 2014-2018 pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan menghasilkan kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.107
Realisasi Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

NO	Uraian	CAPAIAN KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penelitian yang dilaksanakan oleh Balitbang	8	11	12	12	15

Sumber : Balitbang Kab Malang

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

I. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah

Selain digunakan untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah dan parameter arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi, struktur ekonomi juga dipakai sebagai alat untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Gambaran atas pilar-pilar kemampuan dan potensi perekonomian daerah dapat diidentifikasi secara objektif melalui peran sektoral atau lapangan usaha dalam struktur perekonomian. Perbandingan produktifitas masing-masing lapangan usaha (yang dinyatakan dengan satuan persentase) dapat menggambarkan besaran kontribusi setiap lapangan usaha dalam membentuk kemampuan ekonomi daerah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi dominan dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah Kabupaten Malang secara berurutan ialah: (1) industri pengolahan; (2) Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; (3) Pertanian, kehutanan dan Perikanan; (4) Kontruksi; (5) Informasi dan Komunikasi; (6) Penyediaan akomodasi dan makan minum; (7) Jasa pendidikan; (8) Pertambangan dan Penggalian; (9) Jasa lainnya; (10) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (11) Jasa keuangan dan asuransi; (12) *Real estate*, (13) Transportasi dan pergudangan; (14) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (15) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (16) Jasa Perusahaan; dan (17) Pengadaan Listrik dan Gas.

Dilihat dari ketersediaan potensi di kawasan Malang Raya dan beberapa Kabupaten/Kota yang memiliki sektor andalan yang bersamaan dengan Kabupaten Malang sesungguhnya diperlukan kerja sama kawasan yang dapat mempercepat kemajuan daerah sekaligus menjadi kekuatan daya saing bersama. Berikut gambaran potensi beberapa Kabupaten/Kota yang potensinya serupa dengan Kabupaten Malang.

Tabel 2.108
Daerah Yang Potensi Andalannya Sama Dengan Kabupaten Malang

No	TANAMAN PANGAN	PERKEBUNAN	PETERNAKAN	PERIKANAN	PERTAMBANGAN
1	Kab. Malang	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Gresik	Kab. Tuban
2	Kab. Probolinggo	Kab. Blitar	Kab. Blitar	Kab. Lamongan	Kab. Gresik
3	Kab. Jember	Kab. Malang	Kab. Bangkalan	Kab. Sidoarjo	
4	Kab. Banyuwangi			Kab. Bondowoso	
5	Kab. Bojonegoro				
6	Kab. Blitar				
7	Kab. Lamongan				

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa posisi Kabupaten Malang cukup bersaing atau kompetitif untuk sektor tanaman pangan, peternakan, perkebunan. Namun demikian sektor yang potensinya besar yaitu perikanan dan pertambangan belum mampu bersaing dengan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.

Perekonomian Kabupaten Malang juga ditopang oleh sektor industri yang berorientasi ekspor. Berikut data realisasi ekspor Tahun 2019 per komoditas:

Tabel 2.109
Realisasi Ekspor Non Migas Menurut Komoditas
Tahun 2019

No	Komoditas	Volume (Kg)	Nilai (USD)
1	Kulit	102,532.00	10,170,199.60
2	Kerajinan Kayu	727.00	5,579.29
3	Kerajinan Aluminium	-	-
4	Mebel	708,191.92	8,059,532.55
5	Tekstil	7,635,674.17	5,775,790.18
6	Kopi	31,323,186.00	56,930,526.30
7	Kakao	-	-
8	Sepatu	1,527.80	28,002.72
9	Kertas Linier	544.00	131,648.00
10	Audio & TV Cabinet	-	-
11	Kampas Rem	14,572.00	36,726.50
12	Bantal Kursi Busa	-	-
13	Plaster Obat	25,981.28	131,343.93
14	Sayur	235,989.80	409,853.01
15	Kayu	55,374,882.77	10,060,119.63
16	Kertas Rokok	364,051.46	2,121,236.00
17	Cairan Obat	1,930,156.00	1,502,654.72
18	Botol Kemasan	484.00	36,104.54

19	Rokok	25,700,185.37	263,562,633.95
20	Udang	4,752,181.00	40,781,855.00
21	Cairan Infus	2,989,810.33	3,215,230.20
22	Floring	-	-
23	Cengkeh	2,227,800.00	13,979,169.00
24	Benang	-	-
25	Kerajinan Daun/Bunga Kering	-	-
26	Jelly Alga	11,691,787.34	14,564,932.21
27	Garden Furniture	-	-
28	Kayu Moulding	152.45	52,647.67
29	Rumput laut	4,345,750.00	5,490,370.65
30	Kosmetik	30,288.96	145,161.82
31	Alkohol	137,612,494.23	38,540,377.41
32	Susu	150,496.00	5,307,305.44
Total			481,039,000.32

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, komoditas ekspor non migas terbesar dari Kabupaten Malang adalah Alkohol. Disusul oleh komoditas kayu, kopi dan rokok. Salah satu komoditas terbesar adalah Kopi, produsen kopi di Kabupaten Malang berasal dari wilayah Kecamatan Dampit dan daerah sekitar seperti Tirtoyudo, Amplegading dan Sumbermanjing Wetan atau terkenal dengan sebutan kawasan AMSTIRDAM. Kopi asal Dampit telah memperoleh lisensi dari 4 C (The Common Code for The Coffee Community) Association yang berkedudukan di Jerman melalui PT Asal Jaya dengan nomor No L-2004 8-37-2-0317. Dengan demikian, Kopi Dampit telah memenuhi standart kualifikasi internasional dan layak untuk diekspor.

Sejalan dengan pertumbuhan jumlah dan nilai ekspor komoditas, perkembangan investasi juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Investasi yang mengalami pertumbuhan terdiri atas investasi negeri maupun investasi asing. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor pada situasi wilayah dan potensi Kabupaten Malang yang tergolong tinggi.

Tabel 2.110

Perkembangan Jumlah Dan Nilai Investasi PMDN/PMA
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Investasi	Buah					
	- PMDN	Buah	20	20	7.521	8.992	9.052
	- PMA	Buah	20	20	24	24	26
2	Nilai Investasi	Milyar					
	- PMDN	Milyar	5.204,25	5.556,48	25.926,26	26.648,80	27.570,90
	- PMA	Milyar	1.280,44	1.433,17	2.092,08	2.092,08	2.485,09

Sumber : Dinas Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

II. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan dan pertumbuhan kota pada dasarnya merupakan perwujudan tuntutan kebutuhan ruang yang diakibatkan oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kegiatan fungsionalnya, serta interaksi antarkegiatan tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan kota dapat berjalan dengan sendirinya tetapi pada suatu saat dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk diatasi yang bersifat keruangan, struktural, dan fungsional. Melihat kenyataan tersebut, sebaiknya sejak dini bila ada gejala pertumbuhan dan perkembangan kota, maka perlu sekali diarahkan melalui perencanaan untuk mencapai keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan potensi yang ada seefisien dan seefektif mungkin, agar tercipta hubungan yang serasi dan harmonis antara manusia dan lingkungannya.

A. Perhubungan

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kabupaten Malang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerataan pembangunan, mempermudah mobilitas penduduk dari suatu daerah menuju daerah yang lain dan keseimbangan antar daerah, utamanya di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan ditujukan untuk:

- (a) Meningkatkan daya dukung, kapasitas, dan kualitas jalan Kabupaten Malang;
- (b) Meningkatkan aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang di wilayah Kabupaten Malang.

Seiring dengan semakin meningkatnya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, pembangunan jalan yang terbagi atas jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 8.802,41 km terbagi atas jalan negara 115,63 km (1 persen), jalan provinsi 110,12 km (1 persen), jalan kabupaten 1.668,76 km (19 persen) dan jalan desa 6.907,90 km (79 persen) sehingga total 8.802,41 km. Berikut tabel rincian perkembangan prasarana jalan di Kabupaten Malang.

Tabel 2.111
Perkembangan Prasarana Jalan Tahun 2015 - 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jalan Negara	Km	115,63	115,63	115,63	115,63	115,63
Jalan Provinsi	Km	110,12	110,12	110,12	110,12	110,12
Jalan Kabupaten	Km	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76	1.668,76
Jalan Desa	Km	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90	6.907,90

Sumber : Dinas P.U. Bina Marga, 2020

Sarana dan prasarana strategis dalam rangka mendukung daya saing daerah, meliputi a) pengembangan Bandar Udara Abdulracman Saleh yang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berkembang sangat pesat dan kedepan perlu di tingkatkan kapasitasnya lebih besar lagi sehingga dapat menambah maskapai dan jumlah penerbangan sesuai dengan kebutuhan untuk melayani beberapa Kabupaten/Kota di bagian Selatan Tengah Jawa Timur; b) pembangunan jalan tol Malang-Kepanjen melanjutkan tol Pandaan-Malang, sehingga akan terhubung layanan tol antara Kota Surabaya dengan Malang Raya sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur; c) pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur dimana wilayah Kabupaten Malang merupakan titik tengah yang akan menghubungkan Malang-Jogjakarta (ke Barat) dan Malang-Denpasar melalui Banyuwangi (ke Timur), dengan demikian potensi yang selama ini belum tergali karena hambatan transportasi di Malang Selatan akan segera berkembang seperti potensi pertambangan perkebunan, dan perikanan laut, serta tidak kalah

pentingnya adalah obyek wisata pantai yang cukup banyak di Malang Selatan. Berikutnya sarana transportasi yang menjamin kelancaran arus orang dan barang dari sentra produksi ke pasar maupun ke obyek-obyek wisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.112
Perkembangan Sarana Transportasi di Kabupaten Malang
Tahun 2015 – 2019

NO	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Mobil Penumpang Umum	Buah	843	246	205	491	89
2	Bus Umum	Buah	3.326	2.278	2.234	2.538	2.489
3	Bus Bukan Umum	Buah	590	464	487	576	596
4	Mobil Barang Umum	Buah	10.453	7.811	7.283	8.472	6.660
5	Mobil Barang Bukan	Buah	23.394	17.848	18.730	22.238	22.256
6	Kereta Gandengan Umum	Buah	104	37	23	19	10
7	Kereta Gandengan Bukan	Buah	92	7	4	3	2
8	Kereta Tempel Umum	Buah	47	61	67	76	73
9	Kereta Tempel Bukan	Buah	17	0	1	0	2
10	Kendaraan Khusus Bukan Umum	Buah	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan, 2020

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa *trend* perkembangan sarana transportasi Kabupaten Malang dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan seiring bertambahnya kendaraan pribadi.

Tabel 2.113
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Malang Tahun 2015 – 2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Panjang jalan	Km	1894,51	1894,51	1668,72	1668,72	1668,72
Jumlah Kendaraan	Unit	719.144	719.144	969.031	1.156.480	-
Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	%	0.25	0.25	0.22	0.22	-

Sumber : Dinas Perhubungan, 2019

B. Penataan Ruang

Kabupaten Malang memiliki Luas Wilayah 353.486 Ha atau 3.534,86 Km² dengan Luas Daratan 2.977,05 Ha yang selebihnya adalah Lautan, sedangkan struktur penggunaan tanah terdiri dari:

1. Permukiman / Kawasan Terbangun : 80.555,86 Ha (22.89 %)
2. Industri : 753,47 Ha (0.21 %)
3. Sawah
 - Irigasi : 36.058,49 Ha (10.25 %)
 - Non Irigasi : 10.020,79 Ha (2.85 %)
4. Pertanian Tanah Kering : 83.402,92 Ha (23.70 %)
5. Perkebunan
 - Perkebunan Rakyat : 875,99 Ha (0.24 %)

- Perkebunan Besar	: 21.014,96	Ha	(5.97 %)
6. Hutan			
- Sejenis	: 17.406,93	Ha	(4.95 %)
- Belukar	: 10.198,62	Ha	(2.90 %)
- Lebat	: 73.458,06	Ha	(20.90 %)
7. Rawa / Danau Waduk	: 718,69	Ha	(0.20 %)
8. Tambak / Kolam	: 121,43	Ha	(0.03 %)
9. Padang Rumput / Tanah Kosong	: 1.042,59	Ha	(0.30 %)
10. Tanah Tandus / Tanah Rusak	: 5.431,77	Ha	(1.55 %)
11. Tambang Galian C	: 905,20	Ha	(0.26 %)
12. Lain - lain	: 9.906,8613	Ha	(2.82 %)

Sumber : BPN Kabupaten Malang

Berdasarkan Pola Ruang Wilayah, Kabupaten Malang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung

- (a) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, melalui penetapan kawasan hutan dan pengamanan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS);
- (b) kawasan perlindungan setempat, melalui perbaikan mangrove dan kawasan pesisir di Malang Selatan;
- (c) kawasan suaka alam dan pelestarian alam, melalui perlindungan kawasan cagar budaya dan reboisasi kawasan yang rusak;
- (d) kawasan bencana alam, melalui peningkatan kegiatan untuk penanggulangan bencana alam; dan
- (e) kawasan lindung lainnya, melalui pengembalian rona alam yang mengalami kerusakan pada kawasan-kawasan konservasi.

2. Kawasan Budidaya

- (a) Kawasan hutan produksi, melalui penetapan hutan produksi di Kabupaten Malang yang mencapai 30,5 %.
- (b) Kawasan pertanian, melalui :
 - (1) Penetapan pertanian pangan berkelanjutan (sawah beririgasi teknis);
 - (2) pengembangan lumbung desa modern;
 - (3) pengembangan holtikultura unggulan;
 - (4) pengembangan sentra peternakan; dan
 - (5) pengembangan perikanan tangkap, dan minapolitan;
- (c) Kawasan industri, melalui pengembangan industri menengah dan *home industry*.
- (d) Kawasan pariwisata, melalui:
 - (1) Pengembangan zona wisata; dan

(2) pengembangan wisata unggulan di Kabupaten Malang, yaitu : Wisata Air Wendit di Malang Timur, Wisata Ritual Gunung Kawi, Pantai Balekambang dan Pantai Nglileyep di Malang Selatan, serta Waduk Selorejo dan Wanawisata Cobanrondo.

(e) Kawasan permukiman, melalui penyediaan rumah yang layak huni di Kabupaten Malang (pengembangan Kasiba-Lisiba).

C. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan ketersediaan energi listrik sebagai pendukung penting pembangunan dan perekonomian sebagai berikut:

Tabel 2.114
Perkembangan Kelistrikan Tahun 2015 – 2019

Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelanggan Listrik	Pelanggan	599 511	626 207	633 654	680 264	729 202
Distribusi JTR	Kms	5.782	5.782	5.782	5.782	5.782
Distribusi GRD	unit	4.574	4.574	4.574	4.574	4.574
Gardu Induk	unit	10	10	10	10	10

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

III. Fokus Iklim Berinvestasi

Jumlah investasi di Kabupaten Malang semakin bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2014 nilai investasi PMA sebesar 1.160,43 milyar sedangkan untuk PMDN sebesar 5.185,83 milyar, selanjutnya meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2019 nilai investasi PMA sebesar 2.113,77 milyar sedangkan untuk PMDN mengalami penurunan sebesar 182,58 milyar.

Tabel 2.115
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Investasi PMDN	Nilai Milyar	5.204,25	5.556,48	25.926,26	26.648,80	27.570,90
Jumlah Investasi PMA	Nilai Milyar	1.280,44	1.433,17	2.092,08	2.092,08	2.485,09

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Tabel 2.116
Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN (milyar rupiah)
di Kabupaten Malang Tahun 2015-2019

URAIAN			SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PMA	realisasi	investasi	%	10,34	12,00	45,98	0	1,04
Nilai PMDN	realisasi	investasi	%	0,36	6,77	366,58	1,36	0,65

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2020

Sumber Daya Manusia

A. Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2014-2019 cukup berfluktuasi. Tahun 2015 rasio lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang mengalami penurunan, ada korelasi dengan penurunan jumlah penduduk. Kemudian untuk rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu terdapat 295,28 artinya dari 10.000 penduduk di Kabupaten Malang terdapat 295 penduduk yang lulus S1/S2/S3.

Tabel 2.117
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Malang Periode 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Diploma IV/ Strata 1	63.526	69.485	73.381	78.156	81.735
2	Strata 2	5.061	5.51	5.787	6.081	6.35
3	Strata 3	470	587	587	631	654
Jumlah lulusan S1/S2/S3		81.965	85.305	69.057	79.755	84.868

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

B. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Rasio ketergantungan Kabupaten Malang tahun 2018 relatif meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017. Jika tahun 2017 rasio ketergantungan hanya sebesar 40,64%, maka tahun 2018 meningkat menjadi 41,36%. Sampai dengan tahun 2019, rasio ketergantungan ini cenderung

mengalami peningkatan, menjadi 42,21%. Dengan kata lain, setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kabupaten Malang mempunyai tanggungan sebanyak 42 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.118
Rasio Ketergantungan di Kabupaten Malang Periode 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	612.419	616.258	544.299	562.092	573.131
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	198.557	199.965	259.839	278.89	298.173
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	810.976	816.223	804.138	840.982	871.304
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	1.733.399	1.748.452	1.978.602	2.033.222	2.063.834
5	Rasio ketergantungan (3)/(4) (%)	46.78	46.68	40.64	41.36	42.21

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 dan realisasi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 disajikan dalam Tabel 2.119 sebagai berikut:

Tabel 2.119

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2019 DAN REALISASI RPJMD

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					8.162.714.267.947,00		1.872.581.650.692,66		2.209.775.521.587,40		2.003.685.415.188,17	99,87	90,67		3.876.267.065.880,83	33,54	47,49
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.745.732.797.585,00		1.233.761.369.801,66		1.603.351.592.502,03		1.462.253.624.387,13				2.696.014.994.188,79		
	1.101	PENDIDIKAN			1.134.721.060.300,00		203.773.934.492,00		315.322.051.793,85		293.639.542.144,51				497.413.476.636,51		
	1.101.02	DINAS PENDIDIKAN			1.134.721.060.300,00		203.773.934.492,00		315.322.051.793,85		293.639.542.144,51				497.413.476.636,51		
1	1.101.02.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13.253.092.000,00	100%	4.654.385.000,00	100%	5.087.863.800,00	93,68 %	4.766.445.864,00	93,68	93,68	93,68 %	9.420.830.864,00	93,68	71,08
2	1.101.02.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.788.948.000,00	100%	969.121.000,00	100%	4.694.730.000,00	100%	4.526.195.700,00	100	96,41	100%	5.495.316.700,00	100	145,04
3	1.101.02.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	452.000.000,00	100%	128.000.000,00	100%	108.000.000,00	100%	108.000.000,00	100	100	100%	236.000.000,00	100	52,21
4	1.101.02.04	PROGRAM PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN	Meningkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	93%	11.484.400.000,00	92,4 %	2.645.175.000,00	92,4 %	2.074.800.000,00	91,83 %	2.061.951.750,00	99,38	99,38	91,83 %	4.707.126.750,00	98,74	40,99
5	1.101.02.05	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki	95%	7.803.258.000,00	92%	1.808.067.340,00	92%	1.698.765.799,46	92%	1.698.197.799,00	100	99,97	92%	3.506.265.139,00	96,84	44,93

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			komite sekolah yang berfungsi dengan baik														
6	1.101.02.06	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	85%	157.019.400,00	83.35 %	2.040.152.260,00	83.35 %	3.602.614.000,00	83.35 %	3.250.072.635,00	100	90,21	83.35 %	5.290.224.895,00	98,06	3,37
7	1.101.02.07	PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	27 Indikator	97.796.125.392,00	18 Indikator	22.408.240.160,00	18 Indikator	63.557.756.750,00	18 Indikator	63.140.182.720,00	100	99,34	18 Indikator	85.548.422.880,00	66,67	87,48
8	1.101.02.08	PROGRAM PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang	27 Indikator	100.409.436.908,00	18 Indikator	19.280.209.632,00	18 Indikator	39.006.010.125,00	18 Indikator	38.588.535.677,00	100	98,93	18 Indikator	57.868.745.309,00	66,67	57,63
9	1.101.02.09	PROGRAM PELAKSANAAN BOS SATUAN PENDIDIKAN NEGERI	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	100%	742.714.400,00	100%	149.840.584,100,00	100%	195.491.511,319,39	100%	175.499.959,999,51	100	89,77	100%	325.340.544,099,51	100	43,8
	1.102	KESEHATAN			1.619.860.177.798,00		403.848.101.904,66		597.166.530.243,14		522.823.330.944,46				926.671.432.849,12		
	1.102.03	DINAS KESEHATAN			689.786.098.391,00		113.211.569.280,07		329.396.065.305,60		275.761.020.960,20				388.972.590.240,27		
10	1.102.03.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13.742.508.168,00	100%	4.817.377.166,00	100%	3.633.396.440,00	99,53 %	3.505.177.178,00	99,53	96,47	99,53 %	8.322.554.344,00	99,53	60,56
11	1.102.03.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13.605.077.541,00	100%	3.402.915.850,00	100%	3.189.704.889,00	99,77 %	2.767.806.400,00	99,77	86,77	99,77 %	6.170.722.250,00	99,77	45,36
12	1.102.03.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.978.429.500,00	100%	596.053.050,00	100%	974.962.500,00	100%	962.712.500,00	100	98,74	100%	1.558.765.550,00	100	78,79

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
13	1.102 .03.0 4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	5.406.268.717,00	100%	1.281.973.550,00	100%	134.407.500,00	100%	131.232.500,00	100	97,64	100%	1.413.206.050,00	100	26,14
14	1.102 .03.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	Persentase Puskesmas yang menerima biaya operasional dan kinerja BLUD	100%	45.016.175.594,00	100%	0	100%	34.080.335.237,00	100%	32.498.503.115,42	100	95,36	100%	32.498.503.115,42	100	72,19
15	1.102 .03.0 6	PROGRAM PENUNJANG OPERASIONAL DAN KINERJA UPT / UPTD	Persentase UPT / UPTD menerima biaya jasa sarana dan operasional	100%	145.182.786.818,00	100%	49.274.644.485,39	100%	74.931.511.598,92	100%	69.216.074.305,60	100	92,37	100%	118.490.718.790,99	100	81,61
16	1.102 .03.0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KESEHATAN	Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan	100%	10.343.144.999,00	100%	2.049.029.700,00	100%	1.129.987.270,96	100%	1.119.583.019,00	100	99,08	100%	3.168.612.719,00	100	30,63
17	1.102 .03.0 8	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	100%	261.123.563.505,00	100%	22.513.397.612,68	100%	63.473.088.628,81	100%	60.857.269.142,56	100	95,88	100%	83.370.666.755,24	100	31,93
18	1.102 .03.0 9	PROGRAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Puskesmas lulus akreditasi	326%	43.719.265.208,00	100%	4.937.993.186,00	100%	60.946.735.870,13	100%	23.227.136.018,00	100	38,11	200%	28.165.129.204,00	61,35	64,42
19	1.102 .03.1 0	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase rata-rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak : (Pelayanan kesehatan ibu hamil, Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan	100%	18.738.173.525,00	100%	6.400.128.480,00	100%	4.633.000.000,00	100%	3.053.582.790,00	100	65,91	100%	9.453.711.270,00	100	50,45

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
			kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)														
20	1.102.03.11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	90%	8.732.658.557,00	90%	787.150.200,00	90%	7.023.801.500,00	90%	6.032.174.080,00	100	85,88	90%	6.819.324.280,00	100	78,09
			Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak menular sesuai kasus masing - masing : (Cakupan Pelayanan	100%		100%		100%		99.73 %		99,73		99.73 %		99,73	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
			kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)														
21	1.102 .03.1 2	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin	100%	65.316.209.975,00	100%	17.150.906.000,00	100%	16.319.464.595,00	100%	15.725.887.368,62	100	96,36	100%	32.876.793.368,62	100	50,33
22	1.102 .03.1 3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN	Persentase cakupan Lokasi ODF	80%	56.881.836.284,00	70%	0	70%	58.925.669.275,78	70%	56.663.882.543,00	100	96,16	70%	56.663.882.543,00	87,5	99,62
			Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)	14%		14%		14%		14%		100		14%		100	
			Persentase program yang difasilitasi media promosinya	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas	100%		60%		60%		60%		100		60%		60	
	1.102 .36	RSUD KANJURUHAN			570.686.933.623,00		180.049.937.134,30		193.154.401.924,54		175.575.502.010,68				355.625.439.144,98		
23	1.102 .36.0 1	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS	100%	465.725.000.000,00	100%	168.295.680.699,30	100%	147.781.637.851,54	100%	131.619.161.618,68	100	89,06	100%	299.914.842.317,98	100	64,4
24	1.102 .36.0 2	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	100%	56.688.466.505,00	100%	11.754.256.435,00	100%	12.550.000.000,00	100%	12.500.000.000,00	100	99,6	100%	24.254.256.435,00	100	42,79

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
25	1.102.36.03	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	100%	48.273.467.118,00	90%	0	90%	32.822.764.073,00	90%	31.456.340.392,00	100	95,84	90%	31.456.340.392,00	90	65,16
	1.102.37	RSUD LAWANG			359.387.145.784,00			110.586.595.490,29	74.616.063.013,00		71.486.807.973,58				182.073.403.463,87		
26	1.102.37.01	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%	228.983.832.810,00	100%	78.699.927.839,99	100%	44.212.939.217,00	100.83 %	45.072.668.974,01	100,83	101,94	100.83 %	123.772.596.814,00	100,83	54,05
27	1.102.37.02	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RS JIWA/RS PARU-PARU/RS MATA	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan.	100%	69.864.784.229,00	100%	8.217.790.971,30	100%	18.250.698.796,00	87.45 %	15.960.763.904,00	87,45	87,45	87.45 %	24.178.554.875,30	87,45	34,61
28	1.102.37.03	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase sarana prasarana dan peralatan kesehatan rumah sakit	100%	60.538.528.745,00	100%	23.668.876.679,00	100%	12.152.425.000,00	86.02 %	10.453.375.095,57	86,02	86,02	86.02 %	34.122.251.774,57	86,02	56,36
	1.103.04	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			2.391.833.413.706,00		525.413.604.005,00	602.465.731.212,04	561.167.958.912,00						1.086.581.562.917,00		
	1.103.04	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA			1.934.906.706.840,00		424.320.026.049,00	497.950.834.183,04	461.290.741.245,00						885.610.767.294,00		
29	1.103.04.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.240.331.300,00	100%	3.108.825.299,00	100%	4.922.332.000,00	100%	4.542.850.712,00	100	92,29	100%	7.651.676.011,00	100	82,81
30	1.103.04.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13.910.534.800,00	100%	4.687.660.000,00	100%	2.860.250.000,00	100%	2.738.823.046,00	100	95,75	100%	7.426.483.046,00	100	53,39
31	1.103.04.03	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	1.433.771.900,00	100%	592.784.000,00	100%	229.025.000,00	100%	224.749.789,00	100	98,13	100%	817.533.789,00	100	57,02

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		3	DISIPLIN APARATUR														
32	1.103 .04.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapabilitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	675.635.900,00	100%	111.060.000,00	100%	50.000.000,00	100%	47.810.000,00	100	95,62	100%	158.870.000,00	100	23,51
33	1.103 .04.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	540.541.200,00	100%	156.821.000,00	100%	222.050.000,00	100%	194.610.000,00	100	87,64	100%	351.431.000,00	100	65,01
34	1.103 .04.0 6	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN	Persentase Jembatan yang dibangun/ diganti	100%	773.224.029.90 0,00	66.68 %	77.871.160.700, 00	66.68 %	210.666.122.60 0,00	66.68 %	190.015.263.33 5,00	100	90,2	66.68 %	267.886.424.03 5,00	66,68	34,65
			Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan	100%		66.68 %		66.68 %		66.68 %		100		66.68 %		66,68	
			Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	100%		66.68 %		66.68 %		66.68 %		100		66.68 %		66,68	
35	1.103 .04.0 7	PROGRAM PEMELIHARAAN	Persentase Panjang Jalan yang dipelihara	100%	763.176.751.14 0,00	66.68 %	178.025.482.90 0,00	66.68 %	193.969.604.38 2,04	66.68 %	180.922.693.79 5,00	100	93,27	66.68 %	358.948.176.69 5,00	66,68	47,03
			Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara	8%		2%		2%		2%		100		4%		50	
			Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%)	24%		6%		6%		6%		100		12%		50	
			Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	20%		5%		5%		5%		100		10%		50	
36	1.103 .04.0 8	PROGRAM BINA TEKNIK	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis	100%	4.900.103.300,0 0	100%	555.300.150,00	100%	4.011.880.400,0 0	100%	3.891.220.510,0 0	100	96,99	100%	4.446.520.660,0 0	100	90,74
			Persentase Studi/Review	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			Kebnamargaan														
			Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan	100%		66.68 %		66.68 %		66.68 %		100		66.68 %		66,68	
37	1.103.04.09	PROGRAM FASILITAS JALAN	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	100%	315.085.007.400,00	66.68 %	138.455.065.000,00	66.68 %	71.827.497.000,00	66.68 %	69.680.153.058,00	100	97,01	66.68 %	208.135.218.058,00	66,68	66,06
			Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun	100%		66.68 %		66.68 %		66.68 %		100		66.68 %		66,68	
			Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam	100%		66.68 %		66.68 %		66.68 %		100		66.68 %		66,68	
38	1.103.04.10	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	100%	52.720.000.000,00	100%	20.755.867.000,00	100%	9.192.072.801,00	100%	9.032.567.000,00	100	98,26	100%	29.788.434.000,00	100	56,5
	1.103.05	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR			301.129.480.107,00		71.602.438.502,00		42.430.114.689,00		39.290.490.894,00				110.892.929.396,00		
39	1.103.05.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.434.476.196,00	20%	3.006.364.325,00	20%	2.123.575.100,00	17.2 %	1.941.495.232,00	86	91,43	17.2 %	4.947.859.557,00	17,2	52,44
40	1.103.05.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	6.570.846.133,00	20%	1.708.207.908,00	20%	1.169.802.500,00	19.44 %	1.141.990.418,00	97,2	97,62	19.44 %	2.850.198.326,00	19,44	43,38
41	1.103.05.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	404.085.000,00	20%	222.156.000,00	20%	70.500.000,00	19.8 %	69.795.000,00	99	99	19.8 %	291.951.000,00	19,8	72,25
42	1.103	PROGRAM	Persentase	100%	478.581.250,00	20%	82.500.000,00	20%	43.350.000,00	19.9 %	43.177.000,00	99,5	99,6	19.9 %	125.677.000,00	19,9	26,26

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.05.0 4	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)														
43	1.103 .05.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	79.467.240,00	20%	27.374.000,00	20%	8.801.000,00	20%	8.801.000,00	100	100	20%	36.175.000,00	20	45,52
44	1.103 .05.0 6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	100%	13.333.329.000,00	25%	1.760.035.766,00	25%	3.283.560.000,00	25%	3.263.956.675,00	100	99,4	50%	5.023.992.441,00	50	37,68
45	1.103 .05.0 7	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEN DALIAN DAN PEMANFAATAN SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	100%	24.204.469.561,00	25%	2.432.075.600,00	25%	1.991.486.000,00	22,25 %	1.980.355.660,00	89	99,44	47,25 %	4.412.431.260,00	47,25	18,23
46	1.103 .05.0 8	PROGRAM OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENYEDIAAN AIR IRIGASI	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	100%	57.474.085.244,00	25%	11.166.444.800,00	25%	9.153.318.341,76	23,66 %	8.964.661.900,00	94,64	97,94	48,66 %	20.131.106.700,00	48,66	35,03
47	1.103 .05.0 9	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI SERTA PENANGGULANGAN DARURAT AKIBAT BENCANA	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	100%	187.623.101.983,00	25%	50.968.344.103,00	25%	24.180.721.747,24	22,46 %	21.471.404.209,00	89,84	88,8	47,46 %	72.439.748.312,00	47,46	38,61
48	1.103 .05.1 0	PROGRAM UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	100%	1.527.038.500,00	25%	228.936.000,00	25%	405.000.000,00	25%	404.853.800,00	100	99,96	50%	633.789.800,00	50	41,5
	1.103	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN			155.797.226.7		29.491.139.45		62.084.782.34		60.586.726.77				90.077.866.22		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.06	PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA			59,00		4,00		0,00		3,00				7,00		
49	1.103 .06.0 1	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang dikelola	1%	23.513.722.569,00	0.95 %	5.028.898.000,00	0.95 %	6.301.667.940,00	0.83 %	6.099.702.353,00	87,37	96,8	0.83 %	11.128.600.353,00	83	47,33
50	1.103 .06.0 2	PROGRAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal	100%	1.500.000.000,00	0%	0	100%	518.894.400,00	100%	498.463.700,00	100	96,06	100%	498.463.700,00	100	33,23
51	1.103 .06.0 3	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	79.99 %	130.783.504.190,00	76.86 %	24.462.241.454,00	76.86 %	55.264.220.000,00	73.36 %	53.988.560.720,00	95,45	97,69	73.36 %	78.450.802.174,00	91,71	59,99
			Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	37%		34%		34%		31.46 %		92,53		31.46 %		85,03	
	1.104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			532.512.555.453,00		82.865.576.789,00		66.481.027.353,00		63.280.906.240,00				146.146.483.029,00		
	1.104	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA			532.512.555.453,00		82.865.576.789,00		66.481.027.353,00		63.280.906.240,00				146.146.483.029,00		
52	1.104 .06.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	28.528.991.685,00	100%	7.885.280.434,00	100%	5.640.660.600,00	100%	5.169.699.238,00	100	91,65	100%	13.054.979.672,00	100	45,76
53	1.104 .06.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	16.191.978.984,00	100%	6.529.221.492,00	100%	1.335.025.960,00	100%	1.167.039.494,00	100	87,42	100%	7.696.260.986,00	100	47,53
54	1.104 .06.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	565.980.000,00	100%	0	100%	112.500.000,00	100%	112.000.000,00	100	99,56	100%	112.000.000,00	100	19,79
55	1.104 .06.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di	100%	685.231.000,00	100%	496.490.403,00	100%	500.000.000,00	100%	311.342.100,00	100	62,27	100%	807.832.503,00	100	117,89

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAYA APARATUR	Perangkat Daerah (%)														
56	1.104.06.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	2.055.234.340,00	100%	680.793.000,00	100%	678.094.000,00	100%	405.570.000,00	100	59,81	100%	1.086.363.000,00	100	52,86
57	1.104.06.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan rumah layak huni	97.7 %	99.055.079.809,00	97.62 %	7.812.453.560,00	97.62 %	10.111.051.800,00	98.06 %	9.484.624.158,00	100,45	93,8	98.06 %	17.297.077.718,00	100,37	17,46
			Persentase penurunan backlog rumah	0.91 %		1.02 %		1.02 %		1.2 %		82,35		1.2 %		68,13	
58	1.104.06.07	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%	16.000.000.000,00	68%		68%	3.100.000.000,00	68%	3.051.240.000,00	100	98,43	68%	3.051.240.000,00	97,14	19,07
			Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota	80%		78%		78%		78%		100		78%		97,5	
59	1.104.06.08	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	83%	369.430.059.635,00	81%	59.461.337.900,00	81%	45.003.694.993,00	78.82 %	43.579.391.250,00	97,31	96,84	78.82 %	103.040.729.150,00	94,96	27,89
			Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81.77 %		78.5 %		78.5 %		77.53 %		98,76		77.53 %		94,81	
			Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%		68%		68%		68%		100		68%		97,14	
			Persentase penyediaan Jalan Lingkungan	80%		78%		78%		78%		100		78%		97,5	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
			Permukiman skala kawasan dan skala kota														
	1.105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			31.290.776.490,00		8.481.177.059,00		11.580.121.500,00		11.297.997.544,16				19.779.174.603,16		
	1.105.35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			31.290.776.490,00		8.481.177.059,00		11.580.121.500,00		11.297.997.544,16				19.779.174.603,16		
60	1.105.35.01	PROGRAM PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	100%	1.450.107.100,00	40%	663.527.100,00	20%	592.082.045,72	20%	587.989.045,72	100	99,31	60%	1.251.516.145,72	60	86,31
61	1.105.35.02	PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100%	5.201.511.000,00	20%	2.721.399.200,00	20%	1.099.324.554,28	20%	1.043.085.700,00	100	94,88	40%	3.764.484.900,00	40	72,37
62	1.105.35.03	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan	15%	5.466.135.700,00	3%	783.824.700,00	3%	2.363.680.100,00	3%	2.357.220.000,00	100	99,73	6%	3.141.044.700,00	40	57,46
63	1.105.35.04	PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN	Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	100%	2.105.661.826,00	20%	436.068.185,00	20%	1.120.261.826,00	20%	1.110.755.826,00	100	99,15	40%	1.546.824.011,00	40	73,46
64	1.105.35.05	PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai	100%	2.000.000.000,00	40%	500.000.000,00	20%	500.000.000,00	20%	487.560.000,00	100	97,51	60%	987.560.000,00	60	49,38

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
			Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran														
65	1.105 .35.0 6	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10.519.845.414,00	20%	2.861.428.274,00	20%	3.626.184.474,00	20%	3.546.755.572,44	100	97,81	20%	6.408.183.846,44	20	60,92
66	1.105 .35.0 7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.492.833.250,00	20%	324.901.400,00	20%	1.826.751.500,00	20%	1.799.932.700,00	100	98,53	20%	2.124.834.100,00	20	60,83
67	1.105 .35.0 8	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	461.260.000,00	20%	167.404.000,00	20%	72.360.000,00	20%	72.321.700,00	100	99,95	20%	239.725.700,00	20	51,97
68	1.105 .35.0 9	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	513.000.000,00	20%	0	20%	370.000.000,00	10%	282.900.000,00	50	76,46	10%	282.900.000,00	10	55,15
69	1.105 .35.1 0	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	80.422.200,00	20%	22.624.200,00	20%	9.477.000,00	20%	9.477.000,00	100	100	20%	32.101.200,00	20	39,92
	1.106	SOSIAL			35.514.813.838,00		9.378.975.552,00		10.336.130.400,00		10.043.888.602,00				19.422.864.154,00		
	1.106 .14	DINAS SOSIAL			35.514.813.838,00		9.378.975.552,00		10.336.130.400,00		10.043.888.602,00				19.422.864.154,00		
70	1.106 .14.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.272.633.638,00	100%	1.830.937.402,00	100%	1.359.908.578,00	100%	1.258.858.455,00	100	92,57	100%	3.089.795.857,00	100	58,6
71	1.106 .14.0	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Pemenuhan Sarana	100%	2.770.307.000,00	100%	1.031.201.300,00	100%	627.816.050,00	100%	601.172.300,00	100	95,76	100%	1.632.373.600,00	100	58,92

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	2	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)														
72	1.106.14.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	98.625.000,00	100%	36.750.000,00	100%	27.000.000,00	100%	27.000.000,00	100	100	100%	63.750.000,00	100	64,64
73	1.106.14.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	78.087.500,00	100%	27.800.000,00	100%	10.800.000,00	100%	10.800.000,00	100	100	100%	38.600.000,00	100	49,43
74	1.106.14.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	356.376.000,00	100%	112.689.000,00	100%	27.965.100,00	100%	27.245.100,00	100	97,43	100%	139.934.100,00	100	39,27
75	1.106.14.06	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.	80%	8.139.666.500,00	20%	1.865.010.150,00	20%	2.366.038.550,00	20%	2.349.801.270,00	100	99,31	40%	4.214.811.420,00	50	51,78
76	1.106.14.07	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	80%	8.218.978.000,00	20%	1.971.816.500,00	20%	1.953.907.300,00	20%	1.939.000.979,00	100	99,24	40%	3.910.817.479,00	50	47,58

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
77	1.106 .14.0 8	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.	80%	5.335.514.000,00	20%	1.169.088.500,00	20%	2.263.839.872,00	20%	2.134.211.948,00	100	94,27	40%	3.303.300.448,00	50	61,91
78	1.106 .14.0 9	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial keparahlanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial	80%	5.244.626.200,00	20%	1.333.682.700,00	20%	1.698.854.950,00	20%	1.695.798.550,00	100	99,82	40%	3.029.481.250,00	50	57,76
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			773.281.888.342,00		151.586.715.909,00		183.540.880.436,30		175.329.711.249,59				326.916.427.158,59		
	2.201	TENAGA KERJA			19.860.069.775,00		4.830.784.050,00		6.509.856.093,00		5.900.306.674,00				10.731.090.724,00		
	2.201 .15	DINAS TENAGA KERJA			19.860.069.775,00		4.830.784.050,00		6.509.856.093,00		5.900.306.674,00				10.731.090.724,00		
79	2.201 .15.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.471.004.546,00	100%	2.521.326.200,00	100%	2.077.132.293,00	100%	1.881.677.574,00	100	90,59	100%	4.403.003.774,00	100	80,48
80	2.201 .15.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	302.467.782,00	100%	145.851.000,00	100%	71.089.400,00	86,36 %	67.511.400,00	86,36	94,97	86,36 %	213.362.400,00	86,36	70,54

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		APARATUR	(%)														
81	2.201.15.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	18.042.217,00	100%	3.000.000,00	100%	2.000.000,00	100%	2.000.000,00	100	100	100%	5.000.000,00	100	27,71
82	2.201.15.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	97.223.830,00	100%	51.485.800,00	100%	64.060.000,00	100%	62.413.000,00	100	97,43	100%	113.898.800,00	100	117,15
83	2.201.15.05	PROGRAM PERLUASAN DAN PENEMPATAN KERJA	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%	1.313.982.300,00	100%	397.085.800,00	100%	444.187.500,00	100%	417.414.300,00	100	93,97	100%	814.500.100,00	100	61,99
84	2.201.15.06	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%	3.667.130.500,00	100%	0	100%	488.699.400,00	100%	444.105.700,00	100	90,88	100%	444.105.700,00	100	12,11
85	2.201.15.07	PROGRAM PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN SYARAT KERJA	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%	5.599.361.600,00	100%	1.375.826.750,00	100%	862.687.500,00	100%	573.195.700,00	100	66,44	100%	1.949.022.450,00	100	34,81
86	2.201.15.08	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	3.390.857.000,00	100%	336.208.500,00	100%	2.500.000.000,00	100%	2.451.989.000,00	100	98,08	100%	2.788.197.500,00	100	82,23
	2.202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			21.944.582.478,00		2.748.647.536,00		2.551.083.600,00		2.462.342.376,00				5.210.989.912,00		
	2.202.12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			21.944.582.478,00		2.748.647.536,00		2.551.083.600,00		2.462.342.376,00				5.210.989.912,00		
87	2.202	PROGRAM	Persentase	100%	4.726.868.163,0	100%	1.316.157.250,0	100%	916.751.100,00	97,99 %	898.346.207,00	97,99	97,99	97,99 %	2.214.503.457,0	97,99	46,85

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	.12.0 1	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		0		0								0		
88	2.202 .12.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.767.904.000,00	100%	507.891.000,00	100%	249.804.500,00	96.12 %	240.105.500,00	96,12	96,12	96.12 %	747.996.500,00	96,12	42,31
89	2.202 .12.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	194.100.000,00	100%	34.100.001,00	100%	33.000.000,00	93.94 %	31.000.000,00	93,94	93,94	93.94 %	65.100.001,00	93,94	33,54
90	2.202 .12.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	221.590.800,00	100%	14.700.000,00	100%	110.954.000,00	100%	110.953.479,00	100	100	100%	125.653.479,00	100	56,71
91	2.202 .12.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	420.254.908,00	100%	30.151.101,00	100%	30.674.000,00	99.64 %	30.565.090,00	99,64	99,64	99.64 %	60.716.191,00	99,64	14,45
92	2.202 .12.0 6	PROGRAM KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KELUARGA	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga	100%	3.487.610.148,00	80%	145.000.002,00	80%	300.000.000,00	100%	300.000.000,00	125	100	100%	445.000.002,00	100	12,76
93	2.202 .12.0 7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	Persentase capaian pelaksanaan PUG	100%	4.129.141.159,00	80%	378.348.178,00	80%	209.900.000,00	96.25 %	202.020.000,00	120,31	96,25	96.25 %	580.368.178,00	96,25	14,06
94	2.202 .12.0 8	PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak	100%	3.400.737.400,00	80%	178.650.002,00	80%	283.000.000,00	98.21 %	277.930.000,00	122,76	98,21	98.21 %	456.580.002,00	98,21	13,43
95	2.202 .12.0 9	PROGRAM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan	100%	3.596.375.900,00	80%	143.650.002,00	80%	417.000.000,00	89.07 %	371.422.100,00	111,34	89,07	89.07 %	515.072.102,00	89,07	14,32

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	2.203	PANGAN			14.463.723.640,00		3.455.786.534,00		2.971.429.600,00		2.789.671.248,00				6.245.457.782,00		
	2.203.20	DINAS KETAHANAN PANGAN			14.463.723.640,00		3.455.786.534,00		2.971.429.600,00		2.789.671.248,00				6.245.457.782,00		
96	2.203.20.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.318.227.655,00	100%	1.079.601.700,00	100%	637.151.600,00	100%	618.876.290,00	100	97,13	100%	1.698.477.990,00	100	51,19
97	2.203.20.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	595.421.795,00	100%	193.732.000,00	100%	120.257.000,00	100%	119.285.458,00	100	99,19	100%	313.017.458,00	100	52,57
98	2.203.20.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	850.963.970,00	100%	227.055.000,00	100%	190.921.000,00	100%	180.406.900,00	100	94,49	100%	407.461.900,00	100	47,88
99	2.203.20.04	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN PENANGANAN RAWAN PANGAN	Persentase penduduk rawan pangan	10.05 %	1.963.143.000,00	10.8 %	311.660.000,00	10.55 %	423.000.000,00	7.56 %	304.300.000,00	128,34	71,94	7.56 %	615.960.000,00	124,78	31,38
100	2.203.20.05	PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	0.034 %	1.538.027.400,00	0.03 %	380.941.634,00	0.02 %	331.400.000,00	0.02 %	330.347.000,00	100	99,68	0.02 %	711.288.634,00	58,82	46,25
101	2.203.20.06	PROGRAM KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	88,80%	3.920.948.850,00	88.4 %	792.930.200,00	88.6 %	796.530.000,00	88.6 %	792.339.600,00	100	99,47	88.6 %	1.585.269.800,00	100,68	40,43
102	2.203.20.07	PROGRAM KEAMANAN PANGAN	Persentase Keamanan Pangan Segar	68%	1.870.439.370,00	62%	382.266.000,00	64%	384.570.000,00	64%	384.516.000,00	100	99,99	64%	766.782.000,00	94,12	40,99
103	2.203.20.0	PROGRAM PENINGKATAN	Cakupan laporan program dan kegiatan	100%	406.551.600,00	100%	87.600.000,00	100%	87.600.000,00	100%	59.600.000,00	100	68,04	100%	147.200.000,00	100	36,21

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	8	KETAHANAN PANGAN	peningkatan ketahanan pangan														
	2.204	PERTANAHAN			107.327.752.732,00		18.845.961.084,00		35.279.172.500,00		34.667.315.155,00				53.513.276.239,00		
	2.204.07	DINAS PERTANAHAN			107.327.752.732,00		18.845.961.084,00		35.279.172.500,00		34.667.315.155,00				53.513.276.239,00		
104	2.204.07.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2.938.133.317,00	100%	926.996.845,00	100%	1.381.297.900,00	97.23 %	1.343.021.383,00	97,23	97,23	97.23 %	2.270.018.228,00	97,23	77,26
105	2.204.07.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.358.995.985,00	100%	712.363.900,00	100%	881.895.000,00	87.95 %	775.647.135,00	87,95	87,95	87.95 %	1.488.011.035,00	87,95	109,49
106	2.204.07.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	149.806.000,00	100%	87.938.000,00	100%	38.950.000,00	100%	37.494.500,00	100	96,26	100%	125.432.500,00	100	83,73
107	2.204.07.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	113.219.000,00	100%	3.000.000,00	100%	24.420.000,00	66.67 %	11.250.000,00	66,67	46,07	66.67 %	14.250.000,00	66,67	12,59
108	2.204.07.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	172.773.200,00	100%	52.925.000,00	100%	38.403.000,00	86.96 %	33.395.000,00	86,96	86,96	86.96 %	86.320.000,00	86,96	49,96
109	2.204.07.06	PROGRAM INVENTARISASI DAN PENGADAAN TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN MALANG	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan	80%	99.183.037.030,00	50%	16.284.701.589,00	50%	32.111.943.600,00	48.67 %	31.694.608.429,00	97,34	98,7	48.67 %	47.979.310.018,00	60,84	48,37
110	2.204.07.07	PROGRAM PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	80%	3.411.788.200,00	60%	778.035.750,00	60%	802.263.000,00	60%	771.898.708,00	100	96,22	60%	1.549.934.458,00	75	45,43

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	2.205	LINGKUNGAN HIDUP			143.969.388.217,00		21.190.567.212,00		27.981.491.274,00		26.949.491.888,00				48.140.059.100,00		
	2.205.10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			143.969.388.217,00		21.190.567.212,00		27.981.491.274,00		26.949.491.888,00				48.140.059.100,00		
111	2.205.10.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.587.266.117,00	100%	1.708.094.735,00	100%	5.096.788.900,00	100%	4.689.473.121,00	100	92,01	100%	6.397.567.856,00	100	114,5
112	2.205.10.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.227.793.900,00	100%	367.258.500,00	100%	747.960.300,00	100%	725.313.025,00	100	96,97	100%	1.092.571.525,00	100	49,04
113	2.205.10.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	458.808.000,00	100%	99.308.000,00	100%	56.250.000,00	100%	56.062.500,00	100	99,67	100%	155.370.500,00	100	33,86
114	2.205.10.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	181.000.000,00	100%	54.400.000,00	100%	18.437.000,00	100%	18.437.000,00	100	100	100%	72.837.000,00	100	40,24
115	2.205.10.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	812.138.000,00	100%	290.033.000,00	100%	146.388.350,00	100%	145.758.450,00	100	99,57	100%	435.791.450,00	100	53,66
116	2.205.10.06	PROGRAM PENGENDALIAN pencemaran dan PERUSAKAN LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	86%	14.734.378.000,00	84%	974.351.000,00	84%	1.588.295.147,00	84%	1.580.566.899,00	100	99,51	84%	2.554.917.899,00	97,67	17,34
117	2.205.10.07	PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN, PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	12%	20.196.378.000,00	3%	3.132.464.418,00	3%	2.122.304.000,00	4,98 %	2.113.234.923,00	166	99,57	7,98 %	5.245.699.341,00	66,5	25,97

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
			Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	93%		91%		91%		93.85 %		103,13		93.85 %		100,91	
			Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	40%		10%		10%		29.41 %		294,1		39.41 %		98,53	
118	2.205 .10.0 8	PROGRAM PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	80%	10.430.000.000,00	78%	1.938.842.317,00	78%	1.661.036.950,00	78.18 %	1.652.199.146,00	100,23	99,47	78.18 %	3.591.041.463,00	97,73	34,43
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
119	2.205 .10.0 9	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN PENANGANAN LIMBAH B3	Persentase Layanan Persampahan	75%	69.927.989.200,00	60%	10.398.772.309,00	60%	11.305.642.315,00	53.98 %	10.776.081.302,00	89,97	95,32	53.98 %	21.174.853.611,00	71,97	30,28
			Persentase pengurangan sampah	24%		20%		20%		2.61 %		13,05		2.61 %		10,88	
			Persentase kegiatan/usaha yang	74%		39%		39%		35.4 %		90,77		35.4 %		47,84	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			memiliki ijin TPS B3														
120	2.205.10.10	PROGRAM PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	100%	10.717.019.000,00	100%	2.227.042.933,00	100%	3.391.770.312,00	100%	3.353.174.934,00	100	98,86	100%	5.580.217.867,00	100	52,07
121	2.205.10.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	33%	8.696.618.000,00	31%	0	31%	1.846.618.000,00	31%	1.839.190.588,00	100	99,6	31%	1.839.190.588,00	93,94	21,15
	2.206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII			63.920.860.406,00		15.124.125.540,00		17.291.171.550,00		16.544.699.262,00				31.668.824.802,00		
	2.206.11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPII			63.920.860.406,00		15.124.125.540,00		17.291.171.550,00		16.544.699.262,00				31.668.824.802,00		
122	2.206.11.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	11.607.173.730,00	100%	4.051.945.350,00	100%	3.484.699.500,00	99,46 %	3.440.796.688,00	99,46	98,74	99,46 %	7.492.742.038,00	99,46	64,55
123	2.206.11.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	19.118.980.300,00	100%	4.218.074.040,00	100%	5.777.740.100,00	95,56 %	5.564.756.000,00	95,56	96,31	95,56 %	9.782.830.040,00	95,56	51,17
124	2.206.11.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	124.902.500,00	100%	24.150.000,00	100%	54.800.000,00	60%	31.592.400,00	60	57,65	60%	55.742.400,00	60	44,63
125	2.206.11.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	405.120.650,00	100%	152.807.750,00	100%	75.786.000,00	100%	75.786.000,00	100	100	100%	228.593.750,00	100	56,43
126	2.206	PROGRAM PENATAAN	Persentase Kelancaran	100%	19.592.157.900,00	100%	3.867.697.700,00	100%	4.705.626.400,00	128,3 %	4.428.248.349,00	128,3	94,11	128,3 %	8.295.946.049,00	128,3	42,34

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.11.0 5	ADMINISTRASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN	Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)		00		0		0		0				0		
127	2.206 .11.0 6	PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	700.696.700,00	100%	259.668.250,00	100%	114.654.000,00	101.6 %	112.435.000,00	101,6	98,06	101.6 %	372.103.250,00	101,6	53,1
128	2.206 .11.0 7	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	100%	3.397.806.626,00	100%	605.984.050,00	100%	1.021.387.950,00	135.8 %	844.501.325,00	135,8	82,68	135.8 %	1.450.485.375,00	135,8	42,69
129	2.206 .11.0 8	PROGRAM PENGELOLAAN DATA INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%	6.086.213.200,00	100%	1.273.356.100,00	100%	1.272.408.000,00	122.9 %	1.265.758.900,00	122,9	99,48	122.9 %	2.539.115.000,00	122,9	41,72
130	2.206 .11.0 9	PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	100%	2.887.808.800,00	100%	670.442.300,00	100%	784.069.600,00	100%	780.824.600,00	100	99,59	100%	1.451.266.900,00	100	50,25
	2.207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			23.742.599.437,00		8.088.481.071,00		7.162.171.800,00		6.674.853.853,00				14.763.334.924,00		
	2.207	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			23.742.599.437,00		8.088.481.071,00		7.162.171.800,00		6.674.853.853,00				14.763.334.924,00		
131	2.207 .21.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.398.107.131,00	100%	2.103.304.125,00	100%	1.343.585.800,00	100%	1.318.298.212,00	100	98,12	100%	3.421.602.337,00	100	53,48
132	2.207 .21.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.736.856.006,00	100%	750.555.100,00	100%	159.910.000,00	100%	158.445.900,00	100	99,08	100%	909.001.000,00	100	52,34
133	2.207	PROGRAM	Persentase Penunjang	100%	241.948.000,00	100%	66.697.000,00	100%	52.947.000,00	100%	52.947.000,00	100	100	100%	119.644.000,00	100	49,45

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.21.0 3	PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Kerja Aparatur (%)														
134	2.207 .21.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	13.275.000,00	100%	6.000.000,00	100%	2.500.000,00	100%	2.500.000,00	100	100	100%	8.500.000,00	100	64,03
135	2.207 .21.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	592.136.500,00	100%	233.578.250,00	100%	111.726.000,00	100%	111.726.000,00	100	100	100%	345.304.250,00	100	58,31
136	2.207 .21.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%	3.017.587.300,00	100%	736.252.500,00	100%	564.000.000,00	100%	562.635.000,00	100	99,76	100%	1.298.887.500,00	100	43,04
137	2.207 .21.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	100%	2.846.635.000,00	54,67 %	1.042.082.000,00	100%	760.000.000,00	100%	758.149.000,00	100	99,76	100%	1.800.231.000,00	100	63,24
138	2.207 .21.0 8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%	5.567.780.500,00	100%	2.002.258.048,00	100%	3.110.941.000,00	100%	2.655.555.741,00	100	85,36	100%	4.657.813.789,00	100	83,66
139	2.207 .21.0 9	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DESA	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	100%	3.328.274.000,00	62,5 %	1.147.754.048,00	100%	1.056.562.000,00	100%	1.054.597.000,00	100	99,81	100%	2.202.351.048,00	100	66,17
	2.208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			61.876.186.075,00		13.806.880.780,00		16.569.392.958,04		15.583.585.559,60				29.390.466.339,60		
	2.208	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			61.876.186.07		13.806.880.78		16.569.392.95		15.583.585.55				29.390.466.33		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.13	KELUARGA BERENCANA			5,00		0,00		8,04		9,60				9,60		
140	2.208 .13.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.431.490.050,00	100%	1.446.250.143,00	100%	1.328.354.404,58	95.82 %	1.272.779.203,00	95,82	95,82	95.82 %	2.719.029.346,00	95,82	61,36
141	2.208 .13.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	4.883.435.025,00	100%	748.750.842,00	100%	2.039.394.645,00	93.69 %	1.910.773.583,60	93,69	93,69	93.69 %	2.659.524.425,60	93,69	54,46
142	2.208 .13.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	103.114.000,00	100%	41.239.000,00	100%	12.500.000,00	100%	10.752.500,00	100	86,02	100%	51.991.500,00	100	50,42
143	2.208 .13.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	72.970.000,00	100%	9.660.000,00	100%	11.640.000,00	10.33 %	1.200.000,00	10,33	10,31	10.33 %	10.860.000,00	10,33	14,88
144	2.208 .13.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	121.306.750,00	100%	71.356.750,00	100%	21.547.500,00	100%	21.547.500,00	100	100	100%	92.904.250,00	100	76,59
145	2.208 .13.0 6	PROGRAM DATA/INFORMASI PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%	8.502.123.600,00	100%	1.609.859.135,00	100%	2.804.527.000,00	100%	2.637.792.213,00	100	94,05	100%	4.247.651.348,00	100	49,96
146	2.208 .13.0 7	PROGRAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Peserta KB MKJP	40.00 %	4.549.931.400,00	38.2 %	881.181.400,00	38.2 %	1.501.715.608,46	32.16 %	1.329.704.950,00	84,19	88,55	32.16 %	2.210.886.350,00	80,4	48,59
			Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	100%		80%		80%		92.45 %		115,56		92.45 %		92,45	
147	2.208 .13.0	PROGRAM KETAHANAN	Persentase BKR Paripurna	62.26 %	10.509.359.000,00	53.46 %	3.052.349.200,00	53.46 %	2.282.851.500,00	53.46 %	2.210.902.210,00	100	96,85	53.46 %	5.263.251.410,00	85,87	50,08

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	8	KELUARGA, GENERASI BERENCANA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA															
			Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88.15 %		87.1 %		87.1 %		86.21 %		98,98		86.21 %		97,8	
			Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47.47 %		45.45 %		45.45 %		27.59 %		60,7		27.59 %		58,12	
148	2.208.13.09	PROGRAM PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN KELUARGA BERENCANA	Persentase PPKBD Mandiri	69.49 %	28.702.456.250,00	54.1 %	5.946.234.310,00	54.1 %	6.566.862.300,00	54.1 %	6.188.133.400,00	100	94,23	54.1 %	12.134.367.710,00	77,85	42,28
	2.209	PERHUBUNGAN			89.180.902.000,00		19.092.795.951,00		12.030.485.600,00		11.648.501.682,00				30.741.297.633,00		
	2.209.08	DINAS PERHUBUNGAN			89.180.902.000,00		19.092.795.951,00		12.030.485.600,00		11.648.501.682,00				30.741.297.633,00		
149	2.209.08.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	26.080.727.000,00	100%	8.563.305.600,00	100%	4.941.584.000,00	100%	4.771.296.731,00	100	96,55	100%	13.334.602.331,00	100	51,13
150	2.209.08.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	5.286.255.000,00	100%	917.804.420,00	100%	1.834.982.000,00	100%	1.684.648.801,00	100	91,81	100%	2.602.453.221,00	100	49,23
151	2.209.08.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	562.120.000,00	100%	163.206.500,00	100%	82.650.000,00	100%	80.883.000,00	100	97,86	100%	244.089.500,00	100	43,42
152	2.209.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	788.130.000,00	100%	126.905.000,00	100%	112.000.000,00	100%	110.467.350,00	100	98,63	100%	237.372.350,00	100	30,12

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
153	2.209 .08.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	1.030.820.000,0 0	100%	184.070.000,00	100%	125.730.000,00	100%	124.791.000,00	100	99,25	100%	308.861.000,00	100	29,96
154	2.209 .08.0 6	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN TRANSPORTASI	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia	100%	4.467.550.000,0 0	100%	260.584.000,00	100%	742.922.000,00	100%	711.731.500,00	100	95,8	100%	972.315.500,00	100	21,76
155	2.209 .08.0 7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang	100%	23.883.200.000,0 00	100%	3.093.239.731,0 0	100%	937.922.300,00	100%	930.338.000,00	100	99,19	100%	4.023.577.731,0 0	100	16,85
156	2.209 .08.0 8	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN.	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%	2.145.000.000,0 0	100%	323.845.000,00	100%	250.000.000,00	100%	244.466.000,00	100	97,79	100%	568.311.000,00	100	26,49
157	2.209 .08.0 9	PROGRAM TERMINAL DAN PERPARKIRAN	Persentase jaringan prasarana angkutan jalan	100%	6.227.100.000,0 0	100%	1.024.590.000,0 0	100%	300.000.000,00	100%	291.827.000,00	100	97,28	100%	1.316.417.000,0 0	100	21,14
158	2.209 .08.1 0	PROGRAM PELAYANAN UPT PERHUBUNGAN	Persentase pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten Malang	100%	18.710.000.000,0 00	100%	4.435.245.700,0 0	100%	2.702.695.300,0 0	100%	2.698.052.300,0 0	100	99,83	100%	7.133.298.000,0 0	100	38,13
	2.210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			48.403.238.52 4,00		18.677.449.14 2,00		16.147.259.98 1,24		15.570.631.41 5,00				34.248.080.55 7,00		
	2.210 .09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			48.403.238.52 4,00		18.677.449.14 2,00		16.147.259.98 1,24		15.570.631.41 5,00				34.248.080.55 7,00		
159	2.210 .09.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	8.984.720.175,0 0	100%	2.693.603.668,0 0	100%	1.988.221.096,0 0	108%	1.963.951.532,0 0	108	98,78	108%	4.657.555.200,0 0	108	51,84
160	2.210	PROGRAM	Persentase	100%	6.037.961.799,0	100%	1.354.817.370,0	100%	1.837.578.595,0	100%	1.781.633.545,0	100	96,96	100%	3.136.450.915,0	100	51,95

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.09.0 2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		0		0		0		0				0		
161	2.210 .09.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	261.882.000,00	100%	78.545.000,00	100%	91.945.000,00	100%	55.445.000,00	100	60,3	100%	133.990.000,00	100	51,16
162	2.210 .09.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	183.514.550,00	100%	61.785.000,00	100%	21.885.000,00	100%	18.410.000,00	100	84,12	100%	80.195.000,00	100	43,7
163	2.210 .09.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	41.786.000,00	100%	18.460.000,00	100%	58.867.371,00	100%	58.804.950,00	100	99,89	100%	77.264.950,00	100	184,91
164	2.210 .09.0 6	PROGRAM LAYANAN PERSANDIAN, PENGEMBANGAN, PENINGKATAN SDM DI BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%	11.706.135.000,00	100%	9.189.063.001,00	100%	987.237.500,00	100%	940.912.999,00	100	95,31	100%	10.129.976.000,00	100	86,54
165	2.210 .09.0 7	PROGRAM PEMBERDAYAAN, PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	100%	2.015.850.000,00	100%	453.237.450,00	100%	4.078.938.000,00	100%	3.683.242.377,00	100	90,3	100%	4.136.479.827,00	100	205,2
166	2.210 .09.0 8	PROGRAM PENGKAJIAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR TIK	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	100%	11.404.217.000,00	100%	2.886.817.693,00	100%	6.132.587.419,24	105%	6.121.970.750,00	105	99,83	105%	9.008.788.443,00	105	79
167	2.210 .09.0	PROGRAM SOSIALISASI	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai	100%	7.767.172.000,00	100%	1.941.119.960,00	100%	950.000.000,00	100%	946.260.262,00	100	99,61	100%	2.887.380.222,00	100	37,17

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	9	KETENTUAN DI BIDANG CUKAI															
	2.211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		25.117.038.905,00		5.149.733.737,00		5.244.863.663,43		5.142.834.755,99				10.292.568.492,99			
	2.211.16	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		25.117.038.905,00		5.149.733.737,00		5.244.863.663,43		5.142.834.755,99				10.292.568.492,99			
168	2.211.16.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.292.627.096,00	100%	1.611.194.055,00	100%	903.294.350,00	99,37 %	869.108.988,99	99,37	96,22	99,37 %	2.480.303.043,99	99,37	46,86
169	2.211.16.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.014.322.594,00	100%	386.804.600,00	100%	233.513.050,00	100%	223.033.700,00	100	95,51	100%	609.838.300,00	100	30,28
170	2.211.16.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	114.760.000,00	0%	0	0%	39.750.000,00	100%	39.690.000,00	0	99,85	100%	39.690.000,00	100	34,59
171	2.211.16.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	40.200.000,00	100%	10.900.000,00	100%	7.800.000,00	100%	5.140.000,00	100	65,9	100%	16.040.000,00	100	39,9
172	2.211.16.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	139.351.000,00	100%	51.538.000,00	100%	22.280.000,00	100%	22.280.000,00	100	100	100%	73.818.000,00	100	52,97
173	2.211.16.06	PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%	840.028.565,00	100%	231.560.400,00	100%	661.530.700,00	100%	641.950.700,00	100	97,04	100%	873.511.100,00	100	103,99
174	2.211.16.0	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Jumlah koperasi yang	100%	1.440.734.000,00	100%	271.624.000,00	100%	235.726.000,00	100%	235.726.000,00	100	100	100%	507.350.000,00	100	35,21

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	PRODUKSI DAN PEMASARAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran														
175	2.211.16.08	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%	2.469.250.000,00	100%	65.000.000,00	100%	177.000.000,00	100%	170.650.000,00	100	96,41	100%	235.650.000,00	100	9,54
176	2.211.16.09	PROGRAM PENINGKATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%	1.330.000.000,00	100%	523.391.382,00	100%	392.246.463,43	100%	363.532.317,00	100	92,68	100%	886.923.699,00	100	66,69
177	2.211.16.10	PROGRAM PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%	1.821.170.150,00	100%	176.438.300,00	100%	146.723.100,00	100%	146.723.050,00	100	100	100%	323.161.350,00	100	17,74
178	2.211.16.11	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%	9.614.595.500,00	100%	1.821.283.000,00	100%	2.425.000.000,00	100%	2.425.000.000,00	100	100	100%	4.246.283.000,00	100	44,16
	2.212	PENANAMAN MODAL			21.317.326.100,00		5.063.859.422,00		3.619.334.400,00		3.550.649.267,00				8.614.508.689,00		
	2.212.17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			21.317.326.100,00		5.063.859.422,00		3.619.334.400,00		3.550.649.267,00				8.614.508.689,00		
179	2.212.17.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	7.878.963.000,00	100%	2.294.965.725,00	100%	1.667.409.900,00	100%	1.646.982.296,00	100	98,77	100%	3.941.948.021,00	100	50,03
180	2.212.17.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.647.773.100,00	100%	1.615.613.566,00	100%	207.396.500,00	100%	205.562.013,00	100	99,12	100%	1.821.175.579,00	100	110,52

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
181	2.212.17.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63.000.000,00	100%	0	100%	63.125.000,00	100%	62.747.500,00	100	99,4	100%	62.747.500,00	100	99,6
182	2.212.17.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	654.246.000,00	100%	11.985.000,00	100%	38.060.000,00	27%	9.390.000,00	27	24,67	27%	21.375.000,00	27	3,27
183	2.212.17.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	82.041.500,00	100%	34.410.500,00	100%	27.997.000,00	100%	24.365.000,00	100	87,03	100%	58.775.500,00	100	71,64
184	2.212.17.06	PROGRAM PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase peningkatan jumlah investor	17%	6.416.780.000,00	3%	756.637.101,00	4%	530.550.000,00	4%	528.101.328,00	100	99,54	7%	1.284.738.429,00	41,18	20,02
185	2.212.17.07	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN STANDARISASI ADMINISTRASI PELAYANAN	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	540.700.000,00	100%	89.854.000,00	100%	91.000.000,00	100%	88.094.000,00	100	96,81	100%	177.948.000,00	100	32,91
186	2.212.17.08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	1.111.196.000,00	20%	0	20%	297.370.000,00	40%	297.240.000,00	200	99,96	40%	297.240.000,00	200	26,75
187	2.212.17.09	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan	30%	1.478.502.000,00	30%	0	30%	326.910.000,00	90%	326.859.280,00	300	99,98	90%	326.859.280,00	300	22,11

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PEREKONOMIAN DAN SOSIAL BUDAYA	Sosial Budaya yang tepat waktu														
188	2.212.17.10	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INVESTASI	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	80%	1.444.124.500,00	80%	260.393.530,00	80%	369.516.000,00	40%	361.307.850,00	50	97,78	40%	621.701.380,00	50	43,05
	2.213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA			95.421.566.603,00		5.366.902.700,00		18.526.450.616,59		17.051.812.796,00				22.418.715.496,00		
	2.213.19	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA			95.421.566.603,00		5.366.902.700,00		18.526.450.616,59		17.051.812.796,00				22.418.715.496,00		
189	2.213.19.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.473.144.453,00	100%	2.351.084.900,00	100%	1.803.104.033,59	100%	1.800.219.870,00	100	99,84	100%	4.151.304.770,00	100	92,81
190	2.213.19.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	187.372.575,00	100%	44.820.300,00	100%	32.500.000,00	100%	32.350.000,00	100	99,54	100%	77.170.300,00	100	41,19
191	2.213.19.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	328.869.975,00	100%	141.803.500,00	100%	63.371.600,00	100%	63.357.600,00	100	99,98	100%	205.161.100,00	100	62,38
192	2.213.19.04	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%	83.360.562.000,00	23%	438.117.000,00	23%	15.230.445.103,00	23%	13.758.955.446,00	100	90,34	23%	14.197.072.446,00	24,47	17,03
193	2.213.19.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI OLAHRAGA	Persentase pembinaan bibit-bibit atlet olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlet	106%	2.652.617.600,00	26%	1.016.537.500,00	26%	660.852.000,00	26%	660.752.000,00	100	99,98	52%	1.677.289.500,00	49,06	63,23
194	2.213	PROGRAM	Persentase Atlet yang	110%	1.972.742.500,00	22%	519.347.000,00	22%	131.810.000,00	22%	131.810.000,00	100	100	44%	651.157.000,00	40	33,01

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.19.0 6	PEMBERDAYAAN OLAHRAGA REKREASI	terkirim		0												
195	2.213 .19.0 7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN DAN PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%	2.446.257.500,0 0	60%	855.192.500,00	60%	604.367.880,00	60%	604.367.880,00	100	100	60%	1.459.560.380,0 0	100	59,67
	2.214	STATISTIK			3.790.120.000,00		0		502.287.000,00		501.762.386,00				501.762.386,00		
	2.214 .09	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			3.790.120.000,00		0		502.287.000,00		501.762.386,00				501.762.386,00		
196	2.214 .09.0 1	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA, INFORMASI STATISTIK DAERAH	Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	100%	3.790.120.000,0 0	100%	0	100%	502.287.000,00	350%	501.762.386,00	350	99,9	350%	501.762.386,00	350	13,24
	2.216	KEBUDAYAAN			14.344.410.650,00		5.733.186.625,00		5.888.500.000,00		5.548.900.000,00				11.282.086.625,00		
	2.216 .18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			14.344.410.650,00		5.733.186.625,00		5.888.500.000,00		5.548.900.000,00				11.282.086.625,00		
197	2.216 .18.0 1	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN DAN KERAGAMAN BUDAYA	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100%	14.344.410.650,0 00	100%	5.733.186.625,0 0	100%	5.888.500.000,0 0	100%	5.548.900.000,0 0	100	94,23	100%	11.282.086.625,0 00	100	78,65
	2.217	PERPUSTAKAAN			4.728.983.000,00		714.826.550,00		2.386.598.000,00		2.089.303.182,00				2.804.129.732,00		
	2.217 .26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			4.728.983.000,00		714.826.550,00		2.386.598.000,00		2.089.303.182,00				2.804.129.732,00		
198	2.217 .26.0 1	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	100%	3.731.620.000,0 0	17%	480.419.000,00	17%	2.104.058.000,0 0	15%	1.809.714.791,0 0	88,24	86,01	15%	2.290.133.791,0 0	15	61,37

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
199	2.217 .26.0 2	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN BAHAN PUSTAKA	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang	70%	997.363.000,00	17%	234.407.550,00	17%	282.540.000,00	17%	279.588.391,00	100	98,96	17%	513.995.941,00	24,29	51,54
	2.218	KEARSIPAN			13.873.139.800,00		3.696.727.975,00		2.879.331.800,00		2.653.049.750,00				6.349.777.725,00		
	2.218 .26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			13.873.139.800,00		3.696.727.975,00		2.879.331.800,00		2.653.049.750,00				6.349.777.725,00		
200	2.218 .26.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.542.094.700,00	12%	2.036.028.760,00	12%	1.468.419.050,00	17%	1.417.356.470,00	141,67	96,52	17%	3.453.385.230,00	17	52,79
201	2.218 .26.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.997.544.200,00	12%	823.920.700,00	12%	336.245.000,00	12%	204.851.880,00	100	60,92	12%	1.028.772.580,00	12	34,32
202	2.218 .26.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	121.544.000,00	12%	0	12%	20.080.000,00	12%	19.800.000,00	100	98,61	12%	19.800.000,00	12	16,29
203	2.218 .26.0 4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	137.809.900,00	12%	42.966.900,00	12%	32.607.700,00	12%	26.391.700,00	100	80,94	12%	69.358.600,00	12	50,33
204	2.218 .26.0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase terlaksananya SDM kearsipan	60%	1.367.952.000,00	95%	264.408.085,00	95%	370.581.050,00	95%	354.600.134,00	100	95,69	190%	619.008.219,00	316,67	45,25
205	2.218 .26.0 6	PROGRAM PENYELAMATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGOLAHAN SERTA PELAYANAN ARSIP	Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	60%	2.706.195.000,00	12%	529.403.530,00	12%	651.399.000,00	11%	630.049.566,00	91,67	96,72	23%	1.159.453.096,00	38,33	42,84
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			414.368.280.672,00		86.075.963.602,00		97.832.847.684,61		87.541.974.158,45				173.617.937.760,45		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	3.301	KELAUTAN DAN PERIKANAN			32.673.335.900,00		4.973.959.943,00		4.825.429.849,00		4.487.502.595,00				9.461.462.538,00		
	3.301.24	DINAS PERIKANAN			32.673.335.900,00		4.973.959.943,00		4.825.429.849,00		4.487.502.595,00				9.461.462.538,00		
206	3.301.24.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.538.331.050,00	100%	2.028.592.876,00	100%	1.825.824.325,00	100%	1.640.824.582,00	100	89,87	100%	3.669.417.458,00	100	66,25
207	3.301.24.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	427.954.000,00	100%	205.150.000,00	100%	262.405.000,00	100%	253.535.500,00	100	96,62	100%	458.685.500,00	100	107,18
208	3.301.24.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	149.480.000,00	100%	48.488.200,00	100%	21.250.000,00	100%	18.715.150,00	100	88,07	100%	67.203.350,00	100	44,96
209	3.301.24.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	10%	51.589.500,00	2%	27.000.000,00	2%	9.800.000,00	2%	4.500.000,00	100	45,92	4%	31.500.000,00	40	61,06
210	3.301.24.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	726.914.600,00	100%	208.856.000,00	100%	45.543.600,00	100%	41.420.200,00	100	90,95	100%	250.276.200,00	100	34,43
211	3.301.24.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	50%	9.547.107.600,00	12,5 %	1.278.842.827,00	12,5 %	1.487.775.575,00	12,5 %	1.415.377.488,00	100	95,13	25%	2.694.220.315,00	50	28,22
			Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)	52%		13%		13%		13%		100		26%		50	
212	3.301	PROGRAM	Persentase	12%	11.110.028.500,	3%	577.430.740,00	3%	580.338.849,00	3%	575.801.500,00	100	99,22	6%	1.153.232.240,0	50	10,38

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	.24.07	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL	peningkatan sarana prasarana nelayan (%)		00										0		
			Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)	20%		5%		5%		5%		100		10%		50	
213	3.301.24.08	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)	30%	2.892.908.750,00	5%	399.134.100,00	5%	424.284.500,00	5%	396.604.175,00	100	93,48	10%	795.738.275,00	33,33	27,51
214	3.301.24.09	PROGRAM PEMBERDAYAAN PEMBUDIDAYA IKAN	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)	5%	2.229.021.900,00	5%	200.465.200,00	5%	168.208.000,00	5%	140.724.000,00	100	83,66	5%	341.189.200,00	100	15,31
			Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	20%		5%		5%		5%		100		10%		50	
	3.302	PARIWISATA			92.342.312.203,00		22.603.417.527,00		27.074.340.431,00		21.160.081.543,00				43.763.499.070,00		
	3.302.18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN			92.342.312.203,00		22.603.417.527,00		27.074.340.431,00		21.160.081.543,00				43.763.499.070,00		
215	3.302.18.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	7.199.695.427,00	100%	2.089.989.631,00	100%	2.181.420.300,00	100%	1.847.487.923,00	100	84,69	100%	3.937.477.554,00	100	54,69
216	3.302.18.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	461.183.375,00	100%	107.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100	100	100%	207.000.000,00	100	44,88
217	3.302.18.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	603.417.500,00	100%	122.500.000,00	100%	57.500.000,00	100%	57.500.000,00	100	100	100%	180.000.000,00	100	29,83

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
218	3.302 .18.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.085.308.075,0 0	100%	557.888.701,00	100%	521.258.700,00	100%	519.008.700,00	100	99,57	100%	1.076.897.401,0 0	100	99,23
219	3.302 .18.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	418.635.451,00	100%	153.075.100,00	100%	85.101.800,00	100%	78.115.800,00	100	91,79	100%	231.190.900,00	100	55,22
220	3.302 .18.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata di Kabupaten Malang	100%	15.804.209.500, 00	100%	6.264.835.540,0 0	100%	4.900.000.000,0 0	100%	4.720.216.000,0 0	100	96,33	100%	10.985.051.540, 00	100	69,51
221	3.302 .18.0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Objek Wisata	100%	42.628.857.250, 00	100%	5.113.255.000,0 0	100%	11.266.346.664, 00	100%	8.687.310.941,0 0	100	77,11	100%	13.800.565.941, 00	100	32,37
222	3.302 .18.0 8	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%	8.391.005.625,0 0	100%	3.325.075.000,0 0	100%	2.700.000.000,0 0	100%	2.537.245.000,0 0	100	93,97	100%	5.862.320.000,0 0	100	69,86
223	3.302 .18.0 9	PROGRAM PELAYANAN BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%	15.750.000.000, 00	100%	4.869.798.555,0 0	100%	5.262.712.967,0 0	100%	2.613.197.179,0 0	100	49,65	100%	7.482.995.734,0 0	100	47,51
	3.303	PERTANIAN			149.469.945.8 69,00		36.176.598.63 3,00		43.574.211.06 5,24		40.917.419.25 1,00				77.094.017.88 4,00		
	3.303 .22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN			76.143.323.60 0,00		14.197.122.55 3,00		26.020.296.71 4,24		24.118.257.45 3,00				38.315.380.00 6,00		
224	3.303 .22.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	10.766.751.400, 00	100%	3.293.107.400,0 0	100%	2.621.104.191,0 0	98%	2.053.638.728,0 0	98	78,35	98%	5.346.746.128,0 0	98	49,66

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
225	3.303 .22.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	9.306.186.000,0 0	100%	1.614.922.000,0 0	100%	1.899.273.609,0 0	100%	1.585.216.100,0 0	100	83,46	100%	3.200.138.100,0 0	100	34,39
226	3.303 .22.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	438.400.000,00	100%	183.235.000,00	100%	201.300.000,00	100%	199.659.850,00	100	99,19	100%	382.894.850,00	100	87,34
227	3.303 .22.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	47.000.000,00	100%	14.100.000,00	100%	20.660.000,00	75%	10.680.000,00	75	51,69	75%	24.780.000,00	75	52,72
228	3.303 .22.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	123.397.500,00	100%	33.597.500,00	100%	18.507.832,00	100%	18.507.000,00	100	100	100%	52.104.500,00	100	42,22
229	3.303 .22.0 6	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEB UNAN LAPANGAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit	80%	4.403.095.000,0 0	80%	2.091.217.500,0 0	80%	339.371.200,00	78%	317.129.200,00	97,5	93,45	78%	2.408.346.700,0 0	97,5	54,7
230	3.303 .22.0 7	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran	90%	8.776.352.600,0 0	90%	2.981.506.803,0 0	90%	2.346.163.982,2 4	88%	2.270.787.400,0 0	97,78	96,79	88%	5.252.294.203,0 0	97,78	59,85
231	3.303 .22.0 8	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL HORTIKULTURA	Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran	100%	4.075.677.500,0 0	100%	1.105.042.500,0 0	100%	829.950.000,00	98%	738.905.000,00	98	89,03	98%	1.843.947.500,0 0	98	45,24
232	3.303 .22.0	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Capaian Produksi Tanaman	90%	4.585.487.000,0 0	90%	1.176.344.000,0 0	90%	926.422.000,00	88%	872.912.000,00	97,78	94,22	88%	2.049.256.000,0 0	97,78	44,69

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	9	PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Perkebunan Terhadap Sasaran														
233	3.303.22.10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU	Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran	20%	6.886.039.600,00	20%	1.704.049.850,00	20%	1.715.884.900,00	20%	1.603.380.175,00	100	93,44	20%	3.307.430.025,00	100	48,03
234	3.303.22.11	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan	100%	26.734.937.000,00	100%	0	100%	15.101.659.000,00	100%	14.447.442.000,00	100	95,67	100%	14.447.442.000,00	100	54,04
	3.303.23	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN			73.326.622.269,00		21.979.476.080,00		17.553.914.351,00		16.799.161.798,00				38.778.637.878,00		
235	3.303.23.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	13.112.817.398,00	100%	4.324.928.365,00	100%	3.351.949.243,00	100%	3.196.859.746,00	100	95,37	100%	7.521.788.111,00	100	57,36
236	3.303.23.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.057.191.502,00	100%	1.106.171.442,00	100%	359.778.000,00	100%	337.392.355,00	100	93,78	100%	1.443.563.797,00	100	70,17
237	3.303.23.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	512.592.769,00	100%	148.474.000,00	100%	191.956.000,00	100%	187.050.850,00	100	97,44	100%	335.524.850,00	100	65,46
238	3.303.23.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	230.611.232,00	100%	59.530.000,00	100%	23.444.000,00	100%	23.444.000,00	100	100	100%	82.974.000,00	100	35,98
239	3.303.23.0	PROGRAM PENCEGAHAN DAN	Persentase rerata kegiatan pencegahan	100%	4.637.920.997,00	100%	1.840.123.340,00	100%	1.128.752.204,00	100%	1.104.069.888,00	100	97,81	100%	2.944.193.228,00	100	63,48

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	5	PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK	penyakit hewan/ternak (%)														
			Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase pembina dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH (%)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
240	3.303 .23.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)	95%	31.252.012.471,00	95%	9.844.724.048,00	95%	6.727.583.367,00	95%	6.283.864.071,00	100	93,4	95%	16.128.588.119,00	100	51,61
			Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)	30%		30%		30%		30%		100		30%		100	
241	3.303 .23.0 7	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PETERNAKAN	Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)	100%	5.216.851.612,00	100%	1.260.861.031,00	100%	1.280.587.500,00	100%	1.273.912.844,00	100	99,48	100%	2.534.773.875,00	100	48,59
			Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)	90%		90%		90%		90%		100		90%		100	
			Persentase terlaksananya promosi produk peternakan	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			(%)														
242	3.303.23.08	PROGRAM PRASARANA SARANA DAN PENYULUH PETERNAKAN	Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	100%	16.306.624.288,00	100%	3.394.663.854,00	100%	4.489.864.037,00	100%	4.392.568.044,00	100	97,83	100%	7.787.231.898,00	100	47,76
			Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
	3.304	PERDAGANGAN			77.109.850.200,00		7.890.860.200,00		8.662.978.939,37		7.560.543.421,03				15.451.403.621,03		
	3.304.25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			77.109.850.200,00		7.890.860.200,00		8.662.978.939,37		7.560.543.421,03				15.451.403.621,03		
243	3.304.25.01	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PASAR DAN PEMBINAAN PEDAGANG	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	100%	68.133.791.000,00	100%	7.662.100.200,00	100%	6.240.228.939,37	82,63 %	5.222.995.781,03	82,63	83,7	82,63 %	12.885.095.981,03	82,63	18,91
244	3.304.25.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)	100%	8.976.059.200,00	100%	228.760.000,00	100%	2.422.750.000,00	96,44 %	2.337.547.640,00	96,44	96,48	96,44 %	2.566.307.640,00	96,44	28,59
	3.305	PERINDUSTRIAN			59.733.638.000,00		13.535.810.999,00		12.995.887.400,00		12.778.692.448,42				26.314.503.447,42		
	3.305.25	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			59.733.638.000,00		13.535.810.999,00		12.995.887.400,00		12.778.692.448,42				26.314.503.447,42		
245	3.305.25.0	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Pemenuhan	100%	21.021.108.000,00	100%	5.950.103.429,00	100%	5.740.289.400,00	97,25 %	5.584.211.446,72	97,25	97,28	97,25 %	11.534.314.875,72	97,25	54,87

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Perkantoran (%)														
246	3.305.25.02	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	662.700.000,00	100%	717.980.000,00	100%	476.080.000,00	98.05 %	466.664.675,00	98,05	98,02	98.05 %	1.184.644.675,00	98,05	178,76
247	3.305.25.03	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	129.500.000,00	100%	18.988.400,00	100%	175.000.000,00	99.8 %	174.597.000,00	99,8	99,77	99.8 %	193.585.400,00	99,8	149,49
248	3.305.25.04	PROGRAM Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	278.040.000,00	100%	95.200.000,00	100%	46.920.000,00	100.03 %	46.920.000,00	100,03	100	100.03 %	142.120.000,00	100,03	51,11
249	3.305.25.05	PROGRAM Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	342.290.000,00	100%	138.296.000,00	100%	157.598.000,00	94.66 %	149.150.000,00	94,66	94,64	94.66 %	287.446.000,00	94,66	83,98
250	3.305.25.06	PROGRAM Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100%	36.900.000.000,00	100%	6.515.243.170,00	100%	5.875.000.000,00	99.31 %	5.834.049.326,70	99,31	99,3	99.31 %	12.349.292.496,70	99,31	33,47
251	3.305.25.07	PROGRAM Pembinaan Industri	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri	100%	400.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	125.000.000,00	100.03 %	125.000.000,00	100,03	100	100.03 %	225.000.000,00	100,03	56,25
252	3.305.25.08	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri agro	0%	0	100%	0	100%	400.000.000,00	99.53 %	398.100.000,00	99,53	99,53	99.53 %	398.100.000,00	0	0
	3.306	TRANSMIGRASI			3.039.198.500,00		895.316.300,00		700.000.000,00		637.734.900,00				1.533.051.200,00		
	3.306.15	DINAS TENAGA KERJA			3.039.198.500,00		895.316.300,00		700.000.000,00		637.734.900,00				1.533.051.200,00		
253	3.306	PROGRAM	Persentase	100%	3.039.198.500,0	100%	895.316.300,00	100%	700.000.000,00	100%	637.734.900,00	100	91,1	100%	1.533.051.200,0	100	50,44

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	.15.0 1	KETRANSMIGRASIAN	Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi		0										0		
	4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.229.331.301.348,00		401.157.601.380,00		325.050.200.964,46		278.560.105.393,00				679.717.706.773,00		
	4.401	PERENCANAAN			28.203.815.859,00		8.069.952.832,00		9.490.557.026,75		9.189.976.000,00				17.259.928.832,00		
	4.401 .27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			28.203.815.859,00		8.069.952.832,00		9.490.557.026,75		9.189.976.000,00				17.259.928.832,00		
254	4.401 .27.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.150.650.450,00	100%	2.177.922.450,00	100%	1.712.281.400,00	100%	1.607.402.250,00	100	93,87	100%	3.785.324.700,00	100	73,49
255	4.401 .27.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.967.273.009,00	100%	1.416.878.382,00	100%	2.193.881.626,75	100%	2.145.796.600,00	100	97,81	100%	3.562.674.982,00	100	120,07
256	4.401 .27.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	172.223.000,00	100%	0	100%	44.655.000,00	100%	44.655.000,00	100	100	100%	44.655.000,00	100	25,93
257	4.401 .27.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	178.187.500,00	100%	45.187.500,00	100%	8.000.000,00	0%	0	0	0	0%	45.187.500,00	0	25,36
258	4.401 .27.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	161.124.000,00	100%	87.954.000,00	100%	250.000,00	100%	250.000,00	100	100	100%	88.204.000,00	100	54,74
259	4.401 .27.0 6	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat	100%	4.275.408.000,00	100%	1.508.766.500,00	100%	1.211.049.400,00	100%	1.131.547.100,00	100	93,44	100%	2.640.313.600,00	100	61,76

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			waktu														
			Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	95%		92%		93%		93%		100		93%		97,89	
260	4.401.27.07	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	100%	4.656.400.000,00	100%	1.306.870.700,00	100%	1.260.000.000,00	100%	1.251.071.100,00	100	99,29	100%	2.557.941.800,00	100	54,93
			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%		0%		100%		100%		100		100%		100	
261	4.401.27.08	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	Presentase keterpaduan perencanaan program Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%	2.820.000.000,00	100%	0	100%	1.110.000.000,00	100%	1.098.377.000,00	100	98,95	100%	1.098.377.000,00	100	38,95
			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%		0%		100%		100%		100		100%		100	
262	4.401	PROGRAM	Persentase	100%	3.404.590.900,00	100%	789.045.400,00	100%	910.000.000,00	100%	884.661.250,00	100	97,22	100%	1.673.706.650,00	100	49,16

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.27.0 9	PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	keterpaduan perencanaan program pembangunan perekonomian		0										0		
			Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%		0%		100%		100%		100		100%		100	
263	4.401 .27.1 0	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian pelaksanaan program APBD terhadap perencanaan program yang ditetapkan dalam RKPD	100%	4.417.959.000,0 0	95%	737.327.900,00	95%	1.040.439.600,0 0	100%	1.026.215.700,0 0	105,2 6	98,63	100%	1.763.543.600,0 0	100	39,92
	4.402	KEUANGAN			581.429.318.1 72,00		193.240.428.3 52,00		131.799.162.7 50,71		102.229.342.3 50,00				295.469.770.7 02,00		
	4.402 .28	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			455.444.183.9 73,00		152.889.404.7 39,00		98.498.775.35 0,71		72.097.402.12 3,00				224.986.806.8 62,00		
264	4.402 .28.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	350.904.000.58 3,00	100%	122.091.672.05 7,00	100%	68.092.481.992, 57	96.12 %	54.979.869.626, 00	96,12	80,74	96.12 %	177.071.541.68 3,00	96,12	50,46
265	4.402 .28.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	12.148.062.450, 00	100%	7.398.282.930,0 0	100%	5.352.765.158,1 4	66.94 %	2.585.330.664,0 0	66,94	48,3	66.94 %	9.983.613.594,0 0	66,94	82,18
266	4.402 .28.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	24.553.223.784, 00	100%	5.965.432.500,0 0	100%	6.701.611.500,0 0	1.23 %	75.031.000,00	1,23	1,12	1.23 %	6.040.463.500,0 0	1,23	24,6
267	4.402 .28.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.043.037.024,0 0	100%	279.841.588,00	100%	531.730.000,00	88.33 %	418.936.450,00	88,33	78,79	88.33 %	698.778.038,00	88,33	66,99
268	4.402 .28.0	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan	100%	4.104.897.296,0 0	100%	1.530.302.935,0 0	100%	962.698.900,00	96.4 %	860.910.550,00	96,4	89,43	96.4 %	2.391.213.485,0 0	96,4	58,25

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	5	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)														
269	4.402.28.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%	2.166.050.072,00	100%	518.241.200,00	100%	366.616.000,00	88.55 %	248.089.500,00	88,55	67,67	88.55 %	766.330.700,00	88,55	35,38
270	4.402.28.07	PROGRAM PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%	14.761.965.884,00	100%	5.680.761.409,00	100%	3.550.000.000,00	98.77 %	3.169.568.800,00	98,77	89,28	98.77 %	8.850.330.209,00	98,77	59,95
271	4.402.28.08	PROGRAM PENGELOLAAN ASSET PEMERINTAH DAERAH	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%	13.978.817.580,00	100%	2.921.022.056,00	100%	4.517.859.000,00	99.28 %	3.233.988.787,00	99,28	71,58	99.28 %	6.155.010.843,00	99,28	44,03
272	4.402.28.09	PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%	16.565.951.500,00	100%	3.116.512.250,00	100%	4.379.256.000,00	97.79 %	3.254.430.500,00	97,79	74,31	97.79 %	6.370.942.750,00	97,79	38,46
273	4.402.28.10	PROGRAM PENINGKATAN PELAPORAN DAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	100%	15.218.177.800,00	100%	3.387.335.814,00	100%	4.043.756.800,00	99.03 %	3.271.246.246,00	99,03	80,9	99.03 %	6.658.582.060,00	99,03	43,75
	4.402.29	BADAN PENDAPATAN DAERAH			125.985.134.199,00		40.351.023.613,00		33.300.387.400,00		30.131.940.227,00				70.482.963.840,00		
274	4.402.29.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	28.245.500.717,00	100%	11.977.582.475,00	100%	9.700.881.783,00	99.2 %	9.453.631.613,00	99,2	97,45	99.2 %	21.431.214.088,00	99,2	75,87
275	4.402	PROGRAM	Persentase	100%	20.699.873.792,00	100%	11.183.335.550,00	100%	1.672.650.117,00	98.52 %	1.556.319.313,00	98,52	93,05	98.52 %	12.739.654.863,00	98,52	61,54

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.29.0 2	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		00		00		0		0				00		
276	4.402 .29.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	1.478.897.975,0 0	20%	482.600.000,00	20%	249.654.944,00	20%	236.259.100,00	100	94,63	20%	718.859.100,00	20	48,61
277	4.402 .29.0 4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	655.541.887,00	20%	209.193.850,00	20%	158.136.000,00	16,95 %	107.551.700,00	84,75	68,01	16,95 %	316.745.550,00	16,95	48,32
278	4.402 .29.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	782.553.950,00	20%	216.599.400,00	20%	76.081.000,00	20,82 %	24.441.000,00	104,1	32,12	20,82 %	241.040.400,00	20,82	30,8
279	4.402 .29.0 6	PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	400%	8.921.748.000,0 0	100%	327.932.748,00	100%	2.938.696.360,0 0	100%	2.562.544.899,0 0	100	87,2	200%	2.890.477.647,0 0	50	32,4
280	4.402 .29.0 7	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN	Tingkat Layanan PBB	400%	28.734.172.628,0 00	100%	6.070.234.400,0 0	100%	9.730.912.294,0 0	112,83 %	8.267.835.665,0 0	112,8 3	84,96	212,83 %	14.338.070.065,0 00	53,21	49,9
281	4.402 .29.0 8	PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%	16.152.969.250,0 00	100%	3.271.623.104,0 0	100%	4.095.399.100,0 0	94,44 %	3.480.876.617,0 0	94,44	84,99	94,44 %	6.752.499.721,0 0	94,44	41,8
282	4.402 .29.0 9	PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	100%	20.313.876.000,0 00	100%	6.611.922.086,0 0	100%	4.677.975.802,0 0	97,6 %	4.442.480.320,0 0	97,6	94,97	97,6 %	11.054.402.406,0 00	97,6	54,42

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB															
	4.403	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			18.719.398.050,00		3.473.654.922,00		12.085.632.400,00		11.195.084.745,00				14.668.739.667,00		
	4.403.30	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			18.719.398.050,00		3.473.654.922,00		12.085.632.400,00		11.195.084.745,00				14.668.739.667,00		
283	4.403.30.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.575.500.500,00	100%	1.569.570.753,00	100%	1.018.169.050,00	98,44 %	986.667.262,00	98,44	96,91	98,44 %	2.556.238.015,00	98,44	55,87
284	4.403.30.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	3.557.261.800,00	100%	1.391.032.419,00	100%	1.157.263.433,00	100%	1.111.102.748,00	100	96,01	100%	2.502.135.167,00	100	70,34
285	4.403.30.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	286.350.000,00	100%	132.200.000,00	100%	85.000.000,00	100%	84.022.500,00	100	98,85	100%	216.222.500,00	100	75,51
286	4.403.30.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.441.564.000,00	100%	245.131.000,00	100%	303.876.328,00	46,08 %	262.619.260,00	46,08	86,42	46,08 %	507.750.260,00	46,08	35,22
287	4.403.30.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	643.669.750,00	100%	135.720.750,00	100%	83.076.000,00	100%	80.976.000,00	100	97,47	100%	216.696.750,00	100	33,67
288	4.403.30.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Persentase pengembangan kompetensi aparatur	100%	4.491.250.000,00	21,1 %	0	21,1 %	6.022.268.503,00	96,76 %	5.794.813.463,00	458,58	96,22	96,76 %	5.794.813.463,00	96,76	129,02
289	4.403.30.0	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase pengadaan,	100%	2.417.352.000,00	46,66 %	0	46,66 %	1.712.728.089,00	122,1 %	1.264.158.216,00	261,68	73,81	122,1 %	1.264.158.216,00	122,1	52,3

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	7	PENGEMBANGAN APARATUR	pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian aparatur														
290	4.403.30.08	PROGRAM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN DAN KEPANGKATAN	Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan	100%	1.306.450.000,00	30.21 %	0	30.21 %	920.089.000,00	122.74 %	870.432.500,00	406,29	94,6	122.74 %	870.432.500,00	122,74	66,63
291	4.403.30.09	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN DATA SERTA INFORMASI APARATUR	Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur	100%	0	30.21 %	0	30.21 %	783.161.997,00	100%	740.292.796,00	331,02	94,53	100%	740.292.796,00	100	0
	4.404	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			16.566.504.875,00				5.004.578.600,00		3.262.991.000,00				8.239.317.794,00		
	4.404.33	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			16.566.504.875,00				5.004.578.600,00		3.262.991.000,00				8.239.317.794,00		
292	4.404.33.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2.708.704.045,00	100%	819.541.100,00	100%	718.217.900,00	100%	705.242.934,00	100	98,19	100%	1.524.784.034,00	100	56,29
293	4.404.33.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	685.715.400,00	100%	284.773.500,00	100%	158.963.600,00	100%	153.798.060,00	100	96,75	100%	438.571.560,00	100	63,96
294	4.404.33.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	47.040.000,00	100%	0	100%	20.400.000,00	100%	20.400.000,00	100	100	100%	20.400.000,00	100	43,37
295	4.404.33.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	539.391.500,00	100%	34.120.000,00	100%	34.745.000,00	100%	26.275.000,00	100	75,62	100%	60.395.000,00	100	11,2
296	4.404	PROGRAM	Persentase Dokumen	100%	269.618.900,00	100%	51.874.100,00	100%	24.935.400,00	100%	24.935.400,00	100	100	100%	76.809.500,00	100	28,49

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.33.0 5	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)														
297	4.404 .33.0 6	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMBANGUNAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.744.853.000,00	79%	183.000.000,00	79%	485.023.000,00	79%	484.643.000,00	100	99,92	79%	667.643.000,00	97,53	24,32
298	4.404 .33.0 7	PROGRAM PERUMUSAN, PENGOLAHAN DAN PENYUSUNAN INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	50%	1.383.413.550,00	46%	452.312.000,00	46%	353.582.100,00	46%	353.128.900,00	100	99,87	46%	805.440.900,00	92	58,22
299	4.404 .33.0 8	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.288.229.000,00	79%	833.000.000,00	79%	359.000.000,00	79%	359.000.000,00	100	100	79%	1.192.000.000,00	97,53	52,09
300	4.404 .33.0 9	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI, INVESTASI DAN KEUANGAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.696.229.000,00	79%	1.038.140.000,00	79%	501.870.000,00	79,81 %	501.369.900,00	101,03	99,9	79,81 %	1.539.509.900,00	98,53	57,1
301	4.404 .33.1 0	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%	2.626.324.480,00	79%	1.000.374.000,00	79%	459.500.000,00	79%	459.192.000,00	100	99,93	79%	1.459.566.000,00	97,53	55,57
302	4.404 .33.1 1	PROGRAM PENINGKATAN INOVASI DAERAH	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah	81%	576.986.000,00	79%	307.443.900,00	79%	146.754.000,00	79%	146.754.000,00	100	100	79%	454.197.900,00	97,53	78,72

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	4.405	PENGAWASAN			61.036.846.200,00		14.100.240.350,00		10.603.012.050,00		10.195.123.469,00				24.295.363.819,00		
	4.405.01	INSPEKTORAT			61.036.846.200,00		14.100.240.350,00		10.603.012.050,00		10.195.123.469,00				24.295.363.819,00		
303	4.405.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	5.691.269.400,00	100%	1.514.475.150,00	100%	1.388.842.050,00	100%	1.344.176.563,00	100	96,78	100%	2.858.651.713,00	100	50,23
304	4.405.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	5.456.892.800,00	100%	1.303.808.850,00	100%	651.008.000,00	100%	625.924.706,00	100	96,15	100%	1.929.733.556,00	100	35,36
305	4.405.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	192.330.000,00	0%	57.920.000,00	0%	21.000.000,00	94%	19.729.000,00	0	93,95	94%	77.649.000,00	94	40,37
306	4.405.01.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	500%	49.360.000,00	100%	11.760.000,00	100%	9.310.000,00	100,05 %	9.310.000,00	100,05	100	200,05 %	21.070.000,00	40,01	42,69
307	4.405.01.05	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%	35.605.946.250,00	88%	8.554.121.625,00	88%	5.894.335.500,00	87%	5.761.163.900,00	98,86	97,74	87%	14.315.285.525,00	97,75	40,2
308	4.405.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan	84%	1.465.955.000,00	17%	184.825.000,00	17%	732.071.500,00	16%	611.465.300,00	94,12	83,53	33%	796.290.300,00	39,29	54,32

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
309	4.405.01.07	PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata	84%	3.628.892.750,00	17%	842.279.725,00	17%	431.894.000,00	15%	396.713.000,00	88,24	91,85	32%	1.238.992.725,00	38,1	34,14
310	4.405.01.08	PROGRAM PENINGKATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KINERJA	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	100%	8.607.005.000,00	100%	1.580.715.000,00	100%	1.207.116.000,00	87%	1.170.216.000,00	87	96,94	87%	2.750.931.000,00	87	31,96
311	4.405.01.09	PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B	109%	339.195.000,00	20%	50.335.000,00	20%	267.435.000,00	16%	256.425.000,00	80	95,88	36%	306.760.000,00	33,03	90,44
	4.406	FUNGSI LAINNYA			523.375.418.192,00		177.268.746.324,00		157.808.845.737,00		142.515.839.635,00				319.784.585.959,00		
	4.406.31	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			29.623.854.940,00		4.129.682.657,00		5.153.523.000,00		4.957.923.855,00				9.087.606.512,00		
312	4.406.31.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.887.193.940,00	100%	1.635.278.895,00	100%	895.711.300,00	100%	892.248.690,00	100	99,61	100%	2.527.527.585,00	100	51,72
313	4.406.31.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	982.794.900,00	100%	339.103.562,00	100%	225.762.700,00	100%	225.696.400,00	100	99,97	100%	564.799.962,00	100	57,47
314	4.406.31.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	249.188.000,00	100%	74.198.700,00	100%	48.000.000,00	100%	48.000.000,00	100	100	100%	122.198.700,00	100	49,04
315	4.406.31.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	97.707.000,00	100%	21.635.000,00	100%	10.300.000,00	81,82 %	10.280.000,00	81,82	99,81	81,82 %	31.915.000,00	81,82	32,66

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
316	4.406.31.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	518.693.000,00	100%	88.839.900,00	100%	83.376.500,00	100%	83.358.300,00	100	99,98	100%	172.198.200,00	100	33,2
317	4.406.31.06	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%	11.179.118.000,00	100%	356.447.000,00	100%	2.148.000.000,00	100%	1.956.342.186,00	100	91,08	100%	2.312.789.186,00	100	20,69
318	4.406.31.07	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%	6.395.916.000,00	81%	1.084.077.500,00	81%	1.108.672.500,00	81%	1.108.299.000,00	100	99,97	81%	2.192.376.500,00	95,29	34,28
319	4.406.31.08	PROGRAM REHABILITASI - REKONSTRUKSI PASCA BENCANA	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	90%	5.313.244.100,00	85%	530.102.100,00	85%	633.700.000,00	85%	633.699.279,00	100	100	85%	1.163.801.379,00	94,44	21,9
	4.406.32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			13.557.245.644,00		3.888.389.106,00		3.727.386.400,00		3.588.210.096,00				7.476.599.202,00		
320	4.406.32.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 persen	4.359.872.039,00	100 persen	841.557.106,00	100 persen	790.271.400,00	98.56 persen	772.378.033,00	98,56	97,74	98.56 persen	1.613.935.139,00	98,56	37,02
321	4.406.32.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 persen	942.546.000,00	100 persen	196.150.000,00	100 persen	210.075.000,00	95.43 persen	200.644.563,00	95,43	95,51	95.43 persen	396.794.563,00	95,43	42,1
322	4.406.32.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 Persen	60.615.000,00	100 Persen	4.800.000,00	100 Persen	152.910.000,00	96.45 Persen	147.630.000,00	96,45	96,55	96.45 Persen	152.430.000,00	96,45	251,47

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
323	4.406.32.04	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100 persen	469.735.000,00	100 persen	41.867.000,00	100 persen	2.371.000,00	99,99 persen	2.371.000,00	99,99	100	99,99 persen	44.238.000,00	99,99	9,42
324	4.406.32.05	PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK	cakupan peserta pendidikan politik	100 persen	2.585.210.850,00	100 persen	1.062.597.000,00	100 persen	396.530.000,00	99,18 persen	388.840.000,00	99,18	98,06	99,18 persen	1.451.437.000,00	99,18	56,14
325	4.406.32.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DAERAH	Cakupan wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal	100 persen	2.217.220.655,00	100 persen	884.943.000,00	100 persen	1.320.432.000,00	94,21 persen	1.232.936.500,00	94,21	93,37	94,21 persen	2.117.879.500,00	94,21	95,52
326	4.406.32.07	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Cakupan peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan	100 persen	1.577.052.000,00	100 persen	468.067.000,00	100 persen	370.508.000,00	100 persen	360.521.000,00	100	97,3	100 persen	828.588.000,00	100	52,54
327	4.406.32.08	PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	Cakupan forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	100 persen	1.344.994.100,00	100 persen	388.408.000,00	100 persen	484.289.000,00	100 persen	482.889.000,00	100	99,71	100 persen	871.297.000,00	100	64,78
	4.406.34	SEKRETARIAT DPRD			223.106.918.402,00		80.654.996.164,00		63.563.956.537,00		51.679.383.945,00				132.334.380.109,00		
328	4.406.34.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	39.343.219.841,00	100%	13.999.630.535,00	100%	10.060.898.400,00	126%	8.475.721.639,00	126	84,24	126%	22.475.352.174,00	126	57,13
329	4.406.34.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	13.469.908.670,00	100%	4.101.131.823,00	100%	3.077.672.100,00	116,29 %	2.956.408.034,00	116,29	96,06	116,29 %	7.057.539.857,00	116,29	52,39
330	4.406.34.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	0	0	0	0	0	904.670.000,00	100,33	871.438.000,00	0	96,33	100,33	871.438.000,00	0	0

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
331	4.406.34.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	3.865.380.574,00	100%	1.202.486.436,00	100%	986.120.000,00	82,93 %	806.078.100,00	82,93	81,74	82,93 %	2.008.564.536,00	82,93	51,96
332	4.406.34.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%	160.504.271.663,00	100%	59.829.705.996,00	100%	47.228.641.000,00	79,73 %	37.683.772.972,00	79,73	79,79	79,73 %	97.513.478.968,00	79,73	60,75
			Persentase Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%		100%		100%		88,25 %		88,25		88,25 %		88,25	
333	4.406.34.06	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI KINERJA DPRD DENGAN MASS MEDIA	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%	3.689.232.878,00	100%	994.712.000,00	100%	539.000.000,00	101,42 %	456.433.700,00	101,42	84,68	101,42 %	1.451.145.700,00	101,42	39,33
334	4.406.34.07	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%	2.234.904.776,00	100%	527.329.374,00	100%	414.352.500,00	80%	151.267.200,00	80	36,51	80%	678.596.574,00	80	30,36
335	4.406.34.08	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	0%	0	100%	0	100%	352.602.537,00	99,46 %	278.264.300,00	99,46	78,92	99,46 %	278.264.300,00	0	0
	4.406.38	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN			8.097.109.393,00		1.454.136.300,00		2.637.725.400,00		2.556.456.900,00				4.010.593.200,00		
336	4.406.38.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.210.392.720,00	100%	1.157.724.300,00	100%	687.198.400,00	100%	676.724.100,00	100	98,48	100%	1.834.448.400,00	100	57,14
337	4.406.38.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	551.831.125,00	100%	144.765.000,00	100%	78.616.648,00	100%	78.236.700,00	100	99,52	100%	223.001.700,00	100	40,41

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PRASARANA APARATUR	Penunjang Aparatur (%)														
338	4.406.38.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	118.880.000,00	100%	38.700.000,00	100%	18.434.080,00	100%	18.350.000,00	100	99,54	100%	57.050.000,00	100	47,99
339	4.406.38.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	188.095.000,00	100%	55.625.000,00	100%	202.865.000,00	100%	202.865.000,00	100	100	100%	258.490.000,00	100	137,43
340	4.406.38.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	221.725.000,00	100%	57.322.000,00	100%	13.690.000,00	100%	13.690.000,00	100	100	100%	71.012.000,00	100	32,03
341	4.406.38.06	PROGRAM ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%	3.806.185.548,00	100%	0	100%	1.636.921.272,00	100%	1.566.591.100,00	100	95,7	100%	1.566.591.100,00	100	41,16
	4.406.39	BAGIAN HUKUM			8.981.307.728,00		2.562.460.128,00		2.743.957.000,00		2.611.521.836,00				5.173.981.964,00		
342	4.406.39.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.729.533.174,00	100%	703.119.624,00	100%	622.485.519,00	96,4 %	600.048.684,00	96,4	96,4	96,4 %	1.303.168.308,00	96,4	75,35
343	4.406.39.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	344.066.000,00	100%	134.720.000,00	100%	71.349.329,00	92,49 %	65.989.900,00	92,49	92,49	92,49 %	200.709.900,00	92,49	58,33
344	4.406.39.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	128.040.000,00	100%	37.320.000,00	100%	20.100.000,00	100%	20.100.000,00	100	100	100%	57.420.000,00	100	44,85
345	4.406.39.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	382.099.194,00	100%	352.270.194,00	100%	78.793.000,00	100%	78.793.000,00	100	100	100%	431.063.194,00	100	112,81

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
346	4.406.39.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.840.000,00	100%	1.504.000,00	100%	1.434.652,00	100%	1.434.652,00	100	100	100%	2.938.652,00	100	76,53
347	4.406.39.06	PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, PENANGANAN PERKARA DAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin sesuai kebutuhan masyarakat.	100%	6.393.729.360,00	100%	1.333.526.310,00	100%	1.949.794.500,00	94.63 %	1.845.155.600,00	94,63	94,63	94.63 %	3.178.681.910,00	94,63	49,72
	4.406.40	BAGIAN ORGANISASI			7.325.987.000,00		1.788.763.100,00		1.793.972.800,00		1.597.531.702,00				3.386.294.802,00		
348	4.406.40.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.749.643.400,00	100%	569.728.000,00	100%	474.482.300,00	106.29 %	459.891.138,00	106,29	96,92	106.29 %	1.029.619.138,00	106,29	58,85
349	4.406.40.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	228.731.400,00	100%	125.214.300,00	100%	90.986.000,00	100%	81.862.864,00	100	89,97	100%	207.077.164,00	100	90,53
350	4.406.40.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	9.475.000,00	100%	2.975.000,00	100%	7.718.000,00	100%	7.718.000,00	100	100	100%	10.693.000,00	100	112,85
351	4.406.40.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	15.600.000,00	100%	4.800.000,00	100%	3.000.000,00	50%	1.500.000,00	50	50	50%	6.300.000,00	50	40,38
352	4.406.40.0	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan	100%	14.609.000,00	100%	6.109.000,00	100%	5.970.000,00	100%	5.970.000,00	100	100	100%	12.079.000,00	100	82,68

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	5	PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)														
353	4.406.40.06	PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	100%	5.307.928.200,00	28.78 %	1.079.936.800,00	28.78 %	1.211.816.500,00	60.98 %	1.040.589.700,00	211,88	85,87	60.98 %	2.120.526.500,00	60,98	39,95
			Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	100%		79.26 %		79.26 %		70.73 %		89,24		70.73 %		70,73	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK/SKJ	100%		100%		100%		100%		100		100%		100	
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	19%		14%		14%		17%		121,43		17%		89,47	
	4.406.41	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN			8.520.795.416,00		1.717.433.878,00		1.654.668.800,00		1.514.667.007,00				3.232.100.885,00		
354	4.406.41.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.339.917.372,00	100%	554.841.492,00	100%	426.149.158,00	98.8 %	414.870.981,00	98,8	97,35	98.8 %	969.712.473,00	98,8	72,37
355	4.406.41.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	330.922.091,00	100%	127.634.888,00	100%	116.022.044,00	96.4 %	109.291.433,00	96,4	94,2	96.4 %	236.926.321,00	96,4	71,6
356	4.406.41.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	66.930.000,00	100%	22.180.000,00	100%	18.094.598,00	100%	17.825.000,00	100	98,51	100%	40.005.000,00	100	59,77
357	4.406.41.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	175.465.000,00	100%	117.700.000,00	100%	115.000.000,00	101.59 %	105.135.000,00	101,59	91,42	101.59 %	222.835.000,00	101,59	127

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
358	4.406.41.06	PROGRAM ADMINISTRASI BIDANG PEREKONOMIAN	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	100%	6.007.560.953,00	25%	757.069.998,00	25%	779.403.000,00	99%	670.694.058,00	396	86,05	124%	1.427.764.056,00	124	23,77
359	4.406.41.07	PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	100%	600.000.000,00	100%	138.007.500,00	100%	200.000.000,00	98.5 %	196.850.535,00	98,5	98,43	98.5 %	334.858.035,00	98,5	55,81
	4.406.42	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA			5.933.118.150,00		1.396.628.592,00		1.269.287.000,00		1.193.365.432,00				2.589.994.024,00		
360	4.406.42.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 Persen (%)	2.147.680.050,00	100 Persen (%)	780.580.112,00	100 Persen (%)	521.680.500,00	100 Persen (%)	499.120.156,00	100	95,68	100 Persen (%)	1.279.700.268,00	100	59,59
361	4.406.42.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 Persen (%)	525.559.450,00	100 Persen (%)	107.112.980,00	100 Persen (%)	58.965.000,00	100 Persen (%)	57.691.900,00	100	97,84	100 Persen (%)	164.804.880,00	100	31,36
362	4.406.42.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100 Persen (%)	56.410.000,00	100 Persen (%)	12.035.000,00	100 Persen (%)	2.500.000,00	0 Persen (%)	0	0	0	0 Persen (%)	12.035.000,00	0	21,33
363	4.406.42.04	PROGRAM FASILITASI DAN PENINGKATAN KERJA SAMA DAERAH	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 Persen (%)	3.203.468.650,00	80 Persen (%)	496.900.500,00	80 Persen (%)	686.141.500,00	80 Persen (%)	636.553.376,00	100	92,77	80 Persen (%)	1.133.453.876,00	100	35,38
	4.406.43	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA			6.271.719.600,00		2.208.214.100,00		2.487.819.600,00		2.398.603.600,00				4.606.817.700,00		
364	4.406.43.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.892.620.650,00	100%	671.605.700,00	100%	431.670.600,00	96.46 %	412.817.600,00	96,46	95,63	96.46 %	1.084.423.300,00	96,46	57,3
365	4.406.43.02	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Pemenuhan Sarana	100%	710.356.300,00	100%	118.763.800,00	100%	265.734.000,00	76.92 %	255.166.200,00	76,92	96,02	76.92 %	373.930.000,00	76,92	52,64

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)														
366	4.406.43.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	74.996.100,00	100%	14.030.000,00	100%	9.600.000,00	75%	5.352.600,00	75	55,76	75%	19.382.600,00	75	25,84
367	4.406.43.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	1.427.685.150,00	100%	495.243.900,00	100%	274.099.800,00	100%	263.136.800,00	100	96	100%	758.380.700,00	100	53,12
368	4.406.43.05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan	100%	2.166.061.400,00	100%	908.570.700,00	100%	1.506.715.200,00	98,85 %	1.462.130.400,00	98,85	97,04	98,85 %	2.370.701.100,00	98,85	109,45
	4.406.44	BAGIAN UMUM			62.660.131.017,00		21.108.043.625,00		20.568.867.000,00		19.943.711.509,00				41.051.755.134,00		
369	4.406.44.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	9.663.773.829,00	100%	7.274.172.800,00	100%	1.175.654.300,00	100%	1.117.470.900,00	100	95,05	100%	8.391.643.700,00	100	86,84
370	4.406.44.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.750.293.224,00	100%	1.196.684.805,00	100%	166.170.390,00	100%	163.801.340,00	100	98,57	100%	1.360.486.145,00	100	77,73
371	4.406.44.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	132.576.157,00	100%	31.432.500,00	100%	31.750.000,00	95%	30.250.000,00	95	95,28	95%	61.682.500,00	95	46,53
372	4.406.44.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100.964.240,00	100%	26.945.000,00	100%	59.705.000,00	100%	54.140.000,00	100	90,68	100%	81.085.000,00	100	80,31
373	4.406.44.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja	100%	171.298.769,00	100%	28.822.000,00	100%	22.212.000,00	100%	20.113.600,00	100	90,55	100%	48.935.600,00	100	28,57

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)														
374	4.406.44.06	PROGRAM PELAYANAN UMUM	Prosentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)	100%	50.841.224.798,00	100%	12.549.986.520,00	100%	19.113.375.310,00	100%	18.557.935.669,00	100	97,09	100%	31.107.922.189,00	100	61,19
			Presentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)	0%		100%		100%		100%		100		100%		0	
			Persentase Pelaksanaan Pelayanan Umum (%)	0%		100%		100%		100%		100		100%		0	
	4.406.45	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL			15.576.091.001,00		7.350.883.460,00		4.301.499.200,00		4.267.978.644,00				11.618.862.104,00		
375	4.406.45.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	2.839.550.863,00	100%	965.636.245,00	100%	1.176.634.107,00	98,25 %	1.156.050.744,00	98,25	98,25	98,25 %	2.121.686.989,00	98,25	74,72
376	4.406.45.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	360.685.963,00	100%	122.231.800,00	100%	57.104.333,00	82,62 %	51.081.700,00	82,62	89,45	82,62 %	173.313.500,00	82,62	48,05
377	4.406.45.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	290.770.250,00	100%	90.252.000,00	100%	58.677.960,00	96,34 %	56.528.000,00	96,34	96,34	96,34 %	146.780.000,00	96,34	50,48
378	4.406.45.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	77.625.625,00	100%	29.560.000,00	100%	16.350.000,00	99,91 %	16.350.000,00	99,91	100	99,91 %	45.910.000,00	99,91	59,14
379	4.406.45.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15.055.750,00	100%	5.100.000,00	100%	6.292.000,00	93,8 %	5.862.000,00	93,8	93,17	93,8 %	10.962.000,00	93,8	72,81

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAN KEUANGAN															
380	4.406.45.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN DAN KEPROTOKOLAN	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH	90%	11.992.402.550,00	90%	6.138.103.415,00	90%	2.986.440.800,00	99,85 %	2.982.106.200,00	110,94	99,85	99,85 %	9.120.209.615,00	110,94	76,05
	4.406.46	BAGIAN TATA USAHA			17.910.768.500,00		6.869.360.400,00		14.186.947.000,00		14.105.351.922,00				20.974.712.322,00		
381	4.406.46.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	6.820.505.500,00	100%	3.784.835.800,00	100%	2.040.880.200,00	100%	2.032.784.699,00	100	99,6	100%	5.817.620.499,00	100	85,3
382	4.406.46.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	2.743.239.500,00	98%	897.617.650,00	98%	9.058.987.400,00	98%	9.047.428.100,00	100	99,87	98%	9.945.045.750,00	98	362,53
383	4.406.46.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	147.150.000,00	97%	66.733.600,00	97%	64.025.000,00	97%	63.517.400,00	100	99,21	97%	130.251.000,00	97	88,52
384	4.406.46.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	156.146.000,00	100%	116.321.000,00	100%	169.540.000,00	100%	169.467.900,00	100	99,96	100%	285.788.900,00	100	183,03
385	4.406.46.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	68.682.000,00	100%	32.507.000,00	100%	6.617.000,00	100%	6.617.000,00	100	100	100%	39.124.000,00	100	56,96
386	4.406.46.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KETATAUSAHAAN	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)	100%	7.975.045.500,00	98%	1.971.345.350,00	98%	2.846.897.400,00	97%	2.785.536.823,00	98,98	97,84	97%	4.756.882.173,00	97	59,65
	4.406	BAGIAN ADMINISTRASI			9.608.555.500,00		2.382.355.250,00		3.001.264.200,00		2.901.857.282,00				5.284.212.532,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.47	KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL			00		00		00		00				00		
387	4.406 .47.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.402.161.500,00	100%	513.326.750,00	100%	397.209.200,00	96%	341.849.482,00	96	86,06	96%	855.176.232,00	96	60,99
388	4.406 .47.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	90%	287.075.000,00	90%	55.976.000,00	90%	41.606.000,00	90%	40.068.800,00	100	96,31	90%	96.044.800,00	100	33,46
389	4.406 .47.0 3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	111.119.000,00	100%	32.250.000,00	100%	18.885.000,00	100%	18.885.000,00	100	100	100%	51.135.000,00	100	46,02
390	4.406 .47.0 4	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	42.875.000,00	100%	9.855.000,00	100%	11.115.000,00	100%	11.115.000,00	100	100	100%	20.970.000,00	100	48,91
391	4.406 .47.0 5	PROGRAM ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL	Presentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental	100%	7.765.325.000,00	100%	1.770.947.500,00	100%	2.532.449.000,00	100%	2.489.939.000,00	100	98,32	100%	4.260.886.500,00	100	54,87
	4.406 .48	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM			4.807.847.256,00		1.416.078.125,00		1.214.611.600,00		1.212.885.434,00				2.628.963.559,00		
392	4.406 .48.0 1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.366.847.943,00	100%	561.571.000,00	100%	423.493.600,00	113.61 %	423.208.264,00	113,61	99,93	113.61 %	984.779.264,00	113,61	72,05
393	4.406 .48.0 2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	459.740.563,00	100%	236.832.700,00	100%	58.547.000,00	87.62 %	58.423.900,00	87,62	99,79	87.62 %	295.256.600,00	87,62	64,22

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
394	4.406.48.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	54.100.000,00	100%	9.600.000,00	100%	16.560.000,00	100%	16.559.520,00	100	100	100%	26.159.520,00	100	48,35
395	4.406.48.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	398.085.000,00	100%	126.240.000,00	100%	74.691.000,00	100%	74.610.000,00	100	99,89	100%	200.850.000,00	100	50,45
396	4.406.48.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	42.549.500,00	100%	10.616.000,00	100%	3.600.000,00	100%	3.600.000,00	100	100	100%	14.216.000,00	100	33,41
397	4.406.48.06	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang Direkomendasikan	100%	2.486.524.250,00	100%	471.218.425,00	100%	637.720.000,00	100%	636.483.750,00	100	99,81	100%	1.107.702.175,00	100	44,55
	4.406.49	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT			6.172.991.645,00		1.962.849.089,00		1.633.196.200,00		1.562.179.722,00				3.525.028.811,00		
398	4.406.49.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.981.322.337,00	100%	754.973.300,00	100%	559.752.700,00	97.64 %	520.921.672,00	97,64	93,06	97.64 %	1.275.894.972,00	97,64	64,4
399	4.406.49.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	240.895.708,00	100%	93.472.850,00	100%	46.143.000,00	96.94 %	40.690.300,00	96,94	88,18	96.94 %	134.163.150,00	96,94	55,69
400	4.406.49.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	35.244.800,00	100%	11.015.200,00	100%	12.378.000,00	100%	12.296.700,00	100	99,34	100%	23.311.900,00	100	66,14
401	4.406.49.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di	100%	24.000.000,00	100%	0	100%	8.320.000,00	13.46 %	1.120.000,00	13,46	13,46	13.46 %	1.120.000,00	13,46	4,67

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAYA APARATUR	Perangkat Daerah (%)														
402	4.406.49.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	351.898.200,00	100%	87.175.200,00	100%	18.167.000,00	100%	18.167.000,00	100	100	100%	105.342.200,00	100	29,94
403	4.406.49.06	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	90%	3.539.630.600,00	90%	1.016.212.539,00	90%	988.435.500,00	90%	968.984.050,00	100	98,03	90%	1.985.196.589,00	100	56,08
	4.406.50	KECAMATAN PUJON			2.486.255.000,00		933.273.000,00		644.903.000,00		635.633.000,00				1.568.906.000,00		
404	4.406.50.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	248.216.000,00	100%	65.654.000,00	100%	121.772.800,00	100%	121.772.800,00	100	100	100%	187.426.800,00	100	75,51
405	4.406.50.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.764.805.000,00	100%	678.285.000,00	100%	448.986.600,00	100%	439.716.600,00	100	97,94	100%	1.118.001.600,00	100	63,35
406	4.406.50.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	434.964.000,00	100%	175.079.000,00	100%	67.428.600,00	100%	67.428.600,00	100	100	100%	242.507.600,00	100	55,75
407	4.406.50.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	11.040.000,00	100%	3.840.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100	100	100%	5.040.000,00	100	45,65
408	4.406.50.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	27.230.000,00	100%	10.415.000,00	100%	5.515.000,00	100%	5.515.000,00	100	100	100%	15.930.000,00	100	58,5

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
		CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	yang Tepat Waktu (%)														
	4.406.51	KECAMATAN NGANTANG			2.553.840.000,00		996.340.000,00		652.722.400,00		652.722.360,00				1.649.062.360,00		
409	4.406.51.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan tugas Umum pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	453.994.000,00	100%	175.986.000,00	100%	92.537.000,00	100%	92.537.000,00	100	100	100%	268.523.000,00	100	59,15
410	4.406.51.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.743.806.000,00	100%	685.186.000,00	100%	448.396.400,00	100%	448.396.360,00	100	100	100%	1.133.582.360,00	100	65,01
411	4.406.51.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	299.180.000,00	100%	108.668.000,00	100%	87.704.000,00	100%	87.704.000,00	100	100	100%	196.372.000,00	100	65,64
412	4.406.51.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	21.580.000,00	100%	10.420.000,00	100%	14.220.000,00	100%	14.220.000,00	100	100	100%	24.640.000,00	100	114,18
413	4.406.51.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	23.280.000,00	100%	9.780.000,00	100%	7.500.000,00	100%	7.500.000,00	100	100	100%	17.280.000,00	100	74,23
414	4.406.51.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	12.000.000,00	100%	6.300.000,00	100%	2.365.000,00	100%	2.365.000,00	100	100	100%	8.665.000,00	100	72,21
	4.406.52	KECAMATAN KASEMBON			2.544.250.000,00		999.250.000,00		628.722.400,00		628.722.400,00				1.627.972.400,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
415	4.406.52.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	409.724.000,00	100%	135.161.000,00	100%	88.477.000,00	100%	88.477.000,00	100	100	100%	223.638.000,00	100	54,58
416	4.406.52.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.725.634.000,00	100%	672.125.000,00	100%	420.104.400,00	100%	420.104.400,00	100	100	100%	1.092.229.400,00	100	63,29
417	4.406.52.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	332.692.000,00	100%	161.214.000,00	100%	94.791.000,00	100%	94.791.000,00	100	100	100%	256.005.000,00	100	76,95
418	4.406.52.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49.200.000,00	100%	20.400.000,00	100%	23.400.000,00	100%	23.400.000,00	100	100	100%	43.800.000,00	100	89,02
419	4.406.52.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24.000.000,00	100%	9.600.000,00	100%	1.200.000,00	100%	1.200.000,00	100	100	100%	10.800.000,00	100	45
420	4.406.52.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	3.000.000,00	100%	750.000,00	100%	750.000,00	100%	750.000,00	100	100	100%	1.500.000,00	100	50
	4.406.53	KECAMATAN LAWANG			5.029.680.000,00		1.952.381.200,00		1.862.082.000,00		1.853.449.100,00				3.805.830.300,00		
421	4.406.53.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	129.116.000,00	100%	39.854.000,00	100%	880.238.250,00	100%	880.238.250,00	100	100	100%	920.092.250,00	100	712,61
422	4.406.53.0	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Pemenuhan	100%	3.542.259.000,00	100%	1.433.681.000,00	100%	796.219.650,00	100%	787.957.750,00	100	98,96	100%	2.221.638.750,00	100	62,72

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Perkantoran (%)														
423	4.406.53.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.238.575.000,00	100%	434.291.200,00	100%	161.499.100,00	100%	161.128.100,00	100	99,77	100%	595.419.300,00	100	48,07
424	4.406.53.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	92.830.000,00	100%	31.080.000,00	100%	17.100.000,00	100%	17.100.000,00	100	100	100%	48.180.000,00	100	51,9
425	4.406.53.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	17.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	4.000.000,00	100	100	100%	12.000.000,00	100	70,59
426	4.406.53.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	9.900.000,00	100%	5.475.000,00	100%	3.025.000,00	100%	3.025.000,00	100	100	100%	8.500.000,00	100	85,86
	4.406.54	KECAMATAN SINGOSARI			6.150.387.000,00		2.365.137.500,00		2.482.220.000,00		1.975.429.440,00				4.340.566.940,00		
427	4.406.54.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	487.824.000,00	100%	109.961.000,00	100%	1.255.285.200,00	79,48 %	761.219.880,00	79,48	60,64	79,48 %	871.180.880,00	79,48	178,59
428	4.406.54.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	3.781.875.600,00	100%	1.563.401.600,00	100%	906.226.000,00	100%	898.408.000,00	100	99,14	100%	2.461.809.600,00	100	65,09
429	4.406.54.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	100%	1.593.834.400,00	100%	606.071.900,00	100%	290.958.800,00	100%	286.051.560,00	100	98,31	100%	892.123.460,00	100	55,97

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		APARATUR	(%)														
430	4.406.54.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	109.233.000,00	100%	52.083.000,00	100%	19.850.000,00	100%	19.850.000,00	100	100	100%	71.933.000,00	100	65,85
431	4.406.54.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	106.800.000,00	100%	9.600.000,00	100%	8.640.000,00	100%	8.640.000,00	100	100	100%	18.240.000,00	100	17,08
432	4.406.54.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	70.820.000,00	100%	24.020.000,00	100%	1.260.000,00	100%	1.260.000,00	100	100	100%	25.280.000,00	100	35,7
	4.406.55	KECAMATAN KARANGPLOSO			2.524.356.000,00		979.356.000,00		597.083.600,00		521.960.650,00				1.501.316.650,00		
433	4.406.55.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100 Persen	663.455.000,00	100 Persen	216.463.000,00	100 Persen	222.684.000,00	91 Persen	190.930.000,00	91	85,74	91 Persen	407.393.000,00	91	61,4
434	4.406.55.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100 Persen	1.545.401.000,00	100 Persen	646.702.400,00	100 Persen	307.764.600,00	100 Persen	286.637.650,00	100	93,14	100 Persen	933.340.050,00	100	60,39
435	4.406.55.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100 Persen	189.280.000,00	100 Persen	78.610.600,00	100 Persen	49.345.000,00	93 Persen	27.103.000,00	93	54,93	93 Persen	105.713.600,00	93	55,85
436	4.406.55.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100 Persen	126.220.000,00	100 Persen	37.580.000,00	100 Persen	17.290.000,00	100 Persen	17.290.000,00	100	100	100 Persen	54.870.000,00	100	43,47
	4.406.56	KECAMATAN DAU			2.560.000.000,00		948.618.250,00		604.541.800,00		598.660.900,00				1.547.279.150,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
437	4.406.56.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	418.785.000,00	100%	109.680.000,00	100%	152.020.000,00	97%	152.020.000,00	97	100	97%	261.700.000,00	97	62,49
438	4.406.56.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.562.657.000,00	100%	633.568.750,00	100%	322.291.800,00	82.36 %	319.497.350,00	82,36	99,13	82.36 %	953.066.100,00	82,36	60,99
439	4.406.56.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	416.198.000,00	100%	167.544.500,00	100%	93.280.000,00	96.76 %	90.263.550,00	96,76	96,77	96.76 %	257.808.050,00	96,76	61,94
440	4.406.56.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	117.885.000,00	100%	13.150.000,00	100%	26.000.000,00	99.73 %	25.930.000,00	99,73	99,73	99.73 %	39.080.000,00	99,73	33,15
441	4.406.56.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	44.475.000,00	100%	24.675.000,00	100%	10.950.000,00	99.99 %	10.950.000,00	99,99	100	99.99 %	35.625.000,00	99,99	80,1
	4.406.57	KECAMATAN PAKIS			2.479.150.000,00		944.049.000,00		620.722.400,00		614.569.800,00				1.558.618.800,00		
442	4.406.57.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	624.591.500,00	100%	194.033.500,00	100%	206.299.000,00	100%	205.590.000,00	100	99,66	100%	399.623.500,00	100	63,98
443	4.406.57.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.462.439.200,00	100%	573.767.700,00	100%	289.477.900,00	100%	284.684.300,00	100	98,34	100%	858.452.000,00	100	58,7
444	4.406	PROGRAM	Persentase	100%	321.012.300,00	100%	161.271.800,00	100%	101.395.500,00	100%	100.745.500,00	100	99,36	100%	262.017.300,00	100	81,62

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
	.57.0 3	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)														
445	4.406 .57.0 4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	19.315.000,00	100%	0	100%	8.085.000,00	100%	8.085.000,00	100	100	100%	8.085.000,00	100	41,86
446	4.406 .57.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	36.500.000,00	100%	9.500.000,00	100%	12.175.000,00	100%	12.175.000,00	100	100	100%	21.675.000,00	100	59,38
447	4.406 .57.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	15.292.000,00	100%	5.476.000,00	100%	3.290.000,00	100%	3.290.000,00	100	100	100%	8.766.000,00	100	57,32
	4.406 .58	KECAMATAN JABUNG			2.461.825.000,00		938.328.200,00		645.083.600,00		645.083.600,00				1.583.411.800,00		
448	4.406 .58.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	100%	611.732.000,00	100%	203.426.000,00	100%	72.301.500,00	100%	72.301.500,00	100	100	100%	275.727.500,00	100	45,07
449	4.406 .58.0 2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.441.345.000,00	100%	618.656.200,00	100%	484.632.100,00	100%	484.632.100,00	100	100	100%	1.103.288.300,00	100	76,55
450	4.406 .58.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	322.790.000,00	100%	90.623.000,00	100%	38.930.000,00	100%	38.930.000,00	100	100	100%	129.553.000,00	100	40,14
451	4.406 .58.0 4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	17.125.000,00	100%	6.200.000,00	100%	38.820.000,00	100%	38.820.000,00	100	100	100%	45.020.000,00	100	262,89
452	4.406	PROGRAM	Persentase	100%	33.000.000,00	100%	15.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100	100	100%	21.000.000,00	100	63,64

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.58.0 5	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)														
453	4.406 .58.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	35.833.000,00	100%	4.423.000,00	100%	4.400.000,00	100%	4.400.000,00	100	100	100%	8.823.000,00	100	24,62
	4.406 .59	KECAMATAN TUMPANG			2.347.791.000,00		812.495.300,00		660.903.000,00		596.383.200,00				1.408.878.500,00		
454	4.406 .59.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	506.947.000,00	100%	40.847.500,00	100%	176.582.000,00	100%	158.148.950,00	100	89,56	100%	198.996.450,00	100	39,25
455	4.406 .59.0 2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.705.350.500,00	100%	694.912.800,00	100%	414.557.000,00	100%	372.627.750,00	100	89,89	100%	1.067.540.550,00	100	62,6
456	4.406 .59.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	121.401.500,00	100%	71.028.000,00	100%	67.083.000,00	100%	63.038.000,00	100	93,97	100%	134.066.000,00	100	110,43
457	4.406 .59.0 4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.092.000,00	100%	5.707.000,00	100%	2.681.000,00	100%	2.568.500,00	100	95,8	100%	8.275.500,00	100	58,72
	4.406 .60	KECAMATAN PONCOKUSUMO			2.506.335.000,00		961.335.000,00		668.722.400,00		668.722.400,00				1.630.057.400,00		
458	4.406 .60.0	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	435.210.000,00	100%	111.495.000,00	100%	242.936.000,00	100%	242.936.000,00	100	100	100%	354.431.000,00	100	81,44

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
		1 PELAYANAN KECAMATAN	Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)														
459	4.406.60.0	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.655.418.500,00	100%	674.104.000,00	100%	324.436.400,00	100%	324.436.400,00	100	100	100%	998.540.400,00	100	60,32
460	4.406.60.0	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	355.144.000,00	100%	151.511.000,00	100%	89.110.000,00	100%	89.110.000,00	100	100	100%	240.621.000,00	100	67,75
461	4.406.60.0	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	60.562.500,00	100%	24.225.000,00	100%	12.240.000,00	100%	12.240.000,00	100	100	100%	36.465.000,00	100	60,21
	4.406.61	KECAMATAN BULULAWANG			2.471.158.000,00		929.758.000,00		628.903.000,00		626.881.700,00				1.556.639.700,00		
462	4.406.61.0	PROGRAM Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terasilitasi (%)	100%	347.580.000,00	100%	80.250.000,00	100%	153.090.000,00	100%	151.068.700,00	100	98,68	100%	231.318.700,00	100	66,55
463	4.406.61.0	PROGRAM Peningkatan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.355.685.000,00	100%	561.159.000,00	100%	323.955.300,00	100%	323.955.300,00	100	100	100%	885.114.300,00	100	65,29
464	4.406.61.0	PROGRAM Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	676.493.000,00	100%	263.579.000,00	100%	129.647.700,00	100%	129.647.700,00	100	100	100%	393.226.700,00	100	58,13
465	4.406.61.0	PROGRAM Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	22.950.000,00	100%	0	100%	7.650.000,00	100%	7.650.000,00	100	100	100%	7.650.000,00	100	33,33
466	4.406	PROGRAM	Persentase Dokumen	100%	68.450.000,00	100%	24.770.000,00	100%	14.560.000,00	100%	14.560.000,00	100	100	100%	39.330.000,00	100	57,46

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.61.05	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)														
	4.406.62	KECAMATAN GONDANGLEGI			2.461.581.000,00		926.181.000,00		596.903.000,00		596.903.000,00				1.523.084.000,00		
467	4.406.62.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	336.232.000,00	100%	69.458.000,00	100%	165.058.000,00	100%	165.058.000,00	100	100	100%	234.516.000,00	100	69,75
468	4.406.62.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.582.622.000,00	100%	633.912.000,00	100%	351.708.000,00	100%	351.708.000,00	100	100	100%	985.620.000,00	100	62,28
469	4.406.62.03	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	459.427.000,00	100%	193.511.000,00	100%	62.137.000,00	100%	62.137.000,00	100	100	100%	255.648.000,00	100	55,64
470	4.406.62.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	74.300.000,00	100%	25.700.000,00	100%	16.200.000,00	100%	16.200.000,00	100	100	100%	41.900.000,00	100	56,39
471	4.406.62.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	9.000.000,00	100%	3.600.000,00	100%	1.800.000,00	100%	1.800.000,00	100	100	100%	5.400.000,00	100	60
	4.406.63	KECAMATAN PAGELARAN			1.993.320.000,00		893.350.000,00		588.541.800,00		588.541.800,00				1.481.891.800,00		
472	4.406.63.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan (%)	100%	289.600.000,00	100%	77.560.000,00	100%	143.528.000,00	100%	143.528.000,00	100	100	100%	221.088.000,00	100	76,34
473	4.406	PROGRAM	Persentase	100%	1.230.632.000,00	100%	622.128.000,00	100%	312.241.800,00	100%	312.241.800,00	100	100	100%	934.369.800,00	100	75,93

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					0												
474	4.406 .63.0 3	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	330.800.000,00	100%	172.865.000,00	100%	90.700.000,00	100%	90.700.000,00	100	100	100%	263.565.000,00	100	79,68
475	4.406 .63.0 4	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	48.500.000,00	100%	12.125.000,00	100%	18.625.000,00	100%	18.625.000,00	100	100	100%	30.750.000,00	100	63,4
476	4.406 .63.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	63.100.000,00	100%	0	100%	15.775.000,00	100%	15.775.000,00	100	100	100%	15.775.000,00	100	25
477	4.406 .63.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	30.688.000,00	100%	8.672.000,00	100%	7.672.000,00	100%	7.672.000,00	100	100	100%	16.344.000,00	100	53,26
	4.406 .64	KECAMATAN TAJINAN			2.542.281.000,00		996.561.000,00		612.903.000,00		610.684.164,00				1.607.245.164,00		
478	4.406 .64.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	413.115.000,00	100%	132.264.500,00	100%	94.451.300,00	100%	94.451.300,00	100	100	100%	226.715.800,00	100	54,88
479	4.406 .64.0 2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.553.221.000,00	100%	662.516.500,00	100%	417.038.200,00	100%	414.819.364,00	100	99,47	100%	1.077.335.864,00	100	69,36
480	4.406 .64.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%	300.830.000,00	100%	116.912.000,00	100%	68.257.000,00	100%	68.257.000,00	100	100	100%	185.169.000,00	100	61,55

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PRASARANA APARATUR	Penunjang Aparatur (%)														
481	4.406.64.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	43.320.000,00	100%	14.060.000,00	100%	9.338.500,00	100%	9.338.500,00	100	100	100%	23.398.500,00	100	54,01
482	4.406.64.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	159.025.000,00	100%	63.610.000,00	100%	8.270.000,00	100%	8.270.000,00	100	100	100%	71.880.000,00	100	45,2
483	4.406.64.06	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	72.770.000,00	100%	7.198.000,00	100%	15.548.000,00	100%	15.548.000,00	100	100	100%	22.746.000,00	100	31,26
	4.406.65	KECAMATAN BANTUR			2.555.060.000,00		1.010.060.000,00		636.541.800,00		634.597.800,00				1.644.657.800,00		
484	4.406.65.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	403.185.000,00	100%	138.966.000,00	100%	108.290.000,00	100%	108.290.000,00	100	100	100%	247.256.000,00	100	61,33
485	4.406.65.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.369.311.000,00	100%	563.724.000,00	100%	351.012.400,00	100%	349.068.400,00	100	99,45	100%	912.792.400,00	100	66,66
486	4.406.65.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	600.360.000,00	100%	222.906.000,00	100%	140.150.500,00	100%	140.150.500,00	100	100	100%	363.056.500,00	100	60,47
487	4.406.65.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	81.240.000,00	100%	30.570.000,00	100%	16.400.000,00	100%	16.400.000,00	100	100	100%	46.970.000,00	100	57,82
488	4.406.65.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di	100%	52.000.000,00	100%	30.400.000,00	100%	8.200.000,00	100%	8.200.000,00	100	100	100%	38.600.000,00	100	74,23

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		DAYA APARATUR	Perangkat Daerah (%)														
489	4.406.65.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	48.964.000,00	100%	23.494.000,00	100%	12.488.900,00	100%	12.488.900,00	100	100	100%	35.982.900,00	100	73,49
	4.406.66	KECAMATAN GEDANGAN			2.544.160.000,00		999.156.000,00		636.541.800,00		636.531.550,00				1.635.687.550,00		
490	4.406.66.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	336.390.000,00	100%	131.616.000,00	100%	143.272.000,00	100%	143.269.400,00	100	100	100%	274.885.400,00	100	81,72
491	4.406.66.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.514.960.600,00	100%	614.353.600,00	100%	353.983.800,00	100%	353.976.950,00	100	100	100%	968.330.550,00	100	63,92
492	4.406.66.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	554.770.400,00	100%	195.067.400,00	100%	112.456.000,00	100%	112.455.600,00	100	100	100%	307.523.000,00	100	55,43
493	4.406.66.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	75.600.000,00	100%	30.240.000,00	100%	8.330.000,00	100%	8.329.600,00	100	100	100%	38.569.600,00	100	51,02
494	4.406.66.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	62.439.000,00	100%	27.879.000,00	100%	18.500.000,00	100%	18.500.000,00	100	100	100%	46.379.000,00	100	74,28
	4.406.67	KECAMATAN WAJAK			1.909.593.000,00		340.635.000,00		620.541.800,00		619.558.100,00				960.193.100,00		

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
495	4.406.67.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	0%	873.460.000,00	100%	0	100%	351.660.050,00	99,48 %	350.676.250,00	99,48	99,72	99,48 %	350.676.250,00	0	40,15
496	4.406.67.02	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	480.930.000,00	100%	115.232.500,00	100%	117.983.250,00	99,82 %	117.983.250,00	99,82	100	99,82 %	233.215.750,00	99,82	48,49
497	4.406.67.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	415.318.000,00	80%	194.552.500,00	80%	120.588.500,00	99,51 %	120.588.600,00	124,39	100	99,51 %	315.141.100,00	99,51	75,88
498	4.406.67.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	50.625.000,00	100%	0	100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100	100	100%	11.000.000,00	100	21,73
499	4.406.67.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	42.400.000,00	100%	15.400.000,00	100%	8.840.000,00	100%	8.840.000,00	100	100	100%	24.240.000,00	100	57,17
500	4.406.67.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	46.860.000,00	100%	15.450.000,00	100%	10.470.000,00	99%	10.470.000,00	99	100	99%	25.920.000,00	99	55,31
	4.406.68	KECAMATAN TUREN			4.733.600.000,00		1.837.824.000,00		1.830.623.800,00		1.773.211.000,00				3.611.035.000,00		
501	4.406.68.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang Terfasilitasi (%)	100%	448.932.000,00	100%	162.460.000,00	100%	836.726.000,00	99,5 %	780.213.200,00	99,5	93,25	99,5 %	942.673.200,00	99,5	209,98
502	4.406.68.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase Pemenuhan Operasional	100%	3.198.440.000,00	100%	1.362.744.000,00	100%	853.399.700,00	99,8 %	852.499.700,00	99,8	99,89	99,8 %	2.215.243.700,00	99,8	69,26

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		PERKANTORAN	Perkantoran (%)														
503	4.406.68.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	951.228.000,00	100%	241.620.000,00	100%	99.793.100,00	100%	99.793.100,00	100	100	100%	341.413.100,00	100	35,89
504	4.406.68.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	135.000.000,00	100%	71.000.000,00	100%	40.705.000,00	100%	40.705.000,00	100	100	100%	111.705.000,00	100	82,74
	4.406.69	KECAMATAN DAMPIT			3.130.900.000,00		1.417.142.000,00		1.233.402.200,00		1.125.178.200,00				2.542.320.200,00		
505	4.406.69.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	422.310.000,00	100%	141.095.000,00	100%	432.280.000,00	100%	324.056.000,00	100	74,96	100%	465.151.000,00	100	110,14
506	4.406.69.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.894.736.000,00	100%	1.010.823.000,00	100%	627.060.800,00	100%	627.060.800,00	100	100	100%	1.637.883.800,00	100	86,44
507	4.406.69.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	610.484.000,00	100%	194.344.000,00	100%	139.578.900,00	100%	139.578.900,00	100	100	100%	333.922.900,00	100	54,7
508	4.406.69.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	21.900.000,00	100%	4.050.000,00	100%	15.812.500,00	100%	15.812.500,00	100	100	100%	19.862.500,00	100	90,7
509	4.406.69.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	76.250.000,00	100%	29.750.000,00	100%	5.500.000,00	100%	5.500.000,00	100	100	100%	35.250.000,00	100	46,23
510	4.406.69.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	105.220.000,00	100%	37.080.000,00	100%	13.170.000,00	100%	13.170.000,00	100	100	100%	50.250.000,00	100	47,76

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
		CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	yang Tepat Waktu (%)														
	4.406.70	KECAMATAN AMPELGADING			2.560.000.000,00		1.000.760.000,00		644.361.200,00		636.511.700,00				1.637.271.700,00		
511	4.406.70.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	713.033.000,00	100%	232.508.500,00	100%	181.433.000,00	100%	181.433.000,00	100	100	100%	413.941.500,00	100	58,05
512	4.406.70.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.194.929.000,00	100%	539.750.500,00	100%	274.331.200,00	100%	274.331.200,00	100	100	100%	814.081.700,00	100	68,13
513	4.406.70.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	577.909.000,00	80%	200.598.000,00	80%	162.447.000,00	69%	154.597.000,00	86,25	95,17	69%	355.195.000,00	69	61,46
514	4.406.70.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	34.000.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.500.000,00	100%	8.500.000,00	100	100	100%	17.000.000,00	100	50
515	4.406.70.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	40.129.000,00	100%	19.403.000,00	100%	17.650.000,00	100%	17.650.500,00	100	100	100%	37.053.500,00	100	92,34
	4.406.71	KECAMATAN TIRTOYUDO			2.525.127.500,00		955.244.500,00		636.722.400,00		636.067.400,00				1.591.311.900,00		
516	4.406.71.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi	100%	400.263.000,00	100%	157.068.000,00	100%	127.048.000,00	100%	127.048.000,00	100	100	100%	284.116.000,00	100	70,98
517	4.406	PROGRAM	Persentase	100%	1.801.202.000,00	100%	701.763.500,00	100%	437.555.900,00	99,85 %	436.900.900,00	99,85	99,85	99,85 %	1.138.664.400,00	99,85	63,22

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
					0									0			
	.71.0 2	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)														
518	4.406 .71.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	285.802.500,00	100%	86.085.000,00	100%	62.484.000,00	100%	62.484.000,00	100	100	100%	148.569.000,00	100	51,98
519	4.406 .71.0 4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	11.040.000,00	100%	0	100%	4.240.000,00	100%	4.240.000,00	100	100	100%	4.240.000,00	100	38,41
520	4.406 .71.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	26.820.000,00	100%	10.328.000,00	100%	5.394.500,00	100%	5.394.500,00	100	100	100%	15.722.500,00	100	58,62
	4.406 .72	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN			2.486.580.000,00		943.906.000,00		629.264.200,00		624.592.205,00				1.568.498.205,00		
521	4.406 .72.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi	500%	337.200.000,00	100%	63.000.000,00	100%	88.400.000,00	100%	88.400.000,00	100	100	200%	151.400.000,00	40	44,9
522	4.406 .72.0 2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.703.140.000,00	100%	715.880.000,00	100%	447.489.200,00	98,81 %	442.844.805,00	98,81	98,96	98,81 %	1.158.724.805,00	98,81	68,03
523	4.406 .72.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	373.240.000,00	100%	140.526.000,00	100%	71.125.000,00	100%	71.097.400,00	100	99,96	100%	211.623.400,00	100	56,7
524	4.406 .72.0 4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	49.000.000,00	100%	14.500.000,00	100%	14.250.000,00	100%	14.250.000,00	100	100	100%	28.750.000,00	100	58,67

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
525	4.406 .72.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapabilitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	24.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100	100	100%	18.000.000,00	100	75
526	4.406 .73.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	563.304.000,00	100%	228.004.000,00	100%	1.545.918.000,00	100%	1.098.167.900,00	100	71,04	100%	1.326.171.900,00	100	235,43
	4.406 .73	KECAMATAN KEPANJEN			7.031.962.500,00		2.556.060.000,00		3.096.886.400,00		2.535.218.386,00				5.091.278.386,00		
527	4.406 .73.0 2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	4.474.916.250,00	100%	1.713.507.750,00	100%	1.205.386.900,00	100%	1.095.770.570,00	100	90,91	100%	2.809.278.320,00	100	62,78
528	4.406 .73.0 3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	1.739.835.000,00	100%	498.548.000,00	100%	289.535.000,00	100%	285.273.416,00	100	98,53	100%	783.821.416,00	100	45,05
529	4.406 .73.0 4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	239.336.250,00	100%	106.226.250,00	100%	52.600.000,00	100%	52.600.000,00	100	100	100%	158.826.250,00	100	66,36
530	4.406 .73.0 5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	14.571.000,00	100%	9.774.000,00	100%	3.446.500,00	100%	3.406.500,00	100	98,84	100%	13.180.500,00	100	90,46
	4.406 .74	KECAMATAN PAKISAJI			2.553.475.000,00		1.006.854.000,00		589.083.600,00		585.714.450,00				1.592.568.450,00		
531	4.406 .74.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang	100%	215.855.000,00	100%	73.520.000,00	100%	56.350.000,00	100%	56.350.000,00	100	100	100%	129.870.000,00	100	60,17

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
			terfasilitasi (%)														
532	4.406.74.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.748.929.000,00	100%	685.935.000,00	100%	414.875.100,00	100%	414.205.950,00	100	99,84	100%	1.100.140.950,00	100	62,9
533	4.406.74.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	527.475.000,00	100%	222.793.000,00	100%	103.726.000,00	100%	101.026.000,00	100	97,4	100%	323.819.000,00	100	61,39
534	4.406.74.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	26.016.000,00	100%	10.406.000,00	100%	6.132.500,00	100%	6.132.500,00	100	100	100%	16.538.500,00	100	63,57
535	4.406.74.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	35.200.000,00	100%	14.200.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100	100	100%	22.200.000,00	100	63,07
	4.406.75	KECAMATAN NGAJUM			2.542.980.000,00		997.980.000,00		612.541.800,00		612.541.800,00				1.610.521.800,00		
536	4.406.75.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi	100%	349.714.000,00	100%	131.856.000,00	100%	66.693.010,00	100%	66.693.010,00	100	100	100%	198.549.010,00	100	56,77
537	4.406.75.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.718.171.200,00	100%	676.722.200,00	100%	438.057.259,00	100%	438.057.259,00	100	100	100%	1.114.779.459,00	100	64,88
538	4.406.75.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	385.957.000,00	100%	150.454.000,00	100%	84.013.225,00	100%	84.013.225,00	100	100	100%	234.467.225,00	100	60,75
539	4.406.75.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	17.000.000,00	100%	4.250.000,00	100%	7.516.306,00	100%	7.516.306,00	100	100	100%	11.766.306,00	100	69,21
540	4.406	PROGRAM	Persentase	100%	39.030.000,00	100%	13.740.000,00	100%	12.220.000,00	100%	12.220.000,00	100	100	100%	25.960.000,00	100	66,51

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	.75.0 5	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)														
541	4.406 .75.0 6	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	33.107.800,00	100%	20.957.800,00	100%	4.042.000,00	100%	4.042.000,00	100	100	100%	24.999.800,00	100	75,51
	4.406 .76	KECAMATAN WAGIR			2.527.699.500,00		1.005.322.900,00		596.903.000,00		591.615.500,00				1.596.938.400,00		
542	4.406 .76.0 1	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	283.812.000,00	100%	118.953.000,00	100%	159.606.000,00	100%	159.486.800,00	100	99,93	100%	278.439.800,00	100	98,11
543	4.406 .76.0 2	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.640.181.500,00	100%	661.169.400,00	100%	357.643.000,00	100%	353.464.100,00	100	98,83	100%	1.014.633.500,00	100	61,86
544	4.406 .76.0 3	PROGRAM SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	474.566.000,00	100%	178.115.500,00	100%	57.334.000,00	100%	56.649.600,00	100	98,81	100%	234.765.100,00	100	49,47
545	4.406 .76.0 4	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	93.500.000,00	100%	24.945.000,00	100%	20.520.000,00	100%	20.265.000,00	100	98,76	100%	45.210.000,00	100	48,35
546	4.406 .76.0 5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	21.000.000,00	100%	12.000.000,00	100%	50.000,00	0%	0	0	0	0%	12.000.000,00	0	57,14
547	4.406 .76.0 6	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.640.000,00	100%	10.140.000,00	100%	1.750.000,00	100%	1.750.000,00	100	100	100%	11.890.000,00	100	81,22

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7x100		10 = 6 + 8		11=10/5x100	
		CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	yang Tepat Waktu (%)														
	4.406.77	KECAMATAN SUMBERPUCUNG			2.546.210.500,00		996.110.500,00		588.722.400,00		580.201.900,00				1.576.312.400,00		
548	4.406.77.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan	100%	472.893.400,00	80%	161.236.900,00	100%	142.160.450,00	100%	142.262.800,00	100	100,07	100%	303.499.700,00	100	64,18
549	4.406.77.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	0%	1.629.976.100,00	100%	639.413.600,00	100%	357.822.050,00	100%	350.091.900,00	100	97,84	100%	989.505.500,00	0	60,71
550	4.406.77.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	344.057.000,00	80%	154.694.000,00	100%	66.620.800,00	100%	65.558.100,00	100	98,4	100%	220.252.100,00	100	64,02
551	4.406.77.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	50.040.000,00	80%	8.910.000,00	100%	11.280.000,00	100%	11.280.000,00	100	100	100%	20.190.000,00	100	40,35
552	4.406.77.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	49.244.000,00	80%	31.856.000,00	100%	10.839.100,00	100%	11.009.100,00	100	101,57	100%	42.865.100,00	100	87,05
	4.406.78	KECAMATAN KROMENGAN			2.477.082.000,00		949.878.000,00		580.722.400,00		576.780.400,00				1.526.658.400,00		
553	4.406.78.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	203.680.000,00	100%	50.920.000,00	100%	65.537.000,00	100%	65.537.000,00	100	100	100%	116.457.000,00	100	57,18
554	4.406.78.0	PROGRAM PELAYANAN	Persentase Pemenuhan	100%	1.503.942.000,00	100%	579.134.000,00	100%	347.919.400,00	100%	347.919.400,00	100	100	100%	927.053.400,00	100	61,64

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	2	ADMINISTRASI PERKANTORAN	Operasional Perkantoran (%)														
555	4.406.78.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	606.060.000,00	100%	252.424.000,00	100%	135.441.000,00	100%	131.499.000,00	100	97,09	100%	383.923.000,00	100	63,35
556	4.406.78.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	45.000.000,00	100%	18.000.000,00	100%	8.940.000,00	100%	8.940.000,00	100	100	100%	26.940.000,00	100	59,87
557	4.406.78.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	63.400.000,00	100%	27.400.000,00	100%	11.885.000,00	100%	11.885.000,00	100	100	100%	39.285.000,00	100	61,96
558	4.406.78.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	55.000.000,00	100%	22.000.000,00	100%	11.000.000,00	100%	11.000.000,00	100	100	100%	33.000.000,00	100	60
	4.406.79	KECAMATAN WONOSARI			2.357.146.000,00		833.946.000,00		604.541.800,00		604.541.800,00				1.438.487.800,00		
559	4.406.79.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%	604.144.800,00	100%	171.416.200,00	100%	207.277.090,00	100%	207.277.090,00	100	100	100%	378.693.290,00	100	62,68
560	4.406.79.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.547.598.200,00	100%	565.942.800,00	100%	359.731.610,00	100%	359.731.610,00	100	100	100%	925.674.410,00	100	59,81
561	4.406.79.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	142.378.000,00	100%	72.037.000,00	100%	22.658.100,00	100%	22.658.100,00	100	100	100%	94.695.100,00	100	66,51

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
562	4.406.79.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	63.025.000,00	100%	24.550.000,00	100%	14.875.000,00	100%	14.875.000,00	100	100	100%	39.425.000,00	100	62,55
	4.406.80	KECAMATAN PAGAK			2.547.992.000,00		1.010.992.000,00		604.541.800,00		604.442.400,00				1.615.434.400,00		
563	4.406.80.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100%	267.000.000,00	100%	86.750.000,00	100%	40.650.500,00	100%	40.650.500,00	100	100	100%	127.400.500,00	100	47,72
564	4.406.80.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.432.477.000,00	100%	596.794.000,00	100%	360.655.800,00	100%	360.655.800,00	100	100	100%	957.449.800,00	100	66,84
565	4.406.80.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	798.515.000,00	100%	307.448.000,00	100%	195.235.500,00	100%	195.136.100,00	100	99,95	100%	502.584.100,00	100	62,94
566	4.406.80.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	50.000.000,00	100%	20.000.000,00	100%	8.000.000,00	100%	8.000.000,00	100	100	100%	28.000.000,00	100	56
	4.406.81	KECAMATAN KALIPARE			2.560.000.000,00		1.014.999.000,00		612.722.400,00		612.106.844,00				1.627.105.844,00		
567	4.406.81.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas Umum Pemerintah yang Terfasilitasi (%)	100%	340.455.000,00	100%	143.735.000,00	100%	107.714.050,00	100%	107.714.050,00	100	100	100%	251.449.050,00	100	73,86
568	4.406.81.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.437.221.800,00	100%	595.190.000,00	100%	383.357.800,00	76,05 %	382.742.244,00	76,05	99,84	76,05 %	977.932.244,00	76,05	68,04
569	4.406.81.01	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Pemenuhan Sarana	100%	669.123.200,00	100%	230.794.000,00	100%	106.210.550,00	100%	106.210.550,00	100	100	100%	337.004.550,00	100	50,37

No	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 (akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2018		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2019)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD yang dievaluasi Thn 2019 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Tahun 2019 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	3	SARANA DAN PRASARANA APARATUR	dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)														
570	4.406.81.04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	36.000.000,00	100%	14.400.000,00	100%	7.200.000,00	100%	7.200.000,00	100	100	100%	21.600.000,00	100	60
571	4.406.81.05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	100%	77.200.000,00	100%	30.880.000,00	100%	8.240.000,00	100%	8.240.000,00	100	100	100%	39.120.000,00	100	50,67
	4.406.82	KECAMATAN DONOMULYO			2.519.200.000,00		925.189.000,00		620.541.800,00		620.451.800,00				1.545.640.800,00		
572	4.406.82.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Presentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintah Kecamatan	100%	560.740.000,00	100%	177.190.000,00	100%	144.934.000,00	100%	144.844.000,00	100	99,94	100%	322.034.000,00	100	57,43
573	4.406.82.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	1.513.663.000,00	100%	658.869.000,00	100%	379.421.800,00	100%	379.421.800,00	100	100	100%	1.038.290.800,00	100	68,59
574	4.406.82.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	353.637.000,00	100%	52.270.000,00	100%	77.686.000,00	100%	77.686.000,00	100	100	100%	129.956.000,00	100	36,75
575	4.406.82.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	91.160.000,00	100%	36.860.000,00	100%	18.500.000,00	100%	18.500.000,00	100	100	100%	55.360.000,00	100	60,73

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan, masih ditemukan berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam mewujudkan target-target yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan:

- a. Indeks Pendidikan tidak dapat mengukur karena mengacu pada data dari BPS;
- b. Indeks Pendidikan di ukur dari Indeks Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Indeks Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang tidak dapat di ukur pada tahun berjalan;
- c. SPM masih mengacu pada Permendikbud No 23 Tahun 2013 tentang SPM Pendidikan Dasar (terdapat 27 indikator).

2. Urusan Kesehatan:

- a. Ketersediaan obat indikator di sarana pelayanan kesehatan dasar masih kurang dikarenakan Item obat yang terdaftar di indikator yang dikeluarkan oleh Pusdatin banyak yang tidak bisa dipakai oleh FKTP sehingga perlu mengusulkan revisi/perubahan item indikator pada Pusdatin;
- b. Perlunya meningkatkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas dikarenakan survey yang dilakukan masih perkorwil belum per Puskesmas maka diupayakan tahun selanjutnya tetap dilaksanakan survey kepuasan masyarakat per Puskesmas terhadap pelayanan kesehatan
- c. Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit sesuai dengan Permenkes No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan perizinan Rumah sakit;
- d. Perlu peningkatan Performance Pelayanan dan Optimalisasi layanan Rumah Sakit sebagai upaya meningkatkan daya saing dan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

- a. Menurunnya tingkat pelayanan jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan kabupaten akibat bencana alam, anomali cuaca dan pembebanan berlebih (overload);
- b. Terbatasnya kualitas maupun kuantitas SDM Aparatur Teknis dibidang Jalan dan Jembatan dibanding dengan beban volume pekerjaan yang ada;
- c. Masih kurangnya peralatan (alat berat) untuk menunjang kinerja pemeliharaan jalan;
- d. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas saluran drainase;

- e. Belum optimalnya upaya peningkatan pemeliharaan saluran drainase dan Jaringan drainase belum terhubung dengan optimal;
 - f. Belum memadainya prasarana penunjang jalan karena wilayah kabupaten malang yang sangat luas.
 - g. Musim kemarau panjang dapat mengakibatkan kehilangan banyak air sehingga ketersediaan debit air untuk irigasi menjadi berkurang
 - h. Sarana dan prasarana belum semua dapat dipelihara
 - i. Ketaatan petani terhadap RTTG belum maksimal
 - j. Aset belum terdata maksimal
 - k. Kondisi jaringan irigasi yang belum teridentifikasi
- 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:**
- a. Terdapat perbedaan data penduduk yang mendapatkan akses air minum antara DPKCK;
 - b. Belum ada data kejadian korban bencana kabupaten yang perlu ditangani;
 - c. Belum ada data kejadian rumah yang terkena relokasi.
- 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:**
- a. Masih rendahnya penegakan hukum;
 - b. Masih banyaknya gangguan trantibum;
 - c. Belum terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat;
 - d. Pelayanan penanganan kebakaran masih belum memenuhi SPM.
 - e. Upaya untuk menurunkan angka kriminalitas;
 - f. Upaya untuk meningkatkan Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Daerah serta Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan;
 - g. Kurangnya pemahaman Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
 - h. Upaya meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga kerukunan umat beragama;
 - i. Kurangnya kesadaran pengetahuan tentang Pendidikan politik.
- 6. Urusan Sosial:**
- a. Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial yang masih terbatas, sehingga perlu upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

- b. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan, serta masih lemahnya koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level, sehingga perlu dilakukan optimalisasi kualitas pelayanan dan peningkatan koordinasi pada berbagai sektor dan level, serta melakukan pengajuan program/kegiatan ke pemerintah provinsi dan pusat.

7. Urusan Tenaga Kerja:

- a. Kebutuhan tenaga kerja di kabupaten Malang belum dapat diketahui jumlahnya secara pasti dikarenakan tidak tersedianya data yang akurat;
- b. Adanya kebijakan pembuatan kartu kuning dikecamatan sehingga menjadikan data pencari kerja tidak dapat terdokumentasikan dengan valid karena tidak adanya laporan dari kecamatan terkait data pencari kerja (kartu Kuning);
- c. Dari 33 Kecamatan yang ada diwilayah Kabupaten Malang hanya sekitar 5 kecamatan yang melaporkan data pencaker setiap bulannya;
- d. Adanya kesenjangan antara jumlah lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja mengakibatkan tidak semua lulusan/pencaker bisa tertampung dalam dunia kerja, sehingga diperlukan bekal ketrampilan melalui pelatihan guna meningkatkan kompetensinya;
- e. Guna meningkatkan hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Malang untuk menekan terjadinya kasus perselisihan kerja yang memicu adanya unjuk rasa buruh terhadap pengusaha maka diperlukan adanya pemahaman terhadap undang undang ketenagakerjaan serta syarat kerja yang seharusnya ada.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

- a. Perlunya peningkatan peran pemangku kepentingan dalam Implementasi PUG sebagai strategi pembangunan, dengan meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan untuk menginternalisasi peran dan mengintegrasikan PUG dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatannya;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan data terpilah untuk bahan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak, sehingga perlu data yang update dan sistematis yang semakin handal dan tersaji oleh Pusat Data Daerah (P2D).

9. Urusan Pangan:

- a. Aspek Ketersediaan Pangan, akses jalan ke pelosok-pelosok masyarakat di beberapa wilayah masih kurang memadai;

- b. Aspek Kerawanan Pangan, masyarakat desa baik pemdes maupun kelembagaan masyarakat kurang memahami tentang aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan;
- c. Aspek Sumberdaya Pangan, masyarakat kurang memahami banyaknya alternatif pangan yang bisa menggantikan bahan pangan utama (beras), yaitu dengan menggunakan sumber daya pangan lokal;
- d. Keterlambatan Pengiriman Data Harga dari Petugas Enumerator;
- e. Bantuan sembako kurang / tidak berkembang sehingga, terdapat perbedaan harga pangan yang signifikan antara desa dengan yang dipusat kota kecamatan;
- f. Volume Cadangan Pangan pemerintah masih kurang;
- g. Terdapat kendala dalam pemasaran hasil dari pekarangan baik hasil mentah maupun olahan;
- h. Belum meratanya kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari;
- i. Masih tingginya cemaran residu pestisida dan bahan tambahan pangan yang berbahaya pada pangan segar maupun pangan olahan non kemasan.

10. Urusan Pertanahan:

- a. Permohonan pengadaan tanah belum dilengkapi dokumen dan belum memperhatikan kesesuaian tata ruang;
- b. Penerbitan peta bidang dari BPN relatif lama;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap beberapa permasalahan tanah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga dalam penyelesaiannya menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat;
- d. Bahwa terhadap permasalahan tanah yang dilakukan melalui jalur litigasi penyelesaiannya menunggu keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (in kraht).

11. Urusan Lingkungan Hidup:

- a. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan perbaikan/mengoptimalkan kinerja IPAL sehingga kualitas limbah cair yang dihasilkan belum memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga perlu dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha, dengan mengupayakan penerapan sanksi sesuai perundangan yang berlaku;
- b. Lahan yang ditanami untuk kegiatan konservasi berada di luar hutan mayoritas milik masyarakat, sehingga dikhawatirkan bibit yang ditanam akan ditebang jika sudah tumbuh besar, maka diupayakan bantuan bibit diberikan berupa tanaman tahunan yang

menghasilkan buah dengan harapan tanaman tersebut tidak akan ditebang;

- c. Penurunan kuantitas dan kualitas RTH di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dalam public services, sehingga perlu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dan mengoptimalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan atau pelaku usaha.

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

- a. Kurangnya SDM untuk pelayanan;
- b. Belum terlaksananya loket terpadu;
- c. Kurangnya perawatan sarpras yang berkaitan langsung dengan pelayanan.

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

- a. Pengukuran IKD dan IKU, disinergikan dan berdasarkan SOP Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, yang sampai saat ini belum diterbitkan SOP Tahun 2020, sehingga Pemutakhiran Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020 menggunakan SOP Tahun 2019;
- b. SDM input data Pemutakhiran IDM perlu ditingkatkan dan perlu melibatkan perangkat desa.

14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:

- a. Masih rendahnya partisipasi aktif remaja dalam kegiatan PIK Remaja;
- b. Masih rendahnya jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) dan masih tingginya Unmet Need;
- c. Masih rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam penggerakan Program KB;
- d. Terbatasnya modul bahan informasi pengasuhan tumbuh kembang anak di kelompok Bina Kelompok Balita (BKB);
- e. Masih rendahnya kualitas tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- f. Masih rendahnya kapasitas kader pendata, masih rendahnya tingkat kepatuhan petugas pencatatan/ pelaporan dan masih rendahnya kapasitas petugas dalam input data berbasis TI (Teknologi Informasi).

15. Urusan Perhubungan:

- a. Kurang sadarnya masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas;
- b. Kurang terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan;
- c. Anggaran yang tidak memadai;

- d. Sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang kurang memadai.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika:

- a. Wilayah Kabupaten Malang sebagian besar masih terdapat Blankspot Khususnya Tempat Wisata;
- b. Konsistensi Operator / SDM Aplikasi masih kurang / sering berganti orang;
- c. Tingkat Keamanan Informasi yang masih rendah;
- d. Update Web OPD dan Desa Masih Belum Optimal;
- e. Kurangnya informasi kepada masyarakat desa akan pembangunan.

17. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

- a. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan KUMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
- b. Koperasi/KUD belum memanfaatkan secara optimal Gudang, Lantai jemur dan Kios (GLK), penggilingan padi atau rice milling unit (RMU) dan lantai jemur dalam mendukung program peningkatan produktifitas usaha serta kemudahan pelayanan bagi KUMKM.
- c. Banyaknya pelaku UKM/Karyawan Perusahaan rokok yang terkena PHK serta Keluaraganya dan Masyarakat di lingkungan Industri Rokok atau Daerah Penghasil Tanaman Tembakau yang belum bisa mengembangkan usahanya serta kurangnya permodalan bagi UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan WUB (Wira Usaha Baru).
- d. Kurangnya promosi dan pameran produk-produk usaha KUMKM.
- e. Belum maksimalnya kerjasama usaha koperasi yang mengelola sapi perah dan usaha pertanian.
- f. Sering terjadinya keterlambatan dalam pengembalian dana bergulir, serta banyaknya pelaksanaan KSP/USP tidak sesuai dengan aturan koperasi.
- g. Sistem pengelolaan usaha ritail/toko koperasi yang masih tradisional serta banyaknya usaha ritel yang merajalela (Indomart, alfamart dan lain sebagainya) sehingga mempengaruhi usaha ritel koperasi.
- h. Masih minimnya SDM ditingkat pengurus dan Pengawas Koperasi serta masih minimnya pengetahuan berkoperasi bagi Kelompok Ekonomi Produktif (KEP).

18. Urusan Penanaman Modal:

- a. Penetapan target investasi yang terlalu rendah;
- b. Belum optimalnya pengumpulan data potensi dan peluang investasi Kabupaten Malang;

- c. Rendahnya kesadaran perusahaan PMA/ PMDN untuk menyampaikan LKPM;
- d. Sulitnya mengetahui nilai realisasi investasi dan jumlah investor pada aplikasi Online Single Submission (OSS);
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.

19. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga:

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada;
- b. Masih rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan kegiatan kepemudaan;
- c. Belum terpenuhinya standar mutu organisasi kemasyarakatan olahraga dan kepemudaan;
- d. Luasnya cakupan ketersediaan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana yang tersedia;
- e. Belum tersedianya data base kepemudaan dan keolahragaan.

20. Urusan Statistik

- a. Data yang tersaji bukan tahun berjalan, tapi tahun lalu; hal ini karena sistem pengumpulan data di Badan Pusat Statistik (BPS) adalah tahun yang lalu, sehingga kedepan diharapkan adanya perubahan tentang mekanisme/sistem pengumpulan data pada tahun berjalan.

21. Urusan Persandian

- a. Perlunya meningkatkan wawasan dan pengetahuan kebijakan persandian dan keamanan informasi, serta meningkatkan kesadaran pengamanan informasi untuk membangun kesamaan pemahaman tentang *security awareness* dalam penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian

22. Urusan Kebudayaan

- a. Kurangnya jumlah kelompok seni yang berprestasi dikarenakan kurangnya keikutsertaan pada event-event lomba seni budaya pada tingkat daerah, propinsi maupun nasional serta keterbatasan anggaran pada pemberdayaan kelompok seni

23. Urusan Perpustakaan:

- a. Masih terbatasnya koleksi buku baik secara kuantitas maupun spesifikasi, sehingga perlu upaya penambahan koleksi buku melalui peningkatan anggaran pengadaan buku agar semakin banyak pemustaka yang berkunjung guna meningkatkan minat dan budaya baca.

24. Urusan Kearsipan

- a. Belum tersedianya tenaga arsiparis, sehingga perlu adanya tenaga fungsional arsiparis, guna menunjang pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan penataan, pemeliharaan dan pelayanan kearsipan;
- b. Dalam kegiatan dokumentasi terkendala dengan voltase listrik yang tidak stabil sehingga berpengaruh pada alat cetak foto, yakni pada saat pencetakan dilakukan di lapangan, maka perlu menambah alat inveter dengan kapasitas yang cukup untuk cetak dengan dilengkapi stabilizer pada kendaraan operasional;
- c. Masih belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan berkala serta penerapan manajemen arsip dinamis.

25. Urusan Kelautan dan Perikanan:

- a. Terbatasnya pengetahuan pembudidaya tentang teknis budidaya, pakan dan kesehatan lingkungan terutama bagi para pembudidaya pemula;
- b. Tingginya biaya produksi terutama biaya pakan, sehingga keuntungan usaha budidaya ikan air tawar yang rendah dan belum berkembangnya unit pembuatan pakan mandiri oleh kelompok pembudidaya ikan dengan memanfaatkan sumber bahan pakan lokal;
- c. Penurunan produksi perikanan budidaya yang disebabkan pembatasan pembudidayaan karamba jaring apung (KJA) dan jaring sekat dari pihak Jasa Tirta;
- d. Penurunan kualitas lingkungan perairan daratan sehingga keberhasilan dan produktivitas budidaya rendah;
- e. Belum optimalnya produksi benih ikan di unit pembenihan rakyat (UPR) dan UPT Balai Benih Ikan (BBI) karena kendala induk yang sudah memasuki masa akhir dan kebutuhan air yang belum tercukupi secara optimal;
- f. Masih terjadinya permasalahan illegal, unreported dan unregulated fishing serta pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha penangkapan ikan;
- g. Terbatasnya sarana dan prasarana penangkapan ikan, seperti armada penangkapan ikan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan sehingga hasil penangkapan ikan belum optimal;
- h. Rendahnya pemahaman nelayan dan masyarakat pesisir, dimana masih ada yang belum memiliki wawasan tentang kelestarian lingkungan, pengawasan sumberdaya kelautan perikanan dan sulit

merubah mindset untuk lebih maju mengikuti perkembangan teknologi;

- i. Belum optimalnya proses pelelangan dari hasil tangkapan ikan karena keterbatasan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan sehingga nelayan belum mendapatkan harga yang wajar;
- j. Belum adanya kelembagaan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah dan pemasar hasil perikanan yang tangguh dan bermanfaat nyata dalam meningkatkan pendapatan anggota;
- k. Rendahnya investasi bidang perikanan dan kelautan antara lain pabrik es, pabrik tepung ikan, cool room atau cold storage, dan industri pengolahan ikan;
- l. Kualitas hasil tangkapan yang masih rendah akibat lemahnya penanganan atau handling pada proses penangkapan;
- m. Sebagian besar usaha perikanan merupakan industri kecil dan industri primer dengan nilai tambah yang masih relatif kecil, dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah;
- n. Masih lemahnya akses permodalan dan pasar dalam rangka pengembangan usaha bidang perikanan.

26. Urusan Pariwisata:

- a. Belum lengkapnya sarana prasarana pendukung program maupun untuk mobilitas kegiatan di dalam dan diluar daerah masih kurang;
- b. Banyak adat tradisi masyarakat yang masih belum diangkat sebagai warisan dan kekayaan budaya di Kabupaten Malang;
- c. Masih minimnya koleksi dan sarana prasarana pada museum Singhasari yang berdampak pada minat kunjungan museum;
- d. Belum maksimalnya pembinaan kelompok seni budaya yang ada di Kabupaten Malang;
- e. Kurang maksimalnya pelatraian dan pemeliharaan situs purbakal yang ada di wilayah Kabupaten Malang;
- f. Daya tarik wisata / Destinasi Pariwisata yang masih belum tertata dengan baik;
- g. Akses menuju daya tarik wisata / destinasi wisata masih kurang bagus;
- h. Pengelolaan wilayah pantai yang berbatasan dengan wilayah perhutani;
- i. Kalender event yang telah direncanakan banyak perubahan;
- j. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan dalam membangun dan mempromosikan potensi tujuan wisata di Kabupaten Malang;
- k. Koordinasi dan kerjasama antara pelaku pariwisata, asosiasi, pemerhati dan masyarakat umum dalam promosi pariwisata;

- l. Pemanfaatan teknologi semaksimal mungkin sehingga dapat efektif dalam rangka promosi pariwisata di Kabupaten Malang;
- m. Pengembangan Pusat Informasi Pariwisata (Tourism Information Center).

27. Urusan Pertanian:

- a. Belum optimalnya pengembangan kawasan sentra produksi pertanian karena rata-rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit;
- b. Berkurangnya Lahan Pertanian (LP2 B) dikarenakan masih tingginya alih fungsi lahan pertanian di lokasi perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
- c. Adanya kecenderungan alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, sehingga perlu upaya penekanan semaksimal mungkin alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi non produktif, dan menunjang pembangunan jaringan irigasi di tingkat usaha tani dan di tingkat desa (JITUT dan JIDES), serta melaksanakan kegiatan Indeks Pertanaman (IP 300);
- d. Rendahnya SDM peternakan dari segi budidaya, teknologi maupun pengolahan hasil ternak ;
- e. Rendahnya kualitas produk peternakan dan nilai tambah yang diterima peternak;
- f. Masih lemahnya kelembagaan kelompok ternak;
- g. Kepemilikan ternak masih skala kecil;
- h. Terbatasnya penguasaan dan penerapan teknologi dalam budidaya ternak;
- i. Keterbatasan sarana dan prasarana;
- j. Keterbatasan jumlah aparatur khusus petugas teknis peternakan.

28. Urusan Perdagangan:

- a. Para pelaku importir dan eksportir belum optimal dalam melaporkan hasil realisasi impor ekspornya;
- b. Panjangnya mata rantai distribusi dan terbatasnya jaringan informasi pasar (akses pasar) baik dalam negeri maupun luar negeri.

29. Urusan Perindustrian:

- a. Rendahnya daya saing industri dari adanya keterlambatan kemampuan SDM, penguasaan teknologi dan standarisasi produk
- b. Belum optimalnya pemanfaatan bahan baku potensial unggulan daerah menuju terbentuknya kompetensi inti industri daerah dan klaster industri serta produk unggulan.
- c. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan daya kreasi dan inovasi (HAKI) atas produk yang dihasilkan.

30. Urusan Transmigrasi:

- a. Kuota ditetapkan oleh pemerintah pusat dan propinsi, sehingga pemberangkatan transmigran, kedaerah tujuan berpatokan pada jumlah kuota;
- b. Faktor animo masyarakat terkait juga dengan seberapa besar fasilitas yang diberikan kepada calon transmigran yang antara lain berupa pemberian bantuan uang saku maupun sarana peralatan pertanian sebagai penunjang hidup diadaerah tujuan sebelum mereka bisa mandiri.

31. Urusan Perencanaan:

- a. Dalam mekanisme perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif, masyarakat berkeinginan semua usulan yang diajukan dapat terakomudir secara keseluruhan, sehingga masyarakat perlu diberi pemahaman tentang skala prioritas kebutuhan pembangunan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

32. Urusan Keuangan:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah;
- d. Penetapan besaran pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyeteroran Pajak Asli Daerah;
- g. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendapatan;
- h. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan;
- i. Pembinaan teknis pemungutan kepada UPT.

33. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan:

- a. Adanya perbedaan formulasi pengukuran IKU pada saat penetapan target dengan perhitungan pencapaian target.

34. Urusan Penelitian dan Pengembangan:

- a. Kurangnya dukungan dari pemerintah daerah terhadap kegiatan kelitbangan maupun hasil kajian;
- b. Rekomendasi sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh perangkat daerah selaku user;
- c. E-Journal belum dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat sebagai referensi.

35. Urusan Pengawasan:

- a. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan;
- b. Kualitas APIP tidak merata, belum semua APIP mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;
- c. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Malang, yang meliputi semua PD, UPT TK, SD dan PLS, Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dan SMP Negeri, Puskesmas maupun Pustu;
- d. Kurang maksimalnya penanganan tindak lanjut dari Perangkat Daerah;
- e. Kemampuan Auditor dalam melakukan evaluasi kurang optimal, Perangkat Daerah tidak tepat waktu dalam mengumpulkan dokumen, kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen SAKIP kurang optimal.

36. Urusan Fungsi Lainnya:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
 - 1) Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana secara komprehensif (pra, tanggap, pasca) dan lintas sektor;
 - 2) Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana dan jumlah personil yang belum memadai;
 - 3) Indikator Kinerja dan standart pelayanan masih belum terstandart nasional;
 - 4) Belum optimalnya anggaran untuk penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - 5) Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
 - 6) Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk pengurangan risiko bencana;
 - 7) Belum adanya kajian atas risiko bencana dan pemetaannya;
 - 8) Belum terbentuknya Desa Tangguh Bencana di semua Desa rawan bencana;
 - 9) Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
 - 10) Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana karena ketersediaan anggaran yang terbatas.

b. Bagian Administrasi Tata Pemerintahan:

Berkaitan dengan melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah serta aparatur pemerintah kecamatan, permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance dan clean government secara baik dalam penyelenggaraan pemerintahan umum;
- 2) Kemampuan dan keahlian aparat di Kecamatan dan Kelurahan dalam pelayanan kepada masyarakat masih rendah;
- 3) Belum terselesainya pembinaan wilayah perbatasan dalam pelaksanaan otonomi daerah;
- 4) elum maksimalnya pelaksanaan penanganan tugas-tugas umum pemerintahan sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Untuk mengetahui kemampuan keuangan Kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan kondisi ekonomi daerah serta realisasi anggaran yang ada. Bab ini memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021. Bab ini juga membahas tentang perkiraan pendapatan dan kemampuan keuangan untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas di tahun 2021.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

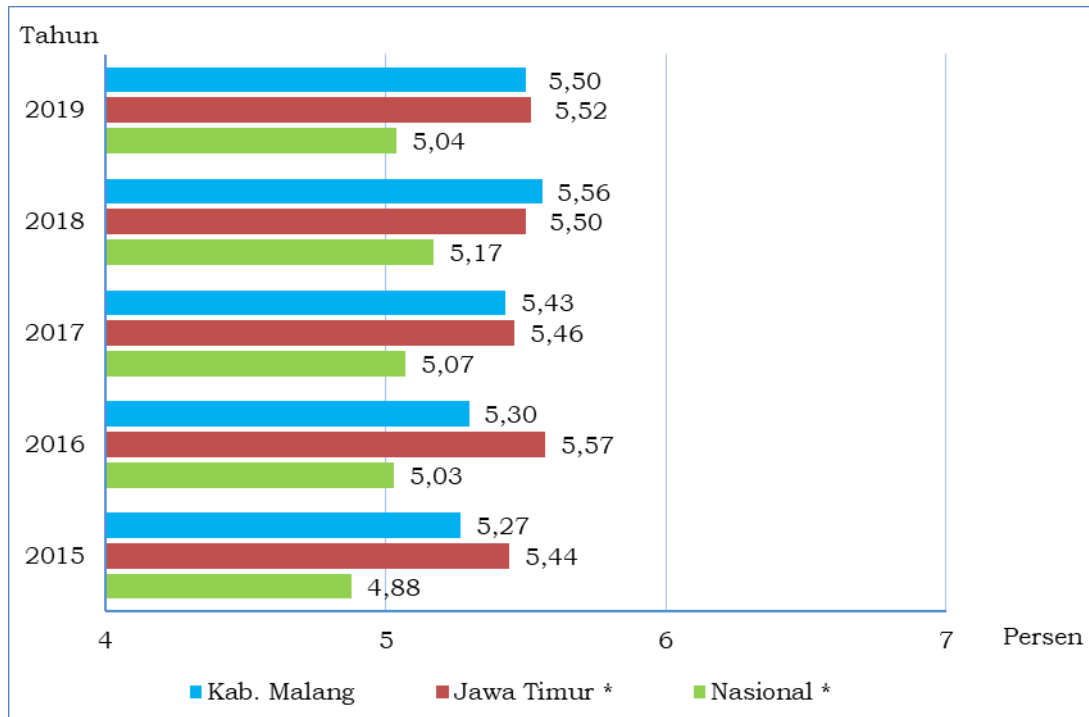
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2018-2019 dan Perkiraan Tahun 2020-2021

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Prioritas program-program tetap memperhatikan kondisi perekonomian secara global, nasional dan regional Jawa Timur. Prioritas dan program pembangunan di tahun 2021 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Sebagaimana arah pembangunan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, pada tahap ke-4 (Tahun 2020-2025) dengan arah pembangunan adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi SWP guna memperkecil kesenjangan antar kawasan; meningkatkan kualitas pelayanan publik; meningkatkan mutu pendidikan, olah raga dan seni budaya; meningkatkan dan mengembangkan sistem kesehatan masyarakat mandiri; mengembangkan penataan dan pengelolaan wilayah dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pelestarian lingkungan hidup; mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata yang didukung infrastuktur yang memadai dan daya dukung lingkungan; meningkatkan kualitas struktur keuangan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan moderat dan berada pada kisaran yang sama dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

Gambar 3.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2015 – 2019



Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Malang tahun 2018 sebesar 5.56%, tahun 2019 melambat menjadi 5.50% angka ini masih dibawah pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,52%, dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%, dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang tahun 2020 diperkirakan 5,60%-5,81%, sedangkan 2021 diperkirakan 5,70%-5,91%.

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Malang telah mengalami banyak kemajuan dan perubahan yang berdampak pada pembangunan ekonomi dalam menciptakan berbagai aktivitas ekonomi dan kenaikan pendapatan masyarakat. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang perlu diidentifikasi sektor-sektor yang merupakan unggulan dan memberikan dampak bagi sektor sektor lain yang belum berkembang.

Pada tahun 2019 nilai PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 103.760,08 milyar atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 96.851,52 milyar, sedangkan untuk nilai PDRB berdasarkan harga konstan pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 68.386,88 milyar atau mengalami kenaikan dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 64 823,28 milyar.

Tabel 3.1
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Primer	14.768,45	15.908,40	16.698,88	16.945,82	17.493,80
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.259,14	14.308,26	14.998,29	15.129,25	15.611,51
2	Pertambangan dan Penggalian	1.509,31	1.600,14	1.700,59	1.816,57	1.882,29
	Sekunder	31.752,50	35.435,64	38.954,50	43.219,60	46.744,34
3	Industri Pengolahan	22.298,08	24.804,67	27.183,53	30.430,88	33.323,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	55,65	61,33	73,10	80,54	85,34
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	71,72	79,66	87,67	94,86	98,83
6	Konstruksi	9.327,05	10.489,98	11.610,20	12.613,32	13.236,99
	Tersier	27.320,98	30.440,39	33.325,80	36.686,10	39.521,96
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13.647,00	15.265,00	16.782,67	18.643,10	19.932,80
8	Transportasi dan Pergudangan	862,50	965,23	1.085,64	1.193,15	1.281,40
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.341,77	2.670,24	2.982,77	3.281,97	3.624,73
10	Informasi dan Komunikasi	2.934,70	3.241,04	3.535,59	3.811,40	4.148,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.267,03	1.413,68	1.518,86	1.624,26	1.717,63
12	Real Estat	999,47	1.089,87	1.184,04	1.327,07	1.465,17
13	Jasa Perusahaan	267,42	298,34	329,23	366,33	406,92
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.404,97	1.541,67	1.641,74	1.803,78	1.953,32
15	Jasa Pendidikan	1.776,97	1.959,07	2.087,38	2.252,32	2.425,72
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	413,74	449,92	486,53	525,11	582,14
17	Jasa lainnya	1.405,41	1.546,33	1.691,35	1.857,61	1.983,82
	PDRB ADHB	73.841,93	81.784,43	88.979,17	96.851,52	103.760,08

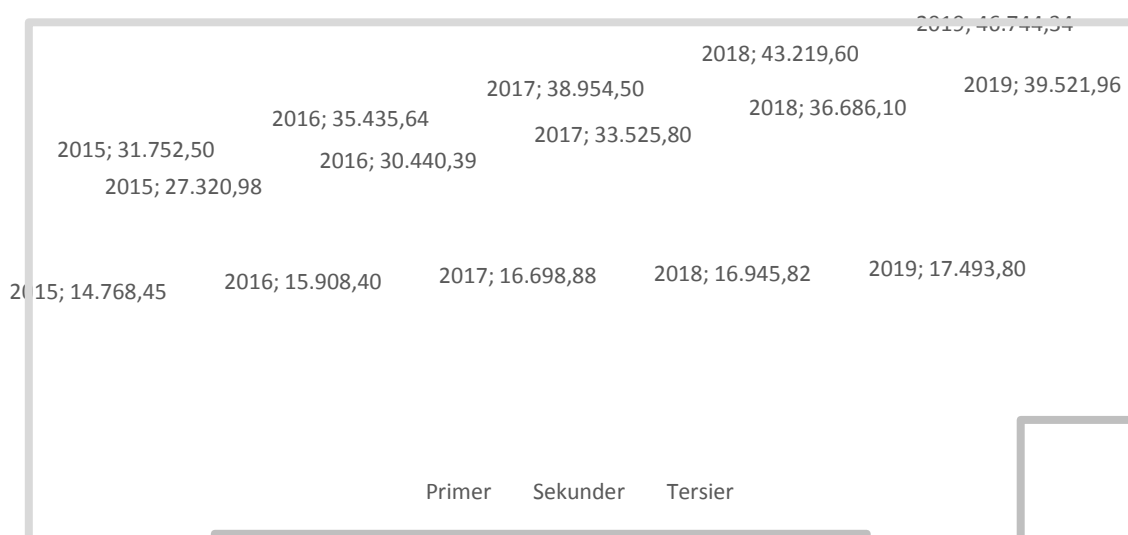
Sumber BPS Kabupaten Malang, 2020

Struktur ekonomi Kabupaten Malang dapat dilihat dari peranan masing-masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total ADHB. Tabel 3.1 secara umum menggambarkan struktur ekonomi Kabupaten Malang tahun 2015-2019, dimana peranan terbesarnya didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dalam kelompok sekunder yaitu 45,06 persen, kemudian kelompok tersier berkisar antara 38,08 persen dan kelompok primer berkisar antara 16,86 persen Pada Tahun 2019.

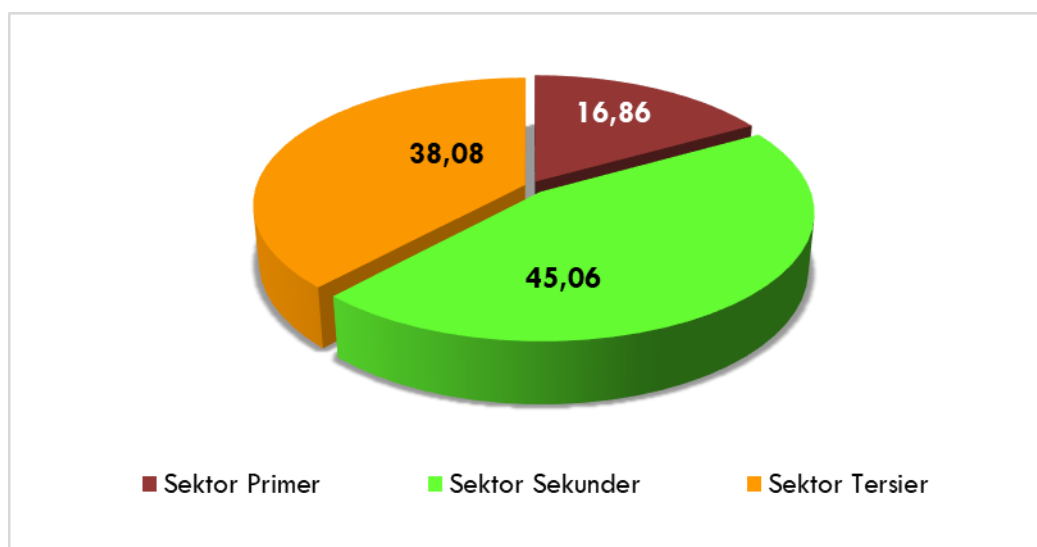
Kontribusi kelompok kategori sekunder dan kategori tersier selama periode 2015-2019 cenderung (trendnya) naik, walaupun gradasinya sangat halus. Sedangkan kelompok kategori primer cenderung menurun. Pada Tabel 3.3 terlihat bahwa kontribusi kelompok kategori primer menurun dari 17,50 Pada tahun 2018 persen menjadi 16,86 persen pada tahun 2019. Kategori pertanian sendiri turun dari 15,62 persen menjadi 15,05 persen. Jika kita telusuri lebih lanjut, maka turunnya kontribusi kategori pertanian tidak terlepas dari sub Kategori pendukungnya yaitu sub kategori pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian yang cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kelompok kategori sekunder, kontribusinya pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini serentak terjadi pada hampir semua Kategori pendukungnya. Sebagai contoh kategori industri pengolahan, kontribusi Kategori ini naik dari 31,42 persen pada tahun lalu menjadi 32,12 persen pada tahun ini. Sedangkan Peranan kelompok kategori tersier pada tahun 2018 mencapai 37,89 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 38,08 persen.

Pertumbuhan ekonomi adalah ukuran dinamis yang digunakan untuk melihat perubahan tingkat ekonomi antar periode. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa geliat perekonomian Kabupaten Malang pada tahun 2018 mampu tumbuh 5,56 persen dan pada tahun 2019 melambat menjadi 5,50 persen.

Gambar 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (milyar rupiah)



Gambar 3.3
Persentase Struktur PDRB ADHB Kabupaten Malang Tahun 2019

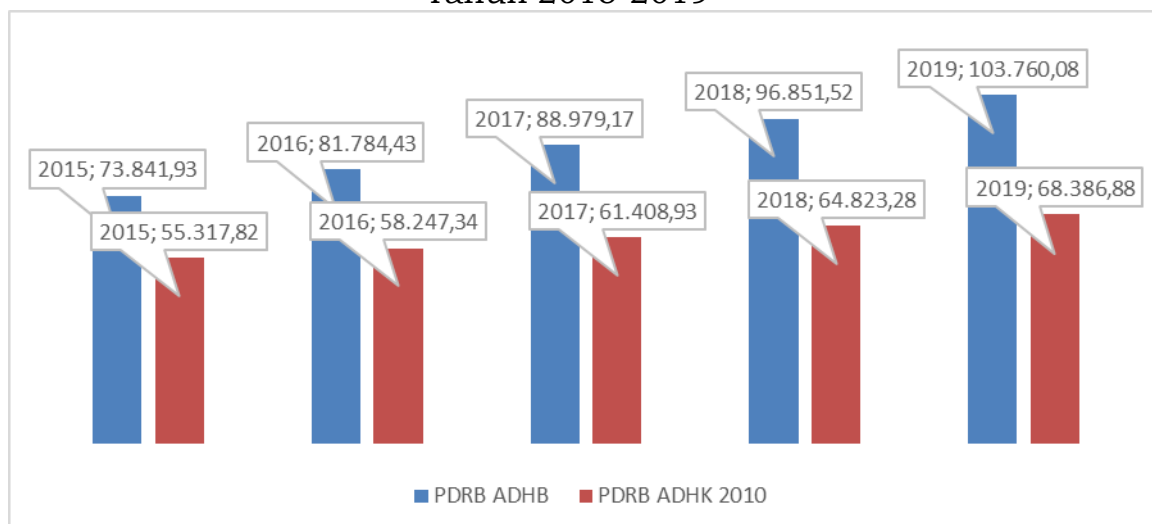


Tabel 3.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019 (milyar rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Primer	10.671,83	10.971,22	11.196,98	11.040,51	11.138,18
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.542,36	9.826,91	9.994,06	9.799,58	9.884,74
2	Pertambangan dan Penggalan	1.129,47	1.144,31	1.202,92	1.240,93	1.253,44
	Sekunder	23.220,72	24.569,06	26.055,79	27.968,96	29.966,99
3	Industri Pengolahan	16.549,38	17.556,29	18.550,57	19.914,53	21.419,16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	52,94	55,21	58,48	61,55	64,88
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan Daur Ulang	55,83	58,58	62,62	66,37	68,29
6	Konstruksi	6.562,57	6.898,98	7.384,12	7.926,51	8.414,66
	Tersier	22.447,95	22.707,06	24.156,17	25.813,80	27.281,70
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.597,95	11.196,12	11.979,77	12.781,85	13.402,19
8	Transportasi dan Pergudangan	610,04	653,28	705,55	765,53	799,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.783,32	1.913,59	2.071,22	2.253,82	2.449,58
10	Informasi dan Komunikasi	2.689,11	2.877,39	3.085,63	3.324,15	3.572,46
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	901,22	956,21	983,90	1.032,12	1.071,18
12	Real Estat	800,48	849,48	895,15	965,24	1.041,88
13	Jasa Perusahaan	207,79	219,78	231,81	249,87	269,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.026,23	1.066,30	1.086,50	1.132,89	1.167,67
15	Jasa Pendidikan	1.347,63	1.429,17	1.491,65	1.578,89	1.674,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.347,63	340,87	360,72	388,06	415,67
17	Jasa lainnya	1.136,55	1204,87	1264,27	1341,38	1417,49
	PDRB ADHK	55 317,82	58 247,34	61 408,93	64 823,28	68 386,88

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Gambar 3.4
Perkembangan PDRB ADHB, PDRB ADHK 2010 Kabupaten Malang
Tahun 2015-2019



Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (Persen)

Lapangan Usaha/ Industry	2015	2016	2017	2018	2019*)
Primer	20,00	19,46	18,77	17,5	16,86
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,96	17,50	16,86	15,62	15,05
B Pertambangan dan Penggalian	2,04	1,96	1,91	1,88	1,81
Sekunder	43,01	43,33	43,78	44,62	45,06
C Industri Pengolahan	30,20	30,33	30,55	31,42	32,12
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F Konstruksi	12,63	12,83	13,05	13,02	12,76
Tersier	36,99	37,21	37,46	37,89	38,08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,48	18,66	18,86	19,25	19,21
H Transportasi dan Pergudangan	1,17	1,18	1,22	1,23	1,23
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,17	3,26	3,35	3,39	3,49
J Informasi dan Komunikasi	3,97	3,96	3,97	3,94	4,00
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,72	1,73	1,71	1,68	1,66
L Real Estat	1,35	1,33	1,33	1,37	1,41
M,N Jasa Perusahaan	0,36	0,36	0,37	0,38	0,39
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,90	1,89	1,85	1,86	1,88
P Jasa Pendidikan	2,41	2,40	2,35	2,33	2,34
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,56	0,55	0,55	0,54	0,56
R,S, T,U Jasa lainnya	1,90	1,89	1,90	1,92	1,91
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2019 (Persen)

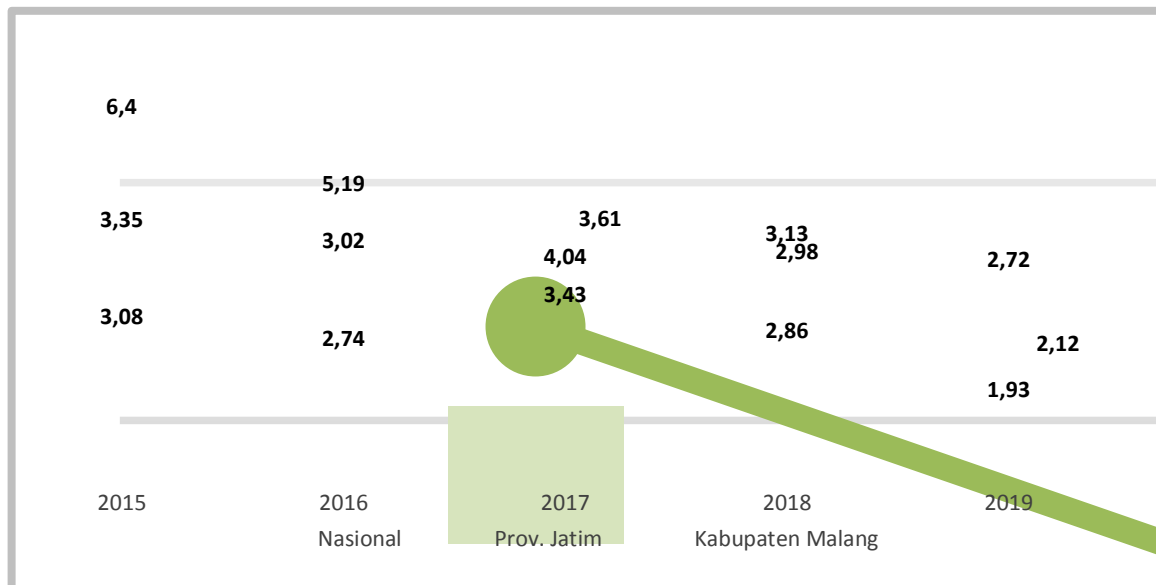
URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019*)
Tradable					
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,44	2,98	1,70	-1,95	0,87
Pertambangan dan Pengalihan	2,92	1,31	5,12	3,16	1,01
Industri Pengolahan	6,44	6,08	5,66	7,35	7,56
Non-Tradable					
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,74	4,29	5,92	3,16	1,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,72	4,94	6,89	7,35	7,56
Konstruksi	3,84	5,13	7,03	3,16	1,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,29	5,64	7,00	7,35	7,56
Transportasi dan Pergudangan	7,68	7,09	8,00	3,16	1,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,70	7,30	8,24	7,35	7,56
Informasi dan Komunikasi	6,78	7,00	7,24	3,16	1,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,83	6,10	2,90	3,16	1,01
Real Estate	5,95	6,12	5,38	7,35	7,56
Jasa Perusahaan	8,53	5,77	5,48	3,16	1,01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan Sosial Wajib	4,99	3,91	1,89	7,35	7,56
Jasa Pendidikan	7,21	6,05	4,37	3,16	1,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,18	4,89	5,82	7,35	7,56
Jasa lainnya	4,54	6,01	4,93	3,16	1,01
Pertumbuhan Ekonomi	5,27	5,30	5,43	5,56	5,50

Sumber : BPS Kabupaten Malang, 2020

Ket *) : Angka Sementara

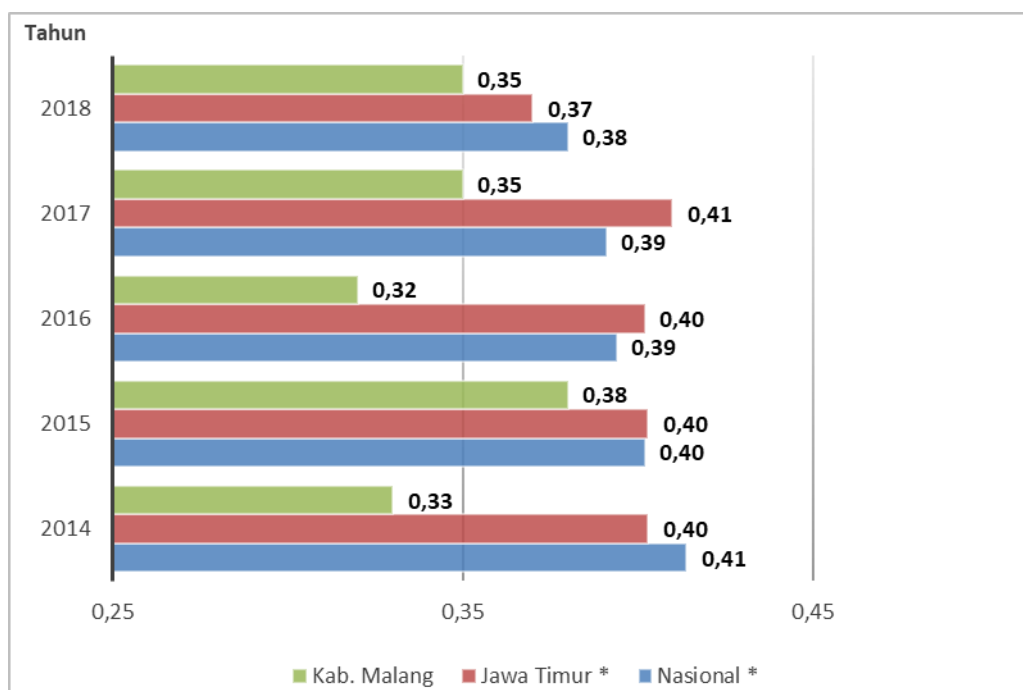
Dari sisi inflasi, pada tahun 2019 inflasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018. Inflasi Kabupaten Malang di tahun 2019 mengikuti Inflasi Kota Malang yang tercatat sebesar 1,93%, lebih rendah dibandingkan inflasi di tahun 2018 yang mencapai 2,98%. Angka tersebut di dibawah inflasi Provinsi Jawa Timur (2,12%).

Gambar 3.5
Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2015 - 2019



Indikator pembangunan lain yang digunakan adalah Koefisien Gini, yang merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dimana semakin tinggi nilainya, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin kecil angka indeks gini maka semakin kecil ketimpangan pendapatan masyarakat. Koefisien Indeks Gini Kabupaten Malang pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 0,35 atau sama dengan tahun 2016 yang tercatat sebesar 0,35. Angka ini dibawah indeks gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional sebagaimana grafik berikut.

Gambar 3.6
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Malang,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2014 -2018



3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021

Kondisi ekonomi daerah tahun 2021 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari perkembangan makro ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional.

Dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang diperkirakan mempengaruhi perekonomian, tantangan yang diperkirakan akan dihadapi di tahun 2021 yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang akan menghadapi tekanan sejumlah faktor, seperti merosotnya perdagangan dunia, depresiasi rupiah, turunnya daya beli, serta melemahnya kinerja UMKM dan industri sebagai dampak dari pandemi Covid 19;
2. Makin ketatnya persaingan global dan membanjirnya produk impor sebagai pesaing produk lokal yang dapat menghambat pertumbuhan produksi dalam negeri dan melemahkan pasar local;
3. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi serta potensi gangguan bencana yang berpotensi mengganggu distribusi barang dan jasa. Perbaikan infrastruktur Kabupaten Malang merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional mengingat posisi strategis Kabupaten Malang dalam konstelasi ekonomi nasional dan regional;
4. Jumlah penduduk yang besar dengan komposisi usia produktif yang terus membesar dibandingkan dengan usia non produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan pekerjaan. Keberadaan bonus demografi ini merupakan peluang untuk pengembangan perekonomian sekaligus tantangan dalam hal penyediaan sarana prasarana dasar kehidupan masyarakat yang memadai secara kuantitas dan kualitas;
5. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2020) tercatat rata-rata sebesar 15,80% dari total penerimaan pendapatan daerah. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan pendapatan daerah masih bergantung dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
6. Aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidikan dan sekolah kejuruan, puskesmas ideal, desa siaga, dan pengembangan program kesehatan dari dan untuk masyarakat;
7. Rumah tangga miskin dan pengangguran masih cukup banyak;

8. Produk SDM yang dihasilkan dunia pendidikan belum mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja;
9. Pelayanan publik dirasakan belum optimal serta tuntutan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik;
10. Kondisi alam dan lingkungan yang belum optimal serta pengaruh iklim yang ekstrim terhadap usaha pertanian sebagai basis perekonomian Kabupaten Malang.

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kabupaten Malang serta arah kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 maka prospek perekonomian Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang Tahun 2021 mengalami kontraksi dan diharapkan telah pulih kembali dari dampak pandemi Covid 19 pada angka sebesar 5,70 % – 5,91 %; ditunjang dengan penanganan melalui berbagai upaya refocusing pada program dan kegiatan yang mendukung perkuatan perekonomian masyarakat.
2. Sedangkan tingkat inflasi diusahakan akan berada di kisaran 3,09 – 3,05 dengan asumsi tidak ada kebijakan dasar yang berdampak ke kenaikan harga komoditi serta harapan semakin baiknya kondisi distribusi barang dan jasa pada tahun rencana;
3. Nilai Investasi PMA dan PMDN diprediksi akan naik sebesar Rp 30.616.413.004.362;
4. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif, diharapkan akan berdampak pada menurunnya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2021, jumlah persentase angka kemiskinan diprediksi dapat menurun dikisaran 9,44 % - 9,04 %, melalui program/kegiatan pembangunan terpadu dalam penanganan kemiskinan;
5. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diprediksikan menjadi 3,10 % pada tahun 2021 yaitu melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah dan produktifitas tinggi. Selain itu, meningkatnya minat kewirausahaan (entrepreneurship) bagi pengusaha muda diharapkan dapat ikut mengurangi angka TPT di Kabupaten Malang.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah didasarkan pada realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada tahun 2016 sampai dengan proyeksi tahun 2021 Berdasarkan pada trend pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah maka dapat ditentukan arah kebijakan keuangan daerah pada tahun 2021 sebagai berikut:

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan yaitu terhadap Pendapatan Asli Daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Upaya penggalan Pendapatan Asli Daerah secara optimal terus dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian agar tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan beban bagi masyarakat. Disamping itu upaya peningkatan dana perimbangan perlu terus menerus diusahakan. Disamping itu upaya lain yang terus digerakkan untuk memperbesar struktur pendapatan daerah diantaranya mengembangkan pendapatan dari sumber pendapatan lain-lain daerah yang sah termasuk hibah baik dari internal maupun eksternal Kabupaten Malang.

Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Malang diarahkan pada:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah berbasiskan pada pemanfaatan Teknologi Informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang professional;
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional, pelatihan etika pelayanan, pelatihan peningkatan pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemungutan pendapatan asli daerah;
4. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;

5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
6. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
8. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;
9. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Untuk mendapatkan gambaran secara lengkap tentang realisasi, target dan proyeksi pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

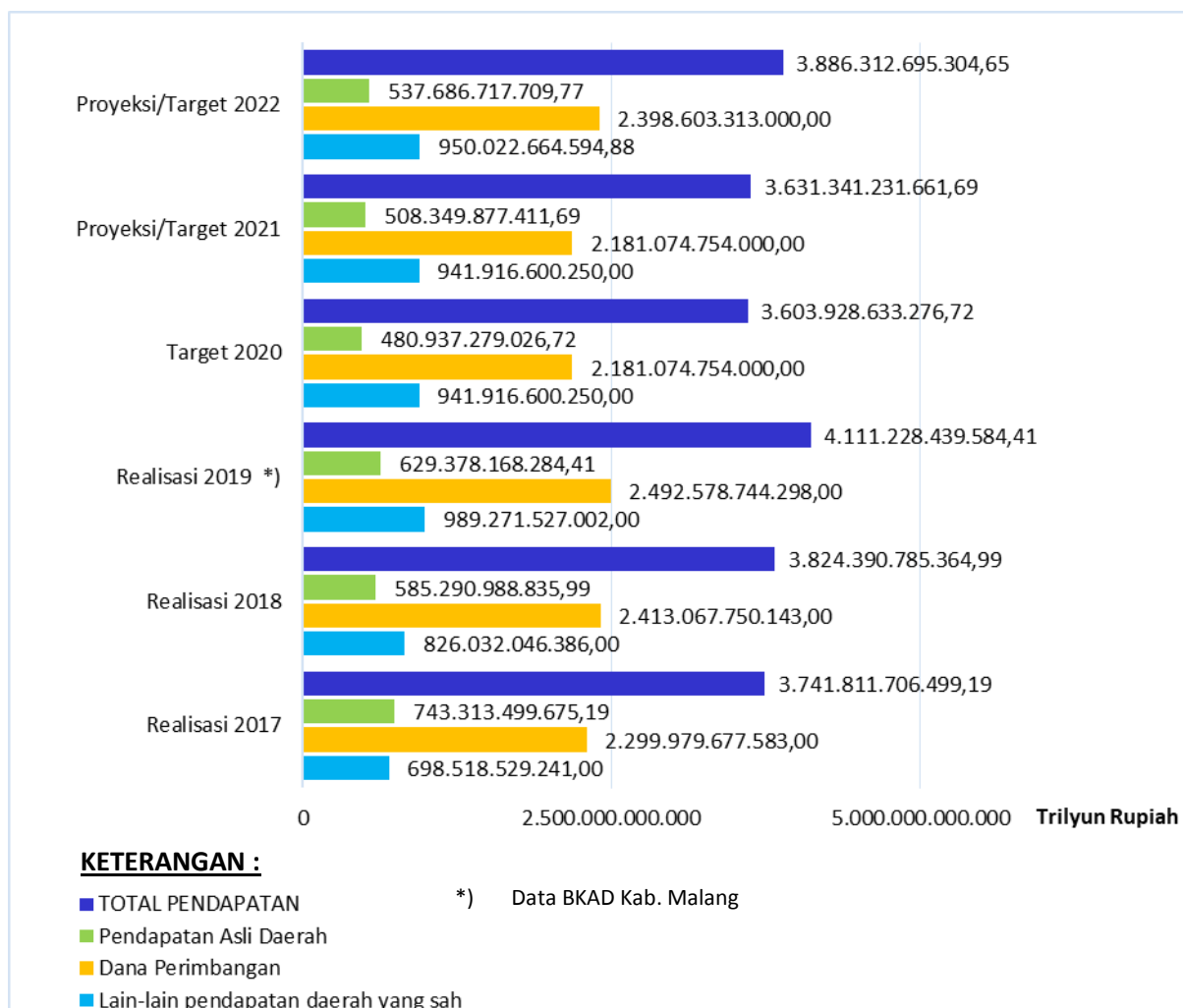
Tabel. 3.5
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Malang
 Tahun 2017 s.d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019 *)	Target Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1	Pendapatan Asli Daerah	743.313.499.675,19	585.290.988.835,99	629.378.168.284,41	480.937.279.026,72	508.349.877.411,69	537.686.717.709,77
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	255.851.109.883,64	281.124.088.274,71	298.231.998.749,54	195.600.000.000,00	206.281.495.844,16	218.097.637.037,04
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	38.398.298.560,00	37.084.220.924,00	44.700.563.225,00	23.972.859.650,00	25.076.314.823,97	26.351.709.394,91
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	15.817.903.641,80	16.880.669.995,80	18.604.532.908,10	19.699.146.276,07	19.765.048.874,52	19.833.392.309,95
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	433.246.187.589,75	250.202.009.641,48	267.841.073.401,77	241.665.273.100,65	257.227.017.869,04	273.403.978.967,87
1.2	Dana Perimbangan	2.299.979.677.583,00	2.413.067.750.143,00	2.492.578.744.298,00	2.181.074.754.000,00	2.181.074.754.000,00	2.398.603.313.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	128.179.963.798,00	194.849.361.899,00	168.797.966.938,00	144.188.345.000,00	144.188.345.000,00	142.064.890.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.665.110.987.000,00	1.665.195.901.000,00	1.728.154.706.000,00	1.592.832.074.000,00	1.592.832.074.000,00	1.650.595.276.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	506.688.726.785,00	553.022.487.244,00	595.626.071.360,00	444.054.335.000,00	444.054.335.000,00	605.943.147.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	698.518.529.241,00	826.032.046.386,00	989.271.527.002,00	941.916.600.250,00	941.916.600.250,00	950.022.664.594,88
1.3.1	Pendapatan Hibah	24.743.464.000,00	193.409.960.000,00	208.926.363.567,00	205.793.900.000,00	205.793.900.000,00	196.201.023.915,65
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov dan Pemerintah Daerah Lainnya	267.272.241.741,00	265.067.691.886,00	316.903.957.935,00	268.000.000.000,00	268.000.000.000,00	277.111.275.179,23
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	320.479.737.000,00	340.465.308.000,00	76.926.900.000,00	59.070.419.000,00	59.070.419.000,00	66.139.603.000,00
1.3.4	Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah Lainnya	86.023.086.500,00	27.089.086.500,00	20.686.715.500,00	29.655.651.250,00	29.655.651.250,00	27.089.086.500,00
1.3.5	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	365.827.590.000,00	379.396.630.000,00	379.396.630.000,00	383.481.676.000,00
	Jumlah Pendapatan Daerah (1.1+1.2+1.3)	3.741.811.706.499,19	3.824.390.785.364,99	4.111.228.439.584,41	3.603.928.633.276,72	3.631.341.231.661,69	3.886.312.695.304,65

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Ket *) : unaudited

Gambar 3.7
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan
Tahun 2017 s.d Tahun 2022



Proyeksi komposisi kerangka pendanaan pada tahun 2021 berdasarkan pada tabel tersebut terbagi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 14,00%, Dana Perimbangan sebesar 60,06%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 25,94%. Penentuan proyeksi tersebut diasumsikan melalui realisasi tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 serta target tahun berjalan pada tahun 2020.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Penganggaran daerah melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan sehingga penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif. Kebijakan Umum Anggaran Belanja Pembangunan Daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh masyarakat khususnya dalam hal pelayanan publik yang

disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

Belanja Daerah tahun 2021 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja langsung maupun tidak langsung) yang dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada tahun 2021 adalah:

1. Pemanfaatan belanja program prioritas dan penanganan isu-isu strategis dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Malang yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan dan fungsi penunjang lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan belanja sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang harus ditangani di tahun 2021;
4. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran;
5. Membiayai urusan yang bersifat mandatory dan sudah ditentukan peruntukan belanjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah maka belanja daerah diprioritaskan dalam upaya pencapaian sasaran dan target pembangunan;
7. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan kegiatan secara efektif dan efisien;
8. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Malang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2021;
9. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2021 belanja gaji PNSD disusun dengan mengantisipasi rencana

pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, access dan kenaikan tunjangan-tunjangan.

10. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2021 berdasarkan kinerja. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya.
12. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial dengan mempertimbangkan juga ketentuan perundang -undangan yang berlaku.
13. Belanja bunga dihitung berdasarkan besarnya jumlah pinjaman daerah sesuai tingkat bunga dalam perjanjian.
14. Belanja bantuan keuangan partai politik ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

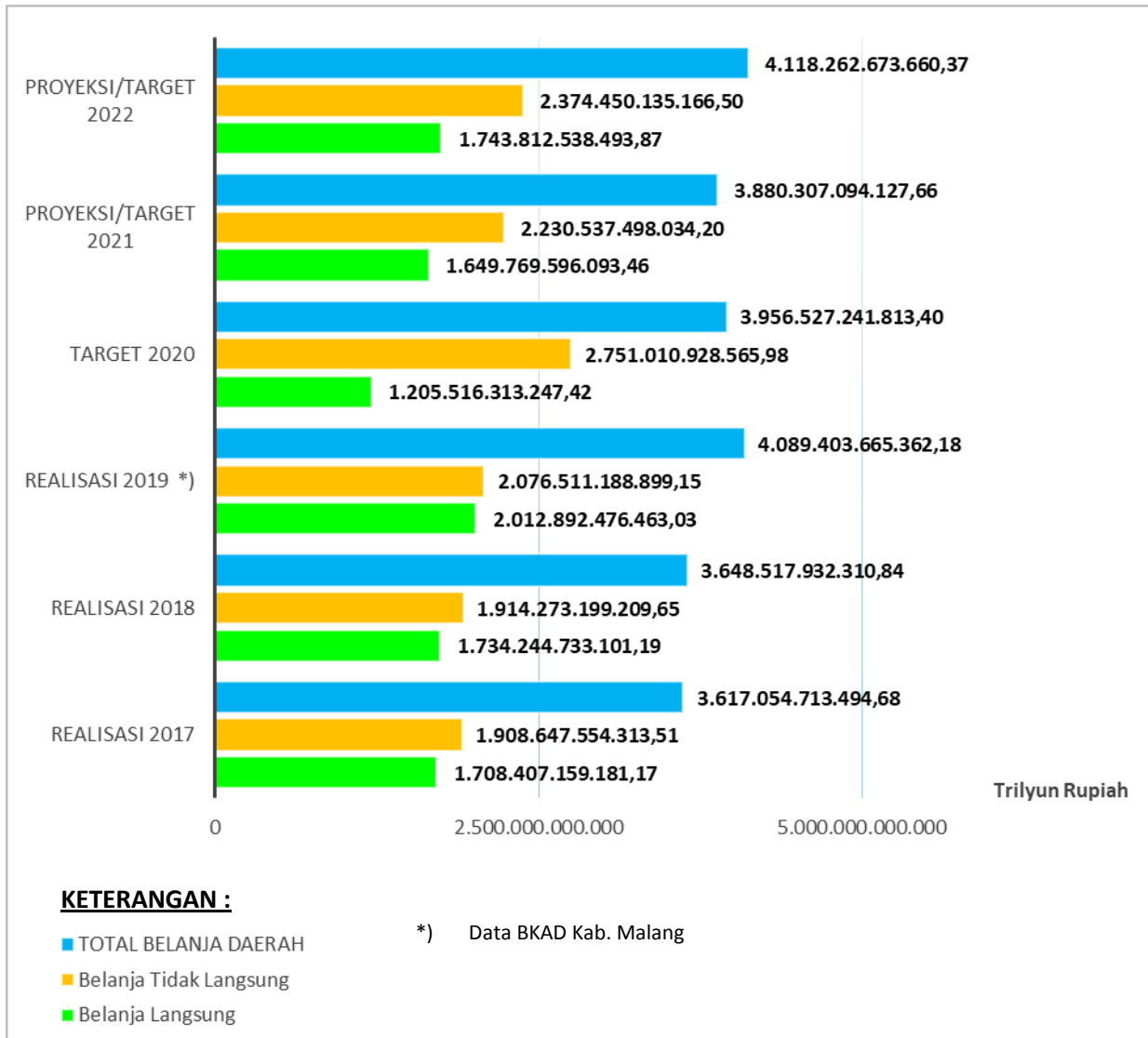
Mengacu pada kebijakan belanja daerah di atas maka belanja daerah yang merupakan perwujudan dari kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan kebijakan yang berkesinambungan dari program-program yang dilaksanakan dapat dibaca ke arah mana pembangunan di Kabupaten Malang. Kebijakan belanja daerah ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, secara selektif, akuntabel dan transparan. Berikut realisasi, plafon dan proyeksi belanja daerah Kabupaten Malang.

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2017 s.d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019 *)	Target Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.908.647.554.313,51	1.914.273.199.209,65	2.076.511.188.899,15	2.751.010.928.565,98	2.230.537.498.034,20	2.374.450.135.166,50
2.1.1	Belanja Pegawai	1.281.202.252.736,92	1.276.083.880.494,15	1.313.906.050.625,15	1.447.789.494.686,00	1.502.038.864.469,20	1.566.288.234.252,40
2.1.2	Belanja Hibah	84.290.140.939,59	87.200.436.440,00	120.645.203.502,00	191.841.615.000,00	84.073.050.000,00	119.145.203.502,00
2.1.3	Belanja Bantuan Sosial	26.284.800.000,00	26.070.300.000,00	41.293.888.000,00	47.367.800.000,00	47.367.800.000,00	46.475.695.661,35
2.1.4	Belanja Bagi Hasil kpd Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa	15.946.060.761,00	24.048.457.725,50	25.351.347.172,00	17.404.285.965,00	17.404.285.965,00	26.667.157.380,63
2.1.5	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota & Pemdes	500.924.299.876,00	500.635.957.800,00	575.280.699.600,00	574.653.497.600,00	574.653.497.600,00	600.873.844.370,12
2.1.6	Belanja Tak Terduga	-	234.166.750,00	34.000.000,00	471.954.235.314,98	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	1.708.407.159.181,17	1.734.244.733.101,19	2.012.892.476.463,03	1.205.516.313.247,42	1.649.769.596.093,46	1.743.812.538.493,87
2.2.1	Belanja Pegawai	225.086.262.729,62	235.782.754.757,19	262.131.215.425,45	278.197.410.381,00	278.735.477.864,14	294.624.426.570,55
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	742.976.554.018,74	779.853.932.940,98	942.107.869.758,31	644.558.577.000,62	820.644.475.927,51	867.424.233.151,56
2.2.3	Belanja Modal	740.344.342.432,81	718.608.045.403,02	808.653.391.279,27	282.760.325.865,80	550.389.642.301,81	581.763.878.771,76
	Jumlah Belanja Daerah	3.617.054.713.494,68	3.648.517.932.310,84	4.089.403.665.362,18	3.956.527.241.813,40	3.880.307.094.127,66	4.118.262.673.660,37

Sumber : BKAD Kabupaten Malang
Ket *) : unaudited

Gambar 3.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun 2017 s.d Tahun 2022



Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan dengan memperhatikan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui prinsip *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam penganggaran. Hal ini sejalan dengan pencapaian manfaat yang lebih jelas sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2021.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Dari sisi pengeluaran pembiayaan digunakan untuk memenuhi penyertaan modal dan pemberian pinjaman dan bergulir. Dalam rangka menutup defisit anggaran, diarahkan dengan penggunaan SiLPA hasil perhitungan anggaran tahun yang lalu dan diharapkan menurun setiap tahunnya.

Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA yang merupakan kelebihan target yang telah ditetapkan, efisiensi anggaran, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang akan dilakukan dengan memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah dan kondisi keuangan daerah.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada pengeluaran pembiayaan dianggarkan untuk dana cadangan persiapan pilkada serta pembayaran pokok hutang kepada PDAM.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut ini:

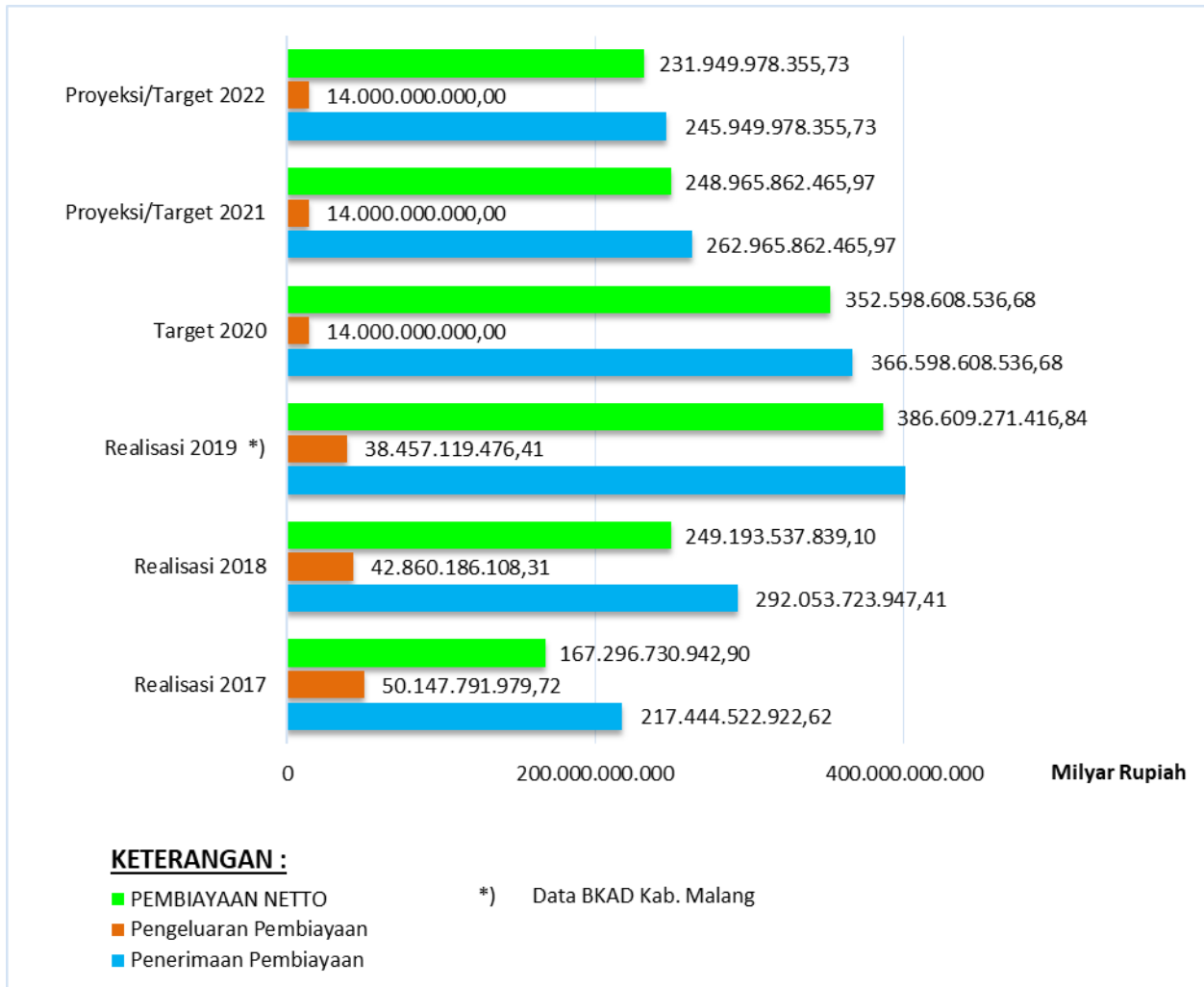
Tabel. 3.7
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Malang
 Tahun 2017 s.d 2022

NO	URAIAN	JUMLAH					
		Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019 *)	Target Tahun 2020	Proyeksi/Target pada Tahun 2021	Proyeksi/Target pada Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
III	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	217.444.522.922,62	292.053.723.947,41	425.066.390.893,25	366.598.608.536,68	262.965.862.465,97	245.949.978.355,73
3.1.1	Penggunaan SILPA (tahun lalu)	217.444.522.922,62	292.053.723.947,41	425.066.390.893,25	316.598.608.536,68	262.965.862.465,97	245.949.978.355,73
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.147.791.979,72	42.860.186.108,31	38.457.119.476,41	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00	14.000.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.147.791.979,72	21.360.186.108,31	18.457.119.476,41	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	34.000.000.000,00	20.500.000.000,00	19.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto		167.296.730.942,90	249.193.537.839,10	386.609.271.416,84	352.598.608.536,68	248.965.862.465,97	231.949.978.355,73

Sumber : BKAD Kabupaten Malang

Ket *) : unaudited

Gambar 3.9
Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun 2017 s.d 2022



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Malang maka penyusunan RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Malang Periode Tahun 2016-2021 tahun kelima.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Malang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan sebagaimana Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 yaitu Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP"

Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**.

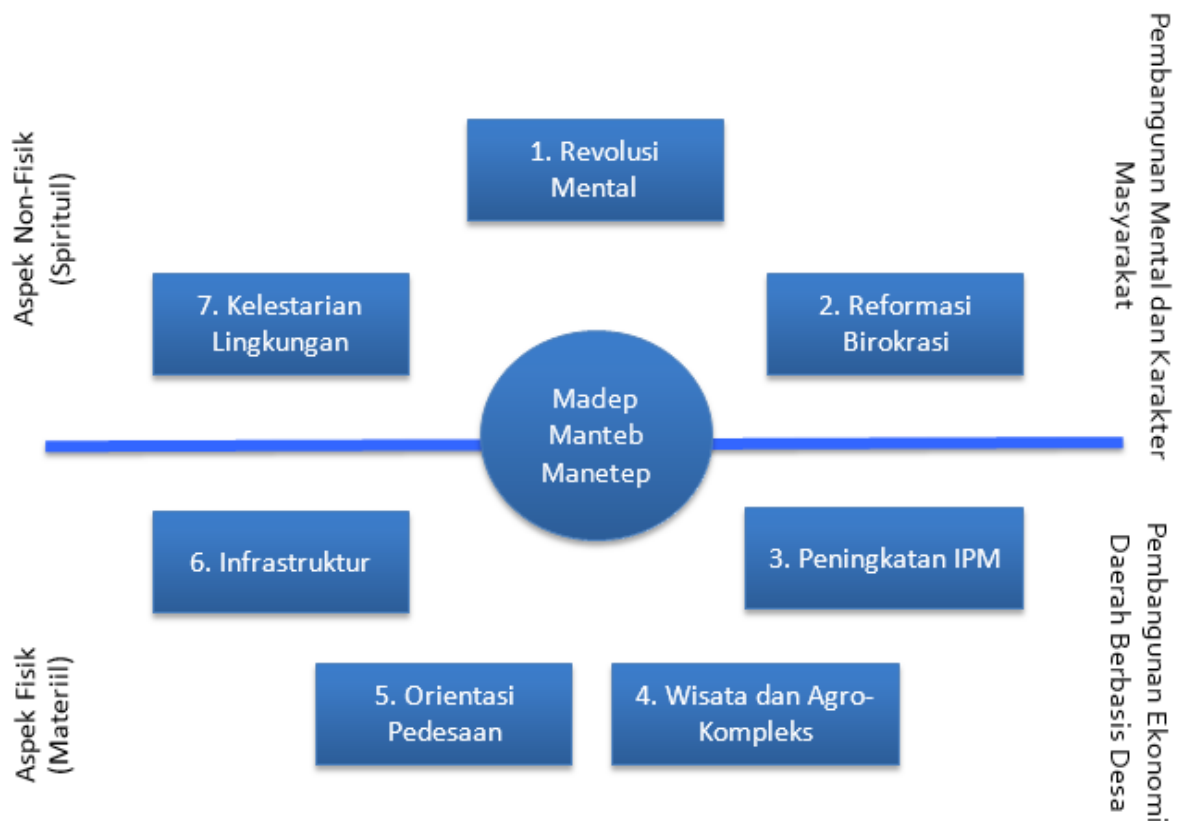
Dalam periode 2016-2021, Visi Pembangunan Kabupaten Malang adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP”**. Dengan visi tersebut maka diharapkan seluruh *stakeholder* di Kabupaten Malang bisa bekerja sama untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya untuk meningkatkan dan mewujudkan Kabupaten Malang menjadi daerah yang Madep, Manteb dan Manetep. Pada Visi Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 secara terperinci dapat dijabarkan sebagai **“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan”**. Secara filosofi visi Kabupaten Malang tersebut dapat dijelaskan melalui makna didalamnya yang dapat diartikan dalam rangka mencapai tujuan umum pembangunan Kabupaten Malang yang **MADEP, MANTEB dan MANETEP**, maka dalam 5 tahun yang akan datang diperlukan upaya untuk mewujudkannya.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah yaitu:

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia**;
4. Mengembangkan **ekonomi masyarakat** berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;

5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui **penguatan kelembagaan**, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan **desa**;
6. Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup.

Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, yaitu konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan materiil, dan juga arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan non-materiil. Kedua dimensi ini harus dapat dijalankan secara seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Hal ini dapat dituangkan dalam skema berikut ini:



Berdasarkan skema di atas terlihat bagaimana tujuh misi pembangunan yang ada merupakan kombinasi antara dua dimensi dasar pembangunan, yaitu baik yang bersifat fisik materiil maupun yang bersifat pembangunan mental atau karakter masyarakat. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai sebuah kesatuan, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Mengacu pada pernyataan visi misi yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik, maka tujuan yang secara spesifik ingin dicapai dalam 2 tahun kedepan adalah:

1. Misi 1 **Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum** dengan tujuan:
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah;
2. Misi 2 **Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi** dengan tujuan:
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Misi 3 **Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
4. Misi 4 **Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif** dengan tujuan:
Meningkatkan perekonomian masyarakat;
5. Misi 5 **Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa** dengan tujuan:
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel;
6. Misi 6 **Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan** dengan tujuan:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk untuk pemerataan hasil pembangunan;
7. Misi 7 **Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup** dengan tujuan:
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sasaran umum yang merupakan target atau hasil yang diharapkan dari pembangunan Kabupaten Malang dalam kurun waktu 2 tahun kedepan dimana atas keberhasilan target ini diharapkan berdampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Misi 1 mempunyai 1 tujuan 5 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama;
 - b. Ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah;
 - d. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender;
 - e. Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya;
2. Misi 2 mempunyai 1 tujuan 8 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik;
 - d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - e. Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi;
 - f. terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah;
 - g. Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan;
 - h. Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah.
3. Misi 3 mempunyai 1 tujuan 3 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - c. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
4. Misi 4 mempunyai 1 tujuan 8 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatkan kinerja sektor pertanian;
 - b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan;
 - c. Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif;
 - d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
 - e. Meningkatnya nilai investasi;
 - f. Meningkatnya jumlah PAD;
 - g. Meningkatnya kinerja sektor peternakan;
 - h. Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata.

5. Misi 5 mempunyai 1 tujuan 4 sasaran yaitu:
 - a. Menurunkan jumlah pengangguran di desa;
 - b. Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan;
 - c. Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat;
 - d. Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.
6. Misi 6 mempunyai 1 tujuan 5 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang;
 - b. Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan;
 - c. Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan;
 - d. Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi;
 - e. Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan.
7. Misi 7 mempunyai 1 tujuan 2 sasaran yaitu:
 - a. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan;
 - b. Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Selain itu sasaran juga merupakan dasar yang kuat untuk melihat pencapaian kinerja Kabupaten Malang. Sasaran-sasaran yang ditetapkan ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian seluruh sasaran yang ditetapkan diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam menindaklanjuti visi dan misi Kabupaten Malang berupaya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja untuk setiap misi RPJMD Kabupaten Malang disajikan pada berikut di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET INDIKATOR TUJUAN TAHUN 2021
<p>Misi I : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum</p>		
<p>1. Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah</p>	<p>Persentase konflik sosial yang ditangani</p>	<p>100%</p>
<p>Misi II : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi</p>		
<p>1. Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Indeks Reformasi Birokrasi</p>	<p>70,20</p>
<p>Misi III : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia</p>		
<p>1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia</p>	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</p>	<p>70,00 - 70,50</p>
<p>Misi IV : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif</p>		
<p>1. Meningkatkan perekonomian masyarakat</p>	<p>1. Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara</p>	<p>5,70% - 5,91% 10.052.688 Orang</p>

Misi V :

Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	1. Persentase angka kemiskinan 2. Persentase Desa Mandiri	9,44% - 9,04% 9,52%
--	--	----------------------------

Misi VI :

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk untuk pemerataan hasil pembangunan	Indeks Gini	0,304 - 0,300
---	-------------	---------------

Misi VII :

Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup

1. Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,31
--	---	-------

Sedangkan keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2

Penjabaran Tujuan dan Sasaran kedalam Strategi dan Kebijakan
Pembangunan RPJMD dalam Rencana Tahun 2021

Misi 1 : Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Menginisiasi forum-forum kerukunan antar umat beragama	Memfasilitasi kebijakan yang memperkuat kerukunan umat beragama dalam suasana saling menghormati
	Ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menegakkan peraturan yg berlaku	Mengimplementasikan sistem komplain dan membentuk tim reaksi cepat dalam penyelesaiannya komplain masyarakat
	Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Menginisiasi dan berperan aktif even-even budaya dan seni masyarakat	Mengimplementasikan kebijakan yg mendukung gerakan cinta budaya lokal
	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam menjamin terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keadilan dan kesetaraan gender
	Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Memfasilitasi penjangkaran Pemuda dan Olahragawan yang berpotensi untuk berprestasi	Mengimplementasikan kebijakan pengembangan prestasi Pemuda dan Olahraga

Misi 2 : Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Meningkatkan kapasitas OPD dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap warganya	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin masyarakat dalam mendapatkan layanan prima
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah sesuai standar yang diberlakukan	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, pelaporan dan pengawasan yang efektif
	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kapasitas pengelolaan sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sistem pelaporan yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan perencanaan dan meningkatkan kapasitas individu dan unit pengelola
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan pengelolaan sistem perencanaan yang terintegrasi dan Penguatan kapasitas SDM Perencana
	Meningkatnya profesionalisme aparatur birokrasi	Meningkatkan profesionalisme ASN berdasarkan sistem merit	Menjamin terselenggaranya kebijakan ASN berdasarkan kompetensi, fit and proper test, reward and punishment
	Terselesaikannya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Meningkatkan kapasitas pengadaan dan penanganan pertanahan	Mengimplementasikan kebijakan pengadaan tanah dan penanganan kasus pertanahan
	Mengembangkan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	Menginisiasi kajian-kajian untuk memecahkan problem tatakelola pemerintahan dalam jangka waktu pendek dan panjang	Mengimplementasikan kebijakan kemitraan dengan berbagai sektor dalam melaksanakan kajian-kajian tatakelola pemerintahan

	Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Memfasilitasi terselenggaranya layanan yang berkualitas dalam rancangan peraturan daerah	Mengimplementasikan kebijakan peningkatan kualitas layanan dengan melibatkan partisipasi individu dan organisasi yang kompeten
Misi 3 : Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan Daerah Kabupaten	Memformulasikan dan Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin hak-hak masyarakat terhadap kualitas dan akses pendidikan sesuai dengan standar Pelayanan Minimal pendidikan daerah kabupaten
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, sarana dan prasarana serta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai standar	Mengimplementasikan dan menformulasikan kebijakan yang menjamin hak - hak masyarakat terhadap derajat kesehatan masyarakat
	Menurunnya laju pertumbuhan penduduk	Meningkatkan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana	Mengimplementasi kan kebijakan pembinaan keluarga dan desa keluarga berencana melalui keikutsertaan dalam Keluarga Berencana
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perekonomian masyarakat	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Meningkatkan produksi hasil pertanian dan perkebunan	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perkebunan

			Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pertanian dan perkebunan
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan		Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesejahteraan pelaku usaha perikanan
Meningkatnya penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Mewujudkan potensi daerah tujuan wisata yg terintegrasi dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata		Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan pariwisata yang terintegrasi dengan pariwisata di wilayah lainnya di Malang Raya (Kota Malang dan Batu)
Meningkatnya perkembangan usaha industri kreatif	Mengembangkan inovasi dan kreasi hasil produk industri kreatif lokal		Mengimplementasikan kebijakan yang meluaskan pasar hasil produk industri kreatif
Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Mngembangkan koperasi yang sehat dan mandiri		Mengimplementasikan kebijakan koperasi yang memberi manfaat bagi masyarakat menengah ke bawah
	Mengembangkan UMKM yang sehat dan mandiri		Mengimplementasikan kebijakan yang memperluas pasar hasil produksi UMKM
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatkan nilai investasi luar dan dalam negeri		Memper mudah kebijakan perizinan dan investasi
Meningkatnya jumlah PAD	Meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD		Mengimplementasikan kebijakan yang dapat menggali potensi PAD
Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Pengembangan kawasan sentra produksi, SDM, pemanfaatan potensi SDA dan pemanfaatan teknologi sektor peternakan		Meningkatkan produksi hasil ternak melalui Pengembangan kawasan sentra produksi, SDM, pemanfaatan potensi SDA dan pemanfaatan teknologi sektor peternakan

Misi 5 : Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	Menurunkan jumlah pengangguran di desa	Menurunkan jumlah pengangguran terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan yang dapat meningkatkan kompetensi dan peluang kerja pengangguran	
	Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Menurunkan jumlah PMKS terutama di pedesaan	Mengimplementasikan kebijakan penanganan PMKS yang terintegrasi	
	Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.		Meningkatkan koordinasi, sinergitas lintas sektor , intervensi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan	Meningkatkan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat
			Memberdayakan masyarakat dalam memanfaatkan sumber pangan lokal untuk memenuhi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) melalui promosi dan edukasi.	Meningkatkan gizi dan keamanan pangan
	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa melalui pemberdayaan potensi desa, pemerintahan desa, kelembagaan masyarakat, dan ekonomi desa.	Mengimplementasi kan kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya desa maju.

Misi 6 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan	Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten Malang	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk daerah prioritas	Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan hasil ekonomi, pariwisata dan lingkungan hidup
	Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Menjamin Keberlangsungan Kualitas dan Kuantitas Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Mengimplimentasikan kebijakan mengurangi Kawasan Permukiman Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni dan peruntukan bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang
	Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Memfasilitasi Sarana Prasarana Perhubungan untuk keselamatan pengguna jalan	Mengimplementasikan kebijakan yang menjamin keselamatan pengguna jalan
	Meningkatnya Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	Meningkatkan kapasitas irigasi di daerah-daerah yang berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian	Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perluasan penyaluran irigasi air persawahan
	Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Meningkatkan kapasitas bandwidth layanan jaringan internet di daerah-daerah yang mengalami keterbatasan akses internet	Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kemitraan dalam meningkatkan akses dan kualitas internet di daerah-daerah terpencil

Misi 7 : Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran air	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas air
		Mencegah dan mengatasi terjadinya pencemaran udara	Melaksanakan pemantauan dan pengukuran kualitas udara
		Mencegah kerusakan lahan dan meningkatkan tutupan vegetasi	Melaksanakan konservasi dan pembinaan dalam pengelolaan tutupan vegetasi
	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana
		Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana	Melaksanakan Penanganan Bencana yang Responsif dan Koordinatif disertai dukungan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
		Pemulihan masyarakat dan pengoperasionalan sarana prasana	Melaksanakan Pemulihan masyarakat dan mengoperasionalkan sarana prasana

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal dan supremasi hukum	Mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib melalui terciptanya kerukunan kehidupan umat beragama dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan diberlakukan didaerah	Persentase konflik sosial yang ditangani	Meningkatnya kerukunan kehidupan umat beragama	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas dan revitalisasi budaya lokal dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang produktif bagi pembangunan daerah	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	%	100%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender	Indeks Pemberdayaan an Gender	Angka	88,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Mengembangkan potensi bakat dan keterampilan pemuda dan olahraga dalam meningkatkan prestasinya	Rata- rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	%	45%	Dinas Pemuda dan Olahraga

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi	Mewujudkan reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	80,5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan,
							RSUD Kanjuruhan
							RSUD Lawang
							Kecamatan
							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai Opini BPK	Opini	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
							Inspektorat Daerah
			Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	Nilai	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
				Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	ST	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	95%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya profesionalis me aparaturn birokrasi	Indeks profesionalisme ASN	Angka	94,49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
			Terselesaikan nya pengelolaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangu nan pemerintah	%	87%	Dinas Pertanahan
			Mengembang	Persentase hasil	%	34%	Badan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			kan hasil-hasil kajian yang bermanfaat untuk peningkatan kinerja pemerintahan	kajian yang ditindaklan juti			Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Meningkatkan kualitas layanan fasilitasi rancangan peraturan daerah	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	%	100%	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan PAUD, Pendidikan dasar dan Pendidikan Kesetaraan	Indeks Pendidikan	Angka	0,61	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	72,6	Dinas Kesehatan
			Menurunkan	Persentase	%	0,64%	Dinas

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			laju pertumbuhan penduduk	pertumbuhan penduduk			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif	Meningkatkan perekonomian masyarakat	Persentase tingkat pertumbuhan ekonomi	Meningkatkan kinerja sektor pertanian	Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	3,66%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
				Persentase PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,46%	
				Persentase PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,81%	
			Meningkatnya	PDRB sektor	%	1,98%	Dinas

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	perikanan			Perikanan
			Meningkatkan perkembangan usaha industri kreatif	Persentase Industri Kreatif	%	17,50%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase Koperasi Stabilisasi	%	50%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,50%	
			Meningkatnya	Jumlah nilai	Rupiah	31.534.905.394.492	Dinas

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			nilai investasi	investasi			Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jumlah PAD	Persentase PAD terhadap APBD	%	20,26%	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya kinerja sektor peternakan	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	%	4,54%	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pariwisata	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	%	3,75%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Melakukan	Mewujudkan	Persentase	Menurunkan	Persentase	%	3,10%	Dinas Tenaga

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
percepatan pembangunan desa melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan desa	penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengentaskan kemiskinan yang responsif, transparan dan akuntabel	angka kemiskinan	jumlah pengangguran di desa	Angka TPT			Kerja
			Menurunnya jumlah PMKS di pedesaan	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	87,83%	Dinas Sosial
			Meningkatnya pemenuhan kecukupan pangan masyarakat.	Persentase surplus ketersediaan pangan	%	80,39%	Dinas Ketahanan Pangan
		Persentase Desa Mandiri	Meningkatnya desa maju Kabupaten Malang.	Jumlah Desa Maju	Desa	133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Meningkatkan	Meningkatkan kualitas dan	Indeks Gini	Meningkatnya Kualitas	Persentase Prasarana Jalan	%	69,10%	Dinas Pekerjaan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan	kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka untuk pemerataan hasil pembangunan		Layanan Jalan Kabupaten Malang	Kondisi Mantap			Umum Bina Marga
			Meningkatkan Sarana Prasarana Permukiman dan Lingkungan	Presentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	%	76,05%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
			Meningkatnya Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase korban kecelakaan lalu lintas	%	13,62%	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya	Persentase luas	%	80,00%	Dinas

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sarana Prasarana Sumber Daya air untuk keperluan irigasi	area pertanian yang dilayani jaringan irigasi			Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
			Meningkatnya kapasitas bandwidth layanan jaringan internet ke seluruh pedesaan	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	%	82,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kebersamaan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,2	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	76,5	
				Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	78	
			Meningkatnya	Presentase desa	%	100%	Badan

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sistem Penanggulangan Bencana Yang Responsif melalui upaya pemberdayaan, pemulihan masyarakat dan sarana prasana dalam rangka pengurangan resiko bencana	tangguh bencana			Penanggula ngan Bencana Daerah

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021 Penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 disusun dengan mempedomani RPJMN 2020-2024 termasuk agenda pembangunan nasional, serta RKP Tahun 2021. Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

Penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Malang tahun 2021 memperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2021 yang ditetapkan pada Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
2. Agenda pembangunan nasional dan strategi dalam RPJMN 2020-2024;
3. Tema dan Prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 dalam Rancangan RKP Tahun 2021;
4. Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu;
5. Permasalahan Pembangunan dan isu strategis daerah;
6. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

4.2.1 Telaahan RPJMN Tahun 2020-2024

Perencanaan pembangunan Kabupaten Malang tidak lepas dari isu atau kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan. Sebelum menentukan prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021, maka perlu dilakukan telaahan terhadap RPJMN.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 7 (tujuh) agenda prioritas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**, yang dilakukan melalui 9 misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan tujuh agenda prioritas yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Implementasi ketujuh agenda prioritas pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan nasional dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

4.2.2. Telaahan Rancangan RKP Tahun 2021

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2021 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dengan Fokus pada Industri, Pariwisata, Investasi, dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional”** dan 7 prioritas nasional sebagai berikut:

1. **Ketahanan ekonomi** untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. **Mengembangkan wilayah** untuk mengurangi kesenjangan;
3. **SDM** berkualitas dan berdaya saing;
4. **Revolusi mental** dan **pembangunan kebudayaan**;
5. **Infrastruktur** untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. **Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim**;
7. Stabilitas **polhukhankam** dan **transformasi pelayanan publik**.

Sesuai dengan Tema RPJMN 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan

Gotong Royong”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-6,0 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 1,5-3,5 persen
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,0 persen; IPM menjadi 75,54; gini rasio pada kisaran 0,360 – 0,374; tingkat pengangguran terbuka 4,0-4,6 persen; dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 5,4 persen, Jawa-Bali 6,0 persen, Kalimantan 6,9 persen, Sulawesi 7,8 persen, Nusa Tenggara 6,1 persen, Maluku 7,6 persen Papua 6,9 persen.

4.2.3. Telaahan RPJMD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”, Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya Kesejahteraan Yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Pekerjaan dengan Memperhatikan Kelompok Rentan;
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan;
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

4.2.4 Telaahan Rancangan RKPD Provinsi Jawa-Timur Tahun 2021

Rancangan Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan Tema **“Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomidan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan Industri, Pariwisata, Investasi, Kesehatan, dan Infrastrukturnya di Jawa Timur”** dan 7 prioritas Jawa Timur, yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata;

2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur;
3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI);
4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal;
5. Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan;
6. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat di Jawa Timur.

4.2.5 Telaahan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025

1. RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025, Khususnya pelaksanaan periode keempat dengan Visi ***“Kabupaten Malang Aman, Maju, Adil dan Makmur”***. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan pendidikan yang menghasilkan generasi Kabupaten Malang berakhlak mulia, berbudaya dan memiliki kompetensi tinggi terhadap dunia kerja;
 - b. Mengembangkan kesehatan masyarakat mandiri;
 - c. Mengembangkan industri berbasis pertanian, pertambangan, kelautan dan pariwisata serta didukung infrastruktur yang memadai;
 - d. Mengembangkan sistem pengamanan, perbaikan dan kelestarian lingkungan;
 - e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. Mengembangkan kerjasama ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan antar daerah regional maupun internasional;
 - g. Memacu prestasi olah raga seni dan budaya.

4.2.6 Telaahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021

RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Visi Pembangunan Kabupaten Malang sebagai berikut: "Terwujudnya

Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB MANETEP" rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: "Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang Bermanfaat Nyata untuk Rakyat Berbasis Pedesaan". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 7 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan guna menunjang percepatan **revolusi mental** yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan supremasi hukum;
2. Memperluas inovasi dan **reformasi birokrasi** demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan percepatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan **Indeks Pembangunan Manusia**;
4. Mengembangkan **ekonomi masyarakat** berbasis pertanian, pariwisata, dan industri kreatif;
5. Melakukan percepatan pembangunan desa melalui **penguatan kelembagaan**, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan produk unggulan **desa**;
6. Meningkatkan ketersediaan **infrastruktur** jalan, transportasi, telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan;
7. Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga **kelestarian lingkungan** hidup.

4.3 Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021

Prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Tahapan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan di atas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Berkaitan dengan hal tersebut, pada RPJMD Kabupaten Malang telah ditetapkan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021. Adapun Tahun 2016 sebagai pijakan awal bagi perencanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada saat RPJMD Kabupaten Malang disusun pada Tahun 2016, pembangunan Tahun 2016 merupakan masa transisi. Tahapan arah kebijakan pembangunan kabupaten malang selama 5 (lima) tahun untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah disusun berdasarkan prioritas.

Tema atau fokus pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021 **“Mewujudkan Kabupaten Malang Yang Sejahtera, Berdaya Saing Melalui Pengembangan Pembangunan Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata Serta Kualitas Daya Dukung Lingkungan Hidup”**. dicapai dengan sasaran dan prioritas pembangunan. Sasaran pembangunan Tahun 2021 masih sama dengan sasaran pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Malang, sebab RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Malang dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1.
Agenda/Tema Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2016-2021



Prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021 diarahkan untuk melaksanakan amanat Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. guna mencapai sasaran pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi. Acuan utama penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah RPJMD 2016-2021. Selain itu, penentuan prioritas tersebut juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.

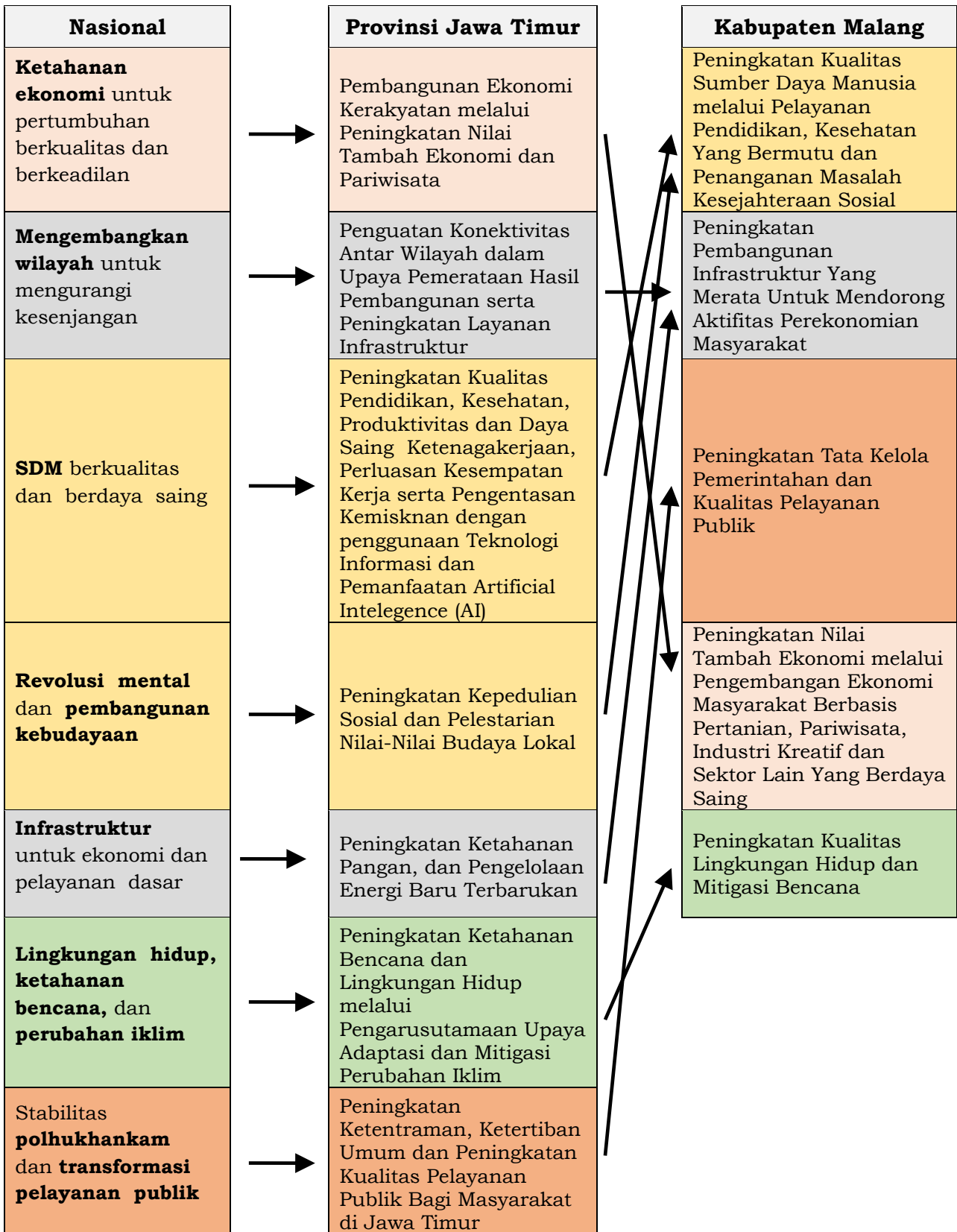
Pembangunan Kabupaten Malang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Malang yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Untuk itu ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2021, meliputi:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan Yang Bermutu dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;

2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Untuk Mendorong Aktifitas Perekonomian Masyarakat;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Kreatif dan Sektor Lain Yang Berdaya Saing;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana.

Memperhatikan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang sebagaimana tersebut diatas, menggambarkan keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang. Dimana pada masing-masing prioritas pembangunan terdapat 5 prioritas pembangunan yang saling mendukung. Dengan demikian terdapat sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang.

Gambar 4.2.
Keselarasan Rancangan Prioritas Pembangunan Nasional,
Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Malang Tahun 2021



Program pembangunan daerah merupakan alat untuk menjalankan prioritas pembangunan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pembangunan sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan daerah. Suatu program baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Berikut matrik prioritas program pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021.

Tabel 4.4
Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Malang Tahun 2021

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
I	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelayanan Pendidikan, Kesehatan yang Bermutu dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial		
101	PENDIDIKAN		
101.02.00	DINAS PENDIDIKAN		
101.02.01	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan	Menigkatnya kompetensi serta kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP	93%
101.02.02	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah menerapkan prinsip (MBS), memiliki Rencana Kerja Tahunan, Laporan Tahunan dan memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik	95%
101.02.03	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap pendidikan PAUD dan DIKMAS	85%
101.02.04	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SD di Kabupaten Malang	27 Indikator
101.02.05	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Cakupan Capaian Indikator SPM Dikdas untuk SMP di Kabupaten Malang	27 Indikator
101.02.06	Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	Persentase Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri	100%
102	KESEHATAN		
102.03.00	DINAS KESEHATAN		
102.03.01	Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan	Cakupan dokumen perencanaan, Evaluasi dan informasi yang dihasilkan	100%
102.03.02	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase sarana prasarana Puskesmas sesuai standar akreditasi	100%
		Persentase stok obat indikator 20 item	90%
		Persentase IRTP yang bersertifikat	84%
		Persentase Pengawasan Toko obat, Apotik, Supermaret, pasar, kosmetika dan PKRT	100%
		Prosentase tenaga kesehatan yang dilatih	100%
102.03.03	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas lulus akreditasi	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase Faskes yang melayani Maskin	100%
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan .	100%
		Prosentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan Tradisional	100%
102.03.04	Program Peningkatan kesehatan masyarakat	Persentase rata- rata capaian SPM kesehatan ibu dan anak . (Pelayanan kesehatan ibu hamil,Pelayanan kesehatan ibu bersalin, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan kesehatan balita, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar , Pelayanan kesehatan pada usia lanjut)	100%
		Persentase Balita kekurangan gizi	15%
		Prevalensi Balita Stunting	2.7 %
102.03.05	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	90%
		Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit menular sesuai kasus masing - masing . (Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TB, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV, Cakupan penderita DBD yang ditangani, Cakupan penemuan dan penanganan penderita diare, Cakupan penanganan penderita Pneumonia balita)	100%
		Cakupan rata-rata penemuan dan pelayanan penderita akibat penyakit tidak msnular sesuai kasus masing - masing . (Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, Cakupan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus, Pelayanan kesehatan pada usia produktif)	100%
102.03.06	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase gedung Puskesmas sesuai standar akreditasi dan yang melayani Maskin	100%
102.03.07	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan	Persentase cakupan Lokasi ODF	80%
		Persentase Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)	14%
		Persentase program yang difasilitasi media promosinya	100%
		Persentase Survey PIS-PK di wilayah Puskesmas	80%
102.03.08	Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT	Persentase pelayanan UKP dan Managemen yang dilaksanakan	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
102.36.00	RSUD KANJURUHAN		
102.36.01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan perorangan rujukan di RS	100%
102.36.02	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan/ pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan	100%
102.36.03	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS	Persentase sarana prasarana dan peralatan RS	100%
102.37.00	RSUD LAWANG		
102.37.01	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan di RSUD Lawang	100%
102.37.02	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata	Persentase Sarana Prasarana dan Peralatan Rumah Sakit.	100%
102.37.03	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase sarana prasarana dan peralatan rumah sakit	100%
106	SOSIAL		
106.14.00	DINAS SOSIAL		
106.14.01	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mendapatkan Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Jaminan Sosial Keluarga.	20%
106.14.02	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	20%
106.14.03	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang Mendapatkan Pendampingan, Pemberdayaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan.	20%
106.14.04	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial serta pemberdayaan sosial pengelolaan sumber dana bantuan sosial	20%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
201	TENAGA KERJA		
201.15.00	DINAS TENAGA KERJA		
201.15.01	Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Persentase terlaksananya program perluasan dan penempatan kerja (%)	100%
201.15.02	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase terlaksananya program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (%)	100%
201.15.03	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja	Persentase terlaksananya Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (%)	100%
201.15.04	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial	100%
202	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
202.12.00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
202.12.01	Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga	Persentase pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga	100%
202.12.02	Program Pengarusutamaan Gender	Persentase capaian pelaksanaan PUG	100%
202.12.03	Program Perlindungan Anak	Persentase Capaian Pelaksanaan Perlindungan Anak	100%
202.12.04	Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase capaian pelaksanaan perlindungan hak perempuan	100%
207	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
207.21.00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
207.21.01	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	100%
207.21.02	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	Persentase peningkatan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat	100%
207.21.03	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Persentase penyampaian laporan keuangan desa tepat waktu dan sesuai Peraturan Bupati.	100%
207.21.04	Program Pengembangan Potensi Desa	Persentase peningkatan pengembangan potensi desa.	100%
208	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA		
208.13.00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
208.13.01	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk	Persentase data keluarga dan KB di desa/kelurahan	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
208.13.02	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB MKJP	40.00 %
		Persentase PUS Risti yang terlayani KB (Program CONTRA WAR)	100%
208.13.03	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase BKR Paripurna	62.26 %
		Persentase PUS anggota kelompok BKB yang ber KB	88.15 %
		Persentase Kelompok UPPKS Mandiri	47.47 %
208.13.04	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana	Persentase PPKBD Mandiri	69.49 %
213	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
213.19.00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		
213.19.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase pemeliharaan rutin pada sarana dan prasarana olahraga di 2 stadion	94%
213.19.02	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga	Persentase pembinaan bibit-bibit atlit olahraga yang berprestasi terhadap jumlah atlit	28%
213.19.03	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi	Persentase Atlit yang terkirim	22%
213.19.04	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Persentase pemuda yang berperan dalam jumlah pemuda produktif dan kreatif	60%
306	TRANSMIGRASI		
306.15.00	DINAS TENAGA KERJA		
306.15.01	Program Ketransmigrasian	Persentase Penempatan Transmigran di Wilayah Transmigrasi	100%
II	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Yang Merata Untuk Mendorong Aktifitas Perekonomian Masyarakat		
103	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
103.04.00	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA		
103.04.01	Program Pembangunan dan Peningkatan	Persentase Jembatan yang dibangun/diganti	100%
		Persentase panjang Jalan yang ditingkatkan	100%
		Persentase panjang Jalan Strategis yang ditingkatkan	100%
103.04.02	Program Pemeliharaan	Persentase Panjang Jalan yang dipelihara	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase Panjang Jembatan yang dipelihara	2%
		Persentase Panjang Jalan yang dipelihara (Kerusakan 0%-6%)	6%
		Persentase Panjang Bangunan Pelengkap Jalan yang dipelihara	5%
103.04.03	Program Bina Teknik	Persentase Kegiatan Bimbingan Teknis	100%
		Persentase Studi/Review Kebinamargaan	100%
		Persentase updating data leger jalan, jembatan dan bangunan pelengkap	100%
		Persentase peningkatan kualitas jalan dan jembatan	100%
103.04.04	Program Fasilitas Jalan	Persentase Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang	100%
		Persentase panjang bangunan pelengkap yang dibangun	100%
		Persentase Jumlah bibit pohon tepi jalan yang ditanam	100%
103.04.05	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Panjang Jalan Yang Ditingkatkan	100%
103.05.00	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR		
103.05.01	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air	25%
103.05.02	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA	Persentase pembinaan, pengendalian dan pemanfaatan SDA	25%
103.05.03	Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi	Persentase layanan sarana dan prasarana penyediaan air irigasi	25%
103.05.04	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana	Persentase sarana prasarana jaringan irigasi dan bangunan pengendalian daya rusak air yang di bangun/ di rehabilitasi	25%
103.05.05	Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	Persentase layanan bidang Sumber Daya Air di Wilayah Kerja UPT Sumber Daya Air	25%
103.06.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
103.06.01	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yang terkelola	1%
103.06.02	Program Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persentase IPAL komunal yang secara teknis berfungsi optimal	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
103.06.03	Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan	Persentase bangunan berkondisi baik dan representatif (aset Pemkab Malang)	79.99 %
		Persentase luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	37%
104	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
104.06.00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA		
104.06.01	Program Pengelolaan Perumahan	Persentase ketersediaan rumah layak huni	97.7 %
		Persentase penurunan backlog rumah	0.91 %
104.06.02	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%
		Persentase penyediaan jalan lingkungan permukiman skala kawasan dan skala kota	80%
104.06.03	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	83%
		Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	81.77 %
		Persentase penyediaan sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	70%
		Persentase penyediaan Jalan Lingkungan Permukiman skala kawasan dan skala kota	80%
209	PERHUBUNGAN		
209.08.00	DINAS PERHUBUNGAN		
209.08.01	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi	Rasio sarana, prasarana dan fasilitas keselamatan yang tersedia	100%
209.08.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di wilayah Kabupaten Malang	100%
209.08.03	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.	Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan	100%
209.08.04	Program Terminal dan Perparkiran	Persentase jaringan prasarana angkutan jalan	100%
209.08.05	Program Pelayanan UPT Perhubungan	Persentase pemenuhan operasional perkantoran di UPT Perhubungan Kabupaten Malang	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
III	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik		
105	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
105.35.00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
105.35.01	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran Perda	20%
105.35.02	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban	Persentase gangguan trantibum yang diselesaikan	20%
105.35.03	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Petugas Linmas yang mendapat Pelatihan	3%
105.35.04	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	20%
105.35.05	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	Persentase Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu, Tidak dilekati Pita Cukai, Dilekati Pita Cukai Yang Bukan Haknya (Salah Personalisasi), Dilekati Pita Cukai Yang Salah Peruntukannya dan Dilekati Pita Cukai Bekas di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	20%
204	PERTANAHAN		
204.07.00	DINAS PERTANAHAN		
204.07.01	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang	Persentase pengadaan tanah pemerintah yang berhasil diadakan dan pengamanan aset Pemerintah Kabupaten Malang	80%
204.07.02	Program Penanganan Masalah Pertanahan	Persentase permasalahan tanah yang terfasilitasi	80%
206	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
206.11.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
206.11.01	Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan	Persentase Kelancaran Pelayanan Dokumen Kependudukan (%)	100%
206.11.02	Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Standar Mutu Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%
206.11.03	Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil Tepat Waktu (%)	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
206.11.04	Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100%
206.11.05	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan (%)	100%
210	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
210.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
210.09.01	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas informasi berbasis TIK	100%
210.09.02	Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi	Cakupan kerjasama informasi dengan mas media	100%
210.09.03	Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK	Persentase cakupan terbitnya pembangunan infrastruktur TIK di Kabupaten Malang	100%
210.09.04	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Cakupan Sosialisasi di Bidang Cukai	100%
212	PENANAMAN MODAL		
212.17.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
212.17.01	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan	Cakupan Penanganan Pengaduan Masyarakat Secara Intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%
212.17.02	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase Pencapaian Pelayanan Perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%
212.17.03	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan Sosial Budaya yang tepat waktu	30%
214	STATISTIK		
214.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
214.09.01	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah	Cakupan pemenuhan data statistik dan informasi pembangunan daerah yang akurat	100%
215	PERSANDIAN		
215.09.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
215.09.01	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika	Persentase cakupan tersedianya fasilitas Informasi berbasis TIK	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
217	PERPUSTAKAAN		
217.26.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
217.26.01	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan minat baca buku perpustakaan umum daerah Kabupaten Malang	100%
217.26.02	Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka	Persentase peningkatan budaya baca masyarakat Kabupaten Malang	70%
218	KEARSIPAN		
218.26.00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
218.26.01	Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan	Persentase terlaksananya SDM kearsipan	18%
218.26.02	Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip	Persentase pelaksanaan sistem penyimpanan dan penyelamatan arsip	18%
401	PERENCANAAN		
401.27.00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
401.27.01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	100%
		Persentase aspirasi/usulan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diakomodir pada dokumen perencanaan	95%
401.27.02	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%
401.27.03	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	Presentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
401.27.04	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%
		Persentase kesesuaian Renja terhadap RKPD Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi	100%
401.27.05	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program APBD terhadap perencanaan program dalam RKPD	100%
402	KEUANGAN		
402.28.00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		
402.28.01	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase pemenuhan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	100%
402.28.02	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan perbendaharaan pemerintah daerah	100%
402.28.03	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan aset pemerintah daerah	100%
402.28.04	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah	Persentase Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah (%)	100%
402.28.05	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan pelaporan dan akuntansi pemerintah daerah	100%
402.29.00	BADAN PENDAPATAN DAERAH		
402.29.01	Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD	Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB	100%
402.29.02	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan	Tingkat Layanan PBB	100%
402.29.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah	Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah	100%
402.29.04	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB	100%
403	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
403.30.00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA		
403.30.01	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Aparatur	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
403.30.02	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	Persentase pengadaan, pembinaan, penghargaan, dan pemberhentian Aparatur	100%
403.30.03	Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan	Persentase penanganan administrasi mutasi dan kepangkatan	100%
403.30.04	Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur	Persentase pengelolaan data dan informasi aparatur	100%
404	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
404.33.00	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
404.33.01	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.02	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan	Prosentase Informasi Penelitian dan Pengembangan yang tersusun	50%
404.33.03	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.04	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.05	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan	Persentase hasil kegiatan kelitbangan yang sesuai dengan strategi pembangunan Pemkab Malang	81%
404.33.06	Program Peningkatan Inovasi Daerah	Persentase Program/Kegiatan Inovasi Daerah	81%
405	PENGAWASAN		
405.01.00	INSPEKTORAT		
405.01.01	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase PD yang tidak mempunyai temuan terkait kerugian daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah	89%
405.01.02	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase pemenuhan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	17%
405.01.03	Program Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang-undangan yang sudah ditata	17%
405.01.04	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
405.01.05	Program Pencegahan Korupsi	Persentase Perangkat Daerah yang WBK/WBBM dan Capaian Nilai PMPRB minimal B	29%
406	FUNGSI LAINNYA		
406.32.00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
406.32.01	Program Pendidikan Politik	Persentase peserta pendidikan politik	100%
406.32.02	Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah	Persentase wilayah yang terpelihara kamtrantibmas dan dalam pencegahan tindak kriminal	100%
406.32.03	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peserta pendidikan Wawasan Kebangsaan	100%
406.32.04	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase forum-forum dan organisasi organisasi yang mendapatkan pendidikan wawasan kebangsaan	100%
406.34.00	SEKRETARIAT DPRD		
406.34.01	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD (%)	100%
		Persentase Layanan Fasilitasi Raperda Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	100%
406.34.02	Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media	Persentase Kerjasama dengan Mass Media (%)	100%
406.34.03	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan (%)	100%
406.34.04	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%
406.38.00	BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN		
406.38.01	Program Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan	100%
406.39.00	BAGIAN HUKUM		
406.39.01	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin	1. Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan daerah; 2. Persentase Penanganan Perkara dan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sesuai kebutuhan masyarakat.	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
406.40.00	BAGIAN ORGANISASI		
406.40.01	Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan	Persentase monitoring kelembagaan Perangkat Daerah	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai B	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun data Anjab/ABK	100%
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun inovasi pelayanan publik	19%
406.41.00	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN		
406.41.01	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	25%
406.41.02	Program Monitoring dan evaluasi Penggunaan DBHCHT di Kabupaten Malang	Pelaporan monitoring dan Evaluasi DBHCHT	100%
406.42.00	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA		
406.42.01	Program Fasilitasi dan Peningkatan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Antar Daerah/ Luar Negeri / Lembaga yang ditindaklanjuti menjadi naskah perjanjian kerja sama	80 Persen (%)
406.43.00	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA		
406.43.01	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan	Cakupan peningkatan kualitas administrasi pembangunan	100%
406.44.00	BAGIAN UMUM		
406.44.01	Program Pelayanan Umum	Prosentase pelayanan umum yang terfasilitasi dengan baik(%)	100%
406.45.00	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
406.45.01	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan Kegiatan KDH/WKDH	90%
406.46.00	BAGIAN TATA USAHA		
406.46.01	Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Ketatausahaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien (%)	100%
406.47.00	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL		
406.47.01	Program Administrasi Kemasyarakatan dan Pembinaan Mental	Presentase pelayanan administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
406.48.00	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM		
406.48.01	Program Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Administrasi Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Bahan Perumusan, Pemantauan, dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam yang direkomendasikan	100%
406.49.00	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT		
406.49.01	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kesejahteraan rakyat	90%
406.50.00	33 KECAMATAN SE KABUPATEN MALANG		
406.50.01	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)	100%
IV	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, pariwisata, industri kreatif dan sektor lain Yang Berdaya Saing		
203	PANGAN		
203.20.00	DINAS KETAHANAN PANGAN		
203.20.01	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Persentase penduduk rawan pangan	10.05 %
203.20.02	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	0.034 %
203.20.03	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	Persentase capaian Angka Kecukupan Gizi (AKG)	88.80%
203.20.04	Program Keamanan Pangan	Persentase Keamanan Pangan Segar	68%
203.20.05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Cakupan laporan program dan kegiatan peningkatan ketahanan pangan	100%
211	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH		
211.16.00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		
211.16.01	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	100%
211.16.02	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
211.16.03	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	100%
211.16.04	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	100%
211.16.05	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	100%
211.16.06	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100%
212	PENANAMAN MODAL		
212.17.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
212.17.01	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	4%
212.17.02	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	80%
216	KEBUDAYAAN		
216.18.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
216.18.01	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	Persentase Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya	100%
301	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
301.24.00	DINAS PERIKANAN		
301.24.01	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Budidaya (%)	12.5 %
		Persentase Peningkatan Pembinaan Teknis Perikanan Budidaya (%)	13%
301.24.02	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil	Persentase peningkatan sarana prasarana nelayan (%)	3%
		Persentase Peningkatan Jumlah Pembinaan Kelompok Nelayan dan Pokmaswas (%)	5%
301.24.03	Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Ikan Olahan (%)	5%
301.24.04	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan	Persentase peningkatan jumlah kelompok pembudidaya ikan (%)	5%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (%)	5%
302	PARIWISATA		
302.18.00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
302.18.01	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Perkembangan Pemasaran Pariwisata	100%
302.18.02	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Malang	100%
302.18.03	Program Pengembangan Kemitraan	Persentase Pengembangan Kerjasama Bidang Usaha dan Jasa Sarana Pariwisata	100%
302.18.04	Program Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100%
303	PERTANIAN		
303.22.00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		
303.22.01	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Yang Memenuhi Angka Kredit	80%
303.22.02	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Pangan Terhadap Sasaran	90%
303.22.03	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura	Persentase Capaian Produksi Hortikultura Terhadap Sasaran	100%
303.22.04	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Capaian Produksi Tanaman Perkebunan Terhadap Sasaran	90%
303.22.05	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	Persentase capaian produksi tembakau terhadap sasaran	20%
303.22.06	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan	Persentase penyediaan prasarana dan sarana pendukung usaha tani pertanian/perkebunan	100%
303.23.00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		
303.23.01	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Persentase rerata kegiatan pencegahan penyakit hewan/ternak (%)	100%
		Persentase pelaksanaan layanan kesehatan hewan (%)	100%
		Persentase pembina dan pengawasan bahan asal ternak yang ASUH (%)	100%
303.23.02	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase kelahiran sapi potong dari IB (%)	95%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
		Persentase pengadaan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%
		Persentase pengadaan pakan ternak dan sarana pendukungnya (%)	100%
		Persentase ketersediaan bibit sapi perah di UPT (%)	30%
303.23.03	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan	Persentase keikutsertaan masyarakat yang melakukan pengolahan hasil peternakan (%)	100%
		Persentase layanan perijinan dan permodalan usaha peternakan (%)	90%
		Persentase terlaksananya promosi produk peternakan (%)	100%
303.23.04	Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan	Persentase partisipasi bimbingan teknis manajemen kelompok ternak (%)	100%
		Persentase ketersediaan data potensi peternakan (%)	100%
		Persentase prasarana dan sarana peternakan yang dimanfaatkan oleh masyarakat (%)	100%
304	PERDAGANGAN		
304.25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
304.25.01	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	Persentase Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang	100%
304.25.02	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan	Persentase terlaksananya Keg.yg dilakukan untuk pembinaan dan pengembangan perdagangan (%)	100%
305	PERINDUSTRIAN		
305.25.00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
305.25.01	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial	100%
305.25.02	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Agro	100%
305.25.03	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro	Persentase pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan industri Non Agro	100%
305.25.04	Program Pembinaan Industri	Persentase pelaksanaan Program Pembinaan Industri	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
V	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana		
205	LINGKUNGAN HIDUP		
205.10.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
205.10.01	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu	86%
205.10.02	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase peningkatan tutupan vegetasi	3%
		Persentase ketersediaan data/informasi dan kajian strategis lingkungan yang akuntabel	93%
		Persentase peningkatan kegiatan/usaha yang memiliki dokumen lingkungan	10%
205.10.03	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup	Persentase hasil pengawasan kegiatan/usaha yang taat terhadap peraturan perundangan	80%
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase peningkatan jumlah kelompok masyarakat yang berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100%
205.10.04	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3	Persentase Layanan Persampahan	75%
		Persentase pengurangan sampah	24%
		Persentase kegiatan/usaha yang memiliki ijin TPS B3	74%
205.10.05	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)	Cakupan kecamatan yang mendapat pelayanan persampahan	100%
205.10.06	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase hasil pemantauan kualitas lingkungan sekitar industri yang memenuhi baku mutu	33%
406	FUNGSI LAINNYA		
406.31.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		
406.31.01	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Penanganan Bencana (%)	100%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN, URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA
1	2	3	4
406.31.02	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	85%
406.31.03	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase Pemulihan dan Peningkatan Kapasitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (%)	90%

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah di tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan urusan yang terdiri dari 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan, 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan dan fungsi lainnya. Rencana Program urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi penunjang tahun 2021 disajikan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1.
Rencana Program urusan wajib, Urusan pilihan, dan Fungsi penunjang
Tahun 2021

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	PENDIDIKAN
	DINAS PENDIDIKAN
1	Program Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Pendidikan
2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
3	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
4	Program Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
5	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
6	Program Pelaksanaan BOS Satuan Pendidikan Negeri
2	KESEHATAN
	DINAS KESEHATAN
1	Program Pengembangan Perencanaan, evaluasi dan pelaporan Kesehatan
2	Program Sumber Daya Kesehatan
3	Program Upaya Pelayanan Kesehatan
4	Program Peningkatan kesehatan masyarakat
5	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
7	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan
8	Program Peningkatan Pelayanan Puskesmas / UPT
	RSUD KANJURUHAN
1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2	Pembinaan Lingkungan Sosial
3	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS
	RSUD LAWANG
1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
2	Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/RS jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
3	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
1	Program Pembangunan dan Peningkatan
2	Program Pemeliharaan
3	Program Bina Teknik
4	Program Fasilitas Jalan
5	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
1	Program Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Air
2	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan SDA
3	Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana penyediaan air irigasi

4	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi serta Penanggulangan Darurat akibat Bencana
5	Program Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Program Pengelolaan Air Limbah Domestik
3	Program Penataan Ruang dan Penataan Bangunan
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTAKARYA
1	Program Pengelolaan Perumahan
2	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
3	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1	Program Penegakan Perundang-Undangan Daerah
2	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
3	Program Perlindungan Masyarakat
4	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
5	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
6	SOSIAL
	DINAS SOSIAL
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Program Rehabilitasi Sosial
3	Program Penanganan Fakir Miskin
4	Program Pemberdayaan Sosial
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1	TENAGA KERJA
	DINAS TENAGA KERJA
1	Program Perluasan dan Penempatan Kerja
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
3	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja
4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1	Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga
2	Program Pengarusutamaan Gender
3	Program Perlindungan Anak
4	Program Perlindungan Hak Perempuan
3	PANGAN
	DINAS KETAHANAN PANGAN
1	Program Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2	Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan
3	Program Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

4	Program Keamanan Pangan
5	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
4	PERTANAHAN
	DINAS PERTANAHAN
1	Program Inventarisasi dan Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Malang
2	Program Penanganan Masalah Pertanahan
5	LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH
2	Program Penataan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
3	Program Pengawasan, Penertiban dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lingkungan Hidup
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Penanganan Limbah B3
5	Program Pelayanan Persampahan pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan (UPTPP)
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1	Program Penataan Administrasi Pelayanan Kependudukan
2	Program Standarisasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Program Penataan Administrasi Pelayanan Pencatatan Sipil
4	Program Pengelolaan Data Informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.
2	Program Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
3	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
4	Program Pengembangan Potensi Desa
8	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1	Program Data/Informasi Pengendalian Penduduk
2	Program Pelayanan Keluarga Berencana
3	Program Ketahanan Keluarga, Generasi Berencana dan Kesejahteraan Keluarga
4	Program Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana
9	PERHUBUNGAN
	DINAS PERHUBUNGAN
1	Program Peningkatan Keselamatan Transportasi
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
4	Program Terminal dan Perpindahan
5	Program Pelayanan UPT Perhubungan

10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM di Bidang Aplikasi Informatika
2	Program Pemberdayaan, pengembangan, pembinaan dan penyebarluasan informasi
3	Program Pengkajian, Penelitian, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur TIK
4	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
11	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
1	Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro
2	Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
3	Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
4	Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro
5	Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro
6	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
12	PENANAMAN MODAL
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan
3	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan
4	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
5	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi
13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga
3	Program Pemberdayaan Olahraga Rekreasi
4	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda
14	STATISTIK
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Pengembangan Data, Informasi Statistik Daerah
15	PERSANDIAN
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1	Program Layanan Persandian, Pengembangan, Peningkatan SDM dibidang Aplikasi informatika
16	KEBUDAYAAN
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1	Program Pengelolaan Kekayaan Dan Keragaman Budaya
17	PERPUSTAKAAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
2	Program Pengembangan dan Pelestarian Bahan Pustaka

18	KEARSIPAN
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1	Program Pengembangan dan pengawasan kearsipan
2	Program Penyelamatan, pemeliharaan dan pengolahan serta pelayanan arsip
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN
	DINAS PERIKANAN
1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2	Program Pemberdayaan Nelayan Kecil
3	Program Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
4	Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan
2	PARIWISATA
	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3	Program Pengembangan Kemitraan
4	Program Pelayanan BLUD
3	PERTANIAN
	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura
4	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Perkebunan
5	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku
6	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian/Perkebunan
	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
2	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3	Program Pengembangan Agribisnis Peternakan
4	Program Prasarana Sarana dan Penyuluh Peternakan
4	PERDAGANGAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan
5	PERINDUSTRIAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
1	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Agro
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Non Agro
4	Program Pembinaan Industri

6	TRANSMIGRASI
	DINAS TENAGA KERJA
1	Program Ketransmigrasian
IV	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1	PERENCANAAN
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
3	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2	KEUANGAN
	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
1	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
2	Program Pengelolaan Perbendaharaan Pemerintah Daerah
3	Program Pengelolaan Asset Pemerintah Daerah
4	Program Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah
5	Program Peningkatan Pelaporan dan Akuntansi Pemerintah Daerah
	BADAN PENDAPATAN DAERAH
1	Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD
2	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan
3	Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah
4	Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
1	Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
2	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur
3	Program Administrasi mutasi jabatan dan kepangkatan
4	Program Peningkatan dan pengembangan data serta informasi aparatur
4	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan
2	Program Perumusan, Pengolahan dan Penyusunan Informasi Penelitian dan Pengembangan
3	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kemasyarakatan
4	Program Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi, Investasi dan Keuangan
5	Program Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan
6	Program Peningkatan Inovasi Daerah
5	PENGAWASAN
	INSPEKTORAT
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

3	Program Peraturan Perundang-undangan
4	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja
5	Program Pencegahan Korupsi
6	FUNGSI LAINNYA
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
2	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
3	Program Rehabilitasi - Rekonstruksi Pasca Bencana
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	Program Pendidikan Politik
2	Program Peningkatan Kewaspadaan Daerah
3	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4	Program Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
	SEKRETARIAT DPRD
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2	Program Kerjasama Informasi Kinerja DPRD Dengan Mass Media
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
1	Program Administrasi Tata Pemerintahan
	BAGIAN HUKUM
1	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penanganan Perkara Dan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
	BAGIAN ORGANISASI
1	Program Penguatan Organisasi Dan Ketatalaksanaan
	BAGIAN PEREKONOMIAN
1	Program Administrasi Bidang Perekonomian
2	Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Dbhcht Di Kabupaten Malang
	BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
1	Program Fasilitasi Dan Peningkatan Kerja Sama Daerah
	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
1	Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pembangunan
	BAGIAN UMUM
1	Program Pelayanan Umum
	BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
1	Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Dan Keprotokolan
	BAGIAN TATA USAHA
1	Program Pelayanan Administrasi Ketatausahaan
	BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL
1	Program Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental
	BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM
1	Program Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Dan Administrasi Sumber Daya Alam

	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Program Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	KECAMATAN PUJON
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN NGANTANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KASEMBON
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN LAWANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN SINGOSARI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KARANGPLOSO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN DAU
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAKIS
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN JABUNG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TUMPANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PONCOKUSUMO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN BULULAWANG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN GONDANGLEGI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAGELARAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TAJINAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN BANTUR
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN GEDANGAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN WAJAK
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TUREN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN DAMPIT
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN AMPELGADING
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN TIRTOYUDO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

	KECAMATAN KEPANJEN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAKISAJI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN NGAJUM
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN WAGIR
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN SUMBERPUCUNG
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KROMENGAN
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN WONOSARI
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN PAGAK
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN KALIPARE
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan
	KECAMATAN DONOMULYO
1	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional PD sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan total belanja sebesar Rp.4.018.507.362.592,36 terdiri dari anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.2.368.737.766.498,90 dan belanja langsung sebesar Rp.1.649.769.596.093,46.

Tabel 5.2
Rencana Pagu Indikatif Belanja Langsung Perangkat Daerah
Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU RANCANGAN AKHIR INDIKATIF PD
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	333.515.907.708,46
2	Dinas Kesehatan	247.728.207.090,00
3	RSUD Kanjuruhan	125.130.148.064,00
4	RSUD Lawang	62.125.425.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga	326.467.877.550,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air	22.680.633.736,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Ciptakarya	74.517.226.565,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.251.788.980,00
9	Dinas Sosial	9.280.058.300,00
10	Dinas Tenaga Kerja	5.180.933.746,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.086.013.986,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.195.099.590,00
13	Dinas Pertanahan	25.280.073.535,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	19.591.702.800,00
15	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	12.246.389.006,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.490.299.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	13.684.263.000,00
18	Dinas Perhubungan	9.839.827.000,00
19	Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.155.872.838,00
20	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	6.231.220.788,00
21	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.250.590.500,00
22	Dinas Pemuda Dan Olahraga	17.913.456.892,00
23	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	13.961.558.578,00
24	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.689.625.248,00
25	Dinas Perikanan	4.401.422.330,00
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	15.502.993.400,00
27	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13.038.515.983,00
28	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	17.353.465.600,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.500.000.000,00
30	Badan Keuangan Dan Aset Daerah	90.539.536.148,00
31	Badan Pendapatan Daerah	20.458.630.712,00
32	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	8.073.724.250,00
33	Badan Penelitian Dan Pengembangan	2.354.142.500,00
34	Inspektorat	8.510.027.850,00
35	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.755.732.640,00
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.028.848.405,00
37	Sekretariat DPRD	41.765.056.849,00
38	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan	1.646.388.250,00
39	Bagian Hukum	1.834.588.240,00
40	Bagian Organisasi	1.193.264.800,00
41	Bagian Administrasi Perekonomian	1.096.162.856,00
42	Bagian Administrasi Kerjasama	1.017.386.675,00

43	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	1.637.819.600,00
44	Bagian Umum	12.363.068.115,00
45	Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol	2.793.308.775,00
46	Bagian Tata Usaha	3.118.037.200,00
47	Bagian Administrasi Kemasyarakatan Dan Pembinaan Mental	1.323.097.800,00
48	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	1.052.104.350,00
49	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	1.071.182.065,00
50	Kecamatan Pujon	644.903.000,00
51	Kecamatan Ngantang	652.722.400,00
52	Kecamatan Kasembon	628.722.400,00
53	Kecamatan Lawang	1.853.806.000,00
54	Kecamatan Singosari	2.469.806.000,00
55	Kecamatan Karangploso	597.083.600,00
56	Kecamatan Dau	604.541.800,00
57	Kecamatan Pakis	620.722.400,00
58	Kecamatan Jabung	645.083.600,00
59	Kecamatan Tumpang	660.903.000,00
60	Kecamatan Poncokusumo	668.722.400,00
61	Kecamatan Bululawang	628.903.000,00
62	Kecamatan Gondanglegi	596.903.000,00
63	Kecamatan Pagelaran	588.541.800,00
64	Kecamatan Tajinan	612.903.000,00
65	Kecamatan Bantur	636.541.800,00
66	Kecamatan Gedangan	636.541.800,00
67	Kecamatan Wajak	646.925.000,00
68	Kecamatan Turen	1.822.347.800,00
69	Kecamatan Dampit	1.229.264.200,00
70	Kecamatan Ampelgading	644.361.200,00
71	Kecamatan Tirtoyudo	636.722.400,00
72	Kecamatan Sumbermanjing Wetan	629.264.200,00
73	Kecamatan Kepanjen	3.080.334.400,00
74	Kecamatan Pakisaji	589.083.600,00
75	Kecamatan Ngajum	612.541.800,00
76	Kecamatan Wagir	596.903.000,00
77	Kecamatan Sumberpucung	588.722.400,00
78	Kecamatan Kromengan	580.722.400,00
79	Kecamatan Wonosari	604.541.800,00
80	Kecamatan Pagak	604.541.800,00
81	Kecamatan Kalipare	612.722.400,00
82	Kecamatan Donomulyo	620.541.800,00
JUMLAH		1.649.769.596.093,46

Sedangkan rencana program dan kegiatan sebagaimana penjabaran dari prioritas daerah dijabarkan pada tabel 5.3 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagai berikut:

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Hal ini ditunjukkan melalui akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH TAHUN 2021

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2021, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Malang Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Tahun 2021
1	Persentase konflik sosial yang ditangani	%	100%
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,20
3	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	70,00 - 70,50
4	Persentase Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,70% - 5,91%
5	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	Orang	10.052.688 Orang

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Target Tahun 2021
6	Persentase Angka Kemiskinan	%	9,44% - 9,04%
7	Persentase Desa Mandiri	%	9,52%
8	Indeks Gini	Angka	0,304 - 0,300
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	69,31

6.2. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Malang yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Target indikator kinerja daerah pada tahun 2021 berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6.2. berikut:

Tabel 6.2

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	PD Penanggung Jawab
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1	Persentase konflik sosial yang terfasilitasi	%	100%	Badan Kesatuan bangsa dan Politik
2	Persentase Event Wisata Budaya Lokal Yang Difasilitasi	%	100%	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
3	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	88,44	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	PD Penanggung Jawab
4	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	72,6	Dinas Kesehatan
5	Persentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	%	87,83%	Dinas Sosial
6	Jumlah Desa Maju	Desa	133	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
7	Persentase desa tangguh bencana	%	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Persentase Angka TPT	%	3,10%	Dinas Tenaga Kerja
B	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Rata-rata Persentase prestasi pemuda dan olahraga	%	45%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	80,5	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan, RSUD Kanjuruhan, RSUD Lawang, 33 Kecamatan, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
3	Persentase terselesaikannya pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan pemerintah	%	87%	Dinas Pertanahan
4	Persentase hasil kajian yang ditindaklanjuti	%	34%	Badan Penelitian Dan Pengembangan
5	Persentase fasilitasi rancangan peraturan daerah	%	100%	Sekretariat DPRD
6	Indeks Pendidikan	Angka	0,61	Dinas Pendidikan
7	Persentase pertumbuhan penduduk	%	0,64%	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	51,2	Dinas Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	PD Penanggung Jawab
9	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	76,5	Dinas Lingkungan Hidup
10	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	78	Dinas Lingkungan Hidup
11	Nilai Sakip	Nilai	A	Bagian Organisasi
12	Nilai Evaluasi LPPD	Nilai	ST	Bagian Administrasi Tata Pemerintahan
13	Persentase kesesuaian RKPD terhadap RPJMD	%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14	Indeks profesionalisme ASN	Angka	94,49	Badan Kepegawaian Daerah
15	Persentase Korban Kecelakaan Lalu Lintas	%	13,62%	Dinas Perhubungan
16	Persentase penanganan kasus pelanggaran perda	%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Persentase PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	%	3,66%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
2	Persentase PDRB Sub Sektor Hortikultura	%	4,46%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
3	Persentase PDRB Sub Sektor Perkebunan	%	1,81%	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan
4	PDRB sektor perikanan	%	1,98%	Dinas Perikanan
5	Persentase PDRB Sektor Peternakan (Atas Dasar Harga Konstan)	%	4,54%	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
6	Persentase surplus ketersediaan pangan	%	80,39%	Dinas Ketahanan Pangan
7	Persentase Koperasi Stabilisasi	%	50%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan	Satuan	Target Tahun 2021	PD Penanggung Jawab
8	Persentase pertumbuhan UMKM	%	0,50%	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro
9	Jumlah nilai investasi	Rupiah	31.534.905.394.492	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10	Persentase kontribusi pendapatan sektor pariwisata thd PAD	%	3,75%	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
11	Persentase Industri Kreatif	%	17,50%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
12	Persentase PAD terhadap APBD	%	20,26%	Badan Pendapatan Daerah
13	Nilai Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Inspektorat
14	Persentase Prasarana Jalan Kondisi Mantap	%	69,10%	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
15	Persentase akses masyarakat terhadap prasarana sarana lingkungan dasar perumahan dan permukiman, beserta Penataan ruang dan Bangunan	%	76,05%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
16	Persentase luas area pertanian yang dilayani jaringan irigasi	%	80,00%	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
17	Persentase wilayah yang terlayani jaringan internet	%	82,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan Tahun 2021, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Tahun 2021. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2021, mengacu pada analisis isu strategis dan hasil evaluasi capaian penyelenggaraan Pemerintahan hingga tahun 2019.

Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan *stakeholders* melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021. Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Malang, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Malang harus melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Malang, berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan program antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, senantiasa dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2021.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat Pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah, dan tentu saja sejalan dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi Jawa Timur.

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI